

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas, efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi; dan
18. Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 065/SE/BPKAD/2022 tanggal 17 November 2022 perihal Percepatan Penatausahaan Bendahara, Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ekonomi makro/ekonomi regional
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- 2.4 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1 Entitas pelaporan
- 3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Transisi laporan keuangan dari basis kas modifikasian ke basis akrual
- 3.5 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

IV. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 4.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 4.1.1 Pendapatan-LRA
 - 4.1.2 Belanja
 - 4.1.3 Pembiayaan
- 4.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
- 4.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 4.3.1 Aset
 - 4.3.2 Kewajiban
 - 4.3.3 Ekuitas
- 4.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 4.4.1 Pendapatan-LO
 - 4.4.2 Beban
 - 4.4.3 Kegiatan Non Operasional
 - 4.4.4 Pos Luar Biasa
- 4.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 4.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 4.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 4.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

V. Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

5.1 Informasi Tambahan

VI. Penutup

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Pelaksanaan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Anggaran 2022 berada dalam koridor pencapaian Visi Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2023 adalah **“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”** yang dijabarkan dalam 5 (lima) Misi yaitu:

1. Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik dipertanian maupun dipedesaan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif;
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah; dan
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2023, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 adalah **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, Kualitas Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia”**. Dalam rangka memenuhi tema yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkanlah 5 (lima) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan *Stunting*;
2. Pembangunan ekonomi dan kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, investasi, industri, perdagangan, UMKM, dan pariwisata;
3. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi;
4. Pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana; dan
5. Optimalisasi reformasi birokrasi dan stabilitas keamanan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, tema pembangunan yang sudah dilakukan adaptasi dan respon terhadap wabah COVID-19 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional dan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

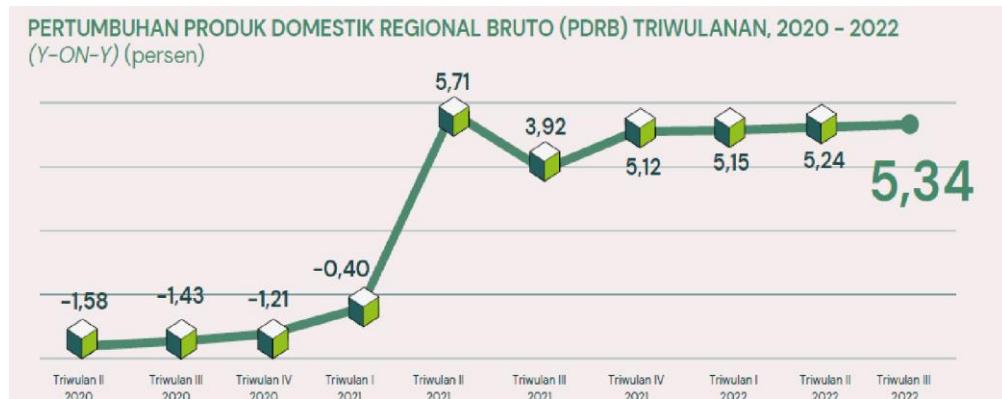
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Kemampuan Ekonomi untuk Memperluas Lapangan Usaha

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2022 mencapai Rp149,98 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp88,28 triliun. Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan III-2022 tumbuh sebesar 2,55 persen (QtQ). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,34 persen. Sementara, dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Ekspor Luar Negeri yang meningkat sebesar 16,17 persen. Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,34

persen (YoY). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,23 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yaitu sebesar 19,38 persen. Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I s.d. III 2022 (YoY) tumbuh 5,24 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 15,22 persen. Sementara, dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 15,61 persen.



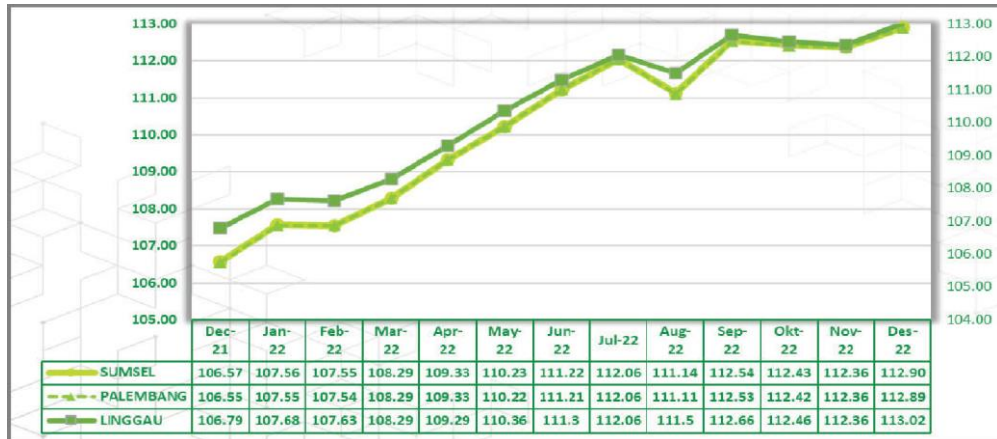
Sumber: BPS Prov. Sumsel

Grafik 1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2022

2. Tingkat Perkembangan Inflasi Daerah

Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Desember 2022 terjadi inflasi gabungan 2 (dua) Kota YoY sebesar 5,94 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,90. Inflasi yoy di kota Palembang sebesar 5,95 persen dengan IHK sebesar 112,89 dan Kota Lubuk Linggau sebesar 5,83 persen dengan IHK sebesar 113,02. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,05 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,22 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,52 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,14 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,49 persen; kelompok transportasi sebesar 17,20 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 6,73 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,85 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,16 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,33 persen. Sementara, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,16 persen. Tingkat inflasi *month to month* (MtM) Desember 2022 sebesar 0,48 persen dan tingkat inflasi *year to date* (YtD) Desember 2022 sama dengan inflasi YoY sebesar 5,94 persen. Tingkat inflasi komponen inti Desember 2022 secara YoY sama dengan inflasi ytd sebesar 3,90 persen sementara inflasi MtM sebesar 0,08 persen. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga pada Desember 2022 mengalami inflasi YoY sebesar 2,52 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 104,68 pada Desember 2021 menjadi 107,32 pada Desember 2022. Kelompok ini pada Desember 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi YoY sebesar 0,46 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi YoY yaitu: sewa rumah sebesar 0,148 persen;

bahan bakar rumah tangga sebesar 0,131 persen; seng sebesar 0,032 persen; dan semen sebesar 0,028 persen. Kelompok ini pada Desember 2022 memberikan andil/sumbangan deflasi umum MtM sebesar 0,01 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi MtM, yaitu bahan bakar rumah tangga sebesar 0,012 persen.



Sumber: BPS Prov. Sumsel

Grafik 2 Perkembangan IHK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

3. Relatif Terjaganya Stabilitas Ekonomi Daerah

Ekonomi Sumatera Selatan triwulan I s.d. III-2022 dibandingkan triwulan I s.d. III-2021 (CtC) mengalami pertumbuhan sebesar 5,24 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami kontraksi sebesar 1,45 persen. Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 15,22 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,51 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil sebesar 11,39 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 7,31 persen. Sementara, Industri Pengolahan; Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan masing-masing tumbuh sebesar 5,30; 5,18; dan 4,37 persen, sedangkan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 2,24 persen. Pertumbuhan PDRB beberapa komponen pengeluaran selama triwulan I s.d. III-2022 (CtC) tumbuh sebesar 5,24 persen. Pertumbuhan terjadi pada beberapa komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 15,61 persen; diikuti Komponen PK-RT sebesar 6,45 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 4,02 persen. Sementara itu, Komponen PK-P dan PMTB terkontraksi masing-masing sebesar 12,76 persen dan 3,74 persen.



Sumber: BPS Prov. Sumsel

Grafik 3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Tahun 2022

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Sumatera Selatan tahun 2022 adalah sebesar 70,90 atau tumbuh 0,83 persen (meningkat 0,66 poin) dibandingkan capaian tahun 2021. Peningkatan IPM tahun 2022 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat serta hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,32 tahun, lebih lama 0,34 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya dari 12,54 menjadi 12,55 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,07 tahun dari 8,30 tahun menjadi 8,37 pada tahun 2022. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil perkapita (yang disesuaikan) meningkat Rp477.000 (4,19 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2019, status pembangunan manusia Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama tahun 2010-2022, IPM Provinsi Sumatera Selatan rata-rata meningkat 0,83 dari 64,44 pada tahun 2010 menjadi 70,90 pada tahun 2022, setelah mengalami perlambatan pada tahun 2019 akibat *pandemic* COVID-19, pada tahun 2021 dan 2022, peningkatan IPM Sumatera Selatan terus membaik seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang berjalan baik dan pemulihan ekonomi Sumatera Selatan. Capaian IPM tahun 2022 yang meningkat didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya terutama umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak. Seluruh indikator yang mewakili dimensi IPM mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali Harapan Lama Sekolah (HLS) pada dimensi pengetahuan yang pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

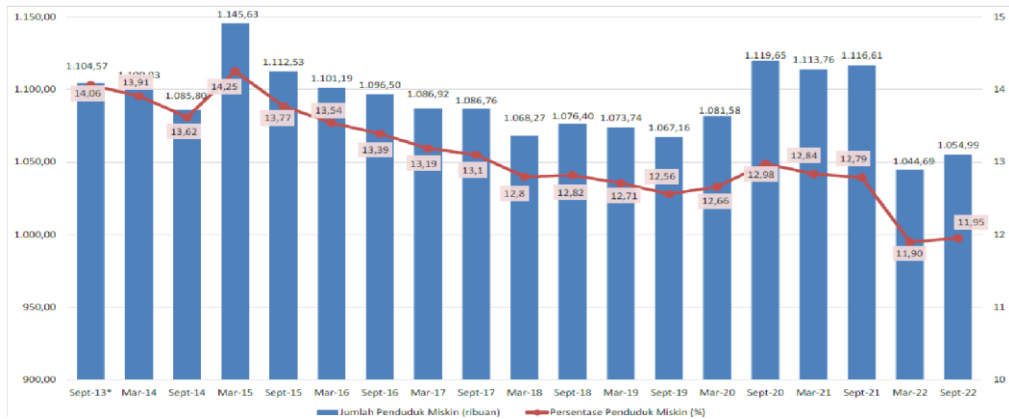


Sumber: BPS Prov. Sumsel

Grafik 4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Selama Tahun 2010-2022

5. Kemiskinan

Selama satu tahun terakhir yaitu bulan September 2021-September 2022, angka kemiskinan Sumatera Selatan turun sebesar 0,84 poin dari 12,79 persen menjadi 11,95 persen, sedangkan jumlah penduduk miskinnya turun sebanyak 61,62 ribu orang dari 1.116,61 ribu orang menjadi 1.054,99 ribu orang. Dibandingkan bulan Maret 2022, angka kemiskinan September 2022 Sumatera Selatan naik sebesar 0,05 poin dari 11,90 persen menjadi 11,95 persen, sedangkan jumlah penduduk miskinnya juga naik sebanyak 10,30 ribu orang dari 1.044,69 ribu orang menjadi 1.054,99 ribu orang. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan September 2021 sebesar 11,99 persen turun menjadi 11,23 persen pada bulan Maret 2022 dan naik menjadi 11,37 persen pada bulan September 2022. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 13,28 persen pada bulan September 2021 menjadi 12,31 persen pada bulan Maret 2022 dan turun menjadi 12,30 persen pada bulan September 2022. Peranan kelompok makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan kelompok bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) bulan September 2022 tercatat sebesar 73,98 turun jika dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 sebesar 74,34 persen, dan turun jika dibandingkan kondisi September 2021 yang sebesar 74,16 persen. Komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir, mie instan, cabe merah, bawang merah, kopi bubuk, dan kopi instan (*sachet*), sedangkan komoditas bukan makanan adalah perumahan, bensin listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, kesehatan, dan perawatan kulit, muka, kuku, dan rambut. Pada periode bulan September 2021-September 2022, maupun periode bulan Maret 2022-September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sama-sama mengalami penurunan.



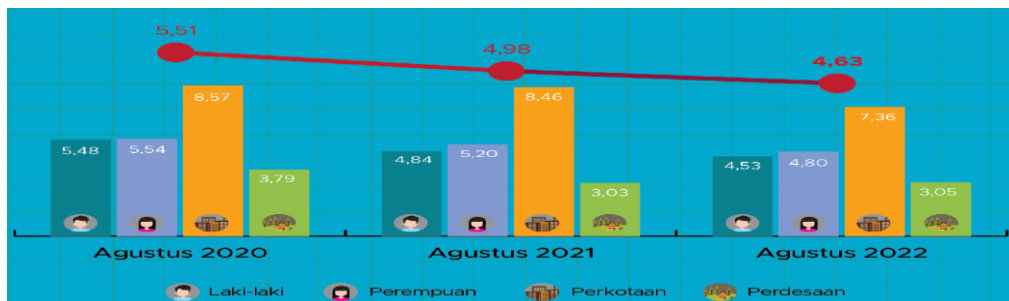
Sumber: BPS Prov. Sumsel

Grafik 5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2013-2022

6. Pengangguran

Jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2022 sebanyak 4,50 juta orang, naik 99,05 ribu orang dibandingkan bulan Agustus 2021. Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan sebesar 0,54 poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 4,29 juta orang, meningkat sebanyak 109,99 ribu orang dari bulan Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (112,74 ribu orang). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (27,73 ribu orang). Sebanyak 2,71 juta orang (63,28 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 0,88 poin dibandingkan bulan Agustus 2021. Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan, masing-masing sebesar 3,85 poin dan 0,85 poin dibandingkan bulan Agustus 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bulan Agustus 2022 sebesar 4,63 persen, turun sebesar 0,35 poin dibandingkan bulan Agustus 2021. Terdapat 74,18 ribu orang (1,14 persen) penduduk usia kerja terdampak COVID-19 terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (4,19 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (7,01 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,19 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (61,78 ribu orang).

Sumber: BPS Prov. Sumsel

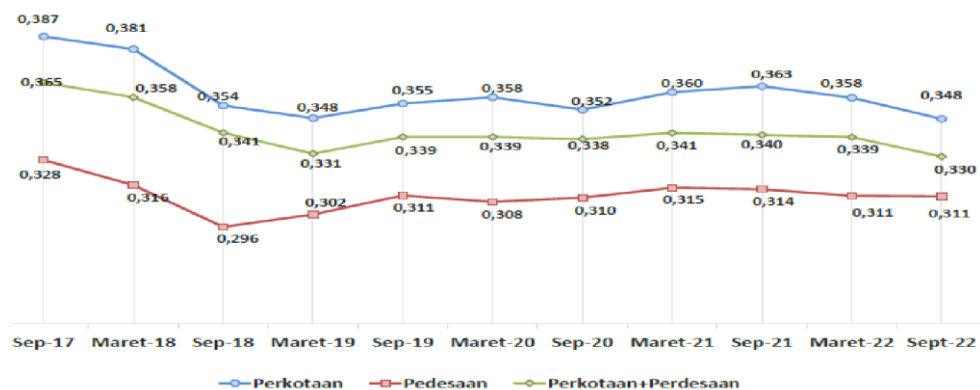


Grafik 6 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2022

7. Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran Penduduk

Untuk mengukur ketimpangan, kesenjangan pendapatan, BPS menggunakan indikator *Gini Ratio* dan Distribusi Pengeluaran menurut *World Bank*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini Ratio* Sumatera Selatan pada kurun waktu tahun 2017 -2022 mengalami fluktuasi dan masih tergolong tinggi. Dalam satu tahun terakhir atau pada periode bulan September 2021-September 2022, *Gini Ratio* Sumatera Selatan mengalami sedikit penurunan dari 0,340 keadaan bulan September 2021 menjadi 0,330 keadaan September bulan 2022 atau turun 0,010 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat mulai menampakkan hasil walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan lebih besar dari perdesaan. *Gini Ratio* perkotaan pada bulan September 2022 sebesar 0,348, sedangkan di perdesaan sebesar 0,311. *Gini Ratio* di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan pada periode tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi, namun dalam satu tahun terakhir atau periode September 2021-September 2022, *Gini Ratio* daerah perkotaan dan perdesaan sama-sama mengalami penurunan, begitu pula pada periode 6 bulan (Maret 2022-September 2022).



Sumber: BPS Prov. Sumsel

Grafik 7 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Secara Menyeluruh Periode 2017-2022

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan target Pendapatan Daerah mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.036.955.961.132,70 mengalami peningkatan sebesar Rp425.664.716.465,53 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.611.291.244.667,17 atau 4,43% peningkatan terjadi pada komponen Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerja.

Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terutama diarahkan untuk pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pengawasan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dialokasikan melalui belanja Operasi dan Belanja Modal, melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang menunjang Pendidikan, antara lain:

- a) Dinas Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp2.252.508.338.380,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.099.989.000.330,00 atau 93,23%;
- b) Dinas Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp20.815.531.625,00 dan terealisasi sebesar Rp16.792.090.362,00 atau 80,67%; dan
- c) Dinas Pemuda dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp89.571.687.000,00 dan terealisasi sebesar Rp81.945.657.990,00 atau 91,49%.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pemerintah Daerah diamanatkan menganggarkan sesuai kemampuan yang dilaksanakan secara bertahap hingga mencapai 10% Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan dalam urusan

wajib kesehatan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan melalui Belanja Operasi dan Belanja Modal terdistribusi melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang menunjang kesehatan, antara lain:

- a) Dinas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp641.530.554.265,00 dan terealisasi sebesar Rp646.671.803.295,43 atau 100,80%;
- b) RS Umum Daerah Siti Fatimah dengan anggaran sebesar Rp336.521.929.592,00 dan terealisasi sebesar Rp363.396.571.384,95 atau 107,98%;
- c) RS Khusus Mata dengan anggaran sebesar Rp53.284.761.000,00 dan terealisasi sebesar Rp51.589.039.685,00 atau 96,81%;
- d) RS Khusus Paru-Paru dengan anggaran sebesar Rp19.521.268.942,00 dan terealisasi sebesar Rp14.411.516.034,00 atau 73,82%;
- e) RS Khusus Gigi dan Mulut dengan anggaran sebesar Rp27.179.017.917,00 dan terealisasi sebesar Rp23.236.422.890,00 atau 85,49%; dan
- f) RS Ernaldi Bahar dengan anggaran sebesar Rp35.039.517.286,00 dan terealisasi sebesar Rp29.346.015.157,00 atau 83,75%.

Sedangkan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan belum memenuhi alokasi anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,60% dari total Belanja Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Belanja Daerah pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dengan anggaran Rp33.870.194.645,00 dan terealisasi Rp31.836.850.817,00 atau 93,99%.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp151.894.033.565,14 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya Rp79.713.949.495,59 menurun sebesar Rp41.879.425.164,510 dibandingkan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp121.593.374.660,10 atau 34,44% dan Pinjaman Daerah sebesar Rp72.180.084.069,55 turun sebesar Rp421.386.092.693,16 dibandingkan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp493.566.176.762,71 atau 85,38%.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari SiLPA tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri dapat berupa anggaran hutang, bantuan modal, dan transfer ke dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja. Komponen pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari SiLPA tahun lalu, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan dari pembayaran pokok utang.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penetapan capaian kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2022 dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Tabel 1 di bawah ini menyajikan Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun 2022.

Tabel 1 Indikator Target Kinerja APBD Tahun 2022

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	PENDAPATAN DAERAH	10.634.451.400.140,00	10.036.955.961.132,74	94,38
I.1	Pendapatan Asli Daerah	5.385.438.862.341,00	4.930.954.855.677,74	91,56
I.2	Pendapatan Transfer	5.209.919.693.387,00	5.090.093.999.526,00	97,70
I.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	39.092.844.412,00	15.907.105.929,00	40,69
II	BELANJA DAERAH	10.426.397.636.784,00	9.663.575.726.750,69	92,68
II.1	Belanja Operasi	4.917.131.819.100,00	4.499.276.793.174,07	91,50
II.2	Belanja Modal	1.631.148.929.785,00	1.536.370.414.095,28	94,19
II.3	Belanja Tidak Terduga	20.023.352.300,00	19.553.804.801,00	97,66
II.4	Belanja Transfer	3.858.093.535.599,00	3.608.374.714.680,34	93,53
	SURPLUS / (DEFISIT)	208.053.763.356,00	373.380.234.382,05	179,46
III	PEMBIAYAAN DAERAH			
III.1	Penerimaan Pembiayaan	151.946.236.644,00	151.894.033.565,14	99,97
III.2	Pengeluaran Pembiayaan	360.000.000.000,00	202.357.225.474,00	56,21
	Pembiayaan NETTO	(208.053.763.356,00)	(50.463.191.908,86)	24,25
	SILPA	0,00	322.917.042.473,19	100,00

Sinergitas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dengan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi faktor penting dalam rangka mengakomodir tujuan pembangunan nasional sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan *Stunting*;
2. Pembangunan ekonomi dan kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, investasi, industri, perdagangan, UMKM, dan pariwisata;
3. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi;
4. Pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana; dan
5. Optimalisasi reformasi birokrasi dan stabilitas keamanan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 berdasarkan urusan, program, dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan-LRA Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar

Rp10.036.955.961.132,74 atau 94,38% dari anggaran sebesar Rp10.634.451.400.140,00 SKPD yang mengelola pendapatan sebanyak 21 SKPD dari 41 SKPD yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tabel 2 berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai oleh 21 SKPD tersebut.

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun 2022

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dinas Pendidikan	108.000.000,00	75.209.000,00	69,64
2	Dinas Kesehatan	90.374.867.693,00	143.933.884.337,95	159,26
3	Rs. Dr Ernaldi Bahar	24.515.300.000,00	27.167.110.807,00	110,82
4	Dinas Pengelola Sumber Daya Air	0,00	580.054.070,00	0,00
5	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	500.000.000,00	1.012.644.203,25	202,53
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	92.552.000,00	91.751.400,00	99,13
7	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	135.000.000,00	93.435.000,00	69,21
8	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	17.600.000.000,00	27.089.098.028,00	153,92
9	Dinas Perhubungan	4.313.500.000,00	7.062.297.313,00	163,73
10	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	205.000.000,00	184.957.000,00	90,22
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	40.000.000,00	35.000.000,00	87,50
12	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	219.450.000,00	210.822.000,00	96,07
13	Dinas Kehutanan	0,00	3.771.852,00	0,00
14	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.050.000.000,00	1.204.064.000,00	114,67
15	Dinas Perdagangan	200.000.000,00	203.405.000,00	101,70
16	Sekretariat Daerah	2.142.086.000,00	1.933.024.200,00	90,24
17	Sekretariat DPRD	24.000.000,00	28.000.000,00	116,67
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	6.476.063.768.513,00	5.310.889.202.646,54	85,08
19	Badan Pendapatan Daerah	4.001.707.595.934,00	4.498.810.688.533,00	112,42
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.120.000.000,00	16.299.015.742,00	107,80
21	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	40.280.000,00	48.526.000,00	120,47
JUMLAH		10.634.451.400.140,00	10.036.955.961.132,74	94,38

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh 41 SKPD. BPKAD selain sebagai SKPD juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga terdapat 41 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah keseluruhan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp10.426.397.636.784,00 dan terealisasi sebesar Rp9.663.575.726.750,69 atau 92,68%. Rincian Belanja per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD Tahun 2022

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dinas Pendidikan	2.252.508.338.380,00	2.099.989.000.330,00	93,23
2	Dinas Kesehatan	641.530.554.265,00	646.671.803.295,43	100,80
3	Rs. Dr Ernaldi Bahar	88.550.507.286,00	77.030.543.102,00	86,99
4	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	944.649.273.970,00	868.227.450.893,46	91,91
5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	104.963.519.449,00	94.714.414.596,00	90,24
6	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	179.948.882.770,00	163.954.111.246,62	91,11
7	Satuan Polisi Pamong Praja	41.386.825.543,00	37.781.701.717,00	91,29
8	Dinas Sosial	45.809.967.050,00	38.859.853.489,00	84,83
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.798.806.066,00	30.455.468.298,00	95,78
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	31.295.256.300,00	29.744.269.907,00	95,04
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	16.461.428.000,00	12.689.885.457,00	77,09
12	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	32.816.418.500,00	30.465.048.749,00	92,83
13	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	57.376.987.682,00	54.304.060.115,40	94,64
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.324.625.054,00	8.437.056.328,00	90,48
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	22.874.469.238,00	19.522.995.357,00	85,35
16	Dinas Perhubungan	45.032.956.903,00	40.685.801.551,00	90,35
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	35.403.026.104,00	32.945.393.949,00	93,06
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	18.998.352.700,00	17.164.191.136,00	90,35
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.809.974.905,00	18.296.202.530,00	70,89
20	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	89.571.687.000,00	81.945.657.990,00	91,49
21	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	47.134.546.600,00	45.443.096.814,00	96,41
22	Dinas Perpustakaan	20.815.531.625,00	16.792.090.362,00	80,67
23	Dinas Kearsipan	14.357.808.000,00	12.407.544.986,00	86,42
24	Dinas Kelautan Dan Perikanan	33.555.227.000,00	23.560.303.485,00	70,21
25	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	106.862.219.411,00	103.093.056.424,00	96,47
26	Dinas Perkebunan	22.216.678.561,00	20.348.654.391,00	91,59
27	Dinas Kehutanan	62.319.719.152,00	56.463.158.332,05	90,60
28	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	29.143.840.464,00	26.649.277.888,00	91,44
29	Dinas Perdagangan	20.491.632.300,00	18.457.897.868,00	90,08
30	Dinas Perindustrian	17.302.804.975,00	14.471.167.583,00	83,63
31	Sekretariat Daerah	467.819.762.033,00	421.996.159.022,99	90,20
32	Sekretariat DPRD	384.073.698.989,00	359.474.789.487,00	93,60
33	Badan Penghubung	16.331.541.000,00	14.756.758.282,00	90,36
34	Inspektorat Daerah	33.870.194.645,00	31.836.850.817,00	94,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.226.668.098,00	29.768.246.349,00	84,50
36	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	4.043.859.260.388,00	3.733.231.135.576,34	92,32
37	Badan Pendapatan Daerah	234.703.645.755,00	222.930.260.068,73	94,98

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	(%)
38	Badan Kepegawaian Daerah	22.126.752.000,00	18.015.290.063,00	81,42
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	41.648.117.167,00	39.438.259.657,00	94,69
40	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	20.353.408.856,00	19.208.304.535,67	94,37
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.072.722.600,00	31.348.514.722,00	86,90
JUMLAH		10.426.397.636.784,00	9.663.575.726.750,69	92,68

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan dalam LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD) selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah basis akrual. Pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berbasis kas yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan serta interpretasi pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyajikan saldo akun-akun Tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan laporan keuangan.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrual

Aspek pertama perubahan akuntansi pemerintahan adalah perubahan dari dasar kas menjadi dasar akrual. Untuk menuju dasar akrual, maka diperlukan masa transisi atau penyesuaian dengan kondisi masing masing entitas dimana akuntansi pemerintahan diaplikasikan. Studi IFAC PSC mengidentifikasi bahwa antara dasar kas dan dasar akrual terdapat dua modifikasi yang dipakai, yaitu (1) basis kas modifikasian (*modified cash basic*) dan (2) basis akrual modifikasian (*modified accrual basic*).

1. Basis Kas Modifikasian (*Modified Cash Basic*)

Pada dasarnya mirip dengan basis kas dalam mengakui transaksi dan kejadian saat kas diterima atau dibayarkan. Hanya saja, perbedaannya, pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka waktu tertentu setelah tahun buku. Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode perpanjangan tersebut berasal dari transaksi periode sebelumnya, diakui sebagai pendapatan dan pengeluaran dari tahun fiskal sebelumnya. Arus kas pada awal periode pelaporan, yang telah

dipertanggungjawabkan pada periode sebelumnya dikurangkan dari aliran kas periode saat ini. Pengakuan dan pelaporan saldo kas antara dasar kas modifikasian dengan dasar kas terdapat persamaan. Hanya saja, dalam dasar kas modifikasian masih dibukanya pembukuan untuk mengakui suatu jumlah yang diterima dan dibayar selama periode perpanjangan tertentu. Pos-pos dasar kas modifikasian dan dasar kas adalah pos-pos dasar kas modifikasian termasuk saldo neto jumlah diterima dan dibayar selama periode tertentu yang terjadi di periode sebelumnya.

2. Basis Akrua Modifikasian (*Modified Accrual Basic*)

Basis akrua modifikasian mengakui transaksi dan peristiwa pada saat transaksi atau peristiwa terjadi, dan bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Perbedaan utama dasar akrua modifikasian dari dasar akrua adalah:

- a. Aset fisik dibiayakan (*expensed*) pada waktu pembelian; dan
- b. Seluruh aset dan kewajiban lainnya diakui seperti dasar akrua.

Elemen-elemen yang diakui dalam dasar akrua modifikasian, adalah:

- a. Aset-aset Keuangan;
- b. Kewajiban;
- c. Kewajiban Bersih/Aset-aset Keuangan Bersih; dan
- d. Pendapatan dan Biaya Modifikasi Akrua.

Dasar Akrua Modifikasian menyediakan para pemakai Laporan Keuangan, dengan informasi mengenai sumber daya, alokasi sumber daya, dan penggunaan sumber-sumber keuangan.

3.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

3.5.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan

5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan RKUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- 1 Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- 2 Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- 3 Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh, atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- 4 Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan

- 5 Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pendapatan-LO Diakui Bersamaan dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima bersamaan dan disertai dokumen penetapan.

2. Pendapatan-LO Diakui pada saat Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah, misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- b. Pendapatan-LO Diakui setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Provinsi kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.

Pendapatan diterima di muka atas pajak daerah hanya terjadi jika adanya kelebihan pembayaran oleh Wajib Pajak (WP) dibanding SKPD, atau SKPD-LB hasil pemeriksaan pajak. Pendapatan pajak diakui pada saat ada Surat Ketetapan tidak memandang masa pajaknya melewati tahun buku. Seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meskipun WP membayar pajak melewati tahun buku.

Pendapatan diterima di muka akibat adanya perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah dimungkinkan terjadi pada jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, lain-lain PAD-BLUD misal penyewaan gedung/kantor jangka panjang, retribusi pemanfaatan ruang jangka panjang, dan uang muka pelayanan BLUD-RSUD.

Untuk retribusi atas izin tertentu diakui pada saat diterbitkan perizinan dan pemerintah mempunyai hak untuk menagih pendapatan atas terbitnya izin tersebut. Meskipun izin tersebut berlaku lebih dari satu tahun buku, namun

jasa/pelayanan yang diberikan sebagian besar diberikan pada saat penerbitan izin, untuk jasa selanjutnya selama masa izin sulit diidentifikasi.

c. **Pendapatan-LO Diakui setelah Penerimaan Kas selama Tahun Berjalan**

Pendapatan-LO diakui pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Kondisi ini biasanya terjadi pada pendapatan retribusi, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Dengan demikian pengakuan pendapatan LO adalah untuk pendapatan daerah selain pendapatan pajak.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD maupun Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer. Belanja Daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran; dan

2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
3. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan Aset Tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban;
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
2. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas; dan
3. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain;
2. Beban Non Operasional; dan
3. Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/TA sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil dibagi menjadi:

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun, jika pemotongan Dana Transfer

misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU TA berjalan.

- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada TA sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada TA berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional, beserta perbandingannya dengan TA sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada TA bersangkutan maupun TA

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan, yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan diakui saat diterima pada RKUD; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari RKUD.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam LRA dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

3.5.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab BUD dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
2. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUD.

Pengakuan

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di RKUD;
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu;
- c. Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- d. Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

4. Pengeluaran Kas Dalam Rangka Pengeluaran Pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.

- 1) Kas telah dikeluarkan dari RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

5. Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di RKUD sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas pada RKUD.

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK). Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada LAK.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.5.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
3. Investasi Jangka Pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dikategorikan sebagai Investasi Jangka Pendek. Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok Aset Lancar. Pengukuran Investasi Jangka Pendek berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan
 - b. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
2. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

3.5.9 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok Aset Non Lancar. Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;

- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS).

Pengukuran Investasi Jangka Panjang berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi Jangka Panjang nonpermanen:
 - 1) Investasi Jangka Panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - 2) Investasi Jangka Panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
 - 3) Investasi Jangka Panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3.5.10 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas Piutang untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
2. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;
3. Transfer antar Pemerintahan Piutang, yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Kelebihan Transfer; dan
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Pengukuran

1. Pengukuran Piutang Pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut.
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding.

2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
 - b. Dana Bagi Hasil, disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi

penyisihan kerugian Piutang Tidak Tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang, maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara, yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Pemberhentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara, yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut.

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan; dan
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang Pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang tiga sampai dengan lima tahun; dan/atau

- b. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang nol sampai dengan satu tahun;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang diatas satu tahun sampai dengan dua tahun;
3. Kualitas diragukan, jika umur piutang diatas dua tahun sampai dengan lima tahun; dan
4. Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari lima tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %
c	Diragukan	50 %
d	Macet	100 %

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

3.5.11 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan**, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
2. **Harga pokok produksi**, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

3.5.12 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d. Investasi Non Permanen Lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a. Penyertaan modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b. Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan BAS.

3.5.13 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam Aset Tetap pemerintah adalah:

1. Aset Tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
2. Hak atas tanah.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

1. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan Aset Tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu Aset Tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh Aset Tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan Aset Tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan Aset Tetap akan andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka Aset Tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah. Misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap lainnya berupa alat olahraga sama dengan atau lebih dari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. Pengeluaran atas perolehan Aset Tetap konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pengukuran Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan Aset Tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut.

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

2. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Peralatan dan Mesin tersebut siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Biaya perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan, dan Irigasi sampai siap pakai. Biaya

ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Jaringan, dan Irigasi tersebut siap pakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kebijakan perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

7. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengonsumsiannya potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa/residu Aset Tetap. Penyusutan per periode dilakukan dengan membagi nilai perolehan/penilaian dengan masa manfaat.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Neraca sebagai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap.

3.5.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan dan lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat

untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek atau Jangka Panjang. Klasifikasi Kewajiban sebagai berikut.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban Jangka Pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan; dan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan

- b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*Exchange Transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi Tanpa Pertukaran (*Non-Exchange Transactions*)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*Government-Related Events*)

Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*Government-Acknowledged Events*)

Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria sebagai berikut.

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan
- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang, atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos Neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. **Utang Bunga** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan Utang Bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. **Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang**, diakui pada saat reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi Kewajiban Jangka Pendek.
- d. **Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. **Utang Beban**, diakui pada saat:
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
 - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. **Utang Jangka Pendek Lainnya**, diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. **Utang Kepada Pihak Ketiga**, diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - 1) Barang yang dibeli sudah diterima;
 - 2) Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; dan
 - 3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. **Utang Transfer DBH**, yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i. **Kewajiban Jangka Panjang**, diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas

dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman; dan
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.

Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral/Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut.

1. Utang PFK

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2. Utang kepada Pihak Ketiga

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

3. Utang Transfer

Dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.

4. Utang Bunga atas Utang Pemerintah

Harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir

periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pendapatan Diterima Dimuka

Merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

7. Utang Beban

Merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

8. Kewajiban Lancar Lainnya

Merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

9. Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

- b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

3.5.15 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dikurangi kewajiban pemerintah daerah ditambah dengan surplus/defisit-LO.

IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

4.1.1 Pendapatan-LRA

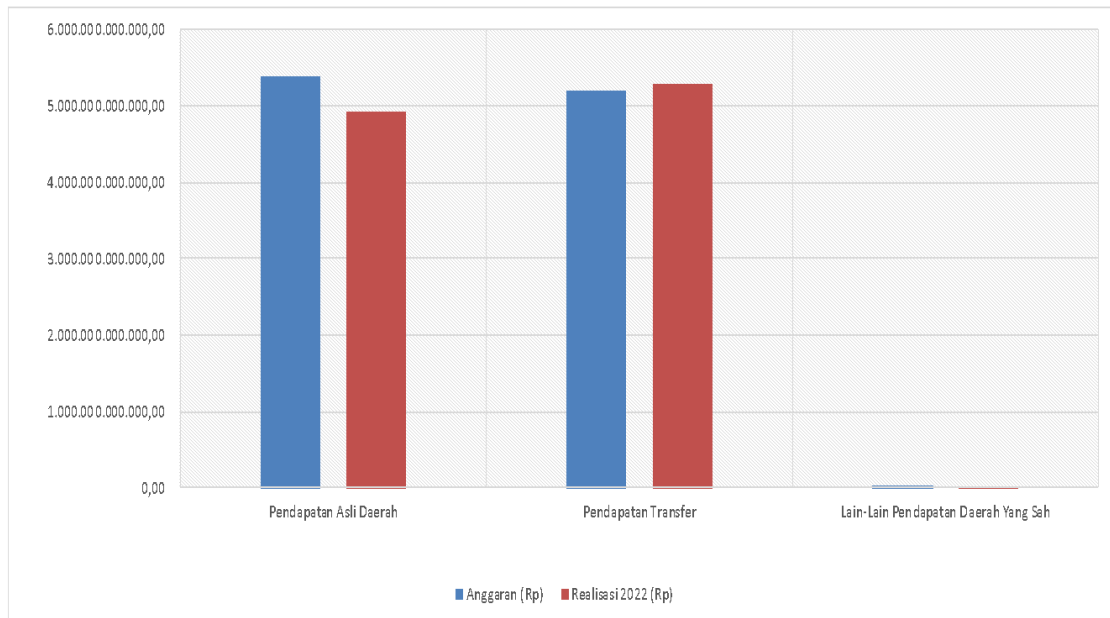
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyajikan anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp10.634.451.400.140,00 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp10.036.955.961.132,74 atau 94,38% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 naik sebesar Rp425.664.716.465,57 atau 4,43% bila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp9.611.291.244.667,17. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4 Realisasi Pendapatan Menurut Kelompok

(dalam rupiah)

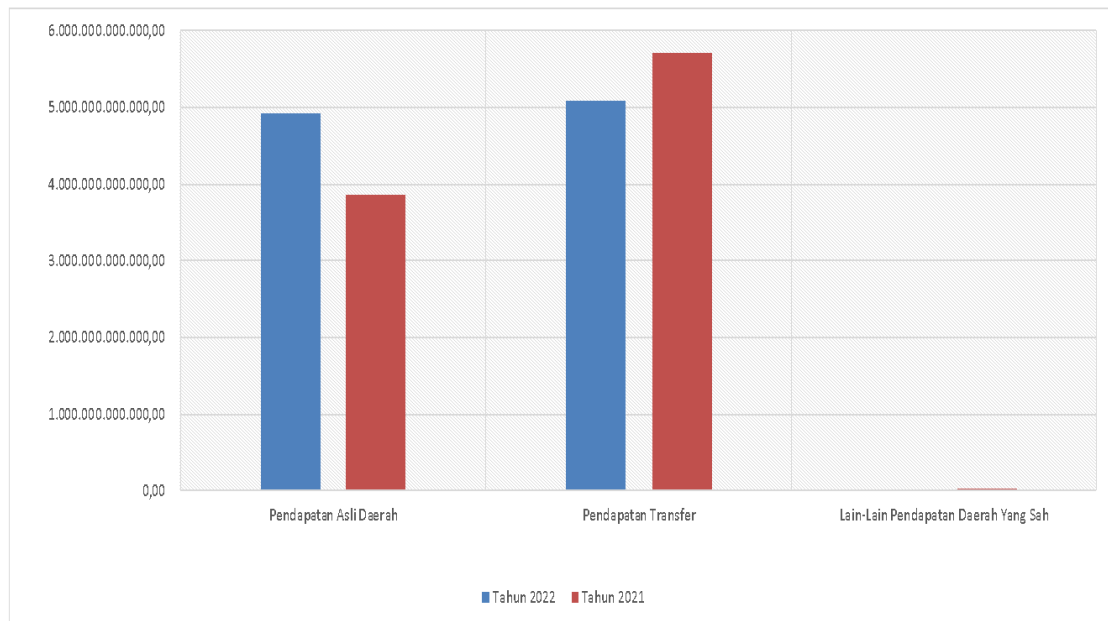
No	Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	5.385.438.862.341,00	4.930.954.855.677,74	91,56	3.865.463.033.085,17
2	Pendapatan Transfer	5.209.919.693.387,00	5.090.093.999.526,00	97,70	5.712.683.072.712,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	39.092.844.412,00	15.907.105.929,00	40,69	33.145.138.870,00
Jumlah Pendapatan		10.634.451.400.140,00	10.036.955.961.132,74	94,38	9.611.291.244.667,17

Realisasi Pendapatan-LRA Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 tergambar pada grafik berikut.



Grafik 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

Perbandingan realisasi pendapatan LRA Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tergambar pada grafik berikut.



Grafik 9 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan 2021

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

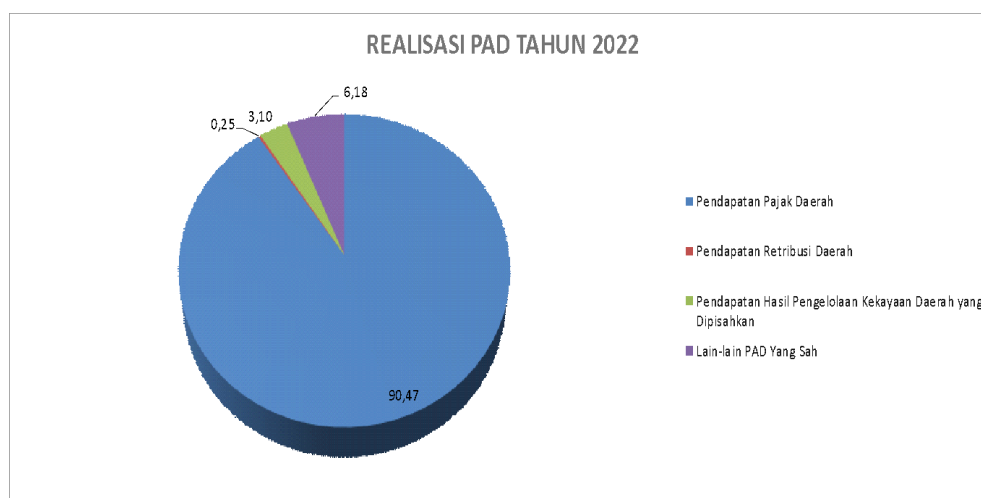
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.930.954.855.677,74 atau 91,56% dari anggarannya sebesar Rp5.385.438.862.341,00 naik sebesar Rp1.065.491.822.592,57 atau 27,56% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp3.865.463.033.085,17 yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	PAD	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Pendapatan Pajak Daerah	4.001.707.595.934,00	4.461.152.465.008,25	111,48	3.523.785.342.246,24
2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.089.868.000,00	12.185.155.716,25	134,05	9.313.749.306,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	153.464.182.528,00	153.032.882.582,11	99,72	65.714.183.659,07
4	Lain-lain PAD Yang Sah	1.221.177.215.879,00	304.584.352.371,13	24,94	266.649.757.873,86
	Jumlah	5.385.438.862.341,00	4.930.954.855.677,74	91,56	3.865.463.033.085,17

Komposisi masing-masing jenis pendapatan dan kontribusinya pada PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 10 Komposisi Realisasi PAD Tahun 2022

Dari grafik diatas terlihat jelas bahwa Pajak Daerah merupakan penyumbang terbesar dalam realisasi PAD Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 90,47%.

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Tahun 2022 Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan terealisasi sebesar Rp4.461.152.465.008,25 atau 111,48% dari anggarannya sebesar Rp4.001.707.595.934,00 naik sebesar Rp937.367.122.762,01 atau 26,60% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp3.523.785.342.246,24. Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi terbesar dalam keseluruhan pencapaian pajak daerah yaitu terealisasi Rp1.507.131.069.658,25 atau 33,78% dari seluruh pencapaian pajak daerah sebesar Rp4.461.152.465.008,25. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 pada tabel berikut.

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Pajak daerah	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.057.129.900.000,00	1.194.685.750.280,00	113,01	1.050.846.360.960,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.059.964.800.000,00	1.083.383.406.500,00	102,21	957.251.353.845,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.280.000.000.000,00	1.507.131.069.658,25	117,74	939.777.027.499,04
4.	Pajak Air Permukaan	13.100.000.000,00	13.119.649.458,00	100,15	12.628.973.571,20

No	Pajak daerah	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
5.	Pajak Rokok	591.512.895.934,00	662.832.589.112,00	112,06	563.281.626.371,00
	Jumlah	4.001.707.595.934,00	4.461.152.465.008,25	111,48	3.523.785.342.246,24

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dianggarkan sebesar Rp1.057.129.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.194.685.750.280,00 atau 113,01% naik sebesar Rp143.839.389.320,00 atau 13,69% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.050.846.360.960,00. Rincian realisasi Pajak kendaraan Bermotor terdapat pada tabel berikut.

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi PKB

(dalam rupiah)

No	Pajak Kendaraan Bermotor	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Mobil Penumpang-Sedan	16.128.190.000,00	17.162.389.025,00	106,41	15.610.696.800,00
2	Mobil Penumpang-Jeep	84.049.510.000,00	132.139.551.525,00	157,22	114.838.782.475,00
3	Mobil Bus-Microbus	1.693.700.000,00	3.460.899.250,00	204,34	2.962.132.050,00
4	Mobil Bus-Bus	2.818.000.000,00	752.739.675,00	26,71	564.242.575,00
5	Mobil Barang/ Beban-Pick Up	105.482.200.000,00	106.086.383.460,00	100,57	94.191.550.490,00
6	Mobil Barang/ Beban-Light Truck	119.789.500.000,00	117.212.456.150,00	97,85	104.202.245.225,00
7	Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda 2	179.407.070.750,00	189.210.876.590,00	105,46	171.892.287.400,00
8	Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	0,00	728.250,00	0,00	38.633.800,00
9	Alat Berat/alat Besar	0,00	13.914.000,00	0,00	86.281.862,00
10	Mobil Penumpang-Minibus	528.999.500.000,00	574.560.126.025,00	108,61	499.952.169.308,00
11	Mobil Barang/Beban-Truck	17.034.300.000,00	52.849.376.100,00	310,25	45.323.351.975,00
12	Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.494.200.000,00	1.018.508.105,00	68,16	965.786.425,00
13	Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	220.529.250,00	217.802.125,00	98,76	217.233.075,00
14	Mobil Roda Tiga	13.200.000,00	0,00	0,00	967.500,00
	Jumlah	1.057.129.900.000,00	1.194.685.750.280,00	113,01	1.050.846.360.960,00

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dianggarkan sebesar Rp1.059.964.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.083.383.406.500,00 atau 102,21% naik sebesar Rp26.132.052.655,00 atau 2,47% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.057.251.353.845,00. Anggaran dan realisasi BBNKB terdapat pada tabel berikut.

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi BBNKB*(dalam rupiah)*

No	BBNKB	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Mobil Penumpang-Sedan	6.442.800.000,00	5.565.177.500,00	86,38	4.113.320.000,00
2	Mobil Penumpang-Jeep	108.032.300.000,00	104.981.476.500,00	97,18	101.064.332.500,00
3	Mobil Bus-Microbus	2.798.400.000,00	2.411.868.500,00	86,19	2.068.815.000,00
4	Mobil Bus-Bus	2.898.000.000,00	768.549.500,00	26,52	1.559.045.000,00
5	Mobil Barang/ Beban-Pick Up	126.468.000.000,00	122.432.033.500,00	96,81	101.237.635.000,00
6	Mobil Barang/ Beban-Light Truck	51.822.400.000,00	72.408.573.250,00	139,72	42.427.734.000,00
7	Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda 2	272.567.733.600,00	258.627.531.750,00	94,89	243.776.975.750,00
8	Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda 3	1.033.300.000,00	898.491.500,00	86,95	877.670.700,00
9	Kendaraan khusus Alat Berat	0,00	52.177.500,00	0,00	47.149.495,00
10	Mobil Barang/Beban Truck	55.800.000.000,00	54.208.735.000,00	97,15	55.440.335.000,00
11	Mobil Barang/Beban-Blind Van	3.889.600.000,00	2.165.680.000,00	55,68	3.640.045.000,00
12	Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00
13	Mobil Penumpang-Minibus	428.204.000.000,00	458.863.112.000,00	107,16	400.958.733.900,00
14	Mobil Roda Tiga	8.266.400,00	0,00	0,00	8.062.500,00
Jumlah		1.059.964.800.000,00	1.083.383.406.500,00	102,21	957.251.353.845,00

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dianggarkan sebesar Rp1.280.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.507.131.069.658,25 atau 117,74% naik sebesar Rp567.354.042.159,21 atau 60,37% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp939.777.027.499,04. Realisasi PBBKB per jenis bahan bakar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9 Anggaran dan Realisasi PBBKB*(dalam rupiah)*

No	PBBKB	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Bahan Bakar Bensin	769.323.813.146,00	434.102.753.571,00	56,43	736.258.844.345,34
2	Bahan Bakar Solar	510.105.546.367,00	1.073.003.523.385,25	210,35	203.112.407.850,70
3	Bahan Bakar Gas	570.640.487,00	24.792.702,00	4,34	405.775.303,00
Jumlah		1.280.000.000.000,00	1.507.131.069.658,25	117,74	939.777.027.499,04

4. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di

darat. PAP dianggarkan sebesar Rp13.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.119.649.458,00 atau 100,15% naik sebesar Rp490.675.886,80 atau 3,89% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp12.628.973.571,20.

5. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut oleh pemerintah. Alokasi pajak rokok untuk masing-masing provinsi tahun 2022 diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-40/PK/2021 tanggal 5 November 2021 tentang proporsi dan estimasi penerimaan pajak rokok untuk masing-masing provinsi Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, sesuai Pasal 18 ayat (5) huruf a dan b PMK Nomor 41/PMK.07/2016 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok. PMK tersebut menyatakan bahwa penyetoran penerimaan pajak rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan setelah Gubernur menyalurkan seluruh bagi hasil pajak rokok kepada kabupaten/kota dan Gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil pajak rokok kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan.

Pendapatan Pajak Rokok Provinsi Sumatera Selatan dianggarkan sebesar Rp591.512.895.934,00 dengan realisasi sebesar Rp662.832.589.112,00 atau 112,06% naik sebesar Rp99.550.962.741,00 atau 17,67% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp563.281.626.371,00. Rincian realisasi penerimaan pajak rokok per triwulan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10 Rincian Penerimaan Pajak Rokok

(dalam rupiah)

No	Uraian	Bruto	Netto	Dasar Penerimaan
1	Desember TA 2021	84.943.366.930,00	80.190.963.784,00	Surat DJPK No. S-164/PK.4/2022 tanggal 20 Juli 2022
2	Triwulan I	171.077.053.143,00	171.077.053.143,00	Surat DJPK No. S-164/PK.4/2022 tanggal 20 Juli 2022
3	Triwulan II	190.940.114.903,00	190.940.114.903,00	Surat DJPK No. S-225/PK.4/2022 tanggal 15 September 2022
4	Triwulan III	98.867.287.045,00	98.867.287.045,00	Surat DJPK No. S-295/PK.4/2022 tanggal 21 November 2022
5	Triwulan IV	121.757.170.237,00	121.757.170.237,00	Surat DJPK No. S-336/PK.4/2022 tanggal 18 Desember 2022
Jumlah		667.584.992.258,00	662.832.589.112,00	

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp9.089.868.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.185.155.716,25,00 atau 134,05% dari anggarannya, naik sebesar Rp2.871.406.410,25 atau 30,83% dari realisasi saldo Tahun 2021 sebesar

Rp9.313.749.306,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Retribusi	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Pelayanan Pendidikan	8.000.000,00	35.709.000,00	446,36	0,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.646.013.000,00	3.319.940.203,25	125,47	1.703.961.960,00
3	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	476.472.000,00	352.610.500,00	74,00	383.050.000,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	1.275.883.000,00	1.226.892.700,00	96,16	556.540.000,00
5	Retribusi Penyeberangan Air	3.300.000.000,00	5.850.539.929,00	177,29	0,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	270.000.000,00	187.706.000,00	69,52	185.900.000,00
7	Retribusi Terminal	900.000.000,00	994.325.000,00	110,48	893.801.530,00
8	Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhan	175.000.000,00	164.182.384,00	93,82	10.798.451,00
9	Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	35.000.000,00	49.500.000,00	141,43	4.648.363.465,00
10	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	926.333.900,00
11	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
12	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	3.500.000,00	3.750.000,00	107,14	0,00
Jumlah		9.089.868.000,00	12.185.155.716,25	134,05	9.313.749.306,00

Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipungut berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah per SKPD sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.

Realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp12.185.155.716,25 merupakan realisasi pendapatan retribusi yang telah diterima di RKUD per 31 Desember 2022 termasuk realisasi pendapatan retribusi yang masih ada di kas bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp30.928.275,00 sebagai berikut:

- a. Pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sebesar Rp4.209.000,00 disetor pada tanggal 2 Januari 2023;
- b. Pelayanan pelabuhan sebesar Rp23.265,00 disetor pada tanggal 2 Januari 2023; dan
- c. Pelayanan penyeberangan orang sebesar Rp26.696.010,00 disetor pada tanggal 2 Januari 2023.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp153.032.882.582,11 atau 99,72% dari anggarannya sebesar Rp153.464.182.528,00 naik sebesar Rp87.318.698.923,04 atau 132,88% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp65.714.183.659,07. Pendapatan tersebut merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan milik swasta yang dikelola oleh BUD selaku PPKD, dengan uraian pada tabel berikut.

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Bagian Laba atas Penyertaan				
1	Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	153.464.182.528,00	153.032.882.582,11	99,72	65.714.183.659,07
-	PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang	0,00	0,00	0,00	0,00
-	PD. Sumsel Energi Gemilang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
-	PT. Jamkrida	2.300.000.000,00	3.638.304.736,50	158,19	0,00
-	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel	71.318.740.434,00	71.318.740.434,61	100,00	56.866.949.483,07
-	PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam	73.378.486.125,00	73.378.486.125,00	100,00	7.960.554.081,00
-	PT. Asuransi Bangun Askrida	89.915.969,00	100.942.071,00	112,26	94.350.095,00
-	PT. Swarnadwipa Selaras Adiguna	782.040.000,00	804.678.000,00	102,89	792.330.000,00
-	PT.Tirta Sriwijaya Mandiri	2.595.000.000,00	3.791.731.215,00	146,12	0,00
-	PT.Sriwijaya Mandiri Sumsel	1.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
-	PT.Jakabaring Sport City	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	153.464.182.528,00	153.032.882.582,11	99,72	65.714.183.659,07

4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.221.177.215.879,00 dengan realisasi sebesar Rp304.584.352.371,13 atau 24,94% naik sebesar Rp37.934.594.497,27 atau 14,23% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp266.649.757.873,86 dengan rincian tabel berikut.

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	1.717.435.277,00	0,00	2.667.227.400,00
2	Penerimaan Jasa Giro	28.000.000.000,00	21.882.295.878,00	78,15	20.222.977.506,57
3	Pendapatan Bunga	109.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	15.000.000,00	14.150.000,00	94,33	8.600.000,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	200.000.000.000,00	2.258.128.057,95	1,13	1.292.484.565,48
6	Pendapatan Denda Pajak	0,00	37.656.868.649,75	0,00	45.130.100.966,80
7	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	557.211.476,00	0,00	1.305.364.843,00
9	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.100.000.000,00	5.266.386.100,72	103,26	3.667.302.897,88
10	Pendapatan BLUD	147.590.167.693,00	214.484.108.914,95	145,32	165.191.108.875,28
11	Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	731.472.048.186,00	20.747.768.016,76	2,84	27.164.590.818,85
Jumlah		1.221.177.215.879,00	304.584.352.371,13	24,94	266.649.757.873,86

- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan direalisasikan sebesar Rp1.717.435.277,00 adalah setoran pelunasan penjualan kendaraan dinas dan peralatan mesin di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui lelang dan penjualan sisa bongkaran gedung dan bangunan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 14 Rincian Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	SK	Jumlah
1	Pembayaran lelang kendaraan dinas roda dua BG 6086 NZ dan BG 3678 PZ pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	SK Nomor 459/KPTS/BPKAD/2022	3.747.877,00
2	Hasil penjualan Peralatan dan Mesin pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan	SK Nomor 934/KPTS/BPKAD/2022	9.965.000,00
3	Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	SK Nomor 911/KPTS/BPKAD/2022	4.270.000,00
4	Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	SK Nomor 935/KPTS/BPKAD/2022	400.000,00
5	Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	1.699.052.400,00
Jumlah			1.717.435.277,00

Hasil penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.382.877,00 dengan perincian sebagai berikut.

- 1) Pembayaran lelang kendaraan dinas roda dua BG 6086 NZ dan BG 3678 PZ pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp3.747.877,00;
- 2) Hasil penjualan Peralatan dan Mesin pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp9.965.000,00;
- 3) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp4.270.000,000;
- 4) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp400.000,00;

Hasil penjualan aset lainnya sebesar Rp1.699.052.400,00 dengan perincian sebagai berikut.

- 1) Angsuran penjualan rumah daerah golongan III pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp1.255.563.500,00;
- 2) Setoran penjualan sisa bongkaran gedung kantor pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp11.352.000,00 dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp23.300.000,00, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp55.095.000,00, Sekretariat daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.551.500,00;
- 3) Lelang atas penjualan sapi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp245.654.000,00;
- 4) Penjualan barang milik daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp11.700.000,00, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp75.677.400,00, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp13.900.000,00 dan Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp4.259.000,00;

- b. Penerimaan Jasa Giro yang dianggarkan sebesar Rp28.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.882.295.878,00 adalah penerimaan jasa giro dari Rekening Kas Umum Daerah nomor 140-300-0001 dan nomor 140-300-00001 pada Bank Sumsel Babel dan semua penerimaan jasa giro pada rekening-rekening SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jasa giro pada rekening pemegang kas daerah sebesar Rp21.859.380.393,00, dan jasa giro pada kas bendahara sebesar Rp22.915.485,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15 Rincian Jasa Giro Tahun 2022

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	Penerimaan Jasa Giro	Jumlah
1	Jasa giro kas daerah	21.859.380.393,00
2	Jasa giro pada Kas di Bendahara	22.915.485,00
Jumlah		21.882.295.878,00

- c. Pendapatan Bunga Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp109.000.000.000,00.
- d. Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah direalisasikan sebesar Rp14.150.000,00 merupakan penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kendaraan dinas atas nama Darwin Sugandi Nomor Plat BG 2328 LZ yang hilang pada tahun 2004 sebesar Rp900.000,00, Tuntutan ganti kerugian daerah kendaraan dinas atas nama Trisbani Arief Nomor Plat BG 2023 LZ yang hilang pada tahun 2006 sebesar Rp11.250.000,00, dan Tuntutan ganti kerugian daerah kendaraan dinas atas nama Syahriar Agustoni Nomor Plat BG 117 LZ yang hilang pada tahun 2003 sebesar Rp2.000.000,00,
- e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan direalisasikan sebesar Rp2.258.128.057,95 dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000.000,00.
- f. Pendapatan Denda Pajak Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp37.656.868.649,75 dengan rincian terdapat pada tabel berikut.

Tabel 16 Rincian Pendapatan Denda Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Denda + Bunga
A	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	36.056.088.330,00
1	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Sedan	609.730.975,00
2	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>	111.682.975,00
3	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	48.436.150,00
4	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>	1.307.875.755,00
5	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua	6.867.290.725,00
6	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>	60.279.950,00
7	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>	3.689.041.538,00
8	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Minibus	15.586.839.792,00
9	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>	3.988.344.000,00
10	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>	3.779.215.295,00
11	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga	7.351.175,00
B	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.069.866.275,00
1	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	35.012.500,00
2	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>	20.767.500,00
3	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	5.707.375,00
4	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	36.224.350,00
5	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	50.092.000,00
6	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua	301.045.850,00
7	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	94.395.850,00
8	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Minibus	427.499.600,00
9	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	87.641.250,00
10	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	9.028.750,00
11	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda tiga	2.451.250,00

No	Uraian	Denda + Bunga
C	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	490.130.963,75
1	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Bensin	837.413,00
2	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar	489.293.550,75
D	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	40.783.081,00
1	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	40.783.081,00
Jumlah		37.656.868.649,75

- g. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp557.211.476,00 merupakan realisasi pendapatan dari pengembalian gaji dan tunjangan tahun sebelumnya sebesar Rp552.381.476,00 dan pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas tahun sebelumnya sebesar Rp4.830.000,00.
- h. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah merupakan realisasi pendapatan atas perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) dan pemanfaatan aset daerah sebesar Rp5.266.386.100,72, terdiri dari hasil sewa barang milik daerah sebesar Rp1.015.992.252,00 untuk sewa lahan dan gedung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas kehutanan, Badan Pendapatan Daerah, PU Bina Marga dan Tata Ruang, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sedangkan Bangun Guna Serah sebesar Rp4.250.393.848,72 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Rincian Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tergambar pada tabel berikut.

Tabel 17 Rincian Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
A	HASIL SEWA BARANG MILIK DAERAH	1.015.992.252,00
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.979.400,00
2	Dinas Kehutanan	3.771.852,00
3	Badan Pendapatan Daerah	96.736.000,00
4	PU Bina Marga dan Tata Ruang	33.939.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Pembayaran Sewa Lahan ATM DriveThru Jakabaring, Lahan Parkir Jakabaring dan ATM DriveThru Kampus	878.566.000,00
B	HASIL DARI BANGUN GUNA SERAH	4.250.393.848,72
1	Pembayaran tetap kerjasama pemanfaatan Bowling Centre	20.000.000,00
2	Pembayaran Kontribusi Tetap Parkir Palembang Paragon Mall (PSX)	302.612.400,00
3	Pembayaran Kontribusi Parkir GOR Town Square PT. Griya Inti Sejahtera Insani	1.627.393.761,72
4	Pembayaran Kontribusi Mall dan parkir PT. Graha Pinarangan	702.108,00
5	Pembayaran Kontribusi Tetap Siloam Hospital	60.000.000,00
6	Pembayaran Kontribusi Pengelolaan Hotel PT. Bayu Jaya Lestari (Hotel Aryaduta)	2.239.685.579,00
	Jumlah	5.266.386.100,72

- i. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp20.747.768.016,76 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 18 Rincian Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pengembalian Dana BOS	1.045.407.181,00
2	Pengembalian Dana DAK	791.349,00
3	Pengembalian dana PSG	2.471.882,00
4	Tindak lanjut Temuan BPK	9.645.151.918,15
5	Pengembalian Hibah	2.860.308.119,15
6	Lain-lain	7.193.637.567,46
Jumlah		20.747.768.016,76

Pengembalian Dana BOS, Dana DAK dan Dana PSG merupakan pengembalian tahun sebelumnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK tahun sebelumnya merupakan pengembalian dari Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perumahan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan. Pengembalian Hibah merupakan Pengembalian Hibah tahun 2021 yang disetor pada Tahun 2022 dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Pengembalian lain-lain merupakan pengembalian yang surat tanda setorannya tidak dapat diidentifikasi antara lain setoran via transfer atm atau surat tanda setoran yang tidak jelas informasinya.

- j. Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp214.484.108.914,95 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 19 Rincian Realisasi Pendapatan BLUD

(dalam rupiah)

No	BLUD	Anggaran	Realisasi	%
1	RS. MATA (BLUD)	30.000.000.000,00	34.058.571.105,00	113,53
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	30.000.000.000,00	34.058.571.105,00	113,53
2	RS. PARU-PARU (BLUD)	473.270.943,00	529.428.105,00	111,87
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	473.270.943,00	529.428.105,00	111,87
3	RS. GIGI DAN MULUT (BLUD)	4.000.000.000,00	4.854.386.255,00	121,36
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	4.000.000.000,00	4.854.386.255,00	121,36
4	RS. UMUM DAERAH SITI FATIMAH (BLUD)	54.646.996.750,00	102.646.962.699,95	187,84
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	54.646.996.750,00	102.646.962.699,95	187,84
5	BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI (BLUD)	1.254.600.000,00	1.844.536.173,00	147,02
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.254.600.000,00	1.844.536.173,00	147,02
6	RS. DR ERNALDI BAHAR (BLUD)	24.515.300.000,00	27.167.110.807,00	110,82
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	24.515.300.000,00	27.167.110.807,00	110,82
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN (BLUD)	17.600.000.000,00	27.089.098.028,00	153,92
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	17.600.000.000,00	27.089.098.028,00	153,92
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH (BLUD)	15.100.000.000,00	16.294.015.742,00	107,91
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	15.100.000.000,00	16.294.015.742,00	107,91
Jumlah		147.590.167.693,00	214.484.108.914,95	145,32

4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp5.209.919.693.387,00 dengan realisasi sebesar Rp5.090.093.999.526,00 atau 97,70% turun sebesar Rp622.589.073.186,00 atau 10,90% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp5.712.683.072.712,00 yang dikelola oleh BUD selaku PPKD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Transfer	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA				
	Dana Perimbangan	5.160.450.355.387,00	5.029.223.442.526,00	97,46	5.712.683.072.712,00
-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.168.769.344.590,00	857.161.346.285,00	73,34	1.174.172.782.308,00
-	Dana Transfer DBH Sumber Daya Alam	1.337.855.303.797,00	1.585.575.950.611,00	118,52	717.561.667.273,00
-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.563.041.287.000,00	1.563.041.287.000,00	100,00	1.563.041.287.000,00
-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	211.287.490.000,00	188.860.939.022,00	89,39	220.514.359.267,00
-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	879.496.930.000,00	834.583.919.608,00	94,89	2.037.392.976.864,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	49.469.338.000,00	60.870.557.000,00	123,05	0,00
	Jumlah	5.209.919.693.387,00	5.090.093.999.526,00	97,70	5.712.683.072.712,00

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp5.160.450.355.387,00 dengan realisasi sebesar Rp5.029.223.442.526,00 atau 97,46% turun sebesar Rp683.459.630.186,00 atau 11,96% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp5.712.683.072.712,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari.

a. Dana Bagi Hasil

Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp2.506.624.648.387,00 dengan realisasi sebesar Rp2.442.737.296.896,00 atau 97,45%. Dana Bagi Hasil terdiri atas:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp1.168.769.344.590,00 dengan realisasi sebesar Rp857.161.346.285,00 atau 73,34%. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp781.707.812.241,00, Kurang Bayar Tahun 2021 sebesar Rp75.453.534.044,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak terdapat pada tabel berikut.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	902.071.971.555,00	644.215.109.785,00	71,42	944.841.803.524,00
2	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	0,00	14.631.341.126,00	0,00	11.550.225.219,00
3	Cukai Hasil Tembakau	488.733.223,00	112.186.101,00	22,95	136.085.684,00
4	DBH PPh Pasal 21	266.208.639.812,00	198.202.709.273,00	74,45	217.644.667.881,00
Jumlah		1.168.769.344.590,00	857.161.346.285,00	73,34	1.174.172.782.308,00

- a) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp644.215.109.785,00 adalah Dana Bagi hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat termasuk biaya pungutnya, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 22 Rincian Realisasi Pendapatan DBH PBB Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	DBH PBB	Kurang bayar 2021	Realisasi 2022	Jumlah
A	Biaya Pungut	1.694.318.954,00	16.430.834.585,00	18.125.153.539,00
1	PBB Migas	361.474.395,00	13.992.533.000,00	14.354.007.395,00
2	PBB Non Migas	484.138.652,00	948.348.985,00	1.432.487.637,00
3	PBB Perkebunan	696.796.338,00	1.030.730.400,00	1.727.526.738,00
4	PBB Kehutanan	105.117.863,00	381.107.200,00	486.225.063,00
5	PBB Panas Bumi	39.613.076,00	66.198.000,00	105.811.076,00
6	Sektor lainnya	7.178.630,00	11.917.000,00	19.095.630,00
B	DBH PBB	50.327.329.945,00	575.762.626.301,00	626.089.956.246,00
1	PBB Migas	13.013.067.232,00	503.705.788.000,00	516.718.855.232,00
2	PBB Non Migas	17.428.991.480,00	34.147.260.901,00	51.576.252.381,00
3	PBB Perkebunan	15.677.924.112,00	27.405.679.400,00	43.083.603.512,00
4	PBB Kehutanan	2.522.835.714,00	7.691.692.000,00	10.214.527.714,00
5	PBB Panas Bumi	1.426.082.739,00	2.383.172.000,00	3.809.254.739,00
6	Sektor lainnya	258.428.668,00	429.034.000,00	687.462.668,00
Jumlah		52.021.648.899,00	592.193.460.886,00	644.215.109.785,00

- b) Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2022 sebesar Rp212.834.050.399,00 terdiri dari DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp198.202.709.273,00 dan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp14.631.341.126,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 23 Rincian Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (PPh)

(dalam rupiah)

No	DBH PBB	Kurang bayar 2021	Realisasi 2022	Jumlah
A	PPh Pasal 21	15.966.372.273,00	182.236.337.000,00	198.202.709.273,00
1	Kurang Bayar Tahun 2021	15.966.372.273,00	0,00	15.966.372.273,00
2	Triwulan 1 Tahun 2022	0,00	36.447.267.400,00	36.447.267.400,00
3	Triwulan 2 Tahun 2022	0,00	36.447.267.400,00	36.447.267.400,00
4	Triwulan 3 Tahun 2022	0,00	36.447.267.400,00	36.447.267.400,00
5	Triwulan 4 Tahun 2022	0,00	72.894.534.800,00	72.894.534.800,00
B	PPh Pasal 25 dan Pasal 29	7.441.888.126,00	7.189.453.000,00	14.631.341.126,00
1	Kurang Bayar Tahun 2021	7.441.888.126,00	0,00	7.441.888.126,00
2	Triwulan 1 Tahun 2022	0,00	1.437.890.600,00	1.437.890.600,00
3	Triwulan 2 Tahun 2022	0,00	1.437.890.600,00	1.437.890.600,00
4	Triwulan 3 Tahun 2022	0,00	1.437.890.600,00	1.437.890.600,00
5	Triwulan 4 Tahun 2022	0,00	2.875.781.200,00	2.875.781.200,00
Jumlah		23.408.260.399,00	189.425.790.000,00	212.834.050.399,00

c) Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022 sebesar Rp112.186.101,00 terdiri dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp88.561.355,00, kurang bayar tahun 2021 sebesar Rp23.624.746,00.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.585.575.950.611,00 atau 118,52% dari anggarannya sebesar Rp1.337.855.303.797,00 naik sebesar Rp868.014.283.338,00 atau 120,97% dari saldo realisasi Tahun 2021 sebesar Rp717.561.667.273,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Iuran Hak Pengusaha Hutan	0,00	15.956.884,00	0,00	0,00
2	Provisi Sumber Daya Hutan	26.688.013.726,00	20.141.791.931,00	75,47	23.775.620.678,00
3	Dana Reboisasi	277.358.489,00	1.240.920.527,00	447,41	1.193.749.539,00
4	Iuran Tetap (Landrent)	555.219.777.200,00	12.817.583.240,00	2,31	7.424.461.625,00
5	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty)	136.750.442.407,00	852.318.821.444,00	623,27	304.808.262.780,00
6	Pertambangan Minyak Bumi	0,00	131.848.512.023,00	0,00	37.667.410.900,00
7	Pertambangan Gas Bumi	612.184.360.498,00	563.095.959.562,00	91,98	338.696.144.203,00
8	Pertambangan Panas Bumi	6.735.351.477,00	4.096.405.000,00	60,82	3.996.017.548,00
Jumlah		1.337.855.303.797,00	1.585.575.950.611,00	118,52	717.561.667.273,00

Realisasi DBH Bukan Pajak sebesar Rp1.585.575.950.611,00 adalah jumlah penerimaan transfer DBH bukan pajak yang masuk ke kas daerah pada

tahun 2022 yang terdiri dari realisasi alokasi transfer pusat untuk tahun 2022 sebesar Rp1.126.514.620.077,00, kurang bayar tahun 2021 sebesar Rp459.061.330.534,00. Rincian realisasi transfer DBH Bukan Pajak terdapat pada tabel berikut.

Tabel 25 Realisasi Alokasi Transfer DBH Bukan Pajak Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	2021	2022	Jumlah
1	Iuran Hak Pengusahaan Hutan	15.956.884,00	0,00	15.956.884,00
2	Provisi Sumber Daya Hutan	4.968.923.931,00	15.172.868.000,00	20.141.791.931,00
3	Dana Reboisasi	753.269.527,00	487.651.000,00	1.240.920.527,00
4	Iuran Tetap (<i>Land rent</i>)	0,00	12.817.583.240,00	12.817.583.240,00
5	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (<i>Royalty</i>)	181.058.179.607,00	671.260.641.837,00	852.318.821.444,00
6	Pertambangan Minyak Bumi	66.750.859.023,00	65.097.653.000,00	131.848.512.023,00
7	Pertambangan Gas Bumi	205.514.141.562,00	357.581.818.000,00	563.095.959.562,00
8	Pertambangan Panas Bumi	0,00	4.096.405.000,00	4.096.405.000,00
Jumlah		459.061.330.534,00	1.126.514.620.077,00	1.585.575.950.611,00

b. Dana Alokasi Umum

Pendapatan Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat Tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp1.563.041.287.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp1.563.041.287.000,00 sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap I Atas Sisa DAK Non Fisik di rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021 serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/KM.7/2022 tentang pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah Tahun Anggaran 2021 periode penyaluran bulan Agustus sampai dengan Desember 2022. Atas pendapatan dana alokasi umum ini dalam penyalurannya dipotong langsung untuk pembayaran Dana SMI sebesar Rp136.698.703.692,00 dan Dana BOS sebesar Rp9.430.187.000,00.

c. Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Provinsi Sumatera Selatan mendapat Alokasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp211.287.490.000,00 dengan realisasi sebesar Rp188.860.939.022,00 atau

sebesar 89,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp220.514.359.257,00 mengalami penurunan sebesar Rp31.653.420.245,00 atau 14,35% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 26 Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik

(dalam rupiah)

No	Penerimaan DAK	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	20.553.376.000,00	20.309.273.900,00	98,81	47.641.880.400,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	17.048.678.000,00	16.914.293.083,00	99,21	34.219.689.979,00
3	DAK Bidang Kesehatan	26.930.973.000,00	13.074.142.489,00	48,55	24.676.093.576,00
4	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	9.952.495.000,00	2.488.123.750,00	25,00	9.360.435.115,00
5	DAK Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.128.141.916,00
6	DAK Bidang Pendidikan	136.801.968.000,00	136.075.105.800,00	99,47	103.488.118.281,00
Jumlah		211.287.490.000,00	188.860.939.022,00	89,39	220.514.359.267,00

Pendapatan transfer DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 diantaranya dialokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan fisik dengan realisasi belanja sebesar Rp185.892.432.310,00 yang dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. Alokasi DAK Non Fisik Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus NonFisik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp879.496.930.000,00 dengan realisasi sebesar Rp834.583.919.608,00 atau sebesar 94,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.202.809.057.256,00 atau sebesar 59,04% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.416.564.000,00	2.410.122.680,00	99,73	2.203.964.141,00
2	BOS Satuan Pendidikan Provinsi	532.447.010.000,00	520.393.649.011,00	97,74	1.706.127.182.000,00
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	317.545.613.000,00	297.029.473.445,00	93,54	321.381.050.000,00

No	Pendapatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	17.400.000.000,00	7.929.662.500,00	45,57	2.085.000.000,00
5	Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.362.056.457,00
6	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.976.461.000,00	885.241.281,00	29,74	0,00
7	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya-Museum	5.500.000.000,00	5.013.592.641,00	91,16	3.700.622.266,00
8	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	301.800.000,00	38.592.550,00	12,79	0,00
9	Dana Fasilitas Penanaman Modal	909.482.000,00	883.585.500,00	97,15	533.102.000,00
Jumlah		879.496.930.000,00	834.583.919.608,00	94,89	2.037.392.976.864,00

2. Pendapatan Transfer Dana Insentif Daerah (DID)

Pendapatan Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2022 untuk Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang DID untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp49.469.338.000,00 dengan realisasi sebesar Rp60.870.557.000,00 atau 123,05%. Penghargaan kinerja tersebut merupakan prestasi Provinsi Sumatera Selatan dalam pengendalian inflasi.

4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp39.092.844.412,00 dengan realisasi Rp15.907.105.929,00 atau 40,69% yang merupakan realisasi pendapatan hibah yang dikelola BUD selaku PPKD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 28 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Pendapatan Hibah	39.092.844.412,00	15.907.105.929,00	40,69	33.145.138.870,00
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		39.092.844.412,00	15.907.105.929,00	40,69	33.145.138.870,00

Pendapatan hibah terdiri dari pendapatan hibah pemerintah pusat dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri dengan realisasi sebesar Rp15.907.105.929,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29 Rincian Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
A	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	12.367.105.929,00
1	Dana IPDMIP-AIF	1.418.974.094,00
2	Dana IPDMIP-ADB	7.093.168.038,00
3	Dana IPDMIP-IFAD	3.854.963.797,00
B	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	3.540.000.000,00
1	Jasa Raharja Bulan Januari sd desember 2021	3.540.000.000,00
Jumlah		15.907.105.929,00

Pendapatan hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi yang merupakan kewenangan pusat, provinsi atau kabupaten.

4.1.2 Belanja-LRA

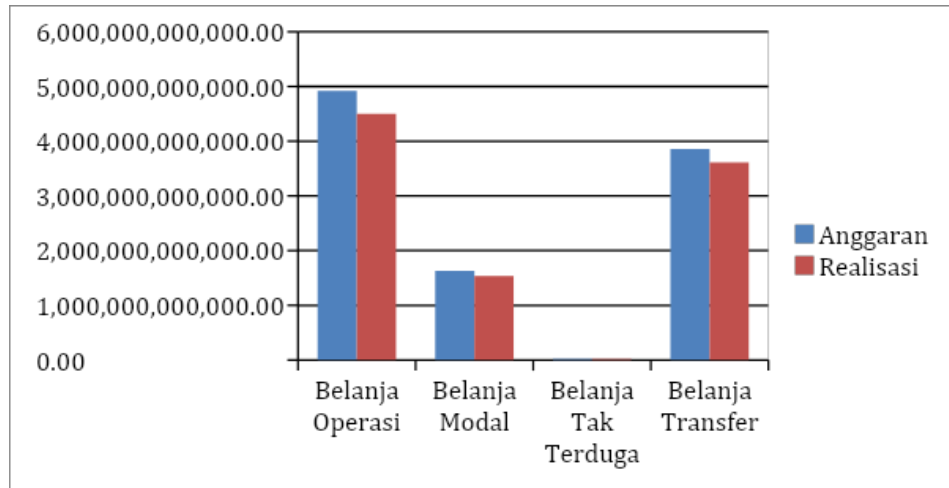
Belanja Daerah berdasarkan jenisnya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Jumlah realisasi belanja daerah sebesar Rp9.663.635.575.750,69 atau 92,68% dari Anggaran sebesar Rp10.426.397.636.784,00 turun sebesar Rp397.154.534.228,70 atau 3,95% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp10.060.730.260.979,40 seperti pada tabel berikut.

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

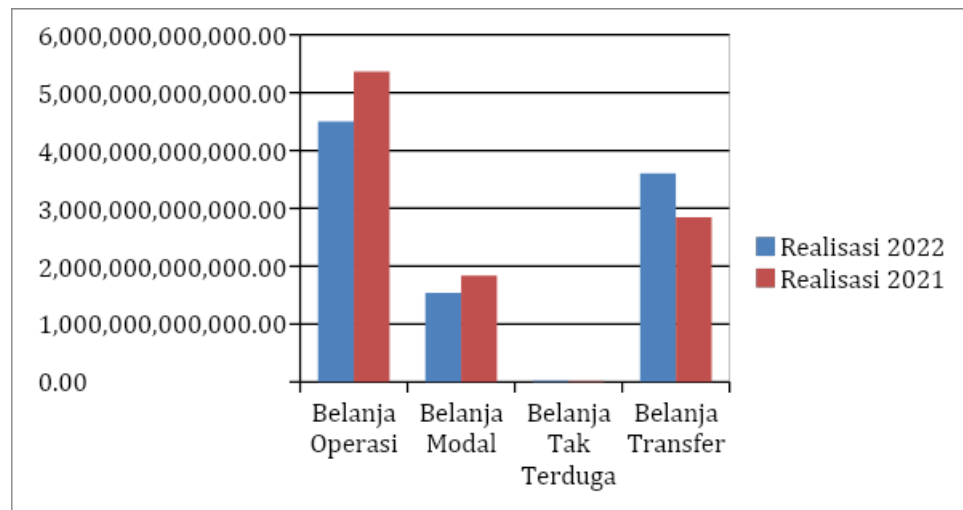
(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Rasio %	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Operasi	4.917.131.819.100,00	4.499.276.793.174,07	91,50	5.365.031.503.749,49
2	Belanja Modal	1.631.148.929.785,00	1.536.370.414.095,28	94,19	1.836.834.114.021,94
3	Belanja Tak Terduga	20.023.352.300,00	19.553.804.801,00	97,56	14.055.098.162,00
4	Belanja Transfer	3.858.093.535.599,00	3.608.374.714.680,34	93,53	2.844.809.545.045,96
Jumlah		10.426.397.636.784,00	9.663.575.726.750,69	92,68	10.060.730.260.979,40

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.



Grafik 11 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022



Grafik 12 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2022 dan 2021

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Objek Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp4.499.276.793.174,07 atau 91,50% dari anggaran Rp4.917.131.819.100,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp865.754.710.575,42 atau 16,14% dari jumlah realisasi Tahun 2021 sebesar Rp5.365.031.503.749,49. Rincian Belanja Operasi Tahun 2022 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Pegawai	2.353.985.331.933,00	2.092.571.068.579,00	88,89	1.923.290.549.742,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.162.957.600.631,00	2.042.275.862.382,07	94,42	1.811.885.209.417,49
3	Belanja Bunga	15.000.000.000,00	13.227.699.524,00	88,18	382.096.916,00
4	Belanja Hibah	385.188.886.536,00	351.202.162.689,00	91,18	1.629.473.647.674,00
Jumlah		4.917.131.819.100,00	4.499.276.793.174,07	91,50	5.365.031.503.749,49

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp2.353.985.331.933,00 dengan realisasi sebesar Rp2.092.571.068.579,00 atau 88,89%, naik sebesar Rp169.280.518.837,00 atau 9,84% dari realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp1.923.290.549.742,00. Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Pegawai BOS, dan Belanja Pegawai BLUD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Gaji dan Tunjangan	1.212.024.699.575,00	1.048.955.501.192,00	86,55	999.720.287.095,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	970.197.405.358,00	881.499.649.438,00	90,86	763.352.861.761,00
3	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	75.460.455.000,00	68.501.996.126,00	90,78	68.717.575.320,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	7.452.934.000,00	7.429.197.884,00	99,68	5.809.870.202,00
5	Belanja Pegawai BOS	78.301.238.000,00	76.131.906.325,00	97,23	78.837.051.622,00
6	Belanja Pegawai BLUD	10.548.600.000,00	10.052.817.614,00	95,30	6.852.903.742,00
Jumlah		2.353.985.331.933,00	2.092.571.068.579,00	88,89	1.923.290.549.742,00

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.212.024.699.575,00 dan terealisasi sebesar Rp1.048.955.501.192,00 atau 86,55 % dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Gaji Pokok ASN	889.158.781.000,00	805.449.507.107,00	90,59	766.516.074.911,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	90.926.260.000,00	76.462.677.560,00	84,09	73.732.542.995,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	15.316.317.000,00	14.328.059.900,00	93,55	14.303.352.986,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	54.094.860.000,00	51.079.243.700,00	94,43	50.695.025.837,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.143.123.000,00	14.207.698.000,00	78,31	11.491.423.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	53.441.458.000,00	45.337.027.974,00	84,83	43.181.411.701,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.972.209.000,00	2.254.886.216,00	45,35	2.084.534.818,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	63.075.000,00	11.094.710,00	17,59	10.665.230,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	74.053.887.575,00	33.166.939.971,00	44,79	31.422.526.854,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.965.372.000,00	1.665.940.789,00	84,76	1.570.682.193,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.409.152.000,00	4.992.425.265,00	92,30	4.712.046.570,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.480.205.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.212.024.699.575,00	1.048.955.501.192,00	86,55	999.720.287.095,00

- b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp970.197.405.358,00 dan terealisasi sebesar Rp881.499.649.438,00 atau 90,86% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	42.251.493.000,00	15.182.069.766,00	35,93	37.393.849.550,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	0,00	0,00	1.002.640.000,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	451.061.364.000,00	412.531.677.640,00	91,46	298.059.057.708,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	120.051.227.000,00	119.952.977.000,00	99,92	89.728.618.772,00
5	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	168.855.000,00	78.044.080,00	46,22	0,00
6	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	317.545.613.000,00	310.067.474.215,00	97,65	323.701.625.280,00
7	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	17.400.000.000,00	6.351.821.823,00	36,50	0,00
8	Belanja Honorarium	21.709.133.358,00	17.335.584.914,00	79,85	11.476.457.951,00
9	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.720.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		970.197.405.358,00	881.499.649.438,00	90,86	761.362.249.261,00

- c. Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah dianggarkan sebesar Rp120.051.227.000,00 dan terealisasi sebesar Rp119.952.977.000,00 merupakan insentif pemungutan Pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah.

Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	31.713.897.000,00	31.713.897.000,00	100,00	28.699.914.507,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	31.798.944.000,00	31.798.944.000,00	100,00	26.411.084.275,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.400.000.000,00	38.400.000.000,00	100,00	18.543.007.609,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	393.000.000,00	294.750.000,00	75,00	271.462.500,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	17.745.386.000,00	17.745.386.000,00	100,00	15.803.149.881,00
Jumlah		120.051.227.000,00	119.952.977.000,00	99,92	89.728.618.772,00

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp75.460.455.000,00 dan terealisasi sebesar Rp68.501.996.126,00 atau 90,78% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Uang Representasi DPRD	2.438.783.000,00	2.379.300.000,00	97,56	2.372.550.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	309.487.000,00	303.282.000,00	98,00	300.894.000,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	273.317.000,00	230.295.600,00	84,26	228.340.260,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	203.940.000,00	203.940.000,00	100,00	203.265.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3.536.235.000,00	3.449.985.000,00	97,56	3.440.197.500,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	273.484.000,00	272.092.500,00	99,49	272.092.500,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.081.000,00	31.450.500,00	98,03	31.189.500,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	18.900.000.000,00	18.900.000.000,00	100,00	18.837.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	4.725.000.000,00	4.671.450.000,00	98,87	4.707.150.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.149.488.000,00	1.030.362.846,00	89,64	1.027.090.320,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	28.642.690.000,00	22.268.237.680,00	77,74	19.756.206.240,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	14.215.000.000,00	14.200.000.000,00	99,89	16.980.000.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	199.350.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000,00	561.600.000,00	100,00	561.600.000,00
Jumlah		75.460.455.000,00	68.501.996.126,00	90,78	68.717.575.320,00

- e. Belanja Biaya Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp7.452.934.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.429.197.884,00 atau 99,68% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 37 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH /WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	77.490.000,00	75.600.000,00	97,56	70.200.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.610.000,00	8.400.000,00	97,56	7.800.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	139.482.000,00	136.080.000,00	97,56	126.360.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.197.000,00	5.069.400,00	97,54	4.707.300,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.642.000,00	8.047.084,00	75,62	7.801.602,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	1.400,00	70,00	1.300,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.024.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	186.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	558.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	7.201.743.000,00	7.196.000.000,00	99,92	5.593.000.000,00
Jumlah		7.452.934.000,00	7.429.197.884,00	99,68	5.809.870.202,00

- f. Belanja Pegawai BOS Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp78.301.238.000,00 dan terealisasi sebesar Rp76.131.906.325,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 38 Rincian Realisasi Belanja Pegawai BOS

(dalam rupiah)

NO	Kab/Kota	SLB	SMK	SMA	Jumlah	Realisasi Tahun 2021
1	Kota Palembang	251.000.000,00	3.995.175.000,00	3.790.940.000,00	8.037.115.000,00	15.823.230.000,00
2	Kota Prabumulih	128.400.000,00	325.710.000,00	812.045.000,00	1.266.155.000,00	2.403.910.000,00
3	Kota Lubuk Linggau	28.800.000,00	1.211.265.000,00	1.079.940.000,00	2.320.005.000,00	4.611.210.000,00
4	Kota Pagaralam	132.000.000,00	273.020.000,00	826.310.000,00	1.231.330.000,00	2.330.660.000,00
5	Kab. Banyuasin	84.000.000,00	1.391.840.000,00	4.387.494.000,00	5.863.334.000,00	11.642.668.000,00
6	Kab. Musi Banyuasin	171.450.000,00	2.811.331.500,00	6.666.854.000,00	9.649.635.500,00	19.127.821.000,00
7	Kab. Ogan Ilir	66.900.000,00	885.962.000,00	1.741.334.000,00	2.694.196.000,00	5.321.492.000,00
8	Kab. Ogan Komering Ilir	68.200.000,00	2.900.917.325,00	4.510.532.500,00	7.479.649.825,00	14.891.099.650,00
9	Kab. Ogan Komering Ulu	92.000.000,00	974.945.000,00	2.467.763.000,00	3.534.708.000,00	6.977.416.000,00

NO	Kab/Kota	SLB	SMK	SMA	Jumlah	Realisasi Tahun 2021
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	0,00	586.550.000,00	3.329.065.000,00	3.915.615.000,00	7.831.230.000,00
11	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	0,00	1.874.305.000,00	3.163.137.000,00	5.037.442.000,00	10.074.884.000,00
12	Kab. Muara Enim	92.400.000,00	2.679.495.000,00	4.380.595.000,00	7.152.490.000,00	14.212.580.000,00
13	Kab. Musi Rawas	102.900.000,00	835.950.000,00	3.232.835.000,00	4.171.685.000,00	8.240.470.000,00
14	Kab. Musi Rawas Utara	0,00	164.520.000,00	847.780.000,00	1.012.300.000,00	2.024.600.000,00
15	Kab. Lahat	114.000.000,00	1.781.460.000,00	5.018.470.000,00	6.913.930.000,00	13.713.860.000,00
16	Kab. Empat Lawang	71.900.000,00	842.505.000,00	2.765.690.000,00	3.680.095.000,00	7.288.290.000,00
17	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	94.800.000,00	853.205.000,00	1.224.216.000,00	2.172.221.000,00	4.249.642.000,00
Jumlah		1.498.750.000,00	24.388.155.825,00	50.245.000.500,00	76.131.906.325,00	150.765.062.650,00

g. Belanja Pegawai BLUD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp10.548.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.052.517.614,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 39 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
1	RS. Mata (BLUD)	80.000.000,00	51.000.000,00	63,75
2	RS. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD)	3.500.000.000,00	3.075.300.000,00	87,87
3	RS. Dr Ernaldi Bahar (BLUD)	136.600.000,00	117.800.000,00	86,24
4	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (BLUD)	6.832.000.000,00	6.808.717.614,00	99,66
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BLUD)	0,00	0,00	0,00
Jumlah		10.548.600.000,00	10.052.817.614,00	95,30

Rincian Belanja Pegawai per SKPD terdapat pada **Lampiran 4**.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp2.162.957.600.631,00 dengan realisasi sebesar Rp2.042.275.862.382,07 atau 94,42%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp230.390.652.964,58 atau 88,55% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.811.885.209.417,49 Rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel 40.

Tabel 40 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)		Tahun 2021 (Rp)
1	Belanja Barang	488.753.853.840,00	447.008.041.411,84	91,46	398.339.711.732,11

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)		Tahun 2021 (Rp)
2	Belanja Jasa	832.690.618.288,00	770.984.371.316,39	92,59	699.114.690.959,63
3	Belanja Pemeliharaan	152.295.959.193,00	143.676.925.149,44	94,34	168.370.559.228,55
4	Perjalanan Dinas	304.579.942.207,00	270.938.946.159,00	88,95	197.528.102.603,00
5	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.825.672.363,00	29.471.342.406,00	95,61	10.210.447.141,00
6	Barang dan Jasa BOS	210.664.633.000,00	219.205.149.758,00	104,05	209.901.648.349,00
7	Barang dan Jasa BLUD	143.146.921.740,00	160.991.086.181,40	112,47	128.420.049.404,20
Jumlah		2.162.957.600.631,00	2.042.275.862.382,07	94,42	1.811.885.209.417,49

- a. Belanja Barang Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp488.753.853.840,00 dan terealisasi sebesar Rp447.008.041.411,84 atau 91,46% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 41 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
Belanja Barang					
A	Belanja Barang Pakai Habis	488.746.353.840,00	447.000.541.411,84	91,46	398.331.061.732,11
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	210.000.000,00	208.262.000,00	99,17	428.767.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.261.030.875,00	2.034.086.422,00	89,96	5.779.360.248,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.011.647.285,00	18.812.795.206,00	94,01	15.164.871.701,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	350.000.000,00	349.353.776,00	99,82	366.316.462,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.140.176.065,00	2.112.077.431,00	98,69	1.766.871.551,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	73.500.000,00	41.919.125,00	57,03	36.485.000,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	51.080.000,00	39.909.800,00	78,13	281.554.500,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	60.500.000,00	59.796.000,00	98,84	118.740.000,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.360.422.915,00	8.389.962.870,00	89,63	8.900.119.644,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.515.583.000,00	3.274.847.542,00	93,15	2.976.569.455,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.687.690.000,00	1.614.898.426,00	95,69	794.991.870,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
12	Belanja suku cadang alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	24.092.250,00
13	Belanja Suku Cadang Alat Laboratorium	24.500.000,00	24.458.850,00	99,83	19.413.481,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.000.000,00	4.950.012,00	99	2.720.000,00
15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	280.000.000,00	233.530.509,00	83,40	1.030.000,00
16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.992.402.900,00	2.632.849.580,00	87,98	1.903.943.327,00
17	Belanja Alat bahan untuk kegiatan Alat tulis kantor	41.565.901.854,00	39.370.430.990,00	94,72	34.431.973.005,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	157.197.535,00	145.227.200,00	92,39	115.998.660,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Kantor Bahan Cetak	58.367.920.904,00	52.379.057.754,00	1	51.293.149.494,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	793.456.000,00	726.704.500,00	91,59	567.932.684,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	30.430.000,00	25.565.000,00	84,01	173.463.730,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	259.725.182,00	255.677.400,00	98,44	847.029.350,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.959.296.470,00	1.934.548.031,00	98,74	1.933.912.940,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.957.610.870,00	5.566.790.214,00	93,44	4.119.670.020,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	23.683.863.470,00	21.102.777.151,00	89,10	17.235.409.052,50
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.376.360.000,00	1.361.033.880,00	98,89	455.187.606,00
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.741.465.000,00	1.726.772.300,00	99,16	950.036.000,00
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.622.058.378,00	24.813.668.569,00	96,84	26.412.807.100,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
29	Belanja Obat-Obatan-Obat	12.671.661.389,00	11.987.511.488,00	94,6	14.301.805.802,00
30	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.075.601.168,00	12.967.375.650,22	99,17	9.207.427.831,00
31	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	114.674.906.665,00	97.725.824.015,62	85,22	81.627.607.357,45
32	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.658.636.840,00	11.285.757.840,00	96,8	13.949.974.450,00
33	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	345.000.000,00	328.044.327,00	95,09	103.359.828,00
34	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	0,00	0,00	0,00	149.976.500,00
35	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.138.000.000,00	1.120.419.225,00	98,46	0,00
36	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	284.856.000,00	283.481.000,00	99,52	8.945.660.894,16
37	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.617.600.000,00	2.610.798.040,00	99,74	39.740.000,00
38	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.376.867.366,00	20.434.398.337,00	83,83	2.528.243.600,00
39	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	34.654.298.494,00	33.493.282.208,00	96,65	16.034.775.656,00
40	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	74.134.500,00	74.134.500,00	100	18.009.604.977,00
41	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	17.172.998.038,00	16.728.043.572,00	97,41	13.875.000,00
42	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.557.662.000,00	2.965.384.300,00	83,35	11.339.298.800,00
43	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	4.796.280.000,00	4.771.164.466,00	99,48	2.963.288.040,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
44	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.709.566.000,00	16.213.877.270,00	97,03	9.831.184.525,00
45	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	2.024.470.000,00	2.008.070.000,00	99,19	9.557.816.505,00
46	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.821.259.000,00	1.746.578.325,00	95,9	1.579.150.000,00
47	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.016.950.000,00	3.922.890.000,00	97,66	899.644.500,00
48	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	365.458.880,00	360.590.000,00	98,67	6.680.147.000,00
49	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.857.199.000,00	7.269.848.500,00	92,52	4.665.544.204,00
50	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.360.605.750,00	2.266.720.500,00	96,02	2.363.896.997,00
51	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	48.780.000,00	48.620.000,00	99,67	1.675.000,00
52	Belanja Pakaian Penyelamatan	600.000,00	0	0	99.935.000,00
53	Belanja Pakaian Siaga	7.250.000,00	6.900.000,00	95,17	159.030.000,00
54	Belanja Pakaian Teknik	13.640.000,00	13.640.000,00	100	29.618.600,00
55	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	649.390.000,00	619.184.500,00	95,35	362.637.500,00
56	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	9.183.286,00	9.159.000,00	99,74	18.000.000,00
57	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	12.500.000,00	12.500.000,00	100	12.500.000,00
58	Belanja Pakaian KORPRI	870.735.000,00	814.743.520,00	93,57	64.013.400,00
59	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.132.500.000,00	871.133.750,00	76,92	504.310.300,00
60	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.455.978.600,00	1.221.692.540,00	83,91	955.180.850,00
61	Belanja Pakaian Olahraga	3.553.967.161,00	3.381.924.000,00	95,16	3.778.424.485,00
62	Belanja Pakaian Paskibraka	159.500.000,00	159.350.000,00	99,91	199.547.000,00
63	Belanja Pakaian Jas/Safari	39.500.000,00	35.550.000,00	90,00	37.800.000,00
B	Belanja Barang Tak Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	8.650.000,00
1	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	8.650.000,00
	Jumlah	488.753.853.840,00	447.008.041.411,84	91,46	398.339.711.732,11

Rincian Belanja Barang per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

- b. Belanja Jasa Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 832.690.618.288,00 dan terealisasi sebesar Rp 770.984.371.316,39 atau 92,61 % dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Jasa Kantor	613.380.446.332,00	568.497.186.104,99	92,71	531.256.634.728,63
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	80.072.022.927,00	79.608.158.448,00	99,42	70.338.071.883,00
3	Belanja Sewa Tanah	960.643.176,00	756.230.000,00	78,72	119.050.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	56.259.376.395,00	54.994.758.532,00	97,75	37.233.244.350,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.583.819.500,00	14.440.462.435,40	87,08	10.440.749.033,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.000.000,00	5.000.000,00	100	336.950.000,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	617.300.000,00	588.085.400,00	95,27	231.200.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	46.691.275.013,00	38.614.939.969,00	82,70	37.949.083.365,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.514.307.245,00	5.920.405.127,00	90,88	4.790.700.400,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	817.800.000,00	811.900.000,00	99,28	692.920.000,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	280.000.000,00	206.400.000,00	73,71	91.250.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.508.627.700,00	6.540.845.300,00	62,24	5.634.837.200,00
Jumlah		832.690.618.288,00	770.984.371.316,39	92,59	699.114.690.959,63

Rincian Belanja Jasa per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

- c. Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 152.295.958.904,00 dan terealisasi sebesar Rp143.676.925.149,44 atau 94,34% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 43 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.128.352.000,00	1.120.731.131,00	99,32	699.936.622,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.119.217.457,00	24.357.317.514,60	83,65	26.779.148.802,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	52.388.843.736,00	49.880.785.443,84	95,21	40.811.096.451,55
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.681.096.000,00	67.375.887.922,00	98,1	96.721.725.403,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	978.450.000,00	942.203.138,00	96,3	3.358.651.950,00
Jumlah		152.295.959.193,00	143.676.925.149,44	94,34	168.370.559.228,55

Rincian Belanja Pemeliharaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

- d. Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp304.580.272.207,00 dan terealisasi sebesar Rp270.938.946.159,00 atau 88,95% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 44 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
	Belanja Perjalanan Dinas	304.580.272.207,00	270.938.946.159,00		
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	298.960.278.715,00	267.382.890.971,00	89,44	197.528.102.603,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	273.223.599.434,00	246.021.652.870,00	90,04	177.074.298.352,00
	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.827.448.543,00	2.785.319.933,00	98,51	6.890.274.886,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.882.088.204,00	4.039.845.604,00	68,68	7.506.103.335,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.177.543.002,00	13.837.245.472,00	85,53	4.880.461.039,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	849.599.532,00	698.827.092,00	82,25	1.176.964.991,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	5.619.663.492,00	3.556.055.188,00	63,28	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	5.619.663.492,00	3.556.055.188,00	63,28	0,00
	Jumlah	304.579.942.207,00	270.938.946.159,00	88,95	197.528.102.603,00

Rincian Belanja Perjalanan Dinas per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

- e. Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp30.825.672.363,00 dan terealisasi sebesar Rp29.471.342.406,00 atau 95,61%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 45 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
A	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.458.165.000,00	27.247.989.300,00	99,23
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.025.415.000,00	4.815.239.300,00	
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	13.432.750.000,00	13.432.750.000,00	
3	Belanja Santunan Kematian	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	
B	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.367.507.363,00	2.223.353.106,00	66,02
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.282.707.363,00	2.223.353.106,00	
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	84.800.000,00	0,00	
	Jumlah	30.825.672.363,00	29.471.342.406,00	95,61

Rincian Belanja Uang dan Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

- f. Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp219.205.149.758,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 46 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS

(dalam rupiah)

No	Kab/Kota	SLB	SMK	SMA	Jumlah
1	Kota Palembang	747.800.050	11.587.806.540,00	21.971.073.257,00	34.306.679.847,00
2	Kota Prabumulih	236.050.000	3.328.663.655,00	5.382.072.660,00	8.946.786.315,00
3	Kota Lubuk Linggau	277.700.000	4.571.616.000,00	5.858.110.700,00	10.707.426.700,00
4	Kota Pagaralam	203.200.000	1.109.962.900,00	3.288.020.677,00	4.601.183.577,00
5	Kab. Banyuasin	184.299.035	3.064.142.500,00	10.626.601.187,00	13.875.042.722,00
6	Kab. Musi Banyuasin	187.200.000	7.770.955.500,00	10.123.418.400,00	18.081.573.900,00
7	Kab. Ogan Ilir	113.478.900	3.709.678.301,00	6.758.656.801,00	10.581.814.002,00
8	Kab. Ogan Komering Ilir	90.470.000	8.254.595.125,00	11.616.153.689,00	19.961.218.814,00
9	Kab. Ogan Komering Ulu	182.600.000	3.318.706.150,00	8.032.747.516,00	11.534.053.666,00
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	0,00	1.199.544.000,00	6.012.179.391,00	7.211.723.391,00
11	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	194.685.500	4.262.936.200,00	9.901.843.093,00	14.359.464.793,00
12	Kab. Muara Enim	165.600.000	7.672.872.000,00	9.881.857.750,00	17.720.329.750,00
13	Kab. Musi Rawas	269.200.000	1.910.223.477,00	8.826.478.673,00	11.005.902.150,00
14	Kab. Musi Rawas Utara	0,00	688.077.770,00	4.891.337.000,00	5.579.414.770,00
15	Kab. Lahat	227.515.000	4.324.503.200,00	10.452.019.250,00	15.004.037.450,00
16	Kab. Empat Lawang	73.200.000	2.077.144.200,00	6.181.500.627,00	8.331.844.827,00
17	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	74.800.000	2.314.172.584,00	5.007.680.500,00	7.396.653.084,00
Jumlah		3.227.798.485,00	71.165.600.102,00	144.811.751.171,00	219.205.149.758,00

- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp143.146.921.740,00 dan terealisasi sebesar Rp160.991.086.181,40 atau 112,47%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 47 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Dinas Kesehatan (Bapelkes)	1.454.600.000	1.446.277.169	99,43	0,00
2	RS. Mata (BLUD)	27.920.000.000	27.926.582.313,00	100,02	17.382.709.506,00
3	RS. Paru-Paru (BLUD)	938.270.943	620.846.721,00	66,17	845.630.116,00
4	RS. Gigi Dan Mulut (BLUD)	4.160.000.000	3.771.683.823,00	90,67	3.512.018.025,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
5	RS. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD)	48.075.690.576	73.049.980.640,00	152	53.150.741.261,20
6	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi (BLUD)	0,00	0,00	0,00	1.354.351.330,00
7	RS. Dr Ernaldi Bahar (BLUD)	32.602.917.286	27.401.720.220,00	84,05	23.354.304.130,00
8	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (BLUD)	11.546.821.768	10.545.351.346,40	91,33	9.674.517.925,00
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BLUD)	16.448.621.167	16.228.643.949,00	98,66	19.145.777.111,00
Jumlah		143.146.921.740	160.991.086.181,40	112,47	128.420.049.404,20

3. Belanja Bunga

Belanja Bunga pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.227.699.524,00 atau 88,18%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 48 Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah	15.000.000.000,00	13.227.699.524,00	88,18
-	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)-PEN Pemda 2022	15.000.000.000,00	13.227.699.524,00	88,18
Jumlah		15.000.000.000,00	13.227.699.524,00	88,18

4. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp385.188.886.536,00 dengan realisasi sebesar Rp351.202.162.689,00 atau 91,18% turun sebesar Rp1.278.271.484.985,00 atau 78,45% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.629.473.647.674,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 49 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	380.225.844.936,00	346.239.121.089,00	91,06	1.624.510.606.074,00
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.963.041.600,00	4.963.041.600,00	100,00	4.963.041.600,00
Jumlah		385.188.886.536,00	351.202.162.689,00	91,18	1.629.473.647.674,00

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah sebesar Rp346.239.121.089,00 atau 91,06% dari anggarannya sebesar Rp380.225.844.936,00. Realisasi belanja tersebut merupakan realisasi belanja uang, barang dan jasa yang diserahkan kepada kelompok anggota masyarakat/pihak ketiga, yang penganggarannya pada Belanja Operasi Organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Rincian Belanja Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat/pihak ketiga terdapat pada tabel berikut.

Tabel 50 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

(dalam rupiah)

No	Uraian/SKPD	Anggaran	Realisasi	%
A	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	376.425.844.936,00	344.164.164.396,00	91,43
1	Dinas Pendidikan	225.937.434.073,00	216.494.631.482,00	95,82
2	Dinas Kesehatan	5.833.103.400,00	5.099.654.398,00	87,43
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.020.000.000,00	1.974.905.615,00	97,77
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	27.579.000.000,00	26.530.531.234,00	96,20
5	Sekretariat Daerah	103.259.778.463,00	84.406.182.504,00	81,74
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.796.529.000,00	9.658.259.163	81,87
B	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial kemasyarakatan	3.800.000.000,00	2.074.956.693,00	54,60
1	Dinas Sosial	3.000.000.000,00	1.275.552.693,00	42,52
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	800.000.000,00	799.404.000,00	99,93
	Jumlah	380.225.844.936,00	346.239.121.089,00	91,06

b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp344.164.164.396,00 dari anggaran sebesar Rp376.425.844.936,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 51 Rincian Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Program Sekolah Gratis	64.297.453.064,00
2	Kuliah Gratis	2.473.435.000,00
3	BPKRMI	8.742.697.906,00
4	PMI Prov. Sumsel	4.021.093.698,00
5	Hibah BOS Reguler	149.723.743.418,00
6	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Prov. Sumsel	1.974.905.615,00
7	Gerakan Pramuka Kwarda Prov. Sumsel	8.185.057.655,00
8	Yayasan Jantung Indonesia	1.078.560.700,00
9	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Prov. Sumsel	11.356.126.464,00
10	Komisi Pemilihan Umum	9.658.259.163,00
11	National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)	6.989.347.115,00
12	PTUN Palembang	2.186.000.000,00
13	BAZNAS Prov. Sumsel	869.114.420,00
14	Kodam II Sriwijaya dan Korem 044 Garuda Dempo	40.995.966.725,00
15	POLDA Sumsel	9.709.500.000,00
16	PWI Prov. Sumsel	643.816.189,00
17	LPTQ Prov. Sumse	4.499.894.654,00
18	Puslatpur Kodiklat	13.965.659.000,00
19	MUI Prov. Sumsel	495.538.937,00
20	Forum Pondok Pesantren	700.000.000,00
21	Yayasan Aulia Cendikia	600.000.000,00
22	Pondok Pesantren Ar-Rahman	350.000.000,00
23	Ponpes Hidayatul Mubtad'in Sigam	271.994.673,00
24	Ponpes Al-Ikhsan	150.000.000,00
25	Ponpes Al-Qomar	126.000.000,00
26	Ponpes Al Masyhur	100.000.000,00
Jumlah		344.164.164.396,00

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.074.956.693,00 dari anggaran sebesar Rp3.800.000.000,00 berupa belanja hibah pada kegiatan karang taruna sebesar Rp1.275.552.693,00 dan belanja hibah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebesar Rp799.404.000,00.

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 adalah Rp4.963.041.600,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.963.041.600,00. Peruntukan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan hibah kepada Partai Politik dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 52 Rincian Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Partai Politik	Realisasi
1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	365.407.200,00
2	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	185.349.600,00
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	688.500.000,00
4	Parta NasDem	417.618.000,00
5	Partai Perindo	206.053.200,00
6	Partai Demokrat	561.546.000,00
7	Partai Gerindra	642.676.800,00
8	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	327.783.600,00
9	Partai Kebangkitan Bangsa	451.326.000,00
10	Partai PDI Perjuangan	713.714.400,00
11	Partai Amanat Nasional (PAN)	403.066.800,00
Jumlah		4.963.041.600,00

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Objek Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya.

Belanja Modal terealisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp1.536.370.414.095,28 atau 94,19% dari anggaran Rp1.631.148.929.785,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp300.463.699.927,00 atau 119,56% dari jumlah realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.836.834.114.021,94 dengan uraian rincian belanja modal selama Tahun 2022 pada tabel berikut.

Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Modal Tanah	9.900.866.391,00	8.708.743.955,00	87,96	70.853.405.527,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	343.196.057.265,00	342.811.302.542,00	99,89	288.834.883.969,24
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	384.013.162.715,00	361.568.165.909,82	94,16	289.050.835.757,28
4	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	810.983.899.571,00	747.812.255.898,46	92,21	1.107.398.086.860,42
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	83.054.943.843,00	75.469.945.790,00	90,87	80.696.901.908,00
Jumlah		1.631.148.929.785,00	1.536.370.414.095,28	94,19	1.836.834.114.021,94

Rincian Belanja Modal per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp9.900.866.391,00 dengan realisasi sebesar Rp8.708.743.955,00 atau 87,96%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 54 Rincian Belanja Modal Tanah

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Modal Tanah Non Persil	9.900.866.391,00	8.708.743.955,00	87,96	
	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	9.900.866.391,00	8.708.743.955,00	87,96	70.853.405.527,00
	Jumlah	9.900.866.391,00	8.708.743.955,00	87,96	70.853.405.527,00

Rincian Belanja Modal Tanah per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per SKPD Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	OPD	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang	9.900.866.391,00	8.708.743.955,00	87,96	67.583.685.577,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (SKPD)	0,00	0,00	0	3.269.719.950,00
	Jumlah	9.900.866.391,00	8.708.743.955,00	87,96	70.853.405.527,00

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp342.811.302.542,00 atau 99,89% dari anggaran sebesar Rp343.196.057.265,00, dengan rincian pada table berikut.

Tabel 56 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
A	Belanja Modal Alat Besar	3.139.408.000,00	3.015.465.200,00	96,05	5.073.835.500,00
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	755.400.000,00	749.550.000,00	99,23	2.751.356.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	2.384.008.000,00	2.265.915.200,00	95,05	2.322.479.500,00
B	Belanja Modal Alat Angkutan	44.085.360.536,00	41.999.486.711,00	95,27	51.187.270.449,70
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	44.085.360.536,00	41.999.486.711,00	95,27	50.489.045.449,70
2	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	698.225.000,00
C	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.748.000.000,00	5.318.121.050,00	92,52	253.377.909,00
1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	4.860.000.000,00	4.430.421.050,00	91,16	10.000.000,00

No	Belanja	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
2	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	12.110.000,00
2	Belanja Modal Alat Ukur	888.000.000,00	887.700.000,00	99,97	231.267.909,00
D	Belanja Modal Alat Pertanian	143.463.000,00	143.031.075,00	99,7	910.265.066,00
1	Belanja Modal Alat Pengolahan	143.463.000,00	143.031.075,00	99,7	910.265.066,00
E	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	122.258.936.303,00	112.760.240.608,00	92,23	75.099.853.566,00
1	Belanja Modal Alat Kantor	66.545.881.987,00	59.332.172.832,00	89,16	11.766.264.211,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	53.572.404.316,00	51.357.491.040,00	95,87	61.095.918.855,00
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.140.650.000,00	2.070.576.736,00	96,73	2.237.670.500,00
F	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.316.813.408,00	12.035.442.326,00	97,72	8.998.770.630,00
1	Belanja Modal Alat Studio	11.084.913.408,00	10.818.005.926,00	97,59	7.583.152.305,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	322.000.000,00	319.231.900,00	99,14	756.136.425,00
3	Belanja Modal Peralatan Pemancar	700.000.000,00	690.309.000,00	98,62	659.481.900,00
4	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	209.900.000,00	207.895.500,00	99,05	-
G	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	104.672.494.298,00	117.950.988.697,00	112,69	33.086.690.996,54
1	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.584.510.917,00	6.466.843.919,00	98,21	22.611.094.902,00
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	98.087.983.381,00	111.484.144.778,00	113,66	10.475.596.094,54
H	Belanja Modal Alat Laboratorium	31.835.500.000,00	31.736.415.456,00	99,69	48.356.182.494,00
1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	372.000.000,00	365.847.150,00	98,35	3.418.018.400,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	25.248.500.000,00	24.812.784.200,00	98,27	38.128.166.505,00
3	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	248.750.000,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	6.015.000.000,00	6.359.052.106,00	105,72	6.073.364.309,00
5	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	200.000.000,00	198.732.000,00	99,37	487.883.280,00
I	Belanja Modal Komputer	17.898.472.870,00	16.854.425.394,00	94,17	63.268.864.183,00
1	Belanja Modal Komputer Unit	11.117.252.237,00	10.574.219.697,00	95,12	15.659.997.926,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.781.220.633,00	6.280.205.697,00	92,61	47.608.866.257,00
J	Belanja Modal Alat Eksplorasi	186.000.000,00	185.800.000,00	99,89	739.036.175,00
1	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	186.000.000,00	185.800.000,00	99,89	739.036.175,00
K	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan pemurnian	9.869.850,00	0,00	-	30.857.500,00
1	Belanja Modal Sumur	9.869.850,00	0,00	-	30.857.500,00
L	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	60.000.000,00	0,00	-	133.125.000,00
1	Belanja Modal Alat Pelindung	60.000.000,00	0,00	-	133.125.000,00
M	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	-	195.563.500,00

No	Belanja	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	-	195.563.500,00
N	Belanja Modal Rambu-Rambu	641.739.000,00	618.191.025,00	96,33	1.403.701.000,00
1	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	641.739.000,00	618.191.025,00	96,33	1.403.701.000,00
O	Belanja Modal Peralatan Olahraga	200.000.000,00	193.695.000,00	96,85	97.490.000,00
1	Belanja Modal Peralatan Olahraga	200.000.000,00	193.695.000,00	96,85	97.490.000,00
	Jumlah	343.196.057.265,00	342.811.302.542,00	99,89	288.834.883.969,24

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp361.568.165.909,82 atau 94,16% dari anggarannya sebesar Rp384.013.162.715,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 57 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
A	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	370.888.950.640,00	349.147.288.504,00	94,14	272.954.784.462,28
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	83.403.816.215,00	75.527.010.573,33	90,56	83.614.403.823,45
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	12.639.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	203.961.500,00	189.873.600,00	93,09	288.550.500,00
4	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	78.461.587.470,00	74.015.538.525,49	94,33	1.055.810.900,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	90.572.005,00	90.572.005,00	100,00	595.197.063,33
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.865.323.700,00	13.048.561.057,00	94,11	44.911.345.288,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	155.783.255.257,00	152.096.990.959,00	97,63	3.513.937.395,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	16.637.318.665,00	15.468.689.185,00	92,98	921.414.600,00
9	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	286.935.000,00	280.168.022,00	97,64	76.618.050.161,37
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	90.000.000,00	89.360.000,00	99,29	15.982.106.380,13
11	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	86.430.153,00	86.106.153,00	99,63	709.800.000,00
12	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.830.000.000,00	1.742.697.450,00	95,23	833.322.893,00
13	Belanja Modal Bangunan Terbuka	4.906.950.350,00	4.674.397.850,00	95,26	408.190.200,00
14	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Belanja	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
15	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.070.960.825,00	620.960.825,00	57,98	7.105.206.650,00
16	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	11.457.700.000,00	10.767.058.300,00	93,97	31.314.103.470,00
17	Belanja Modal Bangunan Parkir	299.000.000,00	296.804.000,00	99,27	960.603.646,00
18	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	152.500.000,00	152.500.000,00	100,00	4.122.741.492,00
B	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	11.000.907.830,00	10.842.112.080,00	98,56	11.831.269.000,00
1	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	10.985.190.700,00	10.826.394.950,00	98,55	11.831.269.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	15.717.130,00	15.717.130,00	100,00	0,00
C	Belanja Modal Candi / Tugu Peringatan/Prasasti	336.338.695,00	240.241.925,00	71,43	144.145.155,00
1	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	336.338.695,00	240.241.925,00	71,43	144.145.155,00
D	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.786.965.550,00	1.338.523.400,00	74,90	4.120.637.140,00
1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	0,00	0,00	0,00	815.247.540,00
2	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	616.000.000,00	314.278.000,00	51,02	567.560.850,00
3	Belanja Modal Pagar	1.120.665.550,00	999.004.000,00	89,14	2.495.676.250,00
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	50.300.000,00	25.241.400,00	50,18	242.152.500,00
	Jumlah	384.013.162.715,00	361.568.165.909,82	94,16	289.050.835.757,28

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp810.833.899.571,00 dengan realisasi sebesar Rp747.812.255.898,46 atau 92,23%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 58 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Tahun 2022	Tahun 2022		Tahun 2021
1	Belanja Modal Jalan Provinsi	673.122.533.590,00	622.469.376.497,46	92,47	888.145.660.612,43
2	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	85.009.653.438,00	81.355.693.440,00	95,70	1.670.400.700,00
3	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	0,00	0,00	0,00	161.748.678.956,21
4	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	21.671.108.001,00	21.200.877.150,00	97,83	18.130.901.102,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.797.186.928,60
6	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	3.420.000.000,00	0,00	0,00	1.986.043.506,18
7	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	194.299.178,00	194.299.178,00	100,00	3.691.684.384,00
8	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.723.369.464,00	3.149.759.000,00	84,59	20.707.582.820,00
9	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	230.341.350,00
10	belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	399.264.600,00	379.544.450,00	0,00	92.370.400,00
11	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	0,00	589.037.000,00
12	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	21.529.583.300,00	17.645.762.850,00	81,96	2.252.115.278,00
13	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.289.758.500,00
14	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	924.284.015,00
15	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
16	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	0,00	0,00	0,00	24.295.000,00
17	Belanja Modal Instalasi Lain	500.000.000,00	390.616.640,00	78,12	625.486.808,00
18	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
19	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.264.088.000,00	1.026.326.693,00	81,19	227.830.000,00
20	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	198.929.500,00
JUMLAH		810.833.899.571,00	747.812.255.898,46	92,23	1.107.398.086.860,42

Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 59 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per SKPD

(dalam rupiah)

No	OPD	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Dinas Pendidikan	175.000.000,00	174.436.500,00	99,68	24.295.000,00
2	Dinas Kesehatan (SKPD)	89.088.000,00	89.088.000,00	100	3.534.606.500,00
3	RS Siti Fatimah	500.000.000,00	390.616.640,00	78,12	487.269.608,00
4	RS Ernaldi Bahar (BLUD)	150.000.000,00	0,00	0,00	198.929.500,00
5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	47.517.624.543,00	42.570.242.628,00	89,59	46.356.738.520,00
6	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	755.794.692.028,00	703.825.069.937,46	93,12	1.049.894.339.568,64
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	353.970.648,78
8	Dinas Kelautan Dan Perikanan	5.757.495.000,00	0,00	0,00	6.358.362.315,00
9	Badan Kepegawaian	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Sekretariat DPRD	800.000.000,00	762.802.193,00	95,35	0,00
11	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	138.217.200,00
12	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	51.358.000,00
Jumlah		810.983.899.571,00	747.812.255.898,46	92,21	1.107.398.086.860,42

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp75.469.945.790,00 atau 90,87% dari anggarannya sebesar Rp83.054.943.843,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 60 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
A	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	43.745.696.000,00	38.045.036.386,00	86,97	38.811.650.567,00
1	Belanja Modal Buku Umum	43.522.326.000,00	37.822.291.310,00	86,90	38.692.175.567,00
2	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	130.000.000,00	129.747.500,00	99,81	119.475.000,00
B	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	93.370.000,00	92.997.576,00	99,60	189.500.000,00
1	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	93.370.000,00	92.997.576,00	99,60	89.071.216,00
C	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.549.375.000,00	1.654.049.500,00	106,76	1.120.496.780,00
1	Belanja Modal Alat Musik	10.000.000,00	9.700.000,00	97,00	597.864.780,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	1.539.375.000,00	1.533.200.000,00	99,60	522.632.000,00
D	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	133.200.000,00	111.149.500,00	83,45	171.419.000,00

No	Belanja	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	133.200.000,00	111.149.500,00	83,45	144.700.000,00
2	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	26.719.000,00
E	Belanja Modal Hewan Piaraan	0,00	0,00	0,00	319.250.000,00
1	Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya	0,00	0,00	0,00	319.250.000,00
F	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	30.070.222.845,00	28.113.334.345,00	93,49	32.958.916.600,00
1	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	30.070.222.845,00	28.113.334.345,00	93,49	32.958.916.600,00
G	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	7.556.449.998,00	7.657.525.559,00	101,34	7.036.597.745,00
1	Belanja Modal Software	1.309.637.600,00	1.282.291.425,00	97,91	4.794.692.370,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	147.785.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	6.246.812.398,00	6.375.234.134,00	102,06	2.094.120.375,00
	Jumlah	83.054.943.843,00	75.469.945.790,00	90,87	80.696.901.908,00

Dalam rincian belanja modal Aset Tetap lainnya terdapat belanja modal aset tidak berwujud yang seharusnya dianggarkan dalam belanja modal aset lainnya dengan nilai anggaran dan realisasi Rp7.556.449.998,00 dan direalisasikan sebesar Rp7.657.525.559,00 atau 101,34%. Atas kesalahan penganggaran tersebut telah dilakukan koreksi pencatatan atas aset lainnya pada neraca per 31 Desember 2022.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD terdapat pada tabel berikut.

Tabel 61 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)

No	OPD	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	Dinas Pendidikan	44.915.071.000,00	39.158.893.755,00	87,18	40.025.472.128,00
2	Dinas Kesehatan (SKPD)	0,00	0,00	0,00	1.726.452.800,00
3	Dinas Kesehatan (BLUD)	3.725.027.408,00	4.027.130.000,00	108,11	645.856.875,00
4	RS Ernaldi Bahar (BLUD)	0,00	0,00	0,00	58.300.000,00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	1.261.649.345,00	1.059.626.500,00	83,99	1.345.380.700,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	77.233.434,00	77.233.434,00	100,00	84.915.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	49.250.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian (SKPD)	0,00	0,00	0,00	48.500.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	41.690.000,00
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	574.000.000,00	541.322.000,00	94,31	0,00

No	OPD	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
11	Badan Kepegawaian Daerah	80.000.000,00	79.775.700,00	99,72	0,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	127.111.100,00	126.067.500,00	99,18	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	120.000.000,00	119.635.000,00	99,70	308.724.000,00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	241.914.304,00	129.426.000,00	53,50	193.025.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	311.949.000,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	324.337.252,00	309.500.000,00	95,43	268.750.000,00
17	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	845.600.000,00	820.233.500,00	97,00	584.541.220,00
18	Dinas Perpustakaan	410.000.000,00	409.197.631,00	99,80	415.805.755,00
19	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	698.000.000,00	696.500.000,00	99,79	49.500.000,00
20	Sekretariat Daerah	28.470.000.000,00	26.743.722.270,00	93,94	32.656.139.900,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	175.000.000,00	166.435.000,00	95,11	384.302.600,00
22	Badan Pendapatan Daerah	500.000.000,00	497.058.000,00	99,41	247.335.000,00
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (SKPD)	90.000.000,00	89.299.500,00	99,22	88.679.800,00
24	Sekretariat DPRD	380.000.000,00	378.890.000,00	99,71	1.135.613.130,00
25	Badan Penghubung	0,00	0,00	0,00	26.719.000,00
Jumlah		83.054.943.843,00	75.469.945.790,00	90,87	80.696.901.908,00

Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak menganggarkan Belanja Modal BLUD sebagai akun tersendiri. Anggaran dan realisasi Belanja Modal BLUD telah dianggarkan pada masing masing akun belanja modal sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Belanja Modal BLUD yang telah dianggarkan pada masing-masing akun belanja modal adalah sebesar Rp199.356.545.956,00 dengan realisasi sebesar Rp208.167.274.106 atau 104,42%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 62 Rincian Realisasi Belanja Modal BLUD

(dalam rupiah)

No	OPD	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
1	RS. Mata (BLUD)	7.000.000.000,00	6.891.496.904,00	98,45	314.912.011,00
2	RS. Paru-Paru (BLUD)	235.000.000,00	181.649.000,00	77,30	32.242.200,00
3	RS. Gigi Dan Mulut (BLUD)	1.448.310.917,00	1.280.237.619,00	88,40	628.300.139,00
4	RS. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD)	181.073.235.039,00	190.847.987.802,00	105,40	12.623.853.150,54
5	RS. Dr Ernaldi Bahar (BLUD)	2.300.000.000,00	1.826.494.397,00	79,41	2.951.508.039,00
6	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (BLUD)	6.500.000.000,00	6.344.290.106,00	97,60	7.592.514.622,33
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BLUD)	800.000.000,00	795.118.278,00	99,39	1.300.000.000,00
Jumlah		199.356.545.956,00	208.167.274.106,00	104,42	25.443.330.161,87

Sedangkan rincian Belanja Modal BLUD per jenis belanja berdasarkan LRA pada masing-masing BLUD terdapat pada tabel berikut.

Tabel 63 Rincian Belanja Modal BLUD per Jenis

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal BLUD	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	RS. Mata	6.444.790.240,00	446.706.664,00	0,00	0,00	6.891.496.904,00
2	RS. Paru-paru	181.649.000,00	0,00	0,00	0,00	181.649.000,00
3	RS.Gigi dan Mulut	1.280.237.619,00	0,00	0,00	0,00	1.280.237.619,00
4	RSUD Siti Fatimah	119.618.855.702,00	66.811.385.460,00	390.616.640,00	4.027.130.000,00	190.847.987.802,00
5	RS. Ernaldi Bahar	1.429.200.937,00	397.294.000,00	0,00	0,00	1.826.494.937,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	6.344.290.106,00	0,00	0,00	0,00	6.344.290.106,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD)	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
Jumlah		136.099.023.604,00	67.655.386.124,00	390.616.640,00	4.027.130.000,00	208.172.156.368,00

Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak mengganggu Belanja Modal BOS sebagai akun tersendiri. Anggaran dan realisasi Belanja Modal BOS telah dianggarkan pada masing masing akun belanja modal sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Belanja Modal BOS yang telah dianggarkan pada masing-masing akun belanja modal sebesar Rp38.200.943.191,00 untuk belanja Peralatan dan Mesin, dan Rp37.615.993.755,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dengan rincian per jenis sekolah pada tabel berikut.

Tabel 64 Rincian Belanja Modal BOS-per Kabupaten/Kota

(dalam rupiah)

No	Kab/Kota	SLB	SMA	SMK	Jumlah
1	Kota Palembang	299.914.100	4.621.817.214	2.179.735.315	7.101.466.629
2	Kota Prabumulih	122.050.000	612.693.050	489.516.000	1.224.259.050
3	Kota Lubuk Linggau	61.000.000	379.823.000	422.078.000	862.901.000
4	Kota Pagaram	14.800.000	649.609.993	76.725.100	741.135.093
5	Kab. Banyuasin	105.000.000	2.206.886.737	880.421.000	3.192.307.737
6	Kab. Musi Banyuasin	61.750.000	1.447.976.100	1.435.402.000	2.945.128.100
7	Kab. Ogan Ilir	29.621.100	1.343.243.600	833.345.254	2.206.209.954
8	Kab. Ogan Komering Ilir	89.830.000	1.884.490.055	1.285.409.150	3.259.729.205
9	Kab. Ogan Komering Ulu	32.400.000	1.541.897.784	575.596.950	2.149.894.734
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	0,00	961.363.700	142.750.000	1.104.113.700
11	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	33.814.500	1.223.959.000	1.023.943.500	2.281.717.000
12	Kab. Muara Enim	31.000.000	1.390.748.443	1.203.087.250	2.624.835.693
13	Kab. Musi Rawas	30.400.000	1.590.246.500	350.931.400	1.971.577.900
14	Kab. Musi Rawas Utara	0,00	559.767.000	229.151.230	788.918.230
15	Kab. Lahat	41.100.000	1.002.894.100	1.244.025.900	2.288.020.000

No	Kab/Kota	SLB	SMA	SMK	Jumlah
16	Kab. Empat Lawang	39.900.000	1.181.736.000	754.352.800	1.975.988.800
17	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	37.000.000	1.119.059.950	326.680.416	1.482.740.366
Jumlah		1.029.579.700	23.718.212.226	13.453.151.265	38.200.943.191

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal BOS adalah untuk pembelian buku, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 65 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-BOS

(dalam rupiah)

No	Kab/Kota	SLB	SMA	SMK	Jumlah
1	Kota Palembang	97.785.850	7.532.052.054	1.631.131.400	9.260.969.304
2	Kota Prabumulih	0,00	823.689.290	116.665.000	940.354.290
3	Kota Lubuk Linggau	0,00	1.543.604.300	820.095.000	2.363.699.300
4	Kota Pagaralam	0,00	443.052.922	101.892.000	544.944.922
5	Kab. Banyuasin	7.200.965	2.205.879.056	960.056.000	3.173.136.021
6	Kab. Musi Banyuasin	6.000.000	2.488.586.300	1.330.123.000	3.824.709.300
7	Kab. Ogan Ilir	0,00	1.181.365.600	348.103.900	1.529.469.500
8	Kab. Ogan Komering Ilir	0,00	1.300.206.256	595.108.500	1.895.314.756
9	Kab. Ogan Komering Ulu	15.000.000	1.202.084.400	302.114.000	1.519.198.400
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	0,00	989.746.000	299.303.000	1.289.049.000
11	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	9.500.000	950.760.907	312.359.300	1.272.620.207
12	Kab. Muara Enim	5.000.000	1.743.798.800	497.106.250	2.245.905.050
13	Kab. Musi Rawas	0,00	2.228.350.432	217.862.000	2.446.212.432
14	Kab. Musi Rawas Utara	0,00	1.515.466.000	163.051.000	1.678.517.000
15	Kab. Lahat	0,00	898.904.900	438.284.000	1.337.188.900
16	Kab. Empat Lawang	25.000.000	1.063.953.373	274.798.000	1.363.751.373
17	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	4.000.000	721.382.000	205.572.000	930.954.000
Jumlah		169.486.815	28.832.882.590	8.613.624.350	37.615.993.755

4.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp19.553.804.801,00 atau 97,56% dari anggarannya sebesar Rp20.023.352.300,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp14.055.098.162,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.498.706.639,00 atau 39,12%. Rincian Belanja Tak Terduga terdapat pada tabel berikut.

Tabel 66 Belanja Tak Terduga Tahun 2022

No	Uraian	SK Gubernur/Peraturan Menteri Keuangan	Jumlah
1	Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Uang Kesalahan Setor BBNKB1 dan PKB PT. Indotruck Utama	Nomor: 235/KPTS/BPKAD/2022 tgl 23 Maret 2022	3.210.510.000,00
2	Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Uang Kesalahan Setor PT. Perdana Abadi Perkasa	Nomor: 236/KPTS/BPKAD/2022 tgl 23 Maret 2022	728.430.601,00
3	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Keuangan kepada Individu/Keluarga yang Mengalami Bencana Kebakaran di Kabupaten Banyuasin	Nomor: 295/KPTS/BPKAD/2022 tgl 22 April 2022	240.000.000,00

No	Uraian	SK Gubernur/Peraturan Menteri Keuangan	Jumlah
4	Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Uang Kelebihan Setor pembayaran Pajak Daerah BBNKB dan PKB PT Eka Permata Agung	Nomor: 483/KPTS/BPKA/2022 tgl 8 Juli 2022	241.427.200,00
5	Belanja Tidak Terduga Untuk pengembalian Uang Kelebihan Setor Pembayaran CV.OSA atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumsel yang disetor ke RKUD Prov.Sumsel	Nomor: 609/KPTS/BPKAD/2022 tgl 23 Agustus 2022	500.000.000,00
6	Belanja Tidak Terduga sebagai Belanja Wajib Perlindungan Sosial untuk Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi	Nomor: 762/KPTS/BPKAD/2022 tgl 14 Oktober 2022	997.250.000,00
7	Belanja Tidak Terduga sebagai Belanja Wajib Perlindungan Sosial untuk Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi	Nomor: 762/KPTS/BPKAD/2022 tgl 14 Oktober 2022	3.500.000.000,00
8	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Keuangan kepada Individu/Keluarga yang Mengalami Bencana Kebakaran di Kelurahan1 Ilir kec.IT II Kota Palembanag	Nomor: 810/KPTS/BPKAD/2022 tgl 03 November 2022	95.000.000,00
9	Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Permodalan kepada para Pedagang yang mengalami Korban Bencana Kebakaran di Kelurahan 17 Ilir Kec. IT I Kota Palembang	Nomor: 897/KPTS/BPKAD/2022 tgl 02 Desember 2022	411.000.000,00
10	Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Biaya Rekonstruksi Kios Pasar Cinde yang mengalami Kebakaran di Kel.17 ilir Kec.IT.I kota Palembang	Nomor: 897/KPTS/BPKAD/2022 tgl 02 Desember 2022	200.000.000,00
11	Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian sisa dana kas BOS tahun 2019 melalui mekanisme pemotongan dana alokasi umum Tahun Anggaran 2022	PMK Nomor 10/KM.7/2022 tgl 08 April 2022	9.430.187.000,00
Jumlah			19.553.804.801,00

4.1.2.4 Belanja Transfer

Transfer Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.858.093.535.599,00 dengan realisasi sebesar Rp3.608.374.714.680,34 atau 93,53%, naik sebesar Rp763.565.169.634,38 atau 78,84% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.844.809.545.045,96 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 67 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

No	Transfer	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Rasio %	Realisasi Tahun 2021
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.955.755.318.322,00	1.914.984.234.446,00	97,92	1.579.375.912.863,60
-	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.955.755.318.322,00	1.914.984.234.446,00	97,92	1.579.375.912.863,60
2	Transfer Bantuan Keuangan	1.902.338.217.277,00	1.693.390.480.234,34	89,02	1.265.433.632.182,36
-	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	23.176.574.691,00	1.000.000.000,00	4,31	1.258.433.632.182,36

-	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
-	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.834.661.642.586,00	1.687.890.480.234,34	92,00	0,00
-	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	9.215.412.000,00
Jumlah		3.858.093.535.599,00	3.608.374.714.680,34	93,53	2.844.809.545.045,96

1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp1.914.984.234.446,00 merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp397.432.640.545,00 dan Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan kepada kabupaten/kota sebesar Rp1.517.551.593.901,00.

Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp397.432.640.545,00 terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok kurang salur Tahun 2021 sebesar Rp74.813.521.981,00 dan Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2022 untuk alokasi bulan Januari sampai dengan Desember sebesar Rp322.619.118.564,00 dengan rincian per kabupaten/kota terdapat pada tabel berikut.

Tabel 68 Rincian Transfer DBH Pajak Rokok Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Kurang salur 2021	Alokasi 2022	Total Penyaluran DBH Pajak Rokok di Tahun 2022
1	Kota Palembang	11.684.784.874,61	45.763.332.192,00	57.448.117.066,61
2	Kab Muba	5.330.546.184,99	22.399.255.626,00	27.729.801.810,99
3	Kab Banyuasin	6.738.861.172,08	27.122.399.522,00	33.861.260.694,08
4	Kab OKI	6.993.288.255,45	26.561.042.256,00	33.554.330.511,45
5	Kab Ogan Ilir	4.310.653.974,15	17.366.397.376,00	21.677.051.350,15
6	Kab OKU	2.631.426.805,05	15.992.039.932,00	18.623.466.737,05
7	Kab OKU Selatan	3.506.679.812,91	15.856.539.902,00	19.363.219.714,91
8	Kab OKU Timur	5.629.459.654,03	22.960.612.892,00	28.590.072.546,03
9	Kab Muaraenim	5.739.583.683,75	22.128.255.566,00	27.867.839.249,75
10	Kota Prabumulih	3.053.692.458,98	11.888.324.742,00	14.942.017.200,98
11	Kab Lahat	4.052.969.947,59	16.882.468.699,00	20.935.438.646,59
12	Kota Pagaralam	1.113.252.942,60	10.746.253.063,00	11.859.506.005,60
13	Kab MURA	4.022.047.864,60	16.824.397.257,00	20.846.445.121,60
14	Kota Lubuk Linggau	1.127.289.197,70	12.914.253.540,00	14.041.542.737,70
15	Kab Empat Lawang	2.699.448.708,20	13.301.396.482,00	16.000.845.190,20
16	Kab Muratara	3.105.229.263,65	11.985.110.480,00	15.090.339.743,65

No	Kabupaten/Kota	Kurang salur 2021	Alokasi 2022	Total Penyaluran DBH Pajak Rokok di Tahun 2022
17	Kab. PALI	3.074.307.180,66	11.927.039.037,00	15.001.346.217,66
Jumlah total		74.813.521.981,00	322.619.118.564,00	397.432.640.545,00

Sedangkan rincian realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan sebesar Rp1.517.551.593.901,00 terdiri dari kurang salur tahun 2021 sebesar Rp137.662.115.490,00 dan penyaluran DBH pajak kendaraan alokasi tahun 2022 sebesar Rp1.379.889.478.411,00 rincian terdapat pada tabel berikut.

Tabel 69 Rincian Transfer DBH Pajak Kendaraan Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Kurang Salur 2021	Alokasi 2022	Total Penyaluran DBH Pajak Daerah di Tahun 2022
1	Kota Palembang	34.269.096.711,00	287.052.691.434,98	321.321.788.145,98
2	Kab Muba	9.308.360.377,00	99.131.446.378,79	108.439.806.755,79
3	Kab Banyuasin	8.031.128.310,00	76.138.544.539,21	84.169.672.849,21
4	Kab OKI	9.475.725.158,00	100.988.943.714,74	110.464.668.872,74
5	Kab Ogan Ilir	5.659.307.771,00	54.467.465.185,25	60.126.772.956,25
6	Kab OKU	6.038.044.424,00	57.139.931.774,21	63.177.976.198,21
7	Kab OKU Selatan	4.273.605.500,00	41.109.617.989,00	45.383.223.489,00
8	Kab OKU Timur	5.657.003.833,00	54.636.089.764,45	60.293.093.597,45
9	Kab Muaraenim	13.610.740.910,00	186.187.655.027,78	199.798.395.937,78
10	Kota Prabumulih	5.760.063.140,00	55.419.391.854,12	61.179.454.994,12
11	Kab Lahat	8.195.014.302,00	99.712.824.256,78	107.907.838.558,78
12	Kota Pagaralam	4.092.063.047,00	40.301.391.349,00	44.393.454.396,00
13	Kab MURA	5.479.369.865,00	54.309.604.204,81	59.788.974.069,81
14	Kota Lubuk Linggau	5.625.250.638,00	52.142.862.519,51	57.768.113.157,51
15	Kab Empat Lawang	3.826.488.954,00	37.883.331.817,03	41.709.820.771,03
16	Kab Muratara	4.105.450.805,00	41.312.928.885,97	45.418.379.690,97
17	Kab. PALI	4.255.401.745,00	41.954.757.715,37	46.210.159.460,37
Jumlah total		137.662.115.490,00	1.379.889.478.411,00	1.517.551.593.901,00

2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 1.693.390.480.234,34 atau 89,02% dari anggarannya sebesar Rp1.902.338.217.277,00 yang terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp1.688.890.480.234,34 dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp4.500.000.000,00.

a. Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah

Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.688.890.480.234,34 dari anggaran sebesar Rp1.711.067.054.925,34 yang merupakan transfer bantuan keuangan kepada kabupaten/kota berupa Bantuan Keuangan Umum yang tidak terealisasi, Bantuan Keuangan Khusus

sebesar Rp1.687.890.480.234,34 dan Bantuan Keuangan untuk kurang salur Jamsoskes sebesar Rp1.000.000.000,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 70 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus dan Kurang Salur Jamsoskes

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Kurang Salur Jamsoskes	Bankeu Khusus	Jumlah
1	Kota Palembang	0,00	138.520.507.889,89	138.520.507.889,89
2	Kab Muba	0,00	13.653.059.000,00	13.653.059.000,00
3	Kab Banyuasin	0,00	113.100.806.505,90	113.100.806.505,90
4	Kab OKI	1.000.000.000,00	103.653.871.400,00	104.653.871.400,00
5	Kab Ogan Ilir	0,00	108.600.995.392,00	108.600.995.392,00
6	Kab OKU	0,00	47.492.352.254,00	47.492.352.254,00
7	Kab OKU Selatan	0,00	82.658.077.077,51	82.658.077.077,51
8	Kab OKU Timur	0,00	303.785.596.707,11	303.785.596.707,11
9	Kab Muaraenim	0,00	26.586.026.610,00	26.586.026.610,00
10	Kota Prabumulih	0,00	35.074.995.200,00	35.074.995.200,00
11	Kab Lahat	0,00	161.584.492.587,00	161.584.492.587,00
12	Kota Pagaralam	0,00	61.519.035.000,00	61.519.035.000,00
13	Kab MURA	0,00	101.831.244.624,00	101.831.244.624,00
14	Kota Lubuk Linggau	0,00	77.435.526.800,00	77.435.526.800,00
15	Kab Empat Lawang	0,00	163.144.553.596,93	163.144.553.596,93
16	Kab Muratara	0,00	93.477.466.000,00	93.477.466.000,00
17	Kab. PALI	0,00	55.771.873.590,00	55.771.873.590,00
Jumlah total		1.000.000.000,00	1.687.890.480.234,34	1.688.890.480.234,34

b. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp4.500.000.000,00. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa adalah belanja bantuan keuangan kepada 45 Desa Persiapan di enam Kabupaten di Sumatera Selatan Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 140/KPTS/DPMD/I/2022. Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa per kabupaten/kota terdapat pada tabel berikut.

Tabel 71 Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Persiapan	Besaran Bantuan	Jumlah Diterima
1	Ogan Komering Ilir	16	100.000.000,00	1.600.000.000,00
2	Ogan Komering Ulu	2	100.000.000,00	200.000.000,00
3	Ogan Komering Ulu Timur	20	100.000.000,00	2.000.000.000,00
4	Musi Banyuasin	2	100.000.000,00	200.000.000,00
5	Banyuasin	4	100.000.000,00	400.000.000,00
6	Muara enim	1	100.000.000,00	100.000.000,00
Jumlah total		45		4.500.000.000,00

4.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 72 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Pembiayaan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Rasio %	Realisasi Tahun 2021
1	Penerimaan Pembiayaan	151.946.236.644,00	151.894.033.565,14	99,97	615.159.551.422,81
2	Pengeluaran Pembiayaan	360.000.000.000,00	202.357.225.474,00	56,21	86.000.000.000,00
Pembiayaan netto		(208.053.763.356,00)	(50.463.191.908,86)	24,25	529.159.551.422,81

4.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 73 Rincian Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
A	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021	79.766.152.574,00	79.713.949.495,59	99,93
1,	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	13.231.924,00	0,00	0,00
2	Pelampauan penerimaan PAD-Jasa Giro	0,00	60.277.174,00	0,00
3	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	47.891.209,00	0,00	0,00
4	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	23.462.357.601,00	0,00	0,00
5	Sisa Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	32.892.544.600,53	0,00
6	Sisa lebih Perhitungan Anggaran BLUD	45.734.763.013,00	45.734.763.013,06	100,00
7	Sisa Dana Bos	10.507.908.827,00	1.032.950.323,00	9,83
8	Koreksi Dana Bos	0,00	-6.585.615,00	0,00
B	Penerimaan Pinjaman Daerah	72.180.084.070,00	72.180.084.069,55	100,00
1	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	72.180.084.070,00	72.180.084.069,55	100,00
Jumlah		151.946.236.644,00	151.894.033.565,14	99,97

1. Pelampauan Penerimaan PAD merupakan Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro Sebesar Rp60.277.174,00;

2. Sisa Belanja Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp32.892.544.600,53 adalah saldo kas per 31 Desember 2021 pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp45.734.763.013,06 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Saldo Kas di BLUD RS Ernaldi Bahar sebesar Rp10.524.217.286,00 adalah saldo kas per 31 Desember 2021;
 - b. Saldo Kas di BLUD RS Mata sebesar sebesar Rp17.323.807.330,00 adalah saldo kas per 31 Desember 2021 di rekening BLUD RSK Mata Masyarakat pada rekening Bank Sumsel Babel nomor 140-301-1895;
 - c. Saldo Kas di BLUD RS Paru sebesar 192.515.448,00 adalah saldo kas per 31 Desember 2021 di rekening BLUD RSK Paru pada Bank Sumsel Babel nomor rekening 140-301-1896;
 - d. Saldo Kas di RSK Gigi dan Mulut sebesar Rp1.334.508.488,00 adalah saldo kas per 31 Desember 2021 di rekening BLUD RSK Gigi dan Mulut pada Bank Sumsel Babel nomor 140-301-8501;
 - e. Saldo Kas di RSUD Siti Fatimah sebesar Rp5.928.693.826.16 adalah saldo kas per 31 Desember 2021 di rekening BLUD RSUD Siti Fatimah dengan nomor rekening 140-310-0196 pada Bank Sumsel Babel;
 - f. Saldo Kas di Badan Pelatihan Kesehatan sebesar Rp1.003.577.700,00 adalah saldo kas di rekening BLUD Badan Pelatihan Kesehatan dengan nomor rekening 174-310- 00044 pada Bank Sumsel Babel;
 - g. Saldo Kas di BLUD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) sebesar Rp7.278.821.767,90 adalah saldo kas di rekening dengan nomor 174-301-5001 pada Bank Sumsel Babel; dan
 - h. Saldo Kas di BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) sebesar Rp2.148.621.167,00 adalah saldo kas di rekening dengan nomor 0821818899 pada Bank Negara Indonesia.
4. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.032.950.323,00;
5. Koreksi Kurang Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp6.585.615,00; dan
6. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2022 sebesar Rp72.180.084.069,55 merupakan pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Infrastruktur untuk mengurangi dampak COVID-19 yang berdampak pada ekonomi.

4.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp202.357.225.474,00 dari anggarannya sebesar Rp360.000.000.000,00 yang merupakan Pembayaran Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah.

4.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Tahun 2022 sebesar Rp322.917.042.473,19 yang merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 74 Rincian Perhitungan SiLPA

(dalam rupiah)

No	Perhitungan Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
1	Pendapatan	10.634.451.400.140,00	10.036.955.961.132,74	94,38
2	Belanja	10.426.397.636.784,00	9.663.635.876.750,69	92,68
3	Surplus/ (Defisit)(1-2)	208.053.763.356,00	373.380.234.382,05	179,46
4	Penerimaan pembiayaan	151.946.236.644,00	151.894.033.565,14	99,97
5	Pengeluaran Pembiayaan	360.000.000.000,00	202.357.225.474,00	56,21
6	Pembiayaan netto (4-5)	(208.053.763.356,00)	(50.463.191.908,86)	24,25
	SiLPA (3+6)	0,00	322.917.042.473,19	0,00

Perhitungan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 menunjukkan SiLPA Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing adalah sebesar Rp322.917.042.473,19 dan Rp79.720.535.110,59 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 75 Rincian SiLPA Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Kas di BUD - RKUD Nomor Rekening 140-30-00001 pada Bank Sumsel Babel	274.006.730.562,58	32.892.544.600,53
2	Kas di BUD-Sub RKUD Nomor Rekening 140-30-000001 pada Bank Sumsel Babel	239.887.990,00	47.045.250,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	806.333,00	0,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	30.928.275,00	13.231.924,00
5	Kas di Bendahara BOS dan PSG tidak termasuk utang PFK	596.046.238,00	1.032.950.323,00
6	Koreksi Dana Bos	-6.585.615,00	0,00
7	Kas BLUD	48.049.228.689,61	45.734.763.013,06
	SiLPA	322.917.042.473,19	79.720.535.110,59

1. Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp274.006.730.562,58 adalah saldo kas per 31 Desember 2022 pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor rekening 140.30.00001 pada Bank Sumsel Babel;
2. Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp239.887.990,00 adalah saldo kas per 31 Desember 2022 pada Rekening Kas Umum Daerah-Sub RKUD Provinsi Sumatera Selatan nomor rekening 140.30.000001 pada Bank Sumsel Babel;
3. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp806.333,00 merupakan penerimaan jasa giro rekening UPTD pada Dinas Pendidikan dan UPTD pada Dinas Kehutanan;
4. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp30.928.275,00 adalah saldo kas pada rekening Bendahara Penerimaan SKPD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 76 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan*(dalam rupiah)*

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Perhubungan		
A	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	23.265,00	Telah disetor ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2023
B	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	26.696.010,00	Telah disetor ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2023
C	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	4.209.000,00	Telah disetor ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2023
Jumlah		30.928.275,00	

5. Saldo Kas di Bendahara BOS dan PSG tidak termasuk Utang PFK sebesar Rp596.046.238,00;
6. Koreksi Kurang Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp6.585.615,00;
7. Saldo Kas di Bendaharan BLUD sebesar Rp48.049.228.689,61 merupakan saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut; dan

Tabel 77 Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
1	RS. Dr Ernaldi Bahar	8.345.312.936,00
2	RS. Mata	16.513.299.218,00
3	RS. Paru-Paru	87.197.832,00
4	RS. Gigi Dan Mulut	1.688.410.101,00
5	RS. Umum Daerah Siti Fatimah	7.924.736.487,11
6	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi	1.401.836.704,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	10.669.560.729,50
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.418.874.682,00
Jumlah		48.049.228.689,61

4.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SAL (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan saldo anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 yaitu sebesar Rp79.720.535.110,59.

4.2.1.1 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2021 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp79.713.949.495,59.

4.2.1.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp322.917.042.473,19 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Surplus/(defisit) anggaran	Rp	373.380.234.382,05
2. Pembiayaan netto	Rp	(50.463.191.908,86)
3. SiLPA tahun berjalan	Rp	322.917.042.473,19

Komponen pembentuk SiLPA adalah sebagai berikut.

a	Penerimaan PAD yang tidak tercapai	Rp	(454.484.006.663,26)
b	Penerimaan Dana Perimbangan yang tidak cair	Rp	(131.226.912.861,00)
c	Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang tidak terealisasi	Rp	(23.185.738.483,00)
d	Penerimaan Pembiayaan yang tidak terealisasi	Rp	(52.203.078,86)
e	Pelampauan realisasi Dana Insentif Daerah	Rp	11.401.219.000,00
f	Penghematan Belanja Operasi	Rp	417.855.025.925,93
g	Belanja Modal yang tidak terealisasi	Rp	94.778.515.689,72
h	Belanja Tak terduga yang tidak terealisasi	Rp	469.547.499,00
i	Transfer yang tidak terealisasi	Rp	249.718.820.918,66
j	Pengeluaran Pembiayaan yang tidak terealisasi	<u>Rp</u>	<u>157.642.774.526,00</u>
	SiLPA Tahun Berjalan	Rp	322.917.042.473,19

Adapun saldo kas di Neraca per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp323.265.976.194,19 sehingga terdapat selisih kurang antara SiLPA di LRA dengan saldo kas di Neraca sebesar Rp348.933.721,00 yang merupakan Utang PFK BOS sebesar Rp65.451.310,00, Utang PFK PSG sebesar Rp282.636.446,00 dan Kas Lainnya berupa Rekening Pasif di Dinas Kesehatan sebesar Rp845.965,00.

4.2.1.3 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kurang Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp6.585.615,00 merupakan koreksi tambah saldo awal Dana BOS sebesar Rp2.227.000,00 dan koreksi kurang saldo awal dana PSG sebesar Rp8.812.615,00 pada Dinas Pendidikan.

4.3 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca per 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut.

4.3.1 Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp35.244.953.304.285,71 dan Rp33.308.080.822.030,92 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 78 Rincian Aset Pemerintah per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ (penurunan)
1	Aset lancar	449.200.563.709,10	206.852.240.873,52	242.348.322.835,58
2	Investasi Jangka Panjang	7.464.748.909.687,83	7.442.535.027.852,15	22.213.881.835,68
3	Aset Tetap	24.016.551.323.097,41	22.563.173.385.495,61	1.453.377.937.601,80
4	Aset lainnya	3.314.452.507.791,37	3.095.520.167.809,64	218.932.339.981,73
Jumlah		35.244.953.304.285,71	33.308.080.822.030,92	1.936.872.482.254,79

4.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas dan Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp449.200.563.709,10 dan Rp206.852.240.873,52 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 79 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ (penurunan)
1	Kas dan Bank	323.265.976.194,19	79.801.398.000,59	442.298.300.339,60
2	Piutang	27.010.499.689,98	28.199.000.660,96	(1.188.500.970,98)
3	Penyisihan Piutang	(5.552.879.460,44)	(4.441.184.050,08)	(1.111.695.410,36)
4	Beban Dibayar Dimuka	3.865.882.104,87	3.718.075.722,06	147.806.382,81
5	Persediaan	100.611.085.180,50	99.574.950.539,99	1.036.134.640,51
Jumlah		449.200.563.709,10	206.852.240.873,52	242.348.322.835,58

1. Kas

Kas merupakan saldo Kas yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD, Bendahara pada SKPD, Bendahara BOS dan PSG dan Kas (BUD), BLUD, berupa uang Tunai rekening giro bank, dan tabungan yang seluruhnya merupakan kas daerah. Saldo kas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp323.265.976.194,19 dan Rp79.801.398.000,59 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 80 Rincian Saldo Kas

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Kas di Kas Daerah	274.006.730.562,58	23.462.357.600,53
2	Kas di Bendahara Penerimaan	30.928.275,00	13.231.924,00
3	Kas di bendahara Pengeluaran	806.333,00	0,00
4	Kas di BLUD	48.049.228.689,61	45.734.763.013,06
5	Kas di Bendahara BOS	937.548.379,00	1.112.967.254,00
6	Kas Lainnya	240.733.955,00	9.478.078.209,00
Jumlah		323.265.976.194,19	79.801.398.000,59

1) Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp274.006.730.562,58 dan Rp23.462.357.600,53 yang merupakan saldo kas pada Rekening Kas Umum Daerah di Bank SumselBabel Nomor 140-30-00001 sebesar Rp274.014.275.551,58 dikurangi koreksi pembukuan transaksi sebesar Rp7.544.989,00 dengan pendebitan rekening RKUD Provinsi Sumatera Selatan ke Rekening BLUD Rumah Sakit Ernaldi Bahar berdasarkan surat dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar Nomor 900/00019/RS.ERBA/2023 tanggal 2 Januari 2023.

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp30.928.275,00 dan Rp13.231.924,00 merupakan pendapatan retribusi daerah pada Dinas Perhubungan yang disetor ke kas daerah pada bulan Januari 2022 dengan uraian pada tabel berikut:

Tabel 81 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

No	SKPD	2022	2021
1	Dinas Perhubungan		
-	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Terminal	4.209.000,00	1.943.000,00
-	Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhan	23.265,00	13.035,00
-	Retribusi Jasa Pelayanan Penyeberangan Orang	26.696.010,00	11.275.889,00
Jumlah		30.928.275,00	13.231.924,00

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp806.333,00 dan Rp0,00, merupakan penerimaan jasa

giro rekening UPTD pada Dinas Pendidikan dan UPTD pada Dinas Kehutanan yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor ke Kas Daerah.

Tabel 82 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	SKPD	2022
1	Dinas Pendidikan	52.886,00
-	Bendahara Pengeluaran Bidang SMA dan PKLK	29.426,00
-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang SMK	23.460,00
2	Dinas Kehutanan	753.447,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah I Meranti	90.193,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis	0,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah III Palembang	0,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding	17.288,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah IV Lempuing Mesuji	12.863,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti	10.000,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka	0,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah VIII Semendo	15.031,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji	10.720,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah X Dempo	10.000,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah	561.324,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah XII Benakat	0,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong	14.546,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah XIV Rawas	11.482,00
		806.333,00

4) Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp48.049.228.689,61 dan Rp45.734.763.013,06 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83 Rincian Kas di BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2022	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir per 31 Des 2022
1	RS. Dr Ernaldi Bahar	10.524.217.286,00	27.167.110.807,00	29.346.015.157,00	8.345.312.936,00
2	RS. Mata	17.323.807.330,00	34.058.571.105,00	34.869.079.217,00	16.513.299.218,00
3	RS. Paru-Paru	192.515.448,00	529.428.105,00	634.745.721,00	87.197.832,00
4	RS. Gigi Dan Mulut	1.334.508.488,00	4.854.386.255,00	4.500.484.642,00	1.688.410.101,00
5	RSUD. Siti Fatimah	5.928.693.826,16	102.646.962.699,95	100.650.920.039,00	7.924.736.487,11
6	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi	1.003.577.700,00	1.844.536.173,00	1.446.277.169,00	1.401.836.704,00
7	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	7.278.821.767,90	27.089.098.028,00	23.698.359.066,40	10.669.560.729,50
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.148.621.167,00	16.294.015.742,00	17.023.762.227,00	1.418.874.682,00
Jumlah		45.734.763.013,06	214.484.108.914,95	212.169.643.238,40	48.049.228.689,61

a) RS. Dr Ernaldi Bahar

Saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.345.312.936,00 merupakan saldo kas di rekening Bank SumselBabel dengan nomor 140-30-11894 sebesar

Rp8.329.809.958,00, saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp7.957.989,00 dan saldo kas terkoreksi yang terdebit oleh Bank Sumsel sebesar Rp7.544.989,00.

b) RS.Khusus Mata

Saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.513.299.218,00 adalah saldo kas direkening Bank SumselBabel nomor 140-301-1895.

c) RS.Khusus Paru

Saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.197.832,00 adalah saldo kas di rekening Nomor 140-301-1896.

d) RS. Gigi dan Mulut

Saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.688.410.101,00 adalah saldo kas di rekening Nomor 140-301-8501.

e) RS. Umum Daerah Siti Fatimah

Saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.924.736.487,11 adalah saldo kas di rekening Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 140-310-0196 sebesar Rp7.898.369.769,11, saldo kas di Bank Mandiri Nomor Rekening 113-0044-888844 sebesar Rp14.132.637,47 dan saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp12.234.080,53.

f) Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.401.836.704,00 adalah saldo kas di rekening Nomor rekening 174-310-00044 pada Bank SumselBabel.

g) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.669.560.729,50 adalah saldo kas di rekening nomor rekening 174-301-5001 pada Bank SumselBabel.

h) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.418.874.682,00 adalah saldo kas di rekening pada Bank Negara Indonesia.Tbk nomor rekening 0821818899.

5) Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp937.548.379,00 dan Rp1.112.967.254,00. Saldo Kas tersebut terdiri dari sisa saldo kas di Bendahara BOS Transfer Pusat SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri sebesar Rp482.437.379,00 dan sisa saldo kas di Bendahara BOS Daerah (PSG) sebesar Rp455.111.000,00 yang merupakan saldo rekening Bank Dana BOS sebesar Rp117.896.978,00, saldo rekening Bank Dana PSG sebesar Rp235.538.495,00, saldo tunai di bendahara BOS sebesar Rp309.788.291,00, saldo tunai di bendahara PSG sebesar Rp429.259,00 dan pajak terutang Dana BOS sebesar Rp54.752.110,00 serta pajak terutang Dana PSG sebesar Rp219.143.246,00.

1) Kas di Bendahara BOS (Pusat)

Pada Tahun Anggaran 2022 telah direalisasikan Belanja BOS Pusat pada 462 sekolah yang ada di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (SMA/SMK/SLB Negeri) sebesar Rp371.153.993.029,00 yang menggunakan dana penyaluran dari pusat di tahun 2022 sebesar Rp370.669.905.593,00 dan sisa kas BOS murni Tahun 2021 sebesar Rp901.069.915,00 sehingga terdapat sisa dana BOS yang belum disalurkan sebesar Rp416.982.479,00. Saldo akhir dana BOS sebesar Rp482.437.379,00 adalah sisa penyaluran dana BOS sebesar Rp416.982.479,00 ditambah PFK terutang Tahun 2022 sebesar Rp65.451.310,00 dan Jasa Giro yang belum disetor sebesar Rp3.590,00.

Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS (Pusat) per Sekolah terdapat pada **Lampiran 13**.

Tabel 84 Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS (Pusat)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal 2021 Audited	904.663.166,00
2	Koreksi Saldo Awal	2.227.000,00
3	Penerimaan	370.669.905.593,00
4	Pengeluaran	(371.153.993.029,00)
5	Realisasi Belanja dari SiLPA 2021	0,00
6	Pengurang Utang PFK Lainnya	(920,00)
7	Pengurang Utang Pajak PFK	(1,00)
8	Pengembalian SiLPA ke RKUD	(279,00)
9	Pengembalian Sisa Belanja BOS 2022 ke RKUD	(5.819.051,00)
10	Penambahan Kas BOS dari Jasa Giro	3.590,00
11	Penambahan Utang Pajak BOS 2022	54.752.110,00
12	Penambahan Utang PFK Lainnya-BOS	10.699.200,00
13 = 1 sd. 12	SALDO AKHIR KAS BOS NERACA per 31 Desember 2022	482.437.379,00
terdiri dari :	- Saldo Rek Bank	117.896.978,00
	- Saldo Tunai	309.788.291,00
	- Sisa Utang Pajak 2022	54.752.110,00

Saldo akhir kas BOS sebesar Rp904.663.166,00 terdapat pada masing-masing sekolah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85 Daftar Saldo Kas BOS pada Sekolah

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Saldo rek. Giro per 31 Des. 2022	Saldo Tunai	Utang Pajak	Jumlah
1	SMAN 1 Pulau Rimau	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2	SMAN 1 Makarti Jaya	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3	SMAN 2 Babat Toman	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
4	SMAN 1 Sekayu	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5	SMAN 1 Babat Toman	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
6	SMAN 1 Lais	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
7	SMAN 2 Sungai Keruh	49.820,00	0,00	0,00	49.820,00
8	SMAN 1 Lawang Wetan	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
9	SMAN 4 Sekayu	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

No	Nama Sekolah	Saldo rek. Giro per 31 Des. 2022	Saldo Tunai	Utang Pajak	Jumlah
10	SMAN 2 Sanga Desa	0,00	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00
11	SMAN 4 Lais	0,00	2.160.100,00	5.702.161,00	7.862.261,00
12	SMAN 3 Sungai Keruh	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13	SMAN Terawas	0,00	385.395,00	0,00	385.395,00
14	SMAN Jayaloka	0,00	14.449,00	0,00	14.449,00
15	SMAN Karya Sakti	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
16	SMAN 1 Rantau Panjang	0,00	299.999,00	28.152.376,00	28.452.375,00
17	SMAN 1 Pulau Beringin	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
18	SMAN 3 Negeri Tanah Abang	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19	SMAN 2 Negeri Lubuklinggau	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20	SMAN 3 Pagar Alam	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
21	SMAN 15 Palembang	0,00	5.161.900,00	0,00	5.161.900,00
22	SMAN 19 Palembang	0,00	75,00	0,00	75,00
23	SMAN Sumatera Selatan	308,00	458,00	0,00	766,00
24	SMKN 1 Banyuasin III	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25	SMKN 1 Makarti Jaya	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
26	SMKN 1 Muara Telang	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00
27	SMKN Spp Sembawa	0,00	10.520.500,00	0,00	10.520.500,00
28	SMKN 1 Lahat	0,00	7.817.500,00	0,00	7.817.500,00
29	SMKN 3 Lahat	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
30	SMKN 2 Sekayu	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
31	SMKN 1 Sekayu	0,00	21.360.000,00	0,00	21.360.000,00
32	SMKN Tugumulyo	0,00	45.706,00	0,00	45.706,00
33	SMKN Muara Beliti	0,00	240.764,00	0,00	240.764,00
34	SMKN 2 Pertanian Tugumulyo	107.144.060,00	0,00	0,00	107.144.060,00
35	SMKN 3 Kayuagung	0,00	0,00	10.848.433,00	10.848.433,00
36	SMKN 1 Mesuji Raya	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
37	SMKN 1 Tulung Selapan	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
38	SMKN 1 Sungai Menang	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
39	SMKN 1 Ogan Komering Ulu	0,00	3.098.000,00	0,00	3.098.000,00
40	SMKN 2 Ogan Komering Ulu	0,00	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00
41	SMKN 1 Martapura	10.699.200,00	0,00	0,00	10.699.200,00
42	SMKN 1 Tanah Abang	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
43	SMKN 4 Lubuklinggau	0,00	0,00	9.851.140,00	9.851.140,00
44	SMKN 6 Palembang	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
45	SMKN 4 Palembang	0,00	10.485.795,00	0,00	10.485.795,00
46	SMKN 2 Palembang	0,00	77.735.150,00	0,00	77.735.150,00
47	SMKN 3 Prabumulih	3.590,00	3.619.000,00	0,00	3.622.590,00
Jumlah		117.896.978,00	309.788.291,00	54.752.110,00	482.437.379,00

2) Kas di Bendahara BOS Daerah (Program Sekolah Gratis)

Saldo kas program sekolah gratis per 31 Desember 2022 adalah Rp455.111.000,00 yang terdiri dari saldo rekening giro sebesar Rp235.538.495,00, saldo tunai di bendahara Rp429.259,00 dan utang pajak sebesar Rp219.143.246,00. Pada saldo rekening giro sebesar Rp163.550.179,00 terdapat utang PFK lainnya yang antara lain merupakan gaji pegawai honorer sebesar Rp63.493.200,00 pada sekolah-sekolah sebagai berikut yaitu:

- SMAN 1 Kikim Selatan	Rp.	10.699.200,00
- SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu	Rp.	10.699.200,00
- SMAN 2 Sekayu	Rp.	9.997.100,00
- SMAN Muara Kelingi	Rp.	5.349.600,00
- SMAN Marga Baru	Rp.	100,00
- SMAN 1 Buay Madang	Rp.	10.699.200,00
- SMKN 1 Bunga Mayang	Rp.	<u>16.048.800,00</u>
Jumlah	Rp.	63.493.200,00

Mutasi saldo kas program sekolah gratis terdapat pada tabel berikut:

Tabel 86 Rincian Mutasi Kas di Bendahara PSG

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal 2021 Audited	208.304.088,00
2	Koreksi Saldo Awal	-8.812.615,00
3	Penerimaan	198.777.151.000,00
4	Pengeluaran	(198.601.760.100,00)
5	Realisasi Belanja dari SILPA 2021	-13.749.550,00
6	Pengurang Utang PFK Lainnya	(44.770.584,00)
7	Pengurang Utang Pajak PFK	(35.245.426,00)
8	Pengembalian SILPA ke RKUD	(105.301.409,00)
9	Pengembalian Sisa Belanja PSG 2022 ke RKUD	(3.430.300,00)
10	Penambahan Kas PSG dari Jasa Giro	89.450,00
11	Penambahan Utang Pajak PSG 2022	219.143.246,00
12	Penambahan Utang PFK Lainnya-PSG	63.493.200,00
13 (Σ1-12)	SALDO AKHIR KAS BOS NERACA per 31 Desember 2022	455.111.000,00
terdiri dari :	-Saldo Rek Bank	235.538.495,00
	-Saldo Tunai	429.259,00
	-Sisa Utang Pajak 2022	219.143.246,00

Rincian Mutasi Kas PSG per Sekolah terdapat pada **Lampiran 14**. Saldo akhir kas PSG sebesar Rp455.111.000,00 terdapat pada masing-masing sekolah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87 Daftar Saldo Rekening PSG pada Sekolah

(dalam rupiah)

No	Sekolah	Saldo rek. Giro per 31 Des. 2022	Saldo Tunai di bendahara	Utang Pajak	Jumlah
1	SMAN 1 Sumber Marga Telang	815,00	-		815,00
2	SMAN 1 Talang Padang			7.335.500,00	7.335.500,00
3	SMAN 2 Lintang Kanan			675.000,00	675.000,00
4	SMAN 1 Kikim Selatan	10.699.200,00	-		10.699.200,00
5	SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu	10.699.200,00			10.699.200,00
6	SMAN 5 Lahat			2.849,00	2.849,00
7	SMAN 2 Muara Enim			13.091.992,00	13.091.992,00
8	SMAN 3 Muara Enim			4.346.900,00	4.346.900,00
9	SMAN 2 Sekayu	9.997.100,00	-		9.997.100,00
10	SMAN 2 Lalan	79.786.000,00		2.667.555,00	82.453.555,00
11	SMAN 2 Plakat Tinggi	92.018.000,00		1.440.000,00	93.458.000,00
12	SMAN 2 Tungkal Jaya			1.891.760,00	1.891.760,00
13	SMAN 2 Bayung Lencir	2.056,00	-		2.056,00
14	SMAN Muara Kelingi	5.349.600,00	-		5.349.600,00
15	SMAN Marga Baru	100,00	-		100,00
16	SMAN Sukamenag			264.900,00	264.900,00
17	SMAN 1 Rantau Alai	1.028,00	-		1.028,00
18	SMAN 1 Rambang Kuang	66.000,00			66.000,00
19	SMAN 1 Rantau Panjang	90.000,00		1.348.300,00	1.438.300,00
20	SMAN 2 Kayuagung			11.125.000,00	11.125.000,00
21	SMAN 1 Pampangan			2.282.500,00	2.282.500,00
22	SMAN 1 Pedamaran Timur	1.546,00			1.546,00
23	SMAN 2 Mesuji Raya			165.000,00	165.000,00
24	SMAN 2 Mesuji			2.432.500,00	2.432.500,00
25	SMAN 2 Ogan Komering Ulu	600,00	-		600,00
26	SMAN 1 Runjung Agung			65.000,00	65.000,00
27	SMAN 1 Pulau Beringin		399.500,00	2.900.000,00	3.299.500,00
28	SMAN 1 Simpang			355.924,00	355.924,00
29	SMAN 2 Muaradua			931.000,00	931.000,00
30	SMAN 1 Sungai Are			1.755.000,00	1.755.000,00
31	SMAN 1 Mekakau Ilir			680.000,00	680.000,00
32	SMAN 1 Ranau Selatan			2.240.750,00	2.240.750,00
33	SMAN 2 Pulau Beringin			1.246.500,00	1.246.500,00
34	SMAN 1 Martapura	400,00	-		400,00
35	SMAN 1 Buay Madang	10.699.200,00	-		10.699.200,00
36	SMAN 1 Sem Barat			2.426.183,00	2.426.183,00
37	SMAN 1 Belitang Jaya	2.560,00	-		2.560,00
38	SMAN 1 Belitang Madang Raya	842,00	-		842,00
39	SMAN 5 Talang Ubi			3.186.000,00	3.186.000,00
40	SMAN 2 Abab			1.740.000,00	1.740.000,00
41	SMAN 3 Lubuklinggau			18.193.425,00	18.193.425,00
42	SMAN 5 Lubuklinggau			8.685.600,00	8.685.600,00
43	SMAN 15 Palembang			20.844.710,00	20.844.710,00
44	SMAN 13 Palembang			30.911.866,00	30.911.866,00
45	SMAN 8 Palembang			2.896.573,00	2.896.573,00
46	SMAN 19 Palembang			23.114.519,00	23.114.519,00
47	SMAN 17 Palembang			2.764.303,00	2.764.303,00
48	SMAN 16 Palembang			17.994.637,00	17.994.637,00

No	Sekolah	Saldo rek. Giro per 31 Des. 2022	Saldo Tunai di bendahara	Utang Pajak	Jumlah
49	SMAN 9 Palembang			22.836.500,00	22.836.500,00
50	SMAN Olahraga Sriwijaya Palembang			4.305.000,00	4.305.000,00
51	SMKN 1 Air Kumbang	6.106,00			6.106,00
52	SMKN Mulak Ulu	7.192,00			7.192,00
53	SMKN Muara Beliti	1.932,00			1.932,00
54	SMKN Purwodadi	12.066,00			12.066,00
55	SMKN 1 Pemulutan	7.804,00	5.000,00		12.804,00
56	SMKN 5 Ogan Komering Ulu	4.808,00			4.808,00
57	SMKN 1 Bunga Mayang	16.048.800,00			16.048.800,00
58	SMKN Batumarta	1.408,00			1.408,00
59	SMKN 11 Cempaka	1.602,00			1.602,00
60	SMKN 2 Talang Ubi	3.350,00			3.350,00
61	SMKN 3 Prabumulih	29.180,00	24.759,00		53.939,00
Jumlah		235.538.495,00	429.259,00	219.143.246,00	455.111.000,00

6) Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp240.733.955,00 dan Rp9.478.078.209,00. Saldo Kas Lainnya Tahun 2022 merupakan saldo kas RKUD pada sub rekening 140-3000-0001 sebesar Rp239.887.990,00 dan saldo rekening *Dormant* pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp845.965,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 88 Rincian Kas Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2022	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir per 31 Des 2022
Badan Pengelola					
1.	Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	9.477.232.250,00	213.952.335,00	9.451.296.595,00	239.887.990,00
-	Kas yang dibatasi penggunaannya	9.430.187.000,00	0,00	9.430.187.000,00	0,00
-	Saldo kas yang terdapat pada Sub-Rekening 140-000-00001	47.045.250,00	213.952.335,00	21.109.595,00	239.887.990,00
2. Dinas Kesehatan					
-	Pemegang Kas Gaji BKOKM	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Program Gigi	47.620,00	0,00	0,00	47.620,00
-	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0,00	6,00	0,00	6,00
-	Klaim Obat Askes RSKMM	572.861,00	0,00	0,00	572.861,00

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2022	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir per 31 Des 2022
-	UPTD BKOKM	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
-	RS Khusus Paru	478,00	0,00	0,00	478,00
	Jumlah	9.478.078.209,00	213.952.341,00	9.451.296.595,00	240.733.955,00

2. Piutang

Piutang daerah merupakan hak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan baik berupa penerimaan kas maupun yang berasal dari pendapatan atau tagihan-tagihan lain yang belum diterima secara kas. Piutang terbagi menjadi piutang pendapatan dan piutang lainnya. Saldo piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp27.010.499.689,98 dan Rp28.199.000.660,96 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 89 Realisasi Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2022	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Pendapatan	26.510.530.014,89	38.153.731.684,61	41.339.011.591,45	23.325.250.108,05
-	Piutang Pajak	1.027.224.000,00	708.935.200,00	1.027.224.000,00	708.935.200,00
-	Piutang Retribusi	2.876.334.157,00	825.230.000,00	662.752.003,25	3.038.812.153,75
-	Piutang Lain- lain PAD yang Sah	22.606.971.857,89	36.619.566.484,61	39.649.035.588,20	19.577.502.754,30
2	Piutang lainnya	1.688.470.646,07	174.452.652.668,70	172.455.873.732,84	3.685.249.581,93
	Total	28.199.000.660,96	212.606.384.353,31	213.794.885.324,29	27.010.499.689,98

1. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan adalah piutang atas pendapatan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 dengan saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp23.325.250.108,05 dan Rp26.510.530.014,89.

Penjelasan atas piutang pendapatan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah piutang atas Piutang Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB) tahun 2022 pada Badan Pendapatan Daerah yang telah dipungut sebesar Rp708.935.200,00 tetapi pada 31 Desember 2022 belum disetor ke kas daerah.

b. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi adalah piutang atas retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa pada Sekretariat Daerah yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022. Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.038.812.153,75 dan Rp2.876.334.157,00, dengan mutasi piutang sebagai berikut.

Tabel 90 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Piutang retribusi	Piutang Audited Tahun 2021	Koreksi Saldo Awal (+/-)	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi Kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Piutang Bruto 2022
	Sekretariat Daerah	2.339.347.000,00	475.000.000,00	350.000.000,00	241.065.000,00	2.923.282.000,00
1	Piutang Retribusi- PT Sriwijaya Optimis Mandiri	258.282.000,00	0,00	0,00	0,00	258.282.000,00
-	Sewa Mess Pertiwi 1 April 2010 s/d 1 April 2011	86.070.500,00	0,00	0,00	0,00	86.070.500,00
-	Sewa Mess Pertiwi 1 April 2011 s/d 1 April 2012	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
-	Sewa Mess Pertiwi 1 April 2012 s/d 1 April 2013	86.070.500,00	0,00	0,00	0,00	86.070.500,00
-	Sewa Mess Pertiwi 1 April 2013 s/d 1 April 2014	86.070.500,00	0,00	0,00	0,00	86.070.500,00
2	Piutang Retribusi- PT Puti Ayu Ardiandi	1.490.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000.000,00
-	Sewa Master Film Gending Sriwijaya Tahun 2014	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
-	Sewa Master Film Gending Sriwijaya Tahun 2015	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
-	Sewa Master Film Gending Sriwijaya Tahun 2016	490.000.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000.000,00
3	Piutang Retribusi- PD Swarna Dwipa	575.000.000,00	475.000.000,00	350.000.000,00	225.000.000,00	1.175.000.000,00
	Sewa Gedung Asrama Haji Tahun 2018	375.000.000,00	475.000.000,00			850.000.000,00
-	Sewa Gedung Asrama Haji Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Sewa Gedung Asrama Haji Tahun 2020	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
-	Sewa Gedung Asrama Haji Tahun 2021	0,00	0,00	350.000.000,00	25.000.000,00	325.000.000,00
4	Piutang Retribusi- PT Karya Baru Manunggal	16.065.000,00	0,00	0,00	16.065.000,00	0,00
	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	521.987.157,00	230.000,00	0,00	406.687.003,25	115.530.153,75

No	Piutang retribusi	Piutang Audited Tahun 2021	Koreksi Saldo Awal (+/-)	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi Kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Piutang Bruto 2022
-	Piutang Retribusi-Alat Berat	506.687.157,00	0,00	0,00	391.157.003,25	115.530.153,75
-	Piutang Retribusi-Laboratorium	15.300.000,00	230.000,00	0,00	15.530.000,00	0,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
-	Piutang Retribusi-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	Jumlah	2.876.334.157,00	475.230.000,00	350.000.000,00	662.752.003,25	3.038.812.153,75

c. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah piutang yang berasal dari piutang pendapatan BLUD, piutang pendapatan atas pemanfaatan Bangun Guna Serah (BGS), piutang pendapatan denda PBB-KB, piutang remunerasi DBH melalui TDF (*Transfer Deposit Facility*), dan piutang pendapatan denda pajak daerah. Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp19.577.502.754,30 dan Rp22.606.971.857,89. Rincian mutasi piutang lain-lain PAD yang sah terdapat pada tabel tersebut.

Tabel 91 Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Piutang Lain-Lain PAD	Piutang Audited Tahun 2021	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi Kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Piutang Bruto 2022
A	Piutang Pendapatan BLUD	18.593.426.520,50	29.158.904.124,15	34.690.217.974,48	13.062.112.670,17
1	Kegiatan Operasional RS Ernaldi Bahar	5.826.399.780,00	20.020.930.777,00	22.425.206.638,00	3.422.123.919,00
2	Kegiatan Operasional RS Khusus Mata	1.961.561.940,00	2.426.436.057,00	1.961.561.940,00	2.426.436.057,00
3	Kegiatan Operasional RS Paru	20.693.500,00	0,00	20.693.500,00	0,00
4	Kegiatan Operasional RS Gigi dan Mulut	313.991.400,00	398.361.700,00	314.277.800,00	398.075.300,00
5	Kegiatan Operasional RS Siti Fatimah	6.480.864.900,50	3.063.105.590,15	6.063.543.096,48	3.480.427.394,17
6	Kegiatan Operasional UPTD Lab Lingkungan Hidup DLHP	3.989.915.000,00	3.250.070.000,00	3.904.935.000,00	3.335.050.000,00

No	Piutang Lain-Lain PAD	Piutang Audited Tahun 2021	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi Kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Piutang Bruto 2022
	Piutang Pendapatan				
B	atas Pemanfaatan BSG BPKAD	3.665.121.572,39	6.890.858.668,54	4.610.393.848,72	5.945.586.392,21
1	PT Griya Inti Sejahtera Insani (Palembang icon)	562.281.761,00	3.126.292.249,00	1.627.393.761,72	2.061.802.248,28
2	PT. Paragon Mall (Underground mall/PSX)	1.157.579.632,39	918.863.120,00	362.612.400,00	1.713.830.352,39
3	Kerja sama Pemanfaatan Bowling Center	1.402.260.179,00	0,00	20.000.000,00	1.382.260.179,00
4	PT Rajawali Jasa Trirama (Sekolah Palembang Harapan)	543.000.000,00	543.000.000,00	360.000.000,00	726.000.000,00
5	PT Graha Pinarangan (Lippo Plaza Jakabaring)	0,00	63.017.720,54	702.108,00	62.315.612,54
6	PT Bayu Jasa Lestari Sukses	0,00	2.239.685.579,00	2.239.685.579,00	0,00
C	Piutang denda PBB-KB	348.423.764,00	0,00	348.423.764,00	0,00
D	Piutang Remunerasi DBH melalui TDF	0,00	48.223.419,90	0,00	48.223.419,90
E	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	521.580.272,02	0,00	521.580.272,02
	Jumlah Piutang lain-lain PAD	22.606.971.857,89	36.619.566.484,61	39.649.035.587,20	19.577.502.754,30

2. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya adalah piutang atas tuntutan ganti kerugian daerah, uang muka pengadaan barang/jasa dan piutang lainnya. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.685.249.581,93 dan Rp1.688.470.646,07 dengan mutasi pada tabel berikut.

Tabel 92 Rincian Mutasi Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No	Piutang Lainnya	Piutang Audited Tahun 2021	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi Kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Piutang Bruto 2022
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	992.292.776,07	2.602.183.005,86	20.150.000,00	3.574.325.781,93
2	Uang Muka	580.054.070,00	161.721.955.423,57	162.302.009.493,57	0,00
3	Piutang Lainnya				
-	Bagian Lancar penjualan angsuran	18.030.000,00	0,00	1.000.000,00	17.030.000,00
-	Piutang TKI	98.093.800,00	0,00	4.200.000,00	93.893.800,00
	Jumlah	1.688.470.646,07	164.324.138.429,43	162.327.359.493,57	3.685.249.581,93

Penjelasan atas Piutang Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah adalah piutang atas ganti kerugian yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. Tuntutan ganti kerugian daerah terbagi menjadi tuntutan kepada bendahara/bukan bendahara dan tuntutan kepada pihak penyedia jasa (pihak ketiga) sebagai kewajiban mengembalikan kekurangan volume pekerjaan pada paket kegiatan yang tersebar di Organisasi Perangkat Daerah. Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara/bukan bendahara memiliki saldo sebesar Rp990.142.776,07 dengan mutasi terdapat pada tabel berikut.

Tabel 93 Rincian Mutasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara/Bukan Bendahara

(dalam rupiah)

No	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Piutang Audited Tahun 2021	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Piutang Bruto 2022
1	TP.an.Abdullah Sani Ar	258.543.507,07	0,00	0,00	258.543.507,07
2	TP.an. Syahrul Somad, SH	370.765.269,00	12.000.000,00	0,00	382.765.269,00
3	TGR.an. Drs. Darwin Subandi (Alm)	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
4	TGR.an.Djunaidi	18.359.000,00	0,00	0,00	18.359.000,00
5	TGR.an.Drs. Budiman Zen	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6	TGR.an.Ir. Nandang Kusdinar, M. Si (Alm)	94.400.000,00	0,00	0,00	94.400.000,00
7	TGR.an.Taniri	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
8	TGR.an.A. Kadir Luthfie (Alm)	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
9	TGR.an.Ir. Syahriar Agustoni	60.500.000,00	0,00	2.000.000,00	58.500.000,00
10	TGR.an.Ir. H. Trisbani Arief	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00	0,00
11	TGR.an.Drs. Zakaria Semendawai	46.200.000,00	0,00	0,00	46.200.000,00
12	TGR.an.Drs. Farouk Barry, M. Si	65.200.000,00	0,00	0,00	65.200.000,00
13	TGR.an.Tarli Senuling, S. Sos	800.000,00	6.000.000,00	0,00	6.800.000,00
14	TGR.an.Ahdiat, SP. MM	8.925.000,00	0,00	0,00	8.925.000,00
15	TGR.an.R.A. Syamsul Bahri, MM (Pensiun Oktober 2012)	10.650.000,00	0,00	0,00	10.650.000,00
16	TGR.an.Ir. Lihandani	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00
17	TGR.an.Ir. Zulfikar, MM	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00
	Jumlah	992.292.776,07	18.000.000,00	20.150.000,00	990.142.776,07

Sedangkan Rincian Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Penyedia Jasa sebesar Rp2.584.183.005,86 dapat dilihat pada **Lampiran 15**

- 2) Uang muka merupakan saldo uang muka pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Saldo uang muka pada 1 Januari 2022 sebesar Rp580.054.070,00 merupakan saldo uang muka pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang pada tahun 2022 telah dibayar sehingga pada 31 Desember 2022 memiliki saldo sebesar Rp0,00.
- 3) Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Penjualan Angsuran, piutang Tunjangan Komunikasi Insentif, dan piutang lainnya.
 - a) Bagian Lancar Penjualan Angsuran sebesar Rp17.030.000,00 merupakan tagihan atas penjualan kendaraan Mobil Toyota Kijang KF71 tahun kendaraan 2000, Nomor polisi BG 2332 LZ atas nama Ahmad Gufron (SK Nomor 689/KPTS/BPKAD/2014 tanggal 10 November 2014 dengan nilai kerugian sebesar Rp25.030.000,00).
 - b) Piutang Tunjangan Komunikasi Insentif sebesar Rp93.893.800,00 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian seperti terdapat pada tabel berikut.

Tabel 94 Rincian Mutasi Piutang Tunjangan Komunikasi Insentif

(dalam rupiah)

No	Piutang TKI	Piutang Audited Tahun 2021	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Piutang Bruto 2022
1	Ir. H. Helman Effendi	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
2	Mustofa Tenar	46.920.100,00	0,00	0,00	46.920.100,00
3	Drs. H. Syafei Alim, MA.	11.877.700,00	0,00	0,00	11.877.700,00
4	Amrullah H. Munir	35.096.000,00	0,00	0,00	35.096.000,00
Jumlah		98.093.800,00	0,00	4.200.000,00	93.893.800,00

3. Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.552.879.460,44 dan Rp4.441.184.050,08 yang merupakan penyisihan atas Piutang Retribusi, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, dan Piutang Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 95 Rincian Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Pihak Ketiga	Saldo Piutang Bruto 2022	Daftar Perhitungan Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
			Lancar 0,50% 0-1 Tahun	Kurang Lancar 10% 1-2 Tahun	Diragukan 50% 2-5 Tahun	Macet 100% > 5 Tahun	
A	Piutang Pajak	708.935.200,00	3.544.676,00				3.544.676,00
	Badan Pendapatan Daerah	708.935.200,00	3.544.676,00	0	0	0	3.544.676,00

No	Pihak Ketiga	Saldo Piutang Bruto 2022	Daftar Perhitungan Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0,50%	10%	50%	100%	
			0-1 Tahun	1-2 Tahun	2-5 Tahun	> 5 Tahun	
B	Piutang Retribusi	3.038.812.153,75	0,00	44.053.015,38	425.000.000,00	1.748.282.000,00	2.217.335.015,38
	Sekretariat Daerah	2.923.282.000,00	0	32.500.000,00	425.000.000,00	1.748.282.000,00	2.205.782.000,00
	PU Bina Marga dan Tata Ruang	115.530.153,75	0	11.553.015,38	0	0	11.553.015,38
C	Piutang LLPAD	19.577.502.754,30	82.036.171,56	93.195.499,53	418.562.620,25	1.637.138.902,80	2.230.933.194,14
C.I	Piutang Pendapatan BLUD	13.062.112.670,17	61.902.702,19	47.962.598,83	144.618.620,45	718.463.470,00	972.947.391,47
1	RS Ernaldi Bahar	3.422.123.919,00	12.245.674,16	6.867.075,20	92.927.433,00	718.463.470,00	830.503.652,36
2	RS Khusus Mata	2.426.436.057,00	12.132.180,29	0	0	0	12.132.180,29
3	RS Paru	0	0	0	0	0	0,00
4	RS Gigi dan Mulut	398.075.300,00	1.990.376,00	0	0	0	1.990.376,00
5	RS Siti Fatimah	3.480.427.394,17	19.284.121,74	38.699.023,63	21.183.687,45	0	79.166.832,82
6	UPTD Lab Lingkungan Hidup DLHP	3.335.050.000,00	16.250.350,00	2.396.500,00	30.507.500,00	0	49.154.350,00
C.I	Piutang BOT BPKAD	5.985.586.392,21	20.133.469,37	45.232.900,70	273.943.999,80	918.675.432,80	1.257.985.802,67
1	PT Griya Inti Sejahtera Insani (Palembang icon)	2.061.180.248,28	10.305.900,85	0	0	0	10.305.900,85
2	PT Paragon Mall (Underground mall/PSX)	1.713.830.352,39	3.425.729,60	0	55.004.499,80	918.675.432,80	977.105.662,20
3	Kerja sama Pemanfaatan Bowling center	1.382.260.179,00	2.460.260,86	45.232.900,70	218.939.500,00	0	266.632.661,56
4	PT, Rajawali Jasa Tritama (Sekolah Palembang Harapan)	726.000.000,00	3.630.000,00	0	0	0	3.630.000,00
5	Graha Pinarangan Lippo Jakabaring	62.315.612,54	311.578,06				311.578,06
D	Piutang Lainnya	3.685.249.581,93	0,00	0,00	0,00	1.101.066.576,07	1.101.066.576,07
1	Bagian Lancar Penjualan Angsuran	17.030.000,00	0	0	0	17.030.000,00	17.030.000,00
2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	3.574.325.781,93	0	0	0	990.142.776,07	990.142.776,07

No	Pihak Ketiga	Saldo Piutang Bruto 2022	Daftar Perhitungan Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0,50%	10%	50%	100%	
			0-1 Tahun	1-2 Tahun	2-5 Tahun	> 5 Tahun	
3	TKI	93.893.800,00	0	0	0	93.893.800,00	93.893.800,00
	Piutang Remunerasi DBH melalui TDF	48.223.419,90					0,00
E	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	521.580.272,02					0,00
	Koreksi Pembulatan						1,15
Jumlah Piutang dan Penyisihan Piutang		27.580.303.381,90	85.580.847,56	137.248.514,91	843.562.620,25	4.486.487.478,87	5.552.879.460,44

4. Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.865.882.104,87 dan Rp3.718.075.722,06. yang terdiri dari Beban Sewa dan Beban Asuransi yang belum jatuh tempo pada beberapa SKPD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 96 Rincian Beban Dibayar Dimuka

		<i>(dalam rupiah)</i>		
No	SKPD	2022	2021	Kenaikan/Penurunan
1	Dinas Kesehatan (SKPD)	82.043.972,00	54.719.021,60	27.324.950,40
2	RS.Umum Siti Fatimah	35.397.496,00	0,00	35.397.496,00
3	RS.DR Ernadi Bahar (BLUD)	48.229.226,00	48.333.724,55	(104.498,55)
4	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	183.065.919,00	189.884.148,06	(6.818.229,06)
5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	41.393.460,00	79.921.830,06	(38.528.370,06)
6	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	51.862.062,00	49.205.505,90	2.656.556,10
7	Satuan Polisi Pamong Praja	47.378.166,00	0,00	47.378.166,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	16.511.219,00	7.695.674,28	8.815.544,72
9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (SKPD)	5.854.535,00	3.391.735,36	2.462.799,64
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (BLUD)	20.867.714,00	22.287.964,64	(1.420.250,64)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31.558.807,00	23.406.198,83	8.152.608,17
12	Dinas Perhubungan	42.723.905,00	29.718.654,76	13.005.250,24
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.809.317,00	5.781.793,20	18.027.523,80
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	90.236.363,00	60.024.657,68	30.211.705,32
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	109.732.989,00	0,00	109.732.989,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.567.512,00	17.832.590,94	(1.265.078,94)
17	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	39.712.420,00	48.912.879,18	(9.200.459,18)
18	Dinas Perkebunan	23.147.794,00	40.100.724,03	(16.952.930,03)
19	Dinas Kehutanan	3.686.118,00	4.810.806,41	(1.124.688,41)
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Miner	7.808.367,00	8.013.699,30	(205.332,30)

No	SKPD	2022	2021	Kenaikan/Penurunan
21	Dinas Perdagangan	26.442.346,58	28.097.312,57	(1.654.965,99)
22	Sekretariat Daerah	823.621.158,00	742.376.578,35	81.244.579,65
23	Inspektorat	16.879.935,00	10.286.814,24	6.593.120,76
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	15.996.826,00	(15.996.826,00)
25	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	24.739.678,84	26.066.050,96	(1.326.372,12)
26	Badan Pendapatan Daerah	1.724.500.278,00	1.894.119.682,97	(169.619.404,97)
27	Badan Kepegawaian Daerah	20.464.480,45	20.461.966,72	2.513,73
28	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	7.262.136,00	52.654.019,37	(45.391.883,37)
29	Sekretariat DPRD	273.661.008,00	233.974.862,10	39.686.145,90
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	26.723.723,00	0,00	26.723.723,00
Jumlah		3.865.882.104,87	3.718.075.722,06	147.806.382,81

5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp100.611.085.180,50 dan Rp 99.574.950.539,99. Tidak termasuk dalam persediaan per 31 Desember 2022, persediaan bahan kimia yang rusak/kadaluarsa pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebesar Rp20.555.550,00, persediaan obat yang telah rusak/ kadaluarsa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp294.512.343,00, dan persediaan Obat dan BMHP pada RSK Gigi dan Mulut sebesar Rp410.618.800,00.

Persediaan obat yang rusak pada RSK Gigi dan Mulut sebesar Rp19.539.561,00 telah dimusnahkan melalui Berita Acara Pemusnahan Perbekalan Farmasi Kadaluarsa/Rusak Nomor:1530/BA/RSKGM-IX/2022, sisanya masih dalam proses administrasi untuk dilakukan pemusnahan.

Saldo Persediaan tersebut merupakan hasil *stock opname* yang dilakukan pada akhir tahun dengan rincian persediaan per jenis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 97 Rekapitulasi Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	11.380.800,00	-11.380.800,00
2	Bahan Kimia	1.722.857.255,82	1.446.665.422,15	276.191.833,67
3	Bahan Bakar dan Pelumas	37.947.500,00	23.369.315,00	14.578.185,00
4	Bahan Baku	71.867.100,00	52.242.600,00	19.624.500,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	767.250,00	0,00	767.250,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
7	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.093.795.638,00	1.423.032.000,00	-329.236.362,00
8	Bahan Lainnya	807.894.874,00	3.453.957.627,00	-2.646.062.753,00

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan
9	Suku Cadang Alat Laboratorium	43.711.000,00	0,00	0,00
10	Alat Tulis Kantor	2.089.943.602,00	3.081.075.986,22	-991.132.384,22
11	Bahan Cetak	6.239.722.417,00	7.236.174.342,00	-996.451.925,00
12	Benda Pos	23.316.000,00	35.263.563,00	-11.947.563,00
13	Perabot Kantor	28.097.963,00	95.594.349,00	-67.496.386,00
14	Alat Listrik	564.375.693,00	379.020.628,00	185.355.065,00
15	Perlengkapan Dinas	0,00	19.878.750,00	-19.878.750,00
16	Suvenir/Cendera Mata	178.205.300,00	33.370.000,00	144.835.300,00
17	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	903.153.206,80	1.460.198.255,00	-557.045.048,20
18	Obat	35.039.393.620,88	77.395.057.406,62	-42.355.663.785,74
19	Obat-obatan Lainnya	26.942.389.790,00	1.369.238.570,00	25.573.151.220,00
20	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	24.718.047.020,00	1.590.366.625,00	23.127.680.395,00
21	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	347.084.870,00	-347.084.870,00
22	Pakan	103.799.950,00	120.994.431,00	-17.194.481,00
23	Persediaan Bibit Tanaman	0,00	35.000,00	-35.000,00
24	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	950.000,00	-950.000,00
Jumlah		100.611.085.180,50	99.574.950.539,99	1.036.134.640,51

Rincian Persediaan Masing-Masing OPD pada **Lampiran 16**.

4.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan pernyataan modal pemerintah Provinsi pada badan usaha yang didirikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri atau pemerintah daerah lainnya. Informasi mengenai penyertaan modal sampai dengan Tahun 2022, bagian laba rugi Tahun 2022, bagian deviden yang diterima Tahun 2022 dan persentase kepemilikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 98 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

(dalam rupiah)

No	Nama Perusahaan	Penyertaan Modal s.d Tahun 2022	Bagian Laba rugi Tahun 2022	Bagian deviden yang diterima Tahun 2022	Persentase Kepemilikan
1	PT Bank Sumsel Babel	430.000.565.445,19	145.105.576.339,12	71.318.740.434,61	20,63
2	PT Sumsel Energi Gemilang/ eks PD Pertambangan dan Energi	99.780.000.000,00	5.464.099.890,00	0,00	100,00
3	PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang/ Eks	305.911.984.402,00	(699.118.243,87)	0,00	59,62

No	Nama Perusahaan	Penyertaan Modal s.d Tahun 2022	Bagian Laba rugi Tahun 2022	Bagian deviden yang diterima Tahun 2022	Persentase Kepemilikan
	PD Perhotelan Swarna Dwipa				
4	PD Prodexim	23.571.538.281,63	(219.368.339,00)	0,00	100,00
5	BPR Sumatera Selatan	113.868.389.00,00	4.156.388.290,44	0,00	95,81
6	PT Penjaminan Kredit Daerah	135.050.000.000,00	19.772.261.878,99	3.638.304.736,50	99,85
7	PD Industri Grafika Meru	559.020.800,00	0,00	0,00	100,00
8	PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	61.047.779.395,70	12.804.274.354,38	0,00	95,93
9	PT Jakabaring Sport City	5.802.498.385.000,00	(32.385.344.534,68)	0,00	99,99
10	PT Syailendra Investasi Gemilang 7	1.000.000.000,00	(133.014.179,00)	0,00	100,00
11	PT Sriwijaya Argo Industri (SAI)	4.114.901.552,00	(833.944.632,00)	0,00	100,00
12	PT Asuransi Bangun Askrida	630.000.000,00	0,00	100.942.071,00	0,20
13	PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna	2.058.000.000,00	0,00	804.678.000,00	20,00
14	PT Tambang Batubara Bukit Asam	12.256.125.000,00	0,00	73.378.486.125,00	1,06
Jumlah		6.878.478.299.876,52	153.031.810.824,38	149.241.151.367,11	

Nilai Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.464.748.909.687,83 Jika dibandingkan dengan nilai investasi Tahun 2021 sebesar Rp7.442.535.027.852,15 terdapat peningkatan sebesar Rp22.213.881.835,68 atau 0,30%. Penilaian Investasi Jangka Panjang pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan metode ekuitas untuk kepemilikan mayoritas pada perusahaan dan metode biaya untuk kepemilikan minoritas pada perusahaan dengan mutasi pada tabel berikut.

Tabel 99 Mutasi Investasi Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Nama Perusahaan	Ke-pemilik-an (%)	Metode Penilai-an	Investasi		Kenaikan/ (Penurunan) Investasi	%
				Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2022		
1	PT Bank Sumsel Babel	20,63	Ekuitas	882.065.495.348,09	904.779.947.462,30	22.714.452.114,21	2,58

No	Nama Perusahaan	Ke-pemilik-an (%)	Metode Penilai-an	Investasi	Investasi	Kenaikan/ (Penurunan) Investasi	%
				Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2022		
2	PT Sumsel Energi Gemilang/ eks PD Pertambangan dan Energi	100	Ekuitas	99.415.772.015,00	104.879.871.905,00	5.464.099.890,00	5,5
3	PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang/ Eks PD Perhotelan Swarna Dwipa	100	Ekuitas	488.609.821.301,17	487.437.162.689,17	(1.172.658.612,00)	-0,24
4	PD Prodexim	100	Ekuitas	5.444.154.215,00	5.224.785.876,00	(219.368.339,00)	-4,03
5	BPR Sumatera Selatan	95,81	Ekuitas	96.250.041.394,66	100.153.347.290,58	3.903.305.895,92	4,06
6	PT Penjaminan Kredit Daerah	99,85	Ekuitas	148.595.386.750,82	161.041.467.445,94	12.446.080.695,12	8,38
7	PD Industri Grafika Meru	100	Ekuitas	377.682.795,00	377.682.795,00	0,00	0,00
8	PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	95,93	Ekuitas	63.184.439.034,70	75.988.544.484,86	12.804.105.450,16	20,26
9	PT Jakabaring Sport City	99,99	Ekuitas	5.642.142.730.677,71	5.609.383.544.229,98	(32.759.186.447,73)	-0,58
10	PT Syailendra Investasi Gemilang 7	100	Ekuitas	133.014.179,00	0,00	(133.014.179,00)	-100
11	PT Sriwijaya Argo Industri (SAI)	100	Ekuitas	1.372.365.141,00	538.420.509,00	(833.944.632,00)	-60,77
12	PT Asuransi Bangun Askrida	-	Ekuitas	0	0	0,00	0,00
13	PT Asuransi Bangun Askrida	0,20	Biaya	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00
14	PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna	20	Biaya	2.058.000.000,00	2.058.000.000,00	0,00	0,00
15	PT Tambang Batubara Bukit Asam	1,06	Biaya	12.256.125.000,00	12.256.125.000,00	0,00	0,00
Jumlah				7.442.535.027.852,15	7.464.748.909.687,83	22.213.871.835,68	0,30

Investasi Jangka Panjang dalam penyertaannya ditetapkan dalam peraturan daerah dengan keterangan pada tabel berikut.

Tabel 100 Peraturan Daerah tentang Investasi Permanen

No	Nama BUMD	Nomor	Tentang
1	Bank Sumsel Babel	6 Tahun 2000	Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas

No	Nama BUMD	Nomor	Tentang
2	PD Pertambangan dan Energi/PT Sumsel Energi Gemilang (PT SEG)	16 Tahun 2005	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas
		14 Tahun 2011	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
		15 Tahun 2016	Perubahan atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
		7 Tahun 2000	Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi
		37 Tahun 2001	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi
3	PD Industri Grafika Meru	12 Tahun 2017	Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang
		5 Tahun 2018	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sumatera Selatan Energi Gemilang
		6 Tahun 1982	Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru
4	PD Perhotelan Swarna Dwipa	3 Tahun 2010	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru
		10 Tahun 2012	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru
		1 Tahun 1962	Pendirian Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa
		2 Tahun 1988	Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa
		8 Tahun 1990	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa
		2 Tahun 2005	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa
		9 Tahun 2013	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa
15 Tahun 2014	Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa		
10 Tahun 2015	Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang		

No	Nama BUMD	Nomor	Tentang
5	PD Prodexim	19 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang
		7 Tahun 2000	Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi
		277 Tahun 1999	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi
		10 Tahun 1990	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim
		5 Tahun 1998	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim
		14 Tahun 2000	Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim
		1 Tahun 2010	Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Daerah Prodexim
6	PT Asuransi Bangun Askrida	4 Tahun 2008	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Bentuk Saham pada PT Asuransi Bangun Askrida
		10 Tahun 2013	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Bentuk Saham Pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
7	PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna	14 Tahun 2002	Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas untuk Pembangunan Pasar Induk Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang
8	BPR Sumatera Selatan	7 Tahun 2004	Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan
		5 Tahun 2009	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan
		13 Tahun 2011	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan
		19 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015
9	PT Penjaminan Kredit Daerah	9 Tahun 2012	Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan
10	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	5 tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan
		4 Tahun 2007	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Bentuk Saham pada PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
11	PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	5 Tahun 2016	Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan
		13 Tahun 2016	Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan

No	Nama BUMD	Nomor	Tentang
		11 Tahun 2017	Perubahan kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan
12	PT Jakabaring Sport City	8 Tahun 2017	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Jakabaring Sport City
13	PT. Syailendra Investasi Gemilang 7	6 Tahun 2016	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
14.	PT Sriwijaya Agro Industri	12 Tahun 2020	Pendirian Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Sriwijaya Agro Industri
15	PT Tirta Sriwijaya Maju	5 Tahun 2021	Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tirta Sriwijaya Maju

a. PT Bank SumselBabel (PT BSB)

PT Bank SumselBabel merupakan BUMD yang bergerak di bidang perbankan/jasa keuangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp430.000.565.445,19 kepada PT BSB Per 31 Desember 2022, sehingga nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 20,63% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai Investasi Pemprov Sumsel pada PT BSB Tahun 2022 adalah sebesar Rp904.779.947.462,30 meningkat sebesar Rp22.714.452.114,21 atau 2,58% dari nilai Investasi Tahun 2021 sebesar Rp882.065.495.348,09 dengan rincian sebagai berikut.

Nilai Persentase Kepemilikan	:	20,63
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp882.065.495.348,09
Penambahan		
Koreksi Ekuitas	:	Rp0
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2022	:	Rp0
Bagian Laba/Rugi Tahun 2022	:	Rp94.033.192.548,82
Pengurangan		
Deviden	:	Rp71.318.740.434,61
Peningkatan/Penurunan		
Nilai Investasi Per 31 Des 2022	:	Rp904.779.947.462,30
Persentase Kenaikan	:	2,58

b. PT Sumsel Energi Gemilang (PT SEG)/Eks PD Pertambangan dan Energi

Perusahaan ini sebelumnya merupakan perusahaan daerah PD Pertambangan dan Energi (PDPDE) yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang diubah badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan badan hukum perusahaan daerah ini berdampak pada peningkatan nilai perolehan saham Pemprov Sumsel pada PT SEG sehingga menjadi sebesar Rp99.780.000.000,00 dengan nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 100% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai Investasi Pemprov Sumsel pada PT SEG Tahun 2022 adalah sebesar Rp104.879.871.905,00 meningkat sebesar Rp5.464.099.890,00 atau 5,50% dari nilai Investasi Tahun 2021 sebesar Rp99.415.772.015,00 dengan rincian sebagai berikut.

Nilai Persentase Kepemilikan	:	100
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp99.415.772.015,00
Penambahan		
Koreksi Ekuitas	:	Rp0
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2022	:	Rp0
Bagian Laba/Rugi Tahun 2022	:	Rp5.464.099.890,00
Pengurangan		
Deviden	:	Rp0
Peningkatan/Penurunan	:	Rp5.464.099.890,00
Nilai Investasi Per 31 Des 2022	:	Rp104.879.871.905,00
Persentase Kenaikan	:	5,50

c. PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang/Eks PD Perhotelan Swarna Dwipa

Perusahaan ini sebelumnya merupakan perusahaan daerah PD Perhotelan Swarna Dwipa yang telah diubah badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) Swarna Dwipa Sumsel Gemilang (PT SDSG). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp305.911.984.402,00 kepada PT SDSG Per 31 Desember 2022, sehingga nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 100% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai Investasi Pemprov Sumsel pada PT SDSG Tahun 2022 adalah sebesar Rp487.437.162.689,17 menurun sebesar (Rp1.172.658.612,00) atau (0,24%) dari nilai Investasi Tahun 2021 sebesar Rp488.609.821.301,17 dengan rincian sebagai berikut.

Nilai Persentase Kepemilikan	:	100
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp488.609.821.301,17
Penambahan		
Koreksi Ekuitas	:	Rp0
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2022	:	Rp0
Bagian Laba/Rugi Tahun 2022	:	(Rp1.172.658.612,00)
Pengurangan		
Deviden	:	Rp0
Peningkatan/penurunan	:	(Rp1,172.658.612,00)
Nilai Investasi Per 31 Des 2022	:	Rp487.437.162.689,17
Persentase Penurunan	:	(0,24)

d. PD Prodexim

Pemprov Sumsel telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp23.571.538.281,63 kepada PD Prodexim Per 31 Desember 2022, sehingga nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 100% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai Investasi Pemprov Sumsel pada PD Prodexim Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.224.785.876,00 menurun sebesar Rp219.368.339,00 atau 4,03% dari nilai Investasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp5.444.154.215,00. Dengan rincian sebagai berikut.

Nilai Persentase Kepemilikan	:	100
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp5.444.154.215,00
Penambahan		
Koreksi Ekuitas	:	Rp0
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2022	:	Rp0
Bagian Laba/Rugi Tahun 2022	:	(Rp219.368.339,00)
Pengurangan		
Deviden	:	Rp0
Peningkatan/Penurunan		
Nilai Investasi Per 31 Des 2022	:	Rp5.224.785.876,00
Persentase Penurunan	:	(4,03)

e. BPR Sumatera Selatan

Pemprov Sumsel telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp113.868.389.000,00 kepada BPR Sumatera Selatan Per 31 Desember 2022, sehingga nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 95,81% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai investasi Pemprov Sumsel pada BPR Sumatera Selatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp100.153.347.290,58 meningkat sebesar Rp3.903.305.895,92 atau 4,06% dari nilai Investasi Tahun 2021 sebesar Rp96.250.041.394,66 dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Persentase Kepemilikan	:	95,81
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp96.250.041.394,66
Penambahan		
Koreksi Ekuitas	:	Rp0
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2022	:	Rp0
Bagian Laba/Rugi Tahun 2022	:	Rp3.903.305.895,92
Pengurangan		
Deviden	:	Rp0
Peningkatan/Penurunan		
Nilai Investasi Per 31 Des 2022	:	Rp100.153.347.290,58
Persentase Kenaikan	:	4,06

f. PT Penjaminan Kredit Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp135.050.000.000,00 kepada PT Penjamin Kredit Daerah Per 31 Desember 2022, sehingga nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 99,85% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai investasi Pemprov Sumsel pada PT Penjamin Kredit Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp161.041.467.445,94 meningkat sebesar Rp12.446.080.695,12 atau 8,38% dari nilai Investasi Tahun 2021 sebesar Rp148.595.386.750,82 dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Persentase Kepemilikan	: 99,85
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	: Rp148.595.386.750,82
Penambahan	
Koreksi Ekuitas	: Rp0
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2022	: Rp0
Bagian Laba/Rugi Tahun 2022	: Rp16.084.385.431,62
Pengurangan	
Deviden	: Rp3.638.304.736,50
Peningkatan/penurunan	: Rp12.446.080.695,12
Nilai Investasi Per 31 Des 2022	: Rp161.041.467.445,94
Persentase Kenaikan	: 8,38

g. PD Industri Grafika Meru

Nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada PD Industri Grafika Meru sebesar Rp 559.020.800,00 Per 31 Desember 2022 dengan nilai kepemilikan 100%. Pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru. Namun sampai saat ini proses likuidasi belum selesai sehingga belum menyerahkan aset yang telah disertakan ke PD Industri Grafika Meru tersebut. Nilai investasi yang tercatat per 31 Desember 2022 sebesar Rp377.682.795,00.

h. PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp61.047.779.395,70 kepada PT Sriwijaya Mandiri Sumsel Per 31 Desember 2022 sehingga nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 95,93% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai investasi Pemprov Sumsel pada PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS) Tahun 2021 adalah sebesar Rp63.184.439.034,70 meningkat sebesar Rp12.804.105.450,16 atau 20,26% menjadi Rp.75.988.544.484,86 Per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Persentase Kepemilikan	: 95,93
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	: Rp63.184.439.034,70
Penambahan	
Koreksi Ekuitas	: Rp0
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2022	: Rp0
Bagian Laba/Rugi Tahun 2022	: Rp12.804.105.450,16
Pengurangan	
Deviden	: Rp0
Peningkatan/penurunan	: Rp12.804.105.450,16
Nilai Investasi Per 31 Des 2022	: Rp75.988.544.484,86
Persentase Kenaikan	: 20,26

i. PT Jakabaring Sport City

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp5.802.498.385.000,00 kepada PT Jakabaring Sport City Per 31 Desember 2022 dengan nilai kepemilikan Pemprov Sumsel sebesar 99,99% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai investasi Pemprov Sumsel pada PT Jakabaring Sport City Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.609.383.554.229,98 menurun sebesar Rp32.759.176.447,73. atau 0,58% dari nilai Investasi Tahun 2021 sebesar Rp5.642.730.677,71 dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Pesentase Kepemilikan	:	99,99
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp5.642.142.730.677,71
Penambahan		
Koreksi Ekuitas	:	Rp0
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2022	:	Rp0
Bagian Laba/Rugi Tahun 2022	:	(Rp32.759.176.447,73)
Pengurangan		
Deviden	:	Rp0
Peningkatan/penurunan	:	(Rp32.759.176.447,73)
Nilai Investasi Per 31 Des 2022	:	Rp5.609.383.554.229,98
Persentase Kenaikan	:	(0,58)

j. PT Syailendra Investasi Gemilang 7

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada PT Syailendra Investasi Gemilang 7 Per 31 Desember 2022, dengan nilai kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 100% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2022 PT SIG melaporkan rugi bersih sebesar Rp157.268.591,00 sehingga mempengaruhi nilai investasi Pemprov Sumsel. Mengingat nilai investasi Per 31 Desember 2021 hanya sebesar Rp133.014.179,00 maka penurunan nilai investasi yang dapat diakui hanya sebesar Rp133.014.179,00. Nilai investasi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Persentase Kepemilikan	:	100
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp133.014.179,00
Penambahan		
Koreksi Ekuitas	:	Rp0
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2022	:	Rp0
Bagian Laba/Rugi Tahun 2022	:	(Rp133.014.179,00)
Pengurangan		
Deviden	:	Rp0
Peningkatan/(penurunan)	:	(Rp133.014.179,00)
Nilai Investasi Per 31 Des 2022	:	Rp0
Persentase Penurunan	:	(100)

k. PT Sriwijaya Argo Industri (PT SAI)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp4.114.901.552,00 kepada PT Sriwijaya Argo Industri (PT SAI) Per 31 Desember 2022, sehingga nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 100% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai investasi Pemprov Sumsel pada PT SAI Tahun 2022 adalah sebesar Rp538.420.509,00 menurun sebesar Rp833.944.632,00 atau 60,77% dari nilai Investasi Tahun 2021 sebesar Rp1.372.365.141,00. dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Persentase Kepemilikan	:	100
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp1.372.365.141,00
Penambahan		
Koreksi Ekuitas	:	Rp0
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2022	:	Rp0
Bagian Laba/Rugi Tahun 2022	:	(Rp833.944.632,00)
Pengurangan		
Deviden	:	Rp0
Peningkatan/penurunan		
Nilai Investasi Per 31 Des 2022	:	Rp538.420.509,00
Persentase Penurunan	:	(60,77)

l. PT Tirta Sriwijaya Maju

PT Tirta Sriwijaya Maju (PT TSM) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2021. Merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bergerak di bidang sistem pelayanan air minum regional dengan modal dasar pendirian PT TSM adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 dengan kepemilikan Pemerintah Provinsi paling sedikit 51% sisanya dapat dimiliki oleh pihak ke-3. Nilai penyertaan modal Provinsi Sumatera Selatan kepada PT Tirta Sriwijaya Maju direncanakan sebesar Rp66.174.612.000,00 berupa Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta Jaringan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih di Wilayah Talang Kelapa Kecamatan Alat-Alang Lebar dan sekitarnya. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Perda Penyertaan Modal belum disahkan, sehingga nilai investasi pada PT Tirta Sriwijaya Maju belum dicatat dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

m. PT Asuransi Bangun Askrida

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp630.000.000,00 kepada PT Asuransi Bangun Askrida Per 31 Desember 2022. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2022 nilai kepemilikan Pemprov Sumsel sebesar 0,21% dari total saham sebesar Rp312.530.000.000,00 dan merupakan pemegang saham minoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode Biaya. Pada Tahun 2022 Pemprov menerima bagian deviden sebesar Rp100.942.071,00 dari perusahaan.

n. PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp2.058.000.000,00 kepada PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna Per 31 Desember 2022. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2022 nilai kepemilikan Pemprov Sumsel sebesar 20,00% dari total saham Perusahaan sebesar Rp10.290.000.000,00 dan merupakan pemegang saham minoritas sehingga metode penilaian investasi menggunakan metode Biaya. Pada tahun 2022 Pemprov menerima bagian deviden sebesar Rp804.678.000,00 dari perusahaan.

o. PT Tambang Batubara Bukit Asam

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp12.256.125.000,00 kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam Per 31 Desember 2022. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2022 nilai kepemilikan Pemprov Sumsel sebesar 1,06% dari total saham sebesar Rp1.152.066.000.000,00 dan merupakan pemegang saham minoritas sehingga metode penilaian investasi menggunakan metode biaya. Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima bagian deviden sebesar Rp73.378.486.125,00 dari perusahaan.

4.3.1.3. Aset Tetap

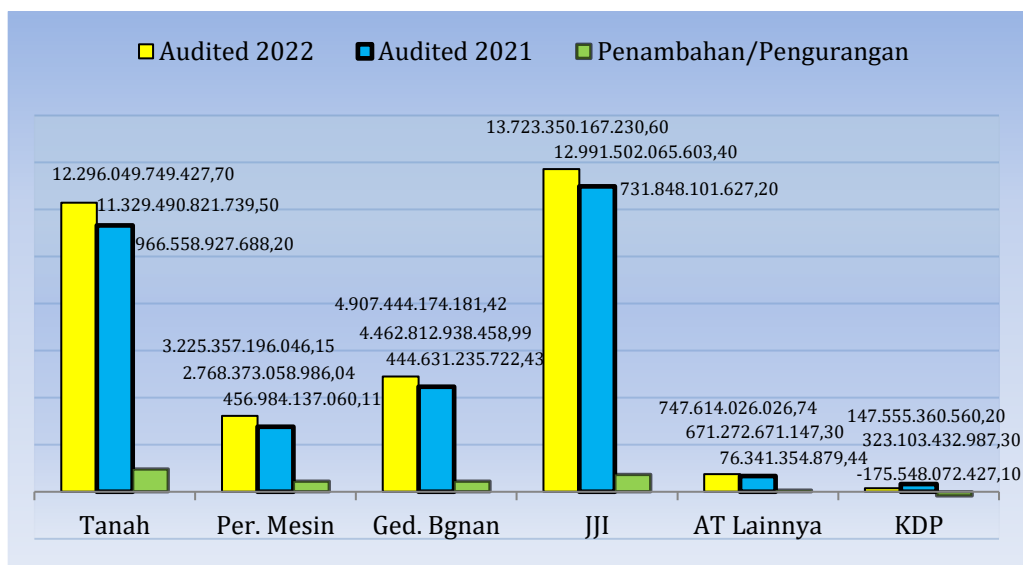
Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp24.016.551.323.097,41 dan Rp22.563.173.385.495,58 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 101 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Tanah	12.296.049.749.427,70	11.329.490.821.739,50	966.558.927.688,20
2	Peralatan dan Mesin	3.225.357.196.046,15	2.768.373.058.986,04	456.984.137.060,11
3	Gedung dan Bangunan	4.907.444.174.181,42	4.462.812.938.458,99	444.631.235.722,43
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.723.350.167.230,60	12.991.502.065.603,40	731.848.101.627,20
5	Aset Tetap Lainnya	747.614.026.026,74	671.272.671.147,30	76.341.354.879,44
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	147.555.360.560,20	323.103.432.987,30	(175.548.072.427,10)
7	Akumulasi Penyusutan	(11.030.819.350.375,40)	(9.983.381.603.426,95)	(1.047.485.358.452,45)
Jumlah		24.016.551.323.097,41	22.563.173.385.495,58	1.453.330.326.097,83

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut.



Grafik 13 Perbandingan Nilai Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021

Penjelasan pos-pos Aset Tetap sebagai berikut.

1. Aset Tetap Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2022 sebesar Rp11.329.490.821.739,50 setelah mutasi, saldo per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp12.296.049.749.427,70 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 102 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
	Saldo per 1 Januari 2022 (Audited)	11.329.490.821.739,50
1	Penambahan:	
	a. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	8.708.743.955,00
	b. Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal Tahun 2022	547.852.287,49
	c. Hibah	1.085.824.000,00
	d. Kapitalisasi selain belanja modal	883.121.927,00
	e. Mutasi Antar OPD	738.843.362.000,00
	f. Aset perolehan lama yang baru dicatat	3.410.162.982,00
	g. Koreksi pencatatan	225.912.000,00
	h. Penilaian tanah bernilai Rp0	966.960.510.950,00
	Jumlah	1.720.665.490.101,49
2	Pengurangan:	
	a. Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal 2022	(2.136.286.251,00)
	b. Tindak lanjut temuan BPK RI	(11.124.000.000,00)
	c. Hibah	(2.002.914.162,29)
	d. Mutasi antar OPD	(738.843.362.000,00)
	Jumlah	(754.106.562.413,27)
4	Saldo per 31 Desember 2022	12.296.049.749.427,70

1. Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2022 sebesar Rp1.720.665.490.101,49 sebagai berikut:
 - a) Realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar Rp8.708.743.955,00 terdapat pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
 - b) Reklasifikasi antar KIB aset tahun 2022 sebesar Rp547.852.287,49 terdapat pada:
 - 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp126.189.509,49 merupakan pengerasan halaman di perumahan sopir;
 - 2) Dinas Pendidikan sebesar Rp421.662.778,00;
 - c) Hibah tanah sebesar Rp1.085.824.000,00 merupakan hibah dari Pemerintah Kota Pagar Alam untuk Mess Pemprov Sumsel sebesar Rp1.035.824.000,00 pada BPKAD dan hibah dari masyarakat berupa tanah seluas 17.500 m² untuk pembangunan SMAN 2 Mesuji Raya sebesar Rp50.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;
 - d) Kapitalisasi selain belanja modal sebesar Rp883.121.927,00 merupakan biaya penaksiran dan pengukuran pembebasan lahan *fly over* Sekip Kota Palembang, jalan akses Jembatan Lontar Kabupaten OKU, relokasi jalan batas OI-Lubuk Batang Kab. OKU pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang;
 - e) Mutasi antar SKPD sebesar Rp738.843.362.000,00 sebagai berikut:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp732.311.362.000,00 merupakan mutasi dari BPKAD berupa tanah yang terletak di Jl. Kol. Burlian KM 6,5 Palembang untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah;
 - 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp236.000.000,00 merupakan mutasi tanah *ex showroom* rotan/gudang milik Dinas Perindustrian yang digunakan untuk bangunan rumah aman (*safe house*);
 - 3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.296.000.000,00 merupakan mutasi tanah dari Dinas Kesehatan.
 - f) Aset perolehan lama yang baru dicatat sebesar Rp3.410.162.982,00 merupakan pembebasan lahan untuk perluasan asrama haji yang dilakukan di Tahun 2006 pada Sekretariat Daerah.
 - g) Koreksi pencatatan sebesar Rp225.912.000,00 terdapat pada Dinas Perhubungan merupakan selisih Nilai Jual Objek Pajak yang tercatat pada Neraca Pemerintah Prov Sumsel Tahun 2021 dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh DJKN tahun 2022 atas tanah di Tanjung Api-Api.
 - h) Penilaian aset tanah bernilai Rp0,00 temuan BPK RI yang dinilai dengan NJOP Kabupaten/Kota setempat Rp966.960.510.950,00 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.185.053.000,00 merupakan penilaian pada gedung kantor Dinas Kesehatan;
- 2) Dinas Pendidikan sebesar Rp964.757.957.950,00 merupakan penilaian tanah di SMA/SMK/SLB di Kabupaten dan Kota;
- 3) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp17.500.000,00 merupakan penilaian tanah kantor Samsat OKU 2 yang diperoleh dari hibah masyarakat.

Rincian Penilaian Aset Tetap Tanah dengan NJOP pada **Lampiran 17**.

2. Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2022 sebesar Rp754.106.562.413,27 sebagai berikut.
 - a) Reklasifikasi antar KIB aset 2022 sebesar Rp2.136.286.251,00 pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang ke KIB Aset Lainnya berupa jasa penaksir harga yang dikapitalisasi ke nilai induk diantaranya.
 - 1) Pembebasan tanah *fly over* Sekip sebesar Rp953.673.029,00;
 - 2) Pembebasan lahan relokasi jalan Kurungan Nyawa-Martapura sebesar Rp83.882.847,00; dan
 - 3) Pembebasan lahan pembangunan jembatan *fly over* Sekip sebesar Rp1.098.730.375,00.
 - b) Tindak lanjut temuan BPK RI atas Manajemen Aset Tahun 2019 sebesar Rp11.124.000.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan/dikuasai oleh Akademi Keperawatan Kementerian Kesehatan RI yang telah ditindaklanjuti dengan menghibahkan tanah tersebut kepada Kementerian Kesehatan RI sesuai Naskah Hibah Nomor 087/HIBAH/BPKAD/2022 dan Nomor KN.02.03/F/3070/2022 tanggal 27 Desember 2022.
 - c) Hibah tanah sebesar Rp2.002.914.162,29 sebagai berikut.
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp 1.934.144.162,29 merupakan tanah yang terletak di Jl. Jend. Sudirman KM 3,5 Palembang yang dihibahkan kepada Kementerian Kesehatan RI sesuai Naskah Hibah Nomor 066/HIBAH/BPKAD/2022 dan Nomor KN.02.07/I/3501/2022 Tanggal 24 Oktober 2022;
 - 2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp68.770.000,- merupakan tanah di alun-alun Kota Pagaram yang dihibahkan kepada Pemerintah Kota Pagaram sesuai Naskah Hibah Nomor 076/HIBAH/BPKAD/2022 dan Nomor 04/BKD-IV/SP3BM/2022 Tanggal 30 November 2022.
 - d) Mutasi antar SKPD sebesar Rp738.843.362.000,00 dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada mutasi tambah antar SKPD angka 1 huruf e) di atas.

Penjelasan lainnya terhadap aset berupa tanah

1. Tanah Lapangan Golf

Tanah lapangan golf yang terletak di Jalan AKBP Cek Agus Kenten Palembang yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pengelola Barang BPKAD Provinsi Sumatera Selatan seluas 404.047 m² terjadi pencatatan ganda antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Pertamina. Terhadap tanah tersebut telah dilakukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Pertamina dengan Perjanjian Nomor 063/SPK/BPKAD/2020 dan Nomor SP-37/C00000/2020-SO tanggal 13 Desember 2020 tentang Pendayagunaan Lahan di Kawasan Golf Kenten. Sebagai tindak lanjut perjanjian tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penilaian tanah lapangan golf tersebut dengan pihak DJKN Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel dengan total nilai sebesar Rp4.061.151.032.000,00;

2. Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari penyerahan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2001 akibat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian hari terjadi *double* pencatatan dilakukan oleh TNI AU antara lain:
 - a. Eks. Kanwil Departemen Perhubungan RI dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanah dan gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan seluas 37.748 m² dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20/2021;
 - 2) Tanah dan rumah negara yang terletak di Jl. Adi Sucipto Palembang:
 - a) Register 000011 seluas 4.035 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/2008;
 - b) Register 000017 seluas 5.435 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/2008;
 - c) Register 000006 seluas 2.915 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/2008;
 - d) Register 000019 seluas 2.490 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/2008;
 - e) Register 000020 seluas 8.775 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/2009;
 - f) Register 000021 seluas 1.718 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/2009.
 - 3) Lahan kosong yang terletak di Jl. Adi Sucipto dengan register 000014 seluas 494 m² dengan surat ukur Nomor 29/AA.Lebar/2003 tanggal 14 April 2003.
 - a) *Ex* Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI berupa tanah dan gedung SMA Negeri 13 Palembang seluas 25.760 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20/2000;
 - b) *Ex* Kanwil Departemen Sosial RI berupa tanah *ex* Panti sosial seluas 32.450 m² dengan register Nomor 000003 dengan rincian:
 - (1) Sertifikat Hak Pakai Nomor 42/1997 seluas 12.450 m²;

- (2) Sertifikat Hak Pakai Nomor 43/1979 seluas 10.000 m²;
- (3) Sertifikat Hak Pakai Nomor 94/1979 seluas 10.000 m².
3. Pengadaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Palembang dengan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi *double* pencatatan pada TNI AU dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengadaan tanah Tahun 1991
Register 000019 seluas 41.285 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 07/1994;
 - b. Pengadaan tanah tahun 2006 dengan Berita Acara Tahap I Nomor 003/PPT/2006 dan Tahap II Nomor 002/BA/PPT/2006 dengan penjelasan sebagai berikut.
 - 1) Register 000001 seluas 20.388 m² dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4707 Tahun 1998 an. Dra. Hj. Kentjanawati seluas 4.500 m²;
 - b) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4602 Tahun 1997 an. Dra. Hj. Kentjanawati seluas 13.440 m²;
 - c) Alas Hak Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 311/2006 dari BPN Kota Palembang Nomor 311/2006 seluas 2.448 m².
 - 2) Register 000027 seluas 6.100 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 276 Tahun 1975 an. Drg. Gunawan;
 - 3) Register 000028 seluas 860 m² dengan Alas Hak Usaha an. Hattam;
 - 4) Register 000030 seluas 253 m² dengan Alas Hak Usaha an. Syech Erzaman;
 - 5) Register 000031 seluas 7.955 m² dengan Alas Hak Usaha an. H. Dahlan;
 - 6) Register 000029 seluas 1.226 m² dengan Alas Hak Usaha an. Djemakir.
 - c. Pengadaan tanah Tahun 2007 dengan Berita Acara Nomor 004/PPT/2007 dengan register 000002 seluas 22.626 m² dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5265 Tahun 2000 seluas 14.705 m² an. Fatma Rozi Mona;
 - b) Akte Pengoperan Hak Nomor 4579/SKR/1998 seluas 8.000 m² an. Fatma Rozi Mona.
4. Tanah bersertifikat milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terjadi *overlapping*/tumpang tindih kepemilikan berupa sertifikat masyarakat/ pihak lainnya yang diterbitkan oleh pihak BPN di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga timbul permasalahan hukum atas sengketa lahan antara lain.
- a. Tanah yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Sirna Raga Abiasan sebesar Rp4.771.100.000,00 dengan luas 3.400 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 523/K Tahun 1979 terjadi *overlapping*

dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12498 Tahun 2014 seluas 2.770 m² an. Theodora Betty Johan dan Fintang Gani;

- b. Tanah yang tercatat pada BPKAD di Jalan Kol. H. Burlian KM 7 Palembang sebesar Rp16.327.000.000,00 dengan luas 26.815 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 8/Sukarami Tahun 1994 terjadi *overlapping* dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2639 Tahun 1995 an. Daniat bin Usaman seluas 7.963 m² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Tahun 1997 seluas 1.077 m² atas nama Kementerian Keuangan RI. Tanah tersebut digunakan oleh PDAM Tirta Musi dan DPW Partai Persatuan Pembangunan;
 - c. Tanah yang tercatat pada Dinas PU Bina dan Tata Ruang di Jalan Talang Kelapa, RT 12 RW 05, KM 7, Palembang seluas 11.648 m² sebesar Rp1.456.000.000,00 sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 2004 terjadi *overlapping* dengan tanah masyarakat dan dalam proses penyidikan Kejaksaan Negeri Palembang atas dugaan penyerobotan tanah oleh masyarakat.
5. Tanah Kantor UPTB/Samsat Palembang 2 pada Badan Pendapatan Daerah di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Palembang sedang dalam proses upaya hukum kembali;
 6. Tanah yang tercatat di KIB Pengelola BMD pada BPKAD yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun Palembang dengan kode barang 01.01.01.04.003 register 00002 dengan luas 129.075 m² sesuai sertifikat hak pakai Nomor 357 telah dilakukan pemecahaan sebanyak delapan persil tanah sebagaimana pada tabel sebagai berikut.

Tabel 103 Tanah yang Tercatat di KIB Pengelola BMD

(dalam rupiah)

No	Nomor Sertifikat	Surat Ukur/ Gambar Situasi	Nomor Register	Luas Tanah (m ²)	Sertifikat Tahun	Keterangan
1	441	SU No 796/Lorok Pakjo/2018	AAF134863 04.01.03.03.4.00441	5.669	07/09/2018	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	442	SU No 797/Lorok Pakjo/2018	AAF134864 04.01.03.03.4.00442	7.392	09/07/2018	Dinas Kearsipan
3	443	SU No 798/Lorok Pakjo/2018	AAF134865 04.01.03.03.4.00443	6.464	09/07/2018	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	445	SU No 800/Lorok Pakjo/2018	AAF134867 04.01.03.03.4.00445	10.866	09/07/2018	Tanah Kosong Belakang RS.Khodijah)
5	444	SU No 799/Lorok Pakjo/2018	AAF134866 04.01.03.03.4.00444	60.000	09/07/2018	Gedung Kantor RS Khodijah
6	449	SU No 01010/Lorok Pakjo/2020	AAJ178392 04.01.03.03.4.00449	8.765	03/03/2020	Gedung POM Bensin Demang Lebar Daun

No	Nomor Sertifikat	Surat Ukur/ Gambar Situasi	Nomor Register	Luas Tanah (m ²)	Sertifikat Tahun	Keterangan
7	450	SU No 01011/Lorok Pakjo/2020	AAJ178393 04.01.03.03.4.00450	3.089	03/03/2020	Rumah Dinas Wagub Sumsel
8	451	SU No 01012/Lorok Pakjo/2020	AAJ178394 04.01.03.03.4.00451	2.091	03/03/2020	Rumah Dinas Sekda Sumsel
9	452	SU No 01013/Lorok Pakjo/2020	AAJ178395 04.01.03.03.4.00452	4.470	03/03/2020	Gedung Kantor YLKI Sumsel
10	453	SU No 01014/Lorok Pakjo/2020	AAJ178396 04.01.03.03.4.00453	5.261	03/03/2020	Gedung STIPER
11	357	GS No.1991/1991	AC.051598.04.01.0330.400357	15.008	19/09/1991	Tanah Kosong Depan SMK Negeri 5 Palembang
				129.075		

7. Tanah dan bangunan rumah negara *ex* Kanwil Pertambangan Prov. Sumsel pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang terletak di Jalan AKBP Cek Agus No. 40 Kelurahan 8 Ilir Palembang dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 940 dengan nilai tanah sebesar Rp645.000.000,00 diklaim oleh anggota DPRD Prov. Sumsel dan bangunan rumah negara tersebut sudah dirobohkan;
8. Tanah *ex* Kanwil Penerangan Prov. Sumsel yang terletak di Jalan I Nyoman Ratu/Jl. Anwar Sastro Kelurahan Sungai Pangeran Palembang dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1195 dengan nilai perolehan tanah sebesar Rp4.000.000.000,00 dikuasai oleh mantan pegawai/keluarga *ex* Kanwil Penerangan Prov. Sumsel. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan melakukan pendataan penghuni tanah;
9. Tanah milik Pemerintah Provinsi yang digunakan/dimanfaatkan selain Pemerintah Provinsi tanpa ikatan perjanjian antara lain:
 - a. Tanah yang tercatat di KIB Pengelola BMD pada BPKAD yang terletak di Jalan Srijaya-Jalan Pramuka KM 6,5 Palembang seluas 17.611 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 dengan nilai sebesar Rp16.131.676.000,00 digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang;
 - b. Tanah yang tercatat di KIB Pengelola BMD pada BPKAD yang terletak di Jalan Pramuka KM 6,5 Palembang seluas 31.710 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 47 dengan nilai sebesar Rp30.566.920.000,00 digunakan oleh Kwartir Pramuka Cabang Kota Palembang;
 - c. Tanah yang tercatat di KIB Pengelola BMD pada BPKAD yang terletak di Jalan Dr. RM. Bhakti No. 1 RT 14 Kecamatan Sematang Borang seluas 92.622 m² dengan nilai sebesar Rp55.573.200,00 digunakan oleh Pemerintah Kota Palembang sebagai Kantor Camat Sematang Borang dan menjadi penyertaan modal ke PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT SP2J). Sesuai Surat Walikota Palembang Nomor 032/002525/BPKAD/2021 Tanggal

- 22 November 2021 Pemerintah Kota Palembang mengajukan permohonan hibah atas tanah tersebut;
- d. Tanah yang tercatat di KIB pada Dinas Sosial yang terletak di Jalan Sosial KM 6 Palembang seluas 67.887 m² dengan GS Nomor 1681 sebesar Rp10.270.000.000,00 sebagian digunakan oleh Kantor Lurah Suka Bangun Palembang;
 - e. Tanah yang tercatat di KIB pada RSUD Siti Fatimah di Jalan Kol. H. Burlian KM 6,5 Palembang dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 01 seluas 40.000 m² sebagian digunakan oleh gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Palembang;
 - f. Tanah yang tercatat di KIB Pengelola BMD pada BPKAD yang terletak di Jalan Kol. H. Burlian KM 6,5, Palembang dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 8/Sukarami Tahun 1994 dengan luas 26.815 m² sebesar Rp16.327.000.000,00 sebagian digunakan oleh PDAM Tirta Musi dan DPW Partai Persatuan Pembangunan;
 - g. Tanah yang tercatat di KIB Pengelola BMD pada BPKAD yang terletak di Jalan Aerobik, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang seluas 2.815 m² dengan nilai sebesar Rp4.091.000.000,00 digunakan oleh DPW Partai Golkar;
 - h. Tanah yang tercatat di KIB Pengelola BMD pada BPKAD yang terletak di Jalan Aerobik Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang seluas 2.070 m² dengan nilai sebesar Rp3.008.000.000,00 digunakan oleh KNPI;
 - i. Tanah yang tercatat di KIB Pengelola BMD pada BPKAD yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun Palembang seluas 60.000 m² digunakan oleh Rumah Sakit Islam Siti Khadijah.
10. Tanah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 10 seluas 28.128 m² dengan nilai sebesar Rp14.041.000.000,00 yang terletak di Jalan Kol. H. Burlian KM 6,5, Palembang terjadi *double* pencatatan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI akan melakukan pembagian lahan sesuai kebutuhan dan melakukan koreksi pencatatan;
 11. Bukti Kepemilikan Tanah *ex* Kanwil Kesehatan pada Dinas Kesehatan Prov. Sumsel seluas 4.069 m² yang telah diserahkan oleh Ketua TIM Kerja Pusat yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2000 sesuai Berita Acara Serah Terima Satuan Kerja, Personil, Peralatan dan Dokumen/Arsip Instansi Vertikal dari Dept/LPND yang dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Nomor 25/3/TIM KEPPRES 157/2001 tanggal 15 Maret 2001 belum diserahkan pihak Kementerian Kesehatan namun telah di *underlying* oleh Pemerintah Pusat.

2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2022 sebesar Rp2.768.373.058.986,04 setelah mutasi saldo per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp3.225.357.196.046,15 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 104 Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Saldo per 1 Januari 2022 (Audited)	2.768.373.058.986,04
	Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2022	
2	Penambahan :	
	a. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	266.790.598.064,00
	b. Realisasi Belanja BLUD Tahun 2022	37.819.761.287,00
	c. Realisasi Belanja BOS Tahun 2022	38.200.943.191,00
	d.. Pengakuan Utang Tahun 2022	2.017.703.954,00
	e. Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal Tahun 2022	10.805.091.070,00
	f. Hibah / Bantuan Pemerintah Pusat	131.786.310.539,00
	g. Kapitalisasi selain Belanja Modal	79.692.500,00
	h. Mutasi antar OPD	790.380.000,00
	i. Aset perolehan lama yang baru dicatat	70.000.000,00
	j. Aset Ektrakomtable Mutasi/penghapusan	669.261.008,00
	k. Belanja BARJAS terdapat aset peralatan mesin	11.225.000,00
	Jumlah	489.040.966.613,00
3	Pengurangan :	
	a. Belanja Modal Tahun 2022 Tidak Memenuhi Kreteria Aset Tetap	(718.927.186,89)
	b. Utang Tahun 2021 dibayar dengan Belanja Modal Tahun 2022 yang telah diakui Aset Tetap di Tahun 2021	(7.039.505.261,00)
	c. Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal Tahun 2021	(3.424.936.251,00)
	f. Penghapusan	(10.575.848.907,00)
	g. Mutasi antar OPD	(790.380.000,00)
	j. Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi	(8.536.882.647,00)
	j. Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke aset lainnya karena rusak berat	(970.349.300,00)
	Jumlah	(32.056.829.552,89)
4	Saldo per 31 Desember 2022	3.225.357.196.046,15

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp489.040.966.613,00 sebagai berikut.

a. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp266.790.598.064,00 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp40.037.151.794,00;
- 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp37.042.724.173,00;
- 3) BPKAD sebesar Rp4.146.497.300,00;
- 4) Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang sebesar Rp5.863.314.775,00;
- 5) Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp483.500.000,00;
- 6) Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.263.669.104,00;
- 7) Dinas Perhubungan sebesar Rp6.763.565.325,00;
- 8) Dinas Kesehatan sebesar Rp103.514.683.876,00;
- 9) DR. Ernaldi Bahar sebesar Rp2.738.585.191,00;
- 10) Dinas Pendidikan sebesar Rp33.591.475.950,00;
- 11) Badan Perpustakaan sebesar Rp168.964.053,00;
- 12) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp892.743.450,00;
- 13) Dinas Sosial sebesar Rp1.812.762.000,00;
- 14) Dinas Penanggulangan Bencana sebesar Rp1.496.373.630,00;
- 15) Badan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp198.808.992,00;
- 16) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi sebesar Rp233.011.749,00;
- 17) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp1.273.550.000,00;
- 18) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp661.700.000,00;
- 19) Dinas Pertanian TPH sebesar Rp409.852.420,00;
- 20) Dinas Perkebunan sebesar Rp476.360.000,00;
- 21) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp1.160.427.726,00;
- 22) Dinas Kehutanan sebesar Rp594.876.993,00;
- 23) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp530.061.500,00;
- 24) Dinas Perindustrian sebesar Rp 610.720.000,00;
- 25) Dinas Perdagangan sebesar Rp397.366.200,00;
- 26) Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp1.517.720.000,00;
- 27) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.575.881.180,00;
- 28) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp222.337.366,00;

- 29) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.417.781.400,00;
 - 30) Inspektorat Daerah sebesar Rp1.121.039.400,00;
 - 31) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp918.449.750,00;
 - 32) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp631.739.186,00;
 - 33) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp1.903.466.308,00;
 - 34) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp977.200.000,00;
 - 35) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.419.327.225,00;
 - 36) Satuan Pol PP sebesar Rp3.226.910.020,00;
 - 37) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp989.913.653,00;
 - 38) Badan Penghubung sebesar Rp838.031.350,00;
 - 39) Dinas Kearsipan Daerah sebesar Rp1.048.246.025,00;
 - 40) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp619.809.000,00.
- b. Realisasi Belanja BLUD Tahun 2022 sebesar Rp37.819.761.287,00 dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp29.251.151.966,00;
 - 2) Dr. Ernaldi Bahar sebesar Rp1.429.200.937,00;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp6.344.290.106,00;
 - 4) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp795.118.278,00.
- c. Realisasi Belanja Modal BOS Tahun 2022 sebesar Rp38.200.943.191,00 pada Dinas Pendidikan;
- d. Pengakuan Utang Tahun 2022 sebesar Rp2.017.703.954,00 dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Dinas Perhubungan sebesar Rp271.968.250,00;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.745.055.704,00;
 - 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp680.000,00.
- e. Reklasifikasi antar KIB yang berasal dari Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp10.805.091.070,00 antara lain.
- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp16.000.000,00;
 - 2) Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang sebesar Rp199.200.000,00;
 - 3) Dinas Pendidikan sebesar Rp10.201.075.670,00;
 - 4) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp195.560.000,00;
 - 5) Dinas Perindustrian sebesar Rp28.531.400,00;
 - 6) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp164.724.000,00.
- f. Hibah/Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp131.786.310.539,00 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.

- 1) BPKAD sebesar Rp8.318.353.317,00 merupakan hibah perlengkapan Rusunawa di Jakabaring dari Kementerian PU RI;
 - 2) Dinas Perhubungan sebesar Rp508.460.000,00 merupakan hibah kendaraan berupa Bus Sekolah dari Kementerian Perhubungan;
 - 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp146.032.728,00 merupakan hibah dari PT PUSRI Palembang berupa Mobil APV ambulance sebesar 114.000.000,- dan KADIN Tahun 2022 sebesar Rp32.032.728,00;
 - 4) Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebesar Rp104.105.500,00 merupakan hibah dari Satker Kementrian Kesehatan (Pusat Krisis Kesehatan) yang ada di Dinas Kesehatan Prov. Sumsel berupa Tabung Oksigen, *Trolly* dan Regulator;
 - 5) Badan Perpustakaan Daerah sebesar Rp489.462.750,00 merupakan hibah dari Perpustakaan Nasional RI berupa kendaraan dan perlengkapan Perpustakaan Keliling (komputer, modem, TV dll);
 - 6) Dinas Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp33.022.594,00 merupakan hibah berupa kendaraan roda 2 (motor listrik) dari BNPB;
 - 7) Dinas Pertanian TPH sebesar Rp116.916.954.796,00 merupakan hibah berupa 82 unit alat berat dari Kementerian Pertanian RI;
 - 8) Dinas Perdagangan sebesar Rp572.403.800,00 merupakan hibah dari Kementerian Perdagangan RI berupa 2 (dua) unit kendaraan mobil;
 - 9) Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal sebesar Rp43.800.000,00 merupakan hibah dari Kementerian Inventasi/BKPM RI berupa 2 (dua) buah Laptop;
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp4.653.715.054,00 merupakan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berupa mobil dan peralatan laboratorium.
- g. Kapitalisasi selain Belanja Modal sebesar Rp79.692.500,00 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Dinas Perdagangan sebesar Rp35.000.000,00 merupakan pembelian 16 unit trali dan pembuatan meja resepsionis dengan menggunakan belanja barang dan jasa;
 - 2) Satuan Pol PP sebesar Rp44.692.500,00 merupakan pembelian aksesoris mobil dengan nilai sebesar Rp35.420.000,00 untuk mobil lama dan sebesar Rp9.272.500,00 untuk mobil baru.
- h. Mutasi antar SKPD sebesar Rp 790.380.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp340.700.000,00,00 merupakan mutasi kendaraan dinas roda 4 BG 1359 MZ dari Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Dinas Sosial sebesar Rp449.680.000,00 merupakan mutasi dari Pengelola BMD BPKAD berupa kasur untuk panti asuhan.
- i. Aset perolehan lama yang baru dicatat sebesar Rp70.000.000,00 pada Dinas Pendidikan berupa *table advance* di SMA Negeri Makakau Ilir.

j. Aset ekstrakomptabel yang dilakukan penghapusan sebesar Rp669.261.008,00 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp140.921.750,00;
- 2) BPKAD sebesar Rp13.895.000,00;
- 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp411.496.641,00;
- 4) Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebesar Rp40.058.582,00;
- 5) Dinas Pendidikan sebesar Rp34.107.035,00;
- 6) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp500.000,00;
- 7) Dinas Perindustrian sebesar Rp27.382.000,00;
- 8) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp900.000,00.

k. Belanja Barjas terdapat Aset Tetap berupa peralatan mesin di Rumah sakit Dr. Ernaldi Bahar sebesar Rp11.225.000,00 temuan Kantor Akuntan Publik antara lain :

- 1) *Speaker portable wireless* senilai Rp2.050.000,00;
- 2) *Air Compressor* senilai Rp1.840.000,00;
- 3) Mesin lass 900 watt senilai Rp2.375.000,00;
- 4) Mesin *mini grinder* senilai Rp2.485.000,00;
- 5) *Battery dan charger starter kit* senilai Rp2.475.000.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp32.056.829.552,89 berasal dari.

a. Belanja Modal Tahun 2022 Tidak Masuk Kriteria Aset Tetap sebesar Rp718.927.186,89 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp481.122.269,00;
- 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp71.772.000,00;
- 3) Dinas Perhubungan sebesar Rp159.582.917,89;
- 4) Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebesar Rp1.650.000,00; dan
- 5) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp4.800.000,00.

b) Utang Tahun 2021 dibayar dengan Belanja Modal Tahun 2022 yang telah diakui Aset Tetap di Tahun 2021 sebesar Rp7.039.505.261,00 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp139.640.200,00;
- 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp5.524.100.635,00;
- 3) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.150.352.600,00;
- 4) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp205.201.826,00;
- 5) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp20.210.000,00.

- c) Reklasifikasi antar KIB berasal dari Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp3.424.936.251,00 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp408.024.133,00;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp59.244.320,00;
 - 3) BPKAD sebesar Rp31.968.000,00;
 - 4) Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp77.499.998,00;
 - 5) Dinas Perhubungan sebesar Rp671.342.000,00;
 - 6) Dinas Kesehatan sebesar Rp299.700.000,00;
 - 7) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.762.873.800,00;
 - 8) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp75.930.000,00;
 - 9) Dinas Kearsipan Daerah sebesar Rp38.354.000,00.
- d) Penghapusan aset berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.575.848.907,00 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.857.530.710,00 merupakan penghapusan peralatan mesin rusak berat sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 585/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 11 Agustus 2022;
 - 2) BPKAD sebesar Rp20.250.000,00 merupakan penghapusan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua yang sudah ada putusan majelis TPTGR dengan nomor polisi BG 5242 NZ dan BG 7671 MZ;
 - 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp5.050.601.112,00 merupakan penghapusan aset rusak berat di Rumah sakit Paru dan Dinas Kesehatan;
 - 4) Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebesar Rp695.773.105,00;
 - 5) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.606.285.980,00 merupakan penghapusan aset rusak berat pada SMAN 4 Palembang sebesar Rp579.922.000,00, SMAN 17 Palembang sebesar Rp1.311.707.380,00, dan SMAN 11 Palembang sebesar Rp714.656.600,00; dan
 - 6) Dinas Perindustrian sebesar Rp345.408.000,00 merupakan Penghapusan Peralatan dan Mesin sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 734/KPTS/BPKAD/2022.
- e) Mutasi antar SKPD sebesar Rp790.380.000,00 merupakan mutasi kurang dengan rincian sebagaimana penjelasan pada poin 2 huruf (h);
- f) Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp8.532.737.981,00 ke ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 105 Reklas Aset Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Penambahan Ekstrakomptabel
1	Sekretariat DPRD	40.607.820,00
2	Sekretariat Daerah	226.570.400,00

No	Nama OPD	Penambahan Ekstrakomptabel
3	BPKAD	5.330.000,00
4	Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang	39.560.600,00
5	Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air	12.757.000,00
6	Dinas PU. Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.748.000,00
7	Dinas Kesehatan	462.766.820,00
8	DR. Ernaldi Bahar	210.828.091,00
9	Dinas Pendidikan	7.345.199.086,00
10	Dinas Perkebunan	1.310.000,00
11	Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan	34.710.000,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.503.000,00
13	Dinas Perindustrian	1.856.400,00
14	Dinas Koperasi dan UKM	2.700.000,00
15	Dinas Energi dan Sumber Daya mineral	41.592.150,00
16	Badan Pendapatan	2.606.180,00
17	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	3.000.000,00
18	Badan Penelitian dan Pengembangan	36.752.100,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	4.596.900,00
20	Dinas Pariwisata	3.250.000,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	490.100,00
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.000.000,00
23	Badan Penghubung	18.537.000,00
24	Arsip Daerah	26.861.000,00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.750.000,00
Jumlah		8.536.882.647,00

- g) Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin rusak berat sebesar Rp970.349.300,00 ke aset lainnya pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp205.205.800,00 merupakan aset rusak berat hasil pemeriksaan fisik;
 - 2) Dinas Perdagangan sebesar Rp572.403.800,00 merupakan hibah dari Kementerian Perdagangan RI berupa 2 (dua) unit kendaraan Dinas; dan
 - 3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp192.739.700,00 merupakan aset rusak berat hasil pemeriksaan fisik.

3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2022 sebesar Rp4.462.812.938.458,99. Setelah mutasi saldo per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp4.907.444.174.181,42 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 106 Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Saldo per 1 Januari 2022 (<i>Audited</i>)	4.462.812.938.458,99
	Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2022	
1	Penambahan :	
a.	Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	359.454.906.985,82
b.	Realisasi Belanja Modal BLUD Tahun 2022	2.113.258.924,00
c.	Pengakuan Utang Tahun 2022	10.096.050.640,70
d.	Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal Tahun 2022	26.722.866.581,79
e.	Sisa belanja modal tahun 2022 yang tidak ditagih	181.658.970,55
f.	Hibah / Bantuan Pemerintah Pusat	124.101.487.451,00
g.	Kapitalisasi (selain belanja modal)	6.311.683.927,53
h.	Mutasi antar OPD	4.101.915.000,00
i.	Aset perolehan lama yang baru dicatat	5.715.466.450,00
j.	Tindak lanjut Temuan BPK RI	7.879.667.305,16
k.	Aset ekstrakomtable reklasifikasi ke Aset Tetap	3.371.310.380,00
l.	Aset rusak berat reklasifikasi ke Aset Tetap	1.152.540.050,00
m.	Reklasifikasi dari KIB D temuan BPK RI	3.243.159.366,24
	Jumlah	554.445.972.032,79
2	Pengurangan :	
a.	Belanja Modal Tidak Memenuhi Kreteria Aset Tetap	(1.055.850.000,00)
b.	Pembayaran Utang Tahun Lalu	(20.409.040.678,00)
c.	Reklasifikasi Antar KIB Belanja Modal Tahun 2022	(78.213.495.705,33)
d.	Hibah keluar	(613.342.522,00)
e.	Penghapusan Aset Tetap gedung bangunan	(3.478.917.650,00)
f.	Mutasi antar OPD	(4.101.915.000,00)
g.	Reklasifikasi aset gedung dan bangunan dibawah nilai kapitalisasi	(273.317.850,00)
h.	Koreksi pencatatan atas kekurangan volume pekerjaan	(1.668.856.905,03)
	Jumlah	(109.814.736.310,36)
	Saldo per 31 Desember 2022	4.907.444.174.181,42

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp554.445.972.032,79 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar Rp359.454.906.985,82 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp21.601.274.450,00;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp16.000.000,00 ;
 - 3) BPKAD sebesar Rp198.678.000,00;
 - 4) Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang sebesar Rp23.832.300.773,00;
 - 5) Dinas PU. Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp49.673.000,00;
 - 6) Dinas PU. Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp50.120.695.955,00;

- 7) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.742.697.450,00;
 - 8) Dinas Kesehatan sebesar Rp82.523.042.752,49;
 - 9) Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebesar Rp1.936.546.503,00;
 - 10) Dinas Pendidikan sebesar Rp155.402.678.534,00;
 - 11) Badan Perpustakaan Daerah sebesar Rp89.360.000,00;
 - 12) Dinas Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.816.673.000,00;
 - 13) Dinas Pertanian TPH sebesar Rp924.584.815,00;
 - 14) Dinas Perkebunan sebesar Rp197.442.000,00;
 - 15) Dinas Kehutanan sebesar Rp189.859.122,00;
 - 16) Dinas Perindustrian sebesar Rp152.500.000,00;
 - 17) Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp896.940.600,00;
 - 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp376.500.000,00;
 - 19) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp14.198.397.282,33;
 - 20) Badan Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp195.000.000,00;
 - 21) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp226.915.600,00;
 - 22) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp753.898.049,00;
 - 23) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp99.804.000,00;
 - 24) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp848.593.100,00;
 - 25) Badan Penghubung sebesar Rp64.852.000,00.
- b) Realisasi belanja modal BLUD Tahun 2022 sebesar Rp2.113.258.924,00 pada SKPD:
- 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.715.964.924,00;
 - 2) Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebesar Rp397.294.000,00.
- c) Pengakuan utang Tahun 2022 sebesar Rp10.096.050.640,70 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp662.773.300,00;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.302.350.505,00;
 - 3) Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang sebesar Rp818.954.068,00;
 - 4) Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp138.215.000,00;
 - 5) Dinas Perhubungan sebesar Rp86.480.000,00,
 - 6) Dinas Kesehatan sebesar Rp4.463.142.837,70 ;
 - 7) Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebesar Rp94.397.447,00;
 - 8) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.266.928.033,00;
 - 9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp139.667.000,00;
 - 10) Dinas Pertanian TPH sebesar Rp33.166.850,00;
 - 11) Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp47.207.400,00;
 - 12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp42.768.200,00.
- d) Reklasifikasi antar KIB yang berasal dari Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp26.722.866.581,79 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.038.841.776,00;

- 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp25.044.827.805,79;
 - 3) BPKAD sebesar Rp31.968.000,00;
 - 4) Dinas Kesehatan sebesar Rp244.200.000,00;
 - 5) Dinas Pendidikan sebesar Rp44.400.000,00;
 - 6) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp100.875.000,00;
 - 7) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp179.400.000,00;
 - 8) Dinas Kearsipan Daerah sebesar Rp38.354.000,00.
- e) Sisa belanja modal Tahun 2022 yang tidak ditagih sebesar Rp181.658.970,55 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp181.658.966,00 merupakan sisa pembayaran yang tidak ditagih oleh pihak rekanan;
 - 2) Dinas PU Bina Marga dan tata Ruang Prov. Sumsel sebesar Rp455,00 merupakan pembulatan tagihan yang tidak ditagihkan oleh rekanan atas pembayaran kontrak pembuatan/ rehab *workshop* UPTD Lahat.
- f) Hibah/Bantuan Pemerintah Pusat/Pihak Ketiga sebesar Rp124.101.487.451,00 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.
- 1) BPKAD sebesar Rp67.465.209.891,00 merupakan hibah 3 (tiga) gedung bangunan Rusunawa di Jakabaring dari Kementerian PU RI;
 - 2) Dinas Perhubungan sebesar Rp51.576.202.000,00 merupakan hibah berupa bangunan dermaga penyeberangan Tanjung Api-Api dari Kementerian Perhubungan RI;
 - 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp650.000.000,00 merupakan hibah rehab gedung dari bantuan CSR PT Bukit Asam Tbk;
 - 4) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp4.410.075.560,00 merupakan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berupa bangunan pabrik oli bekas di Tanjung Api-Api.
- g) Kapitalisasi selain belanja modal sebesar Rp6.311.683.927,53 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut :
- 1) BPKAD sebesar Rp633.640.750,00 merupakan belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetap gedung antara lain :
 - Belanja rehab ruangan rapat BPKAD sebesar 590.200.900,00;
 - Belanja konsultan pengawasan pembuatan tugu/plang nama sebesar Rp14.652.000,00;
 - Belanja Konsultan Perencanaan sebesar Rp28.787.850,00.
 - 2) Dinas Sosial sebesar Rp216.885.693,00 merupakan rehab tempat pakir dan tanjak gapura dengan menggunakan anggaran belanja barang dan jasa;
 - 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp686.211.000,00 merupakan rehab gedung kantor sebesar Rp590.081.000,00 dan rehab rumah aman (*safe house*) sebesar Rp96.130.000'00 dengan menggunakan anggaran belanja barang dan jasa;
 - 4) Dinas Kehutanan sebesar Rp24.699.000,00 merupakan biaya pengawasan sebesar Rp9.879.000,- dan konsultan Rp14.820.000,- pada pembangunan

- pos jaga di UPTD KPH Wilayah X Dempo Pagaralam dengan menggunakan anggaran belanja barang dan jasa;
- 5) Dinas Perdagangan sebesar Rp911.732.895,00 merupakan rehab gedung kantor BPSMB sebesar Rp755.092.787,00, rehap atap gedung kantor dan pembuatan tanjak sebesar Rp156.640.108,00 dengan menggunakan anggaran belanja barang dan jasa;
 - 6) Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp149.600.000,00 merupakan biaya pengawasan dan perencanaan rehab gedung B;
 - 7) Inspektorat Daerah sebesar Rp384.856.608,00 merupakan rehab gedung kantor;
 - 8) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp1.648.401.878,53 merupakan rehab gedung kantor, mess dan pembuatan tempat parkir dengan menggunakan anggaran belanja barang dan jasa;
 - 9) Dinas Pariwisata dan kebudayaan sebesar Rp543.527.000,00 merupakan jasa konsultan dan pengawasan rehab gedung utama kantor dengan menggunakan anggaran belanja barang dan jasa;
 - 10) Satuan Pol PP sebesar Rp320.708.120,00 merupakan rehab pagar sebesar Rp71.778.030,00 dan rehab gedung kantor sebesar Rp248.930.090,00;
 - 11) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp13.553.383,00 merupakan biaya pengawasan dan perencanaan rehab tempat parkir;
 - 12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp777.867.600,00 merupakan rehab Aula Putri Kembang Dadar dan Garasi/ tempat parkir dengan menggunakan anggaran belanja barang dan jasa BLUD.
- h) Mutasi antar SKPD sebesar Rp4.101.915.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp138.700.000,00 merupakan mutasi dari Dinas Perindustrian untuk rumah aman sesuai SK Gubernur Nomor 273/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 13 April 2022;
 - 2) Badan Penghubung sebesar Rp121.528.000,00 merupakan mutasi Pekerjaan Rehab rumah limas dari Dinas PU. Perumahan dan kawasan Permukiman;
 - 3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp3.841.687.000,00 merupakan mutasi dari Dinas Kesehatan berupa bangunan gedung yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- i) Aset perolehan lama yang baru dicatat sebesar Rp5.715.466.450,00 dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp4.106.641.450,00 merupakan rehab gedung BAPELKES yang dilakukan di tahun 2021 dengan nilai rehab Sebesar Rp3.821.720.000,00, perencanaan sebesar Rp187.736.450,00 dan pengawasan sebesar Rp97.185.000,00 dengan menggunakan anggaran belanja barang dan jasa;
 - 2) Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp147.140.000,00 merupakan rehab gedung STP 3 berupa rehab atap, lantai dan kusen dengan menggunakan anggaran belanja barang dan jasa Tahun 2021;

- 3) Badan Penghubung sebesar Rp1.461.685.000,00 merupakan bangunan panggung terbuka di rumah anjungan TMII Jakarta.
- j) Tindak lanjut temuan BPK RI sebesar Rp7.879.667.305,16 dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.771.229.155,16 merupakan tindak lanjut temuan BPK RI berupa Aset Tetap Renovasi yang belum dikapitalisasi ke aset induknya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa rehab gedung PKK Rajawali dan PAUD;
 - 2) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp3.328.588.150,00 merupakan temuan BPK RI berupa KDP yang belum diatribusikan ke induk aset yang telah selesai pekerjaannya sesuai Berita Acara *Final Hand Over* (FHO) berupa pembangunan gedung kantor UPTDJJ Kabupaten OKI;
 - 3) Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp2.779.850.000,00 merupakan tindak lanjut temuan BPK RI atas Aset Tetap Renovasi yang belum dikapitalisasi ke induknya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pembangunan pintu gerbang Kebun Raya Sriwijaya.
- k) Aset ekstrakomptabel yang direklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp3.371.310.380,00 pada SKPD sebagai berikut.
- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp2.835.670.780,00 merupakan aset bangunan yang semula tercatat sebagai ekstrakomptabel dengan nilai induknya lebih kecil atau dibawah nilai kapitalisasi namun nilai rehab lebih besar dari batasan nilai kapitalisasi antara lain: Gedung Legiun Veteran, Gedung PKK, Gudang Pundi Kayu, dan rumah sopir di Pundi Kayu;
 - 2) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp482.700.000,00 merupakan pencatatan gedung garasi dengan kode barang 3.1.1.14.2 Nomor register 00002 yang semula nilai induk lebih kecil dari nilai kapitalisasi namun nilai rehab bangunan lebih besar dari nilai kapitalisasi;
 - 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp16.800.000,00 merupakan mutasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 4) Dinas Pendidikan sebesar Rp30.539.600,00 merupakan ekstrakomptabel menjadi intrakomptabel dengan rincian sebagai berikut.
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp1.059.600,00;
 - BLPT sebesar Rp7.920.000,00;
 - SMAN 1 Sirah Padang sebesar Rp10.560.000,00;
 - SMAN 1 Pulau Beringin sebesar Rp11.000.000,00.
 - 5) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp5.600.000,00 merupakan aset ekstrakomptabel Gedung Parkir I dan II sebesar Rp5.600.000,00.
- l) Aset rusak berat yang direklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp1.152.540.050,00 terdapat pada Dinas Pendidikan merupakan aset rusak berat yang direhab kembali menjadi baik;
- m) Reklasifikasi dari KIB D temuan BPK RI berupa bangunan pagar, ruang kelas dan pos jaga sebesar Rp3.243.159.366,24 antara lain :

- 1) Sekretariat Daerah senilai Rp97.673.000,00;
- 2) Dinas Pengelola Sumber Daya Air senilai Rp79.480.000,00;
- 3) Dinas Pendidikan senilai Rp2.966.506.366,24;
- 4) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp99.500.000,00.

Pengurangan Aset Tetap gedung dan bangunan Tahun 2022 sebesar Rp109.814.736.310,36 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Belanja Modal Tahun 2022 tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sebesar Rp1.055.850.000,00 yang terdapat pada SKPD, terdiri dari.
 - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp972.025.000,00 merupakan pembuatan interior rumah dinas ketua dan wakil ketua;
 - 2) Dinas Perindustrian sebesar Rp83.825.000,00 merupakan pekerjaan pengaturan meja dan perkabelan serta upah, perbaikan 2 (dua) buah kloset, pengecekan pipa air dan upah perbaikan plafon, pengecatan/perawatan *tedmond*, pemasangan *wallpaper* dan pengecatan ruangan.
- b) Pembayaran utang tahun lalu dengan menggunakan anggaran Belanja Modal Tahun 2022 yang telah diakui sebagai aset di Tahun 2021 sebesar Rp20.409.040.678,00 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp67.171.700,00;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.667.452.750,00;
 - 3) Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang sebesar Rp5.567.319.181,00;
 - 4) Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp49.673.000,00;
 - 5) Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp112.355.450,00;
 - 6) Dinas Kesehatan sebesar Rp3.375.982.400,00;
 - 7) Dinas Pendidikan sebesar Rp9.439.443.532,00;
 - 8) Dinas Pertanian TPH sebesar Rp22.321.065,00;
 - 9) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp42.469.600,00; dan
 - 10) Badan Penghubung sebesar Rp64.852.000,00.
- c) Reklasifikasi antar KIB yang berasal dari Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp78.213.495.705,33 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp851.394.900,00;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp16.000.000,00;
 - 3) Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang sebesar Rp199.200.000,00;
 - 4) Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp47.184.353.625,00;
 - 5) Dinas Pendidikan sebesar Rp15.735.618.498,00;
 - 6) Dinas Perindustrian sebesar Rp28.531.400,00; dan
 - 7) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp14.198.397.282,33.
- d) Hibah keluar entitas pelaporan sebesar Rp613.342.522,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan hibah kepada Pemerintah Kota Pagar Alam sesuai Keputusan Gubernur Nomor 976/KPTS/BPKAD/2022 tentang Penghapusan Bangunan yang telah dihibahkan ke Pemerintah Kota Pagaram.
- e) Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.478.917.650,00 pada SKPD.

- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp161.800.000,00 merupakan penghapusan gedung bangunan mushola;
 - 2) Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang sebesar Rp1.080.106.000,00 merupakan penghapusan gedung kantor di UPTD Kota Palembang sebesar Rp120.800.000,00 dan penghapusan rumah dinas dan kantor II *ex* Kantor Cabang Dinas Martapura, UPTD PJ3 sebesar Rp959.306.000,00;
 - 3) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.039.047.000,00 merupakan Penghapusan gedung pada SMAN 1 Banyuasin II sebesar Rp955.347.000,00 dan SMKN 2 Lahat sebesar Rp83.700.000,00;
 - 4) Dinas Perindustrian sebesar Rp63.600.000,00 merupakan penghapusan *ex showroom* Rotan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 605/KPTS/BPKAD/2022;
 - 5) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp585.400.000,00 merupakan penghapusan gedung dan bangunan di UPTB OKI I sesuai Keputusan Gubernur Nomor 974/KPTS/BPKAD/2022;
 - 6) BPKAD senilai Rp367.420.650,00 merupakan pekerjaan pengecatan yang memiliki fisik bangunan dan menjadi temuan BPK RI untuk dilakukan penghapusan;
 - 7) Dinas Kesehatan senilai Rp89.430.000,00 merupakan pekerjaan pengecatan yang tidak memiliki fisik bangunan dan menjadi temuan BPK RI untuk dilakukan penghapusan; dan
 - 8) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp92.114.000,00 merupakan pekerjaan perbaikan lampu di Masjid Agung Palembang yang fisiknya sudah tidak ada lagi dan menjadi temuan BPK untuk dilakukan penghapusan.
- f) Mutasi antar SKPD sebesar Rp4.101.915.000,00 sebagaimana penjelasan pada angka 1 huruf h).
- g) Reklasifikasi aset gedung dan bangunan dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp273.317.850,00 pada SKPD.
- 1) BPKAD sebesar Rp242.117.850,00;
 - 2) Dinas Pendidikan sebesar Rp14.400.000,00;
 - 3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp16.800.000,00.
- h. Koreksi pencatatan terhadap kekurangan volume pekerjaan atas temuan BPK RI sebesar Rp1.668.856.905,03 yang terdapat pada.
- 1) Sekretariat DPRD senilai Rp415.252.534,53;
 - 2) Sekretariat Daerah senilai Rp44.781.651,86;
 - 3) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang senilai Rp168.058.395,90;
 - 4) Dinas Kesehatan senilai Rp603.307.909,94;
 - 5) Dinas Pendidikan senilai Rp437.456.412,80.

4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2022 sebesar Rp12.991.502.065.603,37 setelah mutasi saldo per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp13.723.350.167.230,60 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 107 Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
	Saldo per 1 Januari 2022 (<i>audited</i>)	12.991.502.065.603,37
	Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2022	
1	Penambahan:	
a.	Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	747.421.639.258,46
b.	Pengakuan Utang tahun 2022	41.616.626.898,00
c.	Realisasi Belanja Modal BLUD Tahun 2022	390.616.640,00
d.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2022	7.808.235.099,72
e.	Sisa belanja modal 2022 yang tidak ditagih	2,00
f.	Reklasifikasi antar KIB	24.692.469.124,00
g.	Tindak lanjut temuan BPK RI	283.406.814.777,87
h.	Aset Ekstrakompatabel Mutasi/penghapusan	1.080.491.264,00
	Jumlah	1.106.416.893.064,05
2	Pengurangan:	
a.	Pembayaran Utang Tahun 2021 dibayar dengan Belanja Modal (Tahun 2022 yang telah diakui sebagai aset di Tahun 2022)	(225.712.925.830,00)
b.	Belanja modal tahun 2022 tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	(959.928.231,00)
c.	Reklasifikasi belanja modal tahun 2022	(140.817.098.504,00)
d.	Reklasifikasi aset dibawah nilai kapitalisasi	(425.093.350,00)
e.	Reklasifikasi ke KIB C temuan BPK RI	(3.253.759.366,24)
f.	Koreksi pencatatan atas kekurangan volume pekerjaan	(3.399.986.155,58)
	Jumlah	(374.568.791.436,82)
	Saldo per 31 Desember 2022	13.723.350.167.230,60

Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2022 sebesar Rp1.106.416.893.064,05 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp747.421.639.258,46 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp762.802.193,00;
 - 2) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp703.825.069.937,46;
 - 3) Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp42.570.242.628,00;
 - 4) Dinas Kesehatan sebesar Rp89.088.000,00; dan
 - 5) Dinas Pendidikan sebesar Rp174.436.500,00.
- b) Pengakuan Utang Tahun 2022 sebesar Rp41.616.626.898,00 pada SKPD:
 - 1) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp37.617.963.304,00;
 - 2) Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp3.933.664.094,00; dan
 - 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp64.999.500,00.

- c) Realisasi belanja modal BLUD Tahun 2022 sebesar Rp390.616.640,00 terdapat pada Dinas Kesehatan;
- d) Reklasifikasi belanja modal Tahun 2022 sebesar Rp7.808.235.099,72 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp947.176.800,00;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp801.649.249,72;
 - 3) Dinas Perhubungan sebesar Rp671.342.000,00;
 - 4) Dinas Pendidikan sebesar Rp5.143.180.050,00; dan
 - 5) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp244.887.000,00.
- e) Sisa belanja modal Tahun 2022 yang tidak ditagih sebesar Rp2,00 terdapat pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang berupa pembulatan tagihan atas kegiatan pengawasan teknis paket 11 dan paket 12 yang tidak ditagihkan;
- f) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp24.692.469.124,00 terdapat di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang berupa reklas dari KIB L kegiatan peningkatan Jalan Betung-Petanggan sebesar Rp14.406.606.124,00 dan rehab Jalan Karang Dapo-Ma. Lakitan sebesar Rp10.285.863.000,00 merupakan jalan kewenangan Pemprov. Sumsel;
- g) Tindak lanjut temuan BPK RI tahun lalu sebesar Rp283.406.814.777,87 antara lain:
- 1) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp276.813.511.284,79 merupakan tindak lanjut temuan BPK RI berupa KDP yang belum diatribusikan ke aset induk yang telah selesai pekerjaannya sesuai Berita Acara *Final Hand Over* (FHO) pada tabel sebagai berikut.

Tabel 108 KDP yang Belum Diatribusikan ke Aset Induk

(dalam rupiah)

Nama Aset	Register	Lokasi	Tanggal Perolehan	Harga
1	2	3	4	5
Jalan Propinsi Lain-lain	2214	Jalan Penghubung Pendopo (PALI)-Sp. Kulim (Bts. Mura)	30/12/2021	15.955.564.215,00
Jalan Propinsi Lain-lain	2215	Jl. Penghubung Sp. Kulim (Bts. Mura)-Menara Pengamat 33	30/12/2021	89.601.643.220,96
Jalan Propinsi Lain-lain	2216	Jl. Tanjung Raja-Sp. Tambang Rambang	30/12/2021	12.842.159.300,00
Jalan Propinsi Lain-lain	2217	Jl. Bts. Kab. OKI-Sp. Kepuh (Desa Harisan)	30/12/2021	5.224.725.547,00
Jalan Propinsi Lain-lain	2218	Jl. Tajung Raya-Bts. Prov. Bengkulu	30/12/2021	7.078.545.450,00
Jalan Propinsi Lain-lain	2219	Jl. Kurungan Nyawa-Martapura	30/12/2021	5.243.651.500,00
Jalan Propinsi Lain-lain	2220	Jl. Bts. OKI-Sp. Kepuh	30/12/2021	13.052.599.018,66
Jalan Propinsi Lain-lain	2221	Jl. Ujan Mas-Bts. Prov. Bengkulu (APBD-P)	30/12/2021	11.995.446.000,00
Jalan Propinsi Lain-lain	2222	Jl. Sp. Tambang Rambang-Bts. Kab. OKU	30/12/2021	5.436.751.000,00
Jalan Propinsi Lain-lain	2223	Jl. Sp. Martapura-Muara Dua	30/12/2021	13.177.581.800,00
Jalan Propinsi Lain-lain	2224	Jl. Muara Dua-Kota Batu-Bts. Prov. Lampung	30/12/2021	5.727.533.900,00

Nama Aset	Register	Lokasi	Tanggal Perolehan	Harga
Jalan Propinsi Lain-lain	2225	Jl. Sp. Haji-Sp. Campang	30/12/2021	6.921.309.895,00
Jembatan Propinsi lain-lain	1584	Jembatan Air Tuha	30/12/2021	11.890.766.855,00
Jembatan Propinsi lain-lain	1585	Jembatan Air Kurup (Lubuk Batang) Kab. OKU	30/12/2021	19.797.497.784,43
Jembatan Propinsi lain-lain	1586	Jembatan Sukaraja	30/12/2021	6.994.854.640,00
Jembatan Propinsi lain-lain	1587	Jl. Penghubung Sp. Semambang-Menara Pengamat 33	30/12/2021	45.872.881.158,74
Jumlah				276.813.511.284,79

- 2) Dinas Perhubungan sebesar Rp2.094.284.800,00 merupakan tindak lanjut temuan BPK RI berupa KDP yang belum diatribusikan ke aset induknya; dan
 - 3) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp4.499.018.693,08 merupakan tindak lanjut temuan BPK RI atas Aset Tetap Renovasi (ATR) yang belum dikapitalisasi ke aset induk dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pembangunan akses jalan menuju mess karyawan, rumah dinas dan *Guest house* Kebun Raya Sriwijaya.
- h) Aset ekstrakomptabel menjadi intrakomptabel dan penghapusan aset ekstrakomptabel sebesar Rp 1.080.491.264,00 pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Aset ekstrakomptabel menjadi intrakomptabel sebesar Rp1.041.291.264,00 berupa jembatan provinsi lain-lain register 941 sebesar Rp3.070.080,00 dan jembatan provinsi lain-lain register 935 sebesar Rp1.038.221.184,00; dan
 - 2) Aset ekstrakomptabel senilai Rp39.200.000,00 reklas ke Aset Tetap Gedung Bangunan sesuai temuan BPK RI.
- Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2022 sebesar Rp374.568.791.436,81 dengan penjelasan sebagai berikut:
- a) Utang tahun lalu dibayar dengan Belanja Modal Tahun 2022 yang telah diakui sebagai aset di Tahun 2021 sebesar Rp225.712.925.830,00 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang sebesar Rp223.060.488.397,00;
 - 2) Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp2.563.349.433,00; dan
 - 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp89.088.000,00.
 - b) Belanja Modal Tahun 2022 tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sebesar Rp959.928.231,00 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp585.245.381,00 dengan rincian:
 - Jasa pemasangan jembatan *bailey* sebesar Rp170.794981,00;
 - Pemeliharaan berkala *fly over* Jakabaring berupa pengecatan dll sebesar Rp188.918.200,00;

- Pemeliharaan berkala jembatan ruas SP OPI- SP Babatan Sodagar-Sungai Rebong Sri Jabu (Pengecatan dll) sebesar Rp152.687.200,00; dan
 - Pemeliharaan berkala Jembatan Air Selangis berupa pengecatan dll sebesar Rp72.845.000,00.
- 2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp374.682.850,00 merupakan Pembuat Biopori di Kecamatan Sukarami dan Ilir Timur 2 Palembang.
- c) Reklasifikasi belanja modal tahun 2022 sebesar Rp140.817.098.504,00 pada SKPD sebagai berikut:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp726.599.543,00 merupakan reklas belanja modal ke gedung bangunan dengan rincian:
 - penerangan jalan rumah dinas WK I sebesar Rp86.405.000,00;
 - bangunan taman kantor sebesar Rp193.873.751,00;
 - lampu taman kantor sebesar Rp199.167.300,00;
 - lampu hias taman kantor sebesar Rp199.512.492,00, dan
 - lampu hias rumah dinas WK II sebesar Rp47.641.000,00.
 - 2) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp117.185.063.077,00 merupakan:
 - a. reklasifikasi Belanja Modal ke Kontruksi Dalam Pekerjaan (KDP) sebesar Rp109.535.385.567,00 dengan rincian :
 - Jl. Penghubung menara pengamat 33/SP Kulim sebesar Rp74.457.663.119,00;
 - Jl. SP Campang-Hujan Emas-Bts Bengkulu sebesar Rp7.329.289.900,00;
 - Jl. Kurungan Nyawa Martapura sebesar Rp3.651.473.000,00;
 - Jl. Martapura SP Martapura sebesar Rp4.148.156.000,00;
 - Jl. Tanjung Raya-Bts Bengkulu sebesar Rp7.201.837.548,00;
 - Jembatan Air terentang sebesar Rp8.349.635.000,00;
 - Jl. SP Tambang Bts Kab. OKU sebesar Rp1.831.722.000,00; dan
 - Jl. Tanah Abang trans SP II sebesar Rp2.565.609.000,00.
 - b. reklasifikasi ke KIB L sebesar Rp7.649.677.510,00 dengan rincian:
 - Taman Kenten sebesar Rp175.204.400,00;
 - Jl. Akses Musi VI sebesar Rp5.835.836.110,00; dan
 - Taman trotoar di bawah Jembatan Musi VI sebesar Rp1.638.637.000,00.
 - 3) Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp22.905.435.884,00.
- d) Reklasifikasi aset dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp425.093.350,00 pada SKPD:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp36.202.650,00;
 - 2) Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang sebesar Rp124.334.000,00;
 - 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp123.851.700,00; dan
 - 4) Dinas Pendidikan sebesar Rp140.705.000,00
- e) Reklasifikasi ke KIB C temuan BPK RI berupa bangunan pagar, ruang kelas, dan pos jaga sebesar Rp3.253.759.366,24 antara lain:

- 1) Sekretariat Daerah senilai Rp97.673.000,00;
 - 2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air senilai Rp79.480.000,00;
 - 3) Dinas Pendidikan senilai Rp2.977.106.366,24; dan
 - 4) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp99.500.000,00.
- f) Koreksi pencatatan terhadap kekurangan volume pekerjaan atas temuan BPK RI audit LKPD dan DTT sebesar Rp3.399.986.155,58 pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2022 sebesar Rp671.272.671.147,30 setelah mutasi saldo per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp747.614.026.026,74 dengan rincian pada Tabel 108.

Tabel 109 Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Saldo Per 1 Januari 2022 (audited)	671.272.671.147,30
	Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2022	
1	Penambahan:	
a.	Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	37.051.849.443,00
b.	Realisasi Belanja BLUD	802.102.592,00
c.	Pengakuan Utang tahun 2022	2.123.799.850,00
d.	Realisasi Belanja Modal BOS	37.615.993.755,00
e.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2022	62.109.332.895,00
f.	Hibah Masuk	26.470.000,00
g.	Reklas antar KIB	179.450.000,00
f)	Aset ekstrakomtable reklasifikasi ke Aset Tetap	68.646.000,00
	Jumlah	139.977.644.535,00
2	Pengurangan:	
a.	Utang tahun lalu dibayar dengan Belanja Modal Tahun 2022 yang telah diakui sebagai aset di Tahun 2021	(1.853.155.968,00)
b.	Belanja modal tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	(587.294.100,00)
c.	Reklasifikasi belanja modal tahun 2022	(35.061.945.804,00)
d.	Tindak lanjut temuan BPK RI	(9.106.257.199,24)
e.	Penghapusan	(102.656.000,00)
f.	Reklas aset dibawah nilai kapitalisasi	(16.378.024.652,00)
g.	Koreksi pencatatan atas kekurangan volume pekerjaan	(546.955.932,32)
	Jumlah	(63.636.289.655,56)
	Saldo per 31 Desember 2022	747.614.026.026,74

Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp139.977.644.535,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp37.051.849.443,00 pada SKPD sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp378.890.000,00;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp26.743.722.270,00;

- 3) BPKAD sebesar Rp126.067.500,00;
 - 4) Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.059.626.500,00;
 - 5) Dinas Kesehatan sebesar Rp3.225.027.408,00;
 - 6) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.542.900.000,00;
 - 7) Badan Perpustakaan Daerah sebesar Rp409.197.631,00;
 - 8) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp541.322.000,00;
 - 9) Dinas Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp77.233.434,00;
 - 10) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp119.635.000,00;
 - 11) Dinas Pertanian dan TPH sebesar Rp696.500.000,00;
 - 12) Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp40.000.000,00;
 - 13) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp309.500.000,00;
 - 14) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp497.058.000,00;
 - 15) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp166.435.000,00;
 - 16) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp820.233.500,00;
 - 17) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp79.775.700,00;
 - 18) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp89.299.500,00; dan
 - 19) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp129.426.000,00.
- b) Realisasi belanja BLUD Tahun 2022 sebesar Rp802.102.592,00 terdapat pada Dinas Kesehatan;
 - c) Pengakuan Utang Tahun 2022 sebesar Rp2.123.799.850,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d) Realisasi belanja modal BOS Tahun 2022 sebesar Rp37.615.993.755,00 pada Dinas Pendidikan;
 - e) Reklasifikasi belanja modal Tahun 2022 sebesar Rp62.109.332.895,00 pada SKPD sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp6.996.000,00;
 - 2) Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp18.589.282.000,00;
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp41.746.251.095,00;
 - 4) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.690.873.800,00; dan
 - 5) Satuan Pol PP sebesar Rp75.930.000,00.
 - f) Hibah berupa buku sebesar Rp26.470.000,00 pada Dinas Perpustakaan Daerah dari Perpustakaan Nasional RI;
 - g) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp179.450.000,00 pada Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman dari KIB L berupa ATB ke KIB E Aset Tetap Lainnya dengan rincian:
 - kegiatan Penyusunan Dokumen Pembangunan Mess Pramuka 2 Lantai dan Sarana dan Prasarana Lainnya Bumi Perkemahan Gandus dengan nilai sebesar Rp89.600.000,00; dan
 - kegiatan Penyusunan Dokumen Gedung Camat Putra dan Sarana dan Prasarana Lainnya Bumi Perkemahan Gandus dengan nilai sebesar Rp89.850.000,00.

- h) Aset ekstrakomptabel reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp68.646.000,00 di Dinas Pendidikan merupakan penghapusan aset berupa buku.
2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp63.636.289.655,56 dengan penjelasan sebagai berikut:
- a) Utang Tahun 2021 dibayar dengan Belanja Modal Tahun 2022 yang telah diakui sebagai aset di Tahun 2021 sebesar Rp1.853.155.968,00 terdapat pada SKPD:
- 1) Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.655.155.968,00; dan
 - 2) Dinas Pertanian dan TPH sebesar Rp198.000.000,00.
- b) Belanja Modal Tahun 2022 tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sebesar Rp587.294.100,00 antara lain:
- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp497.394.100,00 merupakan pemeliharaan tribun kolam renang lumban tirta sesuai kontrak Nomor 029/Kontrak/PGK/VIII/2022 berupa pekerjaan pengecatan; dan
 - 2) Badan Perpustakaan Daerah sebesar Rp89.900.000,00 berupa perawatan server dan sewa *cloud server*.
- c) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp35.061.945.804,00 pada SKPD:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp199.245.000,00;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp26.246.328.170,00;
 - 3) BPKAD sebesar Rp126.067.500,00 merupakan reklasifikasi ke ATB berupa Aplikasi e-surat dan pengarsipan berbasis *website*;
 - 4) Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.059.626.500,00;
 - 5) Dinas Kesehatan sebesar Rp4.027.130.000,00;
 - 6) Dinas Pendidikan sebesar Rp76.380.000,00;
 - 7) Badan Perpustakaan Daerah sebesar Rp69.900.000,00;
 - 8) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp541.322.000,00;
 - 9) Dinas Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp77.233.434,00;
 - 10) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp119.635.000,00;
 - 11) Dinas Pertanian dan TPH sebesar Rp498.500.000,00 berupa *updating App* Pentas SItepat;
 - 12) Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp40.000.000,00;
 - 13) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp309.500.000,00;
 - 14) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp 497.058.000,00;
 - 15) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp166.435.000,00;
 - 16) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp709.084.000,00;
 - 17) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp79.775.700,00;
 - 18) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp89.299.500,00; dan
 - 19) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp129.426.000,00.
- d) Tindak lanjut temuan BPK RI sebesar Rp9.106.257.199,24 terdapat pada SKPD:

- 1) Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp9.050.097.848,24 merupakan temuan atas Aset Tetap Renovasi yang belum dikapitalisasi ke aset induknya dengan rincian sebagai berikut:
 - mutasi antar SKPD alih status ke Biro Umum dan Perlengkapan yaitu kegiatan Renovasi Kantor, Graha dan Paud PKK Rajawali Tahun 2019 (Fisik, Perencanaan, Pengawasan) sebesar Rp1.771.229.155,16 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 270/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 13 April 2022 yang semula tercatat pada KIB E Aset Tetap Lainnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - mutasi antar SKPD alih status ke Balitbangda yaitu kegiatan pembangunan pintu gerbang Kebun Raya Sriwijaya (Fisik, Perencanaan, dan Pengawasan) Tahun 2018 sebesar Rp2.779.850.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 975/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang semula tercatat pada KIB E Aset Tetap Lainnya Dinas PU. Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - mutasi antar OPD OPD alih status ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu kegiatan Pembangunan Jalan Akses menuju mess karyawan, rumah dinas, *Guest House* Kebun Raya Sriwijaya (Fisik, Perencanaan, dan Pengawasan) Tahun 2018 sebesar Rp4.499.018.693,08 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 975/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang semula tercatat pada KIB E Aset Tetap Lainnya pada Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 2) Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebesar Rp56.159.351,00 berupa tindak lanjut temuan BPK berupa *software* yg tercatat sebagai Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi dan telah direklasifikasi ke Aset Tak Berwujud (ATB).
- e) Penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp102.656.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- f) Reklasifikasi aset dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp16.378.024.652,00 pada SKPD :
 - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.674.000,00;
 - 2) Dinas Pendidikan sebesar Rp16.182.494.452,00; dan
 - 3) Badan Perpustakaan sebesar Rp193.856.200,00.
- g) Koreksi pencatatan terhadap kekurangan volume pekerjaan atas temuan BPK RI Audit LKPD dan DTT sebesar Rp546.955.932,32 antara lain:
 - 1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp63.943.008,05; dan
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp483.012.924,27.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2022 sebesar Rp323.103.432.987,30 setelah mutasi saldo per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp147.555.360.560,20 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 110 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
	Saldo per 1 Januari 2022 (audited)	323.103.432.987,30
	Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2022	
1	Penambahan :	
	a. Pengakuan utang tahun 2022	4.516.302.152,03
	b. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2022	123.733.782.849,33
	c. Kapitalisasi selain belanja modal	800.820.000,00
	d. Aset perolehan lama yang baru dicatat	197.764.000,00
	Jumlah	129.248.669.001,36
2	Pengurangan:	
	a. Tindak lanjut temuan BPK RI	(301.280.361.823,90)
	b. Koreksi pencatatan atas kekurangan volume pekerjaan	(3.516.379.604,56)
	Jumlah	(304.796.741.428,46)
	Saldo per 31 Desember 2022	147.555.360.560,20

Penambahan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp129.248.669.001,36 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Utang Tahun 2022 sebesar Rp4.516.302.152,03 merupakan utang atas pekerjaan di UPTB Samsat Palembang 4 dan UPTB Samsat OKI pada Badan Pendapatan Daerah
- b) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp123.733.782.849,33 pada SKPD:
 - 1) Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang sebesar Rp109.535.385.567,00 dengan rincian:
 - Jl. Penghubung Menara Pengamat 33/SP Kulim sebesar Rp74.457.663.119,00;
 - Jl. SP Campang-Hujan Emas-Bts Bengkulu sebesar Rp7.329.289.900,00;
 - Jl. Kurungan Nyawa Martapura sebesar Rp3.651.473.000,00;
 - Martapura SP Martapura sebesar Rp4.148.156.000,00;
 - Jl Tanjung Raya-Bts Bengkulu sebesar Rp7.201.837.548,00;
 - Jembatan Air Terentang sebesar Rp8.349.635.000,00;
 - Jl. SP Tambang Bts Kab. OKU sebesar Rp1.831.722.000,00, dan
 - Jl. Tanah Abang Trans SP II sebesar Rp2.565.609.000,00.
 - 2) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp14.198.397.282,33.
- c) Kapitalisasi selain belanja modal sebesar Rp800.820.000,00 terdapat pada Badan Pendapatan Daerah berupa belanja pengawasan pembangunan UPTD Samsat OKI sebesar Rp246.747.000,00 dan belanja pengawasan UPTD Palembang 4 sebesar Rp554.073.000,00; dan
- d) Aset perolehan lama baru yang baru dicatat sebesar Rp197.764.000,00 merupakan belanja perencanaan pembangunan gedung UPTB Samsat OKI sebesar Rp98.900.000,00 dan belanja perencanaan pembangunan gedung UPTB Samsat Palembang 4 Rp98.864.000,00.

2. Pengurangan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp304.796.741.428,46 antara lain.

- a) Tindak lanjut temuan BPK RI berupa KDP yang belum di atribusikan/kapitalisasi ke aset induknya pada SKPD:
 - 1) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang merupakan reklasifikasi ke aset Jalan, Irigasi dan Jembatan sebesar Rp299.186.077.023,90; dan
 - 2) Dinas Perhubungan merupakan reklasifikasi ke aset Jalan, Irigasi dan Jembatan sebesar Rp2.094.284.800,00.
- b) Koreksi pencatatan terhadap kekurangan volume pekerjaan atas temuan BPK RI audit LKPD dan DTT sebesar Rp3.516.379.604,56 pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang.

Perbandingan penambahan/pengurangan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 111 Rincian KDP per SKPD

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Penambahan/ Pengurangan
1	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	110.552.699.646,84	303.719.770.708,30	(193.167.071.061,46)
2	Dinas Perhubungan	13.292.736.400,00	15.387.021.200,00	(2.094.284.800,00)
3	Dinas Kesehatan	895.908.250,00	895.908.250,00	0,00
4	Badan Pendapatan Daerah	22.814.016.263,36	3.100.732.829,00	19.713.283.434,36
Jumlah		147.555.360.560,20	323.103.432.987,30	(175.548.072.427,10)

Penjelasan Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebagai berikut;

1. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Dinas Perhubungan merupakan bagian pekerjaan pembangunan di Bandara Silampari Lubuklinggau dan Bandara di Kabupaten Lahat akan ditindaklanjuti sebagai bagian temuan BPK RI atas KDP yang belum dikapitalisasi ke aset induk yang saat ini sedang dalam proses penyerahan ke Kementerian Perhubungan RI sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4476/BPKAD-V/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyerahan Aset berupa *Runway* Bandara Silampari dan Surat Kepala Unit Penyelenggara Bandara Silampari Nomor PL.310/023/I/SIL.LLG-2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal rencana hibah Aset Pemprov Sumsel ke UPBU Silampari.
2. Badan Pendapatan Daerah merupakan kontruksi pembangunan Kantor UPTB/Samsat Palembang II yang belum selesai dikarenakan terdapat gugatan masyarakat atas lahan pembangunan kantor UPTB/Samsat tersebut dan berdasarkan amar keputusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI Nomor 495 PK/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 atas gugatan lahan seluas 3.472 m² yang akan dibangun kantor UPTB/SAMSAT Kota Palembang II telah dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan namun atas keputusan tersebut digugat kembali oleh masyarakat.

7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu Aset Tetap yang telah dibebankan. Akumulasi Penyusutan menjadi pengurang Aset Tetap dalam neraca dimana harga perolehan Aset Tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi nilai buku (*book value*) Aset Tetap tersebut.

Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutannya. Metode penyusutan yang digunakan untuk seluruh aset adalah metode garis lurus yang dihitung secara bulanan.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp11.030.819.350.375,41 dan Rp9.983.381.603.436,95 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 112 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset	TAHUN 2022		TAHUN 2021	
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021
1	Tanah	12.296.049.749.427,70	0,00	11.329.490.821.739,50	0,00
2	Peralatan dan Mesin	3.225.357.196.046,15	(2.161.731.526.047,73)	2.768.373.058.986,04	(1.863.436.402.849,15)
3	Gedung dan Bangunan	4.907.444.174.181,42	(871.909.992.425,40)	4.462.812.938.458,99	(774.347.279.518,67)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.723.350.167.230,60	(7.994.205.262.894,28)	12.991.502.065.603,40	(7.344.413.312.856,13)
5	Aset Tetap Lainnya	747.614.026.026,74	(2.972.569.008,00)	671.272.671.147,30	(1.184.608.203,00)
6	KDP	147.555.360.560,20	0,00	323.103.432.987,30	0,00
Jumlah		35.047.370.673.472,81	(11.030.819.350.375,41)	32.546.554.988.922,53	(9.983.381.603.426,95)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebagaimana pada **lampiran 18**.

Penjelasan lainnya:

1. Terdapat permasalahan penyerahan aset P3D yang belum selesai yaitu Panti Asuhan Mawar Putih yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 355/PPAT/1994 dan surat Bupati Ogan Ilir Nomor 460/194/Dinsos/2017 tanggal 6 September 2017. Tanah tersebut milik H. Domiri dan belum ada hibahnya dari keluarga H. Domiri. Hingga saat ini tanah dan bangunan Panti Asuhan Mawar Putih masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemprov Sumsel telah menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk diserahterimakan kembali guna permasalahan klaim aset panti asuhan tersebut dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/3825/BPKAD-V/2021 tanggal 03 Desember 2021.

2. Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah ditindaklanjuti antara lain:
 - a. Aset Tetap Tanah yang bernilai Rp0,00 telah ditindaklanjuti dengan menggunakan penilaian dari DJKN Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel dengan rincian sebagaimana pada **lampiran 19**;
 - b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak memiliki informasi nomor dokumen telah ditindaklanjuti sesuai dokumen yang disampaikan oleh SKPD dengan rincian sebagaimana pada **lampiran 20**;
 - c. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak memiliki informasi lokasi unit telah ditindaklanjuti sesuai informasi lokasi yang disampaikan oleh SKPD dengan rincian sebagaimana pada **lampiran 21**;
 - d. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak memiliki informasi lokasi unit telah ditindaklanjuti sesuai informasi lokasi yang disampaikan oleh SKPD dengan rincian sebagaimana pada **lampiran 22**;
 - e. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tidak memiliki informasi nomor dokumen telah ditindaklanjuti sesuai dokumen yang disampaikan oleh SKPD dengan rincian sebagaimana pada **lampiran 23**;
 - f. Tanah pada UPB/sekolah yang belum tercatat pada Neraca Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2021 telah ditindaklanjuti sesuai dokumen yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dengan rincian sebagaimana pada **lampiran 24**;
 - g. Aset Tetap Gedung dan Bangunan tercatat tahun perolehan 1900 telah ditindaklanjuti sesuai dokumen yang disampaikan oleh SKPD dengan rincian sebagaimana pada **lampiran 25**;
 - h. Pekerjaan Normalisasi yang tercatat sebagai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Neraca per 31 Desember 2021 telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Nomor 62/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang penghapusan, namun belum dilakukan penghapusan dari KIB Simda BMD dengan rincian sebagaimana pada **lampiran 26**;
 - i. Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan berupa puskesmas, poskesdes, dan rumah sakit kabupaten dan kota telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Nomor 604/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan 94/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Penghapusan, namun belum dilakukan penghapusan dari KIB Simda BMD dengan rincian sebagaimana pada **lampiran 27**;
 - j. Aset Tetap Renovasi yang belum diatribusikan ke aset induknya pada Neraca per 31 Desember 2021 telah ditindaklanjuti berdasarkan dokumen yang disampaikan SKPD dengan rincian sebagaimana pada **lampiran 28**;
 - k. Daftar Aset Tetap-KDP yang direklasifikasi sesuai dengan kategori masing-masing Aset Tetap telah ditindaklanjuti sesuai dokumen yang disampaikan oleh SKPD dengan rincian sebagaimana pada **lampiran 29**; dan
 - l. Perbedaan umur manfaat pada Aplikasi Simda BMD dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah ditindaklanjuti dengan rincian sebagaimana pada **lampiran 30**.

4.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 menyajikan saldo sebesar Rp3.314.452.507.791,37 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.095.520.167.809,64. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 113 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Tagihan Jangka Panjang	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.503.156.493.000,00	1.668.304.573.000,00	(165.148.080.000,00)
3	Aset Tidak Berwujud	142.500.347.757,00	130.386.962.349,00	12.113.385.408,00
4	Aset lain-lain	2.779.007.144.165,37	2.401.307.817.956,64	377.699.326.208,73
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(105.227.855.186,00)	(96.327.071.916,00)	(8.900.783.270,00)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.005.001.371.945,00)	(1.008.169.863.580,00)	3.168.491.635,00
	Jumlah	3.314.452.507.791,37	3.095.520.167.809,64	218.932.339.981,73

Penjelasan lebih rinci terkait saldo aset lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang pada Tahun 2022 menyajikan saldo sebesar Rp17.750.000,00 yang merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara a.n. Arpan yang belum diketahui dasar pembebanannya dan belum masuk dalam Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah BPK RI Semester II Tahun Anggaran 2019 dan sampai Tahun 2022 belum diselesaikan;
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerja sama dengan pihak ketiga yang menyajikan saldo pada Tahun 2022 sebesar Rp1.503.156.493.000,00. Aset Kemitraan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut dikerjasamakan kepada pihak ketiga sebagai berikut.
 - 1) PT Bayu Jaya Lestari Sukses

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT Bayu Jaya Lestari Sukses dalam bentuk kerja sama *Build Operate Transfer* (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan adalah tanah seluas 56.362m² dengan alamat di Jalan Angkatan 45 (POM IX) Palembang. Tanah tersebut digunakan untuk pembangunan Hotel Aryaduta dan fasilitas parkir dengan nomor perjanjian kerja sama 14/SPK/III/2002 dan SPK-02/BJLS/VIII/2002 tanggal 2 Agustus 2002 dan adendum Nomor 16/Add/SK/IX/02 dan 030/BJLS/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002. Jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu:

 - a) Pasal 7 ayat (1) mulai tahun ke-18 menerima kontribusi setiap tahun atas hasil operasional hotel bintang 4 dan fasilitas parkir yang besarnya sesuai kesepakatan bersama; dan
 - b) Pasal 7 ayat (5) menerima 1 (satu) kantor toko dengan desain khusus yang menghadap lapangan parkir Bumi Sriwijaya sebagai pengganti ruang tunggu VIP.

2) PT Palembang Paragon Mall

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT Palembang Paragon Mall dalam bentuk kerja sama *Build Operate Transfer* (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan adalah tanah seluas 23.285 m² dengan alamat di Jalan Angkatan 45 (POM IX) Palembang. Tanah tersebut digunakan untuk pembangunan *Underground Mall* (PSx Mall), Rumah Sakit Siloam dan fasilitas perparkiran dengan perjanjian kerja sama Nomor 003/SPK/VI/2011 dan 001/PPM-DIR/I/2011 tanggal 25 Januari 2011. Jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu Pasal 10.1.1, selama jangka waktu pengelolaan, pembayaran kontribusi pihak kedua kepada pihak pertama:

- a) Untuk Mall, tahun pertama sampai tahun kelima sebesar Rp100.000.000,00, dan selanjutnya setiap kelipatan 5 tahun akan menerima tambahan kontribusi sebesar 10% dari nilai kontribusi awal sesuai lampiran perjanjian kerja sama ini;
- b) Untuk Rumah Sakit, tahun pertama sampai tahun kelima sebesar Rp50.000.000,00, dan selanjutnya setiap kelipatan 5 tahun akan menerima tambahan kontribusi sebesar 10% dari nilai kontribusi awal sesuai lampiran perjanjian kerja sama ini; dan
- c) Untuk lahan parkir, akan dibagi 60% untuk pihak kedua dan 40% untuk pihak pertama dari pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan biaya pengelolaan parkir. Perhitungan bagi hasil pengelolaan lahan parkir akan dilakukan oleh konsultan independen.

3) PT Griya Inti Sejahtera Insani

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT Griya Inti Sejahtera Insani dalam bentuk kerja sama *Build Operate Transfer* (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan adalah bangunan seluas 6,819 m² dan tanah seluas 49.498 m² dengan alamat di Jalan POM IX Palembang. Bangunan dan tanah tersebut digunakan untuk revitalisasi gedung olahraga (Stadion Bumi Sriwijaya), Town Square I (Mall Palembang Icon), Town Square II (Mall Palembang Icon) dan fasilitas perparkiran dengan perjanjian kerja sama Nomor 015/ASP/K/XII/2010 tanggal 30 April 2010 serta addendum Nomor 040.A/SPK/XII/2010 dan 020/GOR/GISI/XI/2010 (Addendum I) tanggal 8 Oktober 2010, Nomor 016/SPK/VI/2011 dan 034/GOR/GISI/III/2011 (Addendum II) tanggal 18 Maret 2011, dan Nomor 108/SPK/DPKAD/2014 dan 25/GISI-HO/XII/2014 (Addendum III) tanggal 24 Desember 2014. Jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu Pasal 7 ayat (1) dan ayat (1a), selama jangka waktu pengelolaan, pembayaran kontribusi pihak kedua kepada pihak pertama:

- a) Untuk Mall, sebesar 1% dari pendapatan kotor setiap tahunnya;
- b) Untuk lahan parkir, akan dibagi 60% untuk pihak kedua dan 40% untuk pihak pertama dari pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan biaya

pengelolaan parkir. Perhitungan bagi hasil pengelolaan lahan parkir akan dilakukan oleh akuntan independen; dan

c) Dibayarkan paling lambat 1 bulan tahun berikutnya.

4) PT Graha Pinaringin

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT Graha Pinaringin dalam bentuk kerja sama *Build Operate Transfer* (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan adalah tanah seluas 60.156 m² dengan alamat di Jalan HA. Bastari Jakabaring Palembang. Tanah tersebut digunakan untuk Gedung Pusat Perbelanjaan (Lippo Mall Jakabaring) dan fasilitas penunjang lainnya dengan perjanjian kerja sama Nomor 008/SPK/VI/2011 dan 001/GP-DIR/VI/2011 tanggal 24 Februari 2011. Jangka waktu kerja sama selama 29 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu Pasal 10.1.1, selama jangka waktu pengelolaan, pembayaran kontribusi pihak kedua kepada pihak pertama:

a) Untuk Mall, sebesar 1% dari pendapatan kotor setiap tahunnya;

b) Untuk lahan parkir, akan dibagi 60% untuk pihak kedua dan 40% untuk pihak pertama dari pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan biaya pengelolaan parkir. Perhitungan bagi hasil pengelolaan lahan parkir akan dilakukan oleh akuntan independen; dan

c) Dibayarkan paling lambat 1 bulan tahun berikutnya.

5) PT Rajawali Jasa Tritama

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT Rajawali Jasa Tritama dalam bentuk kerja sama *Build Operate Transfer* (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan adalah tanah seluas 2.820 m² dengan alamat di Jalan POM IX Palembang. Tanah tersebut digunakan untuk gedung sarana pendidikan (Sekolah Pelita Harapan) dan fasilitas penunjang lainnya dengan nomor perjanjian kerja sama 009/SPK/VI/2011 dan 001/RJT-DIR/VI/2011 tanggal 28 Februari 2011. Jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu Pasal 10.1.1, selama jangka waktu pengelolaan, pembayaran kontribusi pihak kedua kepada pihak pertama:

a) Untuk Sarana Pendidikan, tahun pertama sampai tahun kelima sebesar Rp330.000.000,00, dan selanjutnya setiap kelipatan 5 tahun akan menerima tambahan kontribusi sebesar 10% dari nilai kontribusi awal;

b) Untuk lahan parkir, akan dibagi 60% untuk pihak kedua dan 40% untuk pihak pertama dari pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan biaya pengelolaan parkir. Perhitungan bagi hasil pengelolaan lahan parkir akan dilakukan oleh konsultan independen; dan

c) Dibayarkan paling lambat 1 bulan tahun berikutnya.

6) PT Magna Beatum

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT Magna Beatum dalam bentuk kerja sama *Build Operate Transfer* (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan adalah tanah seluas 6.540m² dengan alamat di Jalan Jendral Sudirman Palembang. Tanah tersebut digunakan untuk Pasar Modern Cinde dan fasilitas penunjang lainnya dengan perjanjian kerja sama Nomor 231/PKS/BPKAD/2016 dan MB014/PKS/DIRUT/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 dan Nomor 028/SPK/BPKAD/2018 dan MB103/ADD/DIRUT/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018. Jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu:

- a) Pasal 11 ayat (1) huruf e) menerima pendapatan dari hasil sewa tempat usaha (kios/los) pada bangunan kontribusi awal;
- b) Pasal 11 ayat (1) huruf g) dan Pasal 12 ayat (2) huruf j) menerima pembayaran kontribusi usaha setiap tahunnya dengan rumusan perhitungan pasal kontribusi usaha paling lambat bulan Februari tahun berikutnya;
- c) Pasal 11 ayat (1) huruf g) menerima penyerahan bangunan kontribusi akhir;
- d) Pasal 11 ayat (1) huruf g) dan Pasal 12 ayat (2) huruf j) menerima pembayaran kontribusi usaha setiap tahunnya dengan rumusan perhitungan pasal kontribusi usaha paling lambat bulan Februari tahun berikutnya;
- e) Pasal 11 ayat (1) huruf g) menerima penyerahan bangunan kontribusi akhir.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membatalkan perjanjian Kerjasama dengan PT Magna Beatum sesuai dengan Surat Nomor 511.2/0520/BPKAD/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pengakhiran Kerja Sama karena PT Magna Beatum tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan Kawasan Pasar Modern Pasar Cinde.

Dengan batalnya perjanjian kerjasama tersebut maka aset berupa Tanah sebesar Rp165.148.080.000,00 yang semula dicatat sebagai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga direklasifikasi menjadi Aset lain-lain. Rincian Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

- c. Aset Tak Berwujud yang umumnya berupa *software* atau sistem perangkat lunak komputer pada Tahun 2022 menyajikan saldo sebesar Rp142.500.347.757,00. Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.113.385.408,00 dari saldo Tahun 2021 sebesar Rp130.386.962.349,00 karena adanya penambahan belanja, reklasifikasi, koreksi, dan mutasi. Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 32**;
- d. Aset Lain-Lain Tahun 2022 menyajikan saldo sebesar Rp2.779.007.144.165,37. Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp377.699.326.208,73 dari saldo Tahun 2021 sebesar Rp2.401.307.817.956,64 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 114 Rincian Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

No	Rincian Aset Lain-lain	Saldo 31 Des 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2022
1	Aset Rusak Berat	698.441.244.314,74	970.349.300,00	1.152.540.050,00	698.259.053.564,74
2	Hewan Ternak bergulir	4.033.220.000,00	0,00	0,00	4.033.220.000,00
3	Piutang UMKM	620.354.037,00	0,00	0,00	620.354.037,00
4	Aset belum diserahkan ke Masyarakat/Pemerintah Lainnya	70.507.479.010,15	5.269.826.913,00	5.475.105,00	75.771.830.818,15
5	Peningkatan Jalan Milik Pemerintah Daerah Lainnya	1.627.689.328.594,75	26.693.655.099,11	24.796.343.395,18	1.629.586.640.298,68
6	Barang dlm Proses Penghapusan	16.192.000,00	0,00	0,00	16.192.000,00
7	Lahan dlm proses kerjasama pemanfaatan (Pasar Cinde)	0,00	165.148.080.000,00	0,00	165.148.080.000,00
8	Dana Bagi Hasil melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD)	0,00	198.834.528.479,00	0,00	198.834.528.479,00
9	Piutang TGR dlm proses penetapan	0,00	6.737.244.967,80	0,00	6.737.244.967,80
Jumlah		2.401.307.817.956,64	403.653.684.758,91	25.954.358.550,18	2.779.007.144.165,37

- 1) Aset Rusak Berat Tahun 2022 sebesar Rp698.259.053.564,74. Saldo tersebut mengalami penurunan sebesar Rp182.190.750,00 dari saldo Tahun 2021 sebesar Rp698.441.244.314,74 karena aset gedung bangunan pada Dinas Pendidikan yang telah direhabilitasi sehingga dapat dipergunakan sebesar Rp1.152.540.050,00. Penambahan saldo aset rusak berat berasal dari Dinas Perdagangan sebesar Rp572.403.800,00 berupa kendaraan bermotor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp205.205.800,00 berupa alat kantor, dan Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp192.739.700,00 berupa alat kantor. Rincian Saldo Aset Rusak Berat per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 33**.
- 2) Hewan ternak bergulir Tahun 2022 sebesar Rp4.033.220.000,00 merupakan Hewan Ternak berupa Kambing, Sapi dan Kerbau pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Saldo tersebut tidak berubah dari saldo Tahun 2021.
- 3) Piutang UMKM sebesar Rp620.354.037,00 yang merupakan nilai pokok Piutang bantuan modal kecil dan menengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 315/KPTS/DISKOP.UKM/2009 tanggal 15 April 2009. Saldo tersebut tidak mengalami perubahan dari saldo Tahun 2018; dan
- 4) Aset yang belum diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat/pemerintah lainnya merupakan aset lainnya berupa tanah, peralatan, gedung yang belum diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat/pemerintah lainnya sesuai dengan BAST pada SKPD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 115 Rincian Aset Belum Diserahkan

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Dinas Kesehatan	Bangunan Puskesmas/ Pustu/Pusdes	31.608.022.230,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Bangunan lumbung desa	3.572.598.000,00
3	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	Peralatan pertanian	396.340.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah	947.000.000,00
5	Dinas Perhubungan	Aset P3D urusan UPPKB eks. Timbangan	10.904.461.600,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah-PPKD	Kolam ikan	1.421.334.309,83
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Gedung dan Bangunan	7.154.788.100,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Gedung Sarana Olahraga dan Peralatan Pemadam Kebakaran	14.502.934.770,32
9	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Bangunan Air Bersih/Air Baku	4.310.678.779,00
10	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Tanah	953.673.029,00
Jumlah			75.771.830.818,15

Mutasi saldo per 31 Desember 2022 tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya dirinci pada tabel berikut:

Tabel 116 Mutasi Aset Belum Diserahkan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Per 1 Januari 2022 (audited)		70.507.479.010,15
1	Penambahan:	
	a) Reklas dari Aset Jalan ke Aset Lainnya pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air:	
-	Perkuatan Tebing Desa Kotanegara Kab. OKU Timur	932.898.884,00
-	Perkuatan Tebing di Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas	462.900.000,00
-	Pembuatan Sumur Bor di Kec. Jejawi	188.109.000,00
-	Pembuatan Sumur Bor di Kec. Cengal	186.997.000,00
-	Penataan Kolam Retensi Pramuka di Kota Palembang	2.545.249.000,00
	b) Reklas dari Aset Tanah ke Aset Lainnya pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang:	
-	Pembebasan lahan peruntukan pembangunan jembatan Fly Over di Kec. Kemuning Palembang	953.673.029,00
2	Pengurangan:	
	Kekurangan Volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Desa Kotanegara Kab. OKU Timur	5.475.105,00
Saldo per 31 Desember 2022		75.771.830.818,15

- 5) Peningkatan Jalan Milik Pemerintah Daerah Lainnya per 1 Januari 2022 sebesar Rp1.627.689.328.594,75 setelah mutasi saldo per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp1.629.586.640.298,68 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 117 Mutasi Peningkatan Jalan Milik Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Per 1 Januari 2022 (audited)		1.627.689.328.594,75
1	Penambahan:	
a)	Reklas ke Aset Lainnya karena Jalan bukan kewenangan Provinsi pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang (Pembangunan Jalan Akses Musi 6 Palembang)	19.043.977.589,11
b)	Reklas ke Aset Lainnya karena Jalan bukan kewenangan Provinsi pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang (Pembangunan Jalan Akses Musi 6 Palembang TA. 2022)	7.649.677.510,00
	Jumlah	26.693.655.099,11
2	Pengurangan:	
	Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Jalan pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	24.692.469.124,00
	Kekurangan Volume Jalan Akses Musi 6 (Jl. Faqih Usman-Jl. Wahid Hasyim)	103.874.271,18
	Jumlah	24.796.343.395,18
Saldo per 31 Desember 2022		1.629.586.640.298,68

- 6) Barang dalam proses penghapusan sebesar Rp16.192.000,00 merupakan barang yang hilang pada Dinas Pendidikan masih menunggu proses surat keputusan penghapusan.
- 7) Lahan dalam proses kerjasama pemanfaatan (Pasar Cinde) merupakan Tanah sebesar Rp165.148.080.000,00 yang semula dicatat sebagai aset kemitraan dengan pihak ketiga direklasifikasi menjadi aset lainnya karena batalnya perjanjian kerjasama.
- 8) Dana Bagi Hasil melalui Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) merupakan kas non tunai pada Bank Indonesia yang merupakan penerimaan Dana Bagi Hasil Pusat yang belum masuk ke RKUD sebesar Rp198.834.528.479,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 118 Rincian Dana Bagi Hasil melalui Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD)

(dalam Rupiah)

No	Tahun	Uraian Dana Bagi Hasil	Jumlah
1	2022	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	23.431.954.787,00
		- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022	22.542.620.037,00
		- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022	889.334.750,00
2	2022	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	71.399.261.691,00
		- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022, Bagian daerah untuk provinsi	53.071.470,00
		- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022, Bagian daerah untuk provinsi	2.419.107.521,00
		- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022, Bagian daerah untuk provinsi	951.461.673,00
		- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022, Bagian daerah untuk provinsi	3.375.080.159,00

No	Tahun	Uraian Dana Bagi Hasil	Jumlah
		- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Panas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 , Bagian daerah untuk provinsi	294.798.182,00
		- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 , Bagian daerah untuk provinsi	62.308.364.930,00
		- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 , Biaya pemungutan untuk provinsi	1.474.131,00
		- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022, Biaya pemungutan untuk provinsi	67,195,403,00
		- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022, Biaya pemungutan untuk provinsi	39,642,855,00
		- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022, Biaya pemungutan untuk provinsi	150.001.489,00
		- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Panas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022, Biaya pemungutan untuk provinsi	8.188.687,00
		- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 , Biaya pemungutan untuk provinsi	1.730.875.191,00
3	2022	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi	7.039.043.876,00
		- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Non Tunai-TDF, Minyak Bumi 15% Triwulan ke-4 TA 2022	6.811.972.570,00
		- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Non Tunai-TDF, Triwulan ke-4 TA 2022, SDA Minyak Bumi 0.5%	227.071.306,00
4	2022	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi	38.665.512.355,00
		- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Non Tunai-TDF, Gas Bumi 30% Triwulan ke-4 TA 2022	38.031.493.412,00
		- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Non Tunai-TDF, Gas Bumi 0,5% Triwulan ke-4 TA 2022	634.018.943,00
5	2022	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	56.144.930.347,00
		- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai-TDF, Iuran Tetap Triwulan ke-4 TA 2022	889.585.132,00
		- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai-TDF, Royalty Triwulan ke-4 TA 2022	55.255.345.215,00
6	2022	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	442.946.453,00
		- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Non Tunai-TDF, Iuran Tetap Triwulan ke-4 TA 2022	27.873.780,00
		- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Non Tunai-TDF, Iuran Produksi Triwulan ke-4 TA 2022	415.072.673,00
7	2022	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	1.693.380.256,00
		- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Non Tunai-TDF, PSDH Triwulan ke-4 TA 2022	1.640.650.294,00
		- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Non Tunai-TDF, Dana Reboisasi Triwulan ke-4 TA 2022	52.729.962,00
8	2022	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	17.498.714,00
		- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022	17.498.714,00
			198.834.528.479,00

- 9) Piutang TGR dalam proses penetapan merupakan piutang yang timbul dari hasil pemeriksaan karena kekurangan volume pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya pada beberapa OPD sesuai dengan PSAP 10 Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan pos luar biasa untuk LHP LKPD sebesar Rp6.737.244.967,80. Rincian Piutang TGR dalam Proses Penetapan dapat dilihat pada **Lampiran 34**.
- e. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 sebesar Rp105.227.855.186,00. Saldo tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp8.900.783.270,00 dari saldo Tahun 2021 sebesar Rp96.327.071.916,00. Saldo tersebut adalah akumulasi atas penurunan nilai Aset Tetap Tidak Berwujud yang umumnya berbentuk *Software*. Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 35**.
- f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp1.005.001.371.945,00. Saldo tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.168.491.635,00 dari saldo Tahun 2021 sebesar Rp1.008.169.863.580,00 yang disebabkan oleh pengurangan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya dari aset lainnya pada Dinas Kesehatan berupa Bangunan Puskesmas/Pustu/Pusdes yang telah diserahkan kepada masyarakat Tahun 2021. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 119 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Kesehatan	8.509.139.740,00	11.677.631.375,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.006.344.592,00	6.006.344.592,00
3	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	963.086.144.550,00	963.086.144.550,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman	22.392.474.326,00	22.392.474.326,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	982.250.049,00	982.250.049,00
6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	309.846.260,00	309.846.260,00
7	Dinas Perhubungan	3.715.172.428,00	3.715.172.428,00
Jumlah		1.005.001.371.945,00	1.008.169.863.580,00

4.3.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp1.318.710.997.409,26 dan Rp1.449.569.292.272,20, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.318.710.997.409,26 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp 0,00.

4.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.318.710.997.409,26 dan Rp 1.045.531.709.076,98 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 120 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Utang PFK	348.087.756,00	59.890.739.802,00	8.385.419.441,00	14,00
2	Utang Bunga	190.566.067,82	184.805.354,47	5.760.713,35	3,12
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	489.132.545.694,26	215.272.103.903,49	273.860.441.791	127,22
4	Pendapatan Diterima di Muka	3.112.364.236,34	1.203.651.638,07	1.908.712.598	158,58
5	Utang Belanja	758.127.018.077,85	501.637.475.328,69	186.589.891.775,16	37,2
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	67.800.415.576,99	267.342.933.050,26	(199.542.517.473)	74,64
Jumlah		1.318.710.997.409,26	1.045.531.709.076,98	271.207.708.845,28	414,76

Penjelasan atas kewajiban jangka pendek sebagai berikut.

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp348.087.756,00 dan Rp59.890.739.802,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 121 Rincian Utang PFK

(dalam rupiah)

No	Utang PFK	Utang PFK Audited 2021	Koreksi Tambah Saldo Awal	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi kurang Tahun 2022	Koreksi Audited Tambah	Koreksi Audited Kurang	Saldo Akhir Utang PFK 2022
1	PPh Pasal Ayat 21	26.438.615,00	0,00	176.452.242,00	26.438.615,00			176.452.242,00
2	PPh Pasal Ayat 22	399.136,00	0,00	6.066.273,00	399.136,00			6.066.273,00
3	PPh Pasal Ayat 23	397.600,00	0,00	14.845.611,00	397.600,00			14.845.611,00
4	PPh Pasal 4 Ayat 2	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5	PPN	8.010.076,00	0,00	76.531.230,00	8.010.076,00			76.531.230,00
6	Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	44.771.504,00	0,00	74.192.400,00	44.771.504,00			74.192.400,00
7	Iuran Jaminan Kesehatan - BPJS	59.810.722.871,00	340.943.090,00	0,00	0,00	7.776.405.526,00	67.928.071.487,00	0,00
Jumlah		59.890.739.802,00	340.943.090,00	348.087.756,00	80.016.931,00	7.776.405.526,00	67.928.071.487,00	348.087.756,00

Saldo utang PFK sebesar Rp348.087.756,00 merupakan pajak yang belum disetor yang terdapat pada bendahara BOS sebesar Rp46.483.710,00, bendahara PSG sebesar Rp219.143.246,00, utang PFK Lainnya BOS sebesar Rp10.699.200,00, utang PFK Lainnya PSG sebesar Rp63.493.200,00, dan adanya reklasifikasi Iuran Jaminan Kesehatan – BPJS sebesar Rp67.928.071.487,00 dari Utang PFK menjadi Utang Beban Pegawai.

2. Utang Bunga

Saldo Utang Bunga Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp190.566.067,82 dan Rp184.805.354,47. Utang Bunga Tahun 2022 ini merupakan Utang Bunga yang belum dicatat mulai tanggal 26 Desember sampai dengan 31 Desember 2022 atas pinjaman Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.

3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp489.132.545.694,26 dan Rp215.272.103.903,49 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2022 ini merupakan Utang Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan.

4. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.112.364.236,34 dan Rp1.203.651.638,07 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 122 Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

No	Pendapatan diterima dimuka	Pendapatan diterima dimuka Audited 2021	Koreksi Saldo Awal	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka 2022
1	RSUD Siti Fatimah	287.906.849,32	0,00	2.168.402.265,00	287.906.849,32	2.168.402.265,00
2	Dinas Perhubungan	25.979.472,00	0,00	35.904.269,00	25.979.472,00	35.904.269,00
3	Sekretariat Daerah	128.160.723,91	0,00	233.449.259,00	128.160.723,91	233.449.259,00
4	BPKAD	761.604.592,84	0,00	674.608.443,34	761.604.592,84	674.608.443,34
	Jumlah	1.203.651.638,07	0,00	3.112.364.236,34	1.203.651.638,07	3.112.364.236,34

- a. Pendapatan Diterima Di Muka RSUD Siti Fatimah sebesar Rp2.168.402.265,00 merupakan pendapatan diterima dimuka atas:
 - 1) Pendapatan sewa Bakery Mouzie and Cake sebesar Rp6.514.824,00;
 - 2) Pendapatan sewa Bank SumselBabel sebesar Rp130.547.690,00;
 - 3) Pendapatan sewa Toko Kopi Subway sebesar Rp45.040.894,00;
 - 4) Pendapatan sewa Toko Marsha (*snack corner*) sebesar Rp1.114.784,00;
 - 5) Pendapatan sewa Toko Marsha (*fotocopy*) sebesar Rp393.594,00;
 - 6) Pendapatan Sewa PT Reska Multi Usaha Sebesar 1.982.265.978,00;
 - 7) Pendapatan Koperasi Jasa Mitra Medika Sejahtera sebesar Rp2.524.501.
- b. Dinas Perhubungan sebesar Rp35.904.269,00 adalah pendapatan diterima dimuka atas pendapatan sewa kios di Terminal Jakabaring dan sewa ruangan di Pelabuhan Tanjung Api-Api.

- c. Pendapatan Diterima Dimuka pada Sekretariat Daerah sebesar Rp233.449.259,00 terdiri atas:
- 1) Pendapatan sewa lahan belakang kantor gubernur oleh PT XL Axiata sebesar Rp2.735.905,00 dengan nomor kontrak 057/SPK/VII/2018;
 - 2) Pendapatan sewa area halaman parkir Stadion Bumi Sriwijaya oleh PT RS Siloam sebesar Rp1.512.649,00 dengan nomor kontrak 51/PPA/VII/2018;
 - 3) Pendapatan sewa lahan kantor gubernur oleh PT BPD Sumsel Babel sebesar Rp80.021.725,00 dengan nomor kontrak 019/SPK/VIII/2021; dan
 - 4) Pendapatan sewa lahan lantai atas (*Roof top*) kantor Gubernur oleh PT Dayamitra Telekomunikasi sebesar Rp149.178.980,00.
- d. Pendapatan Diterima Dimuka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp674.608.443,34 terdiri atas:
- 1) Pendapatan sewa lahan Pemprov Sumsel jalan Kapt. A. Rivai Kel 26 Ilir dan Jalan Kapt. A. Rivai Kel. Lorok Pakjo Palembang oleh PT Bank SumselBabel sebesar Rp46.018.504,11 dengan nomor kontrak No. 044/SPK/BPKAD/2019 dan No. 324/UM/2/SPP/2019;
 - 2) Pendapatan sewa sebagian tanah dan bangunan Pemprov Sumsel di Jalan Kapten A. Rivai No.51 Kel Sei Pangeran Kec. Ilir Barat 1, Palembang oleh PT Bank SumselBabel sebesar Rp100.917.189,04 dengan nomor kontrak No.045/SPK/BPKAD/2019 dan No.325/UM/2/SPP/2019;
 - 3) Pendapatan sewa lahan di Jalan POM IX Kel. Lorok Pakjo dan Jalan Palembang Darussalam Kec Bukit Kecil Palembang oleh PT Quattro Internasional sebesar Rp50.153.972,60 dengan nomor kontrak 0251/SPK/BPKAD/2019 dan Nomor 001/PKS-Quantro/Sumsel/VI/2019.
 - 4) Pendapatan sewa tanah dan bangunan rukan untuk kantor sekretariat Jalan Basuki Rahmat, Palembang oleh Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumsel sebesar Rp38.808.723,29 dengan nomor kontrak 028/SPK/BPKAD/2020 dan 002/MOU/AIA-SS/VI/2020;
 - 5) Pendapatan Sewa Paguyuban Nusantara Sumsel bersatu (PNSB) di Jl. Diponegoro, Palembang sebesar Rp40.403.944,71 dengan nomor kontrak 029/SPK/BPKAD/2021 dan 19/DPP-PNSB/IV/2021;
 - 6) Pendapatan sewa lahan kolam retensi Palembang Icon oleh PT Grand Modern sebesar Rp25.216.438,36; dan
 - 7) Pendapatan Sewa sebagian lahan milik Pemprov Sumsel yang terletak di Jalan POM IX, Kelurahan Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Palembang dan di Jln. Gubernur H.A Bastari Jakabaring, Palembang oleh PT BPD SumselBabel sebesar Rp373.089.671,23.

5. Utang Belanja

Saldo Utang Belanja Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp758.127.018.077,85 dan Rp501.637.475.328,69 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 123 Rincian Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Mutasi 2022		Per 31 Desember 2022
				Tambah	Kurang	
1	Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00	67.928.071.487,00		67.928.071.487,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	30.513.640.358,00	9.714.125,00	30.140.635.039,00	28.729.179.020,17	31.934.810.501,83
-	Utang Belanja Jasa	125.250.000,00	0,00		114.850.000,00	10.400.000,00
-	Utang Belanja Barjas BLUD	11.910.749.826,00	0,00	17.132.344.896,00	11.878.218.063,00	17.164.876.659,00
-	Utang Belanja Pihak Ketiga	18.477.640.532,00	9.714.125,00	13.008.290.143,00	16.736.110.957,17	14.759.533.842,83
3	Utang Belanja Hibah	9.430.187.000,00	0,00	0,00	9.430.187.000,00	0,00
-	DAK Non Fisik BOS	9.430.187.000,00	0,00	0,00	9.430.187.000,00	0,00
4	Utang Belanja Bagi Hasil	157.767.683.766,00	0,00	450.312.861.283,00	157.767.683.766,00	450.312.861.283,00
-	Utang Bagi Hasil Pajak Rokok	20.105.568.276,00	0,00	85.230.019.166,00	20.105.568.276,00	85.230.019.166,00
-	Utang Bagi Hasil Pajak Daerah	137.662.115.490,00	0,00	365.082.842.117,00	137.662.115.490,00	365.082.842.117,00
5	Utang Belanja Bantuan Keuangan	303.925.964.204,69	0,00	115.762.692.924,44	211.737.382.323,11	207.951.274.806,02
-	Jamsoskes Kab/Kota	70.012.007.190,58	0,00	0,00		70.012.007.190,58
-	Integrasi Program BPJS Kesehatan	23.176.574.691,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	22.176.574.691,00
-	Bersifat Khusus	210.737.382.323,11	0,00	115.762.692.924,44	210.737.382.323,11	115.762.692.924,44
	Jumlah	501.637.475.328,69	9.714.125,00	594.243.938.759,44	407.663.761.109,28	758.127.018.077,85

a. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai untuk Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp67.928.071.487,00 dan Rp0,00.

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp31.934.810.501,83 dan Tahun 2021 sebesar Rp30.513.640.358,00 terdiri dari utang belanja jasa, utang belanja barang dan jasa BLUD dan utang belanja pihak ketiga sebagai berikut.

- 1) Utang Belanja Jasa Tahun 2022 adalah utang atas tagihan pembayaran langsung honor jasa tenaga laboratorium, honor narasumber dan jasa tenaga ahli pada Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp10.400.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 124 Rincian Mutasi Utang Belanja Jasa

(dalam rupiah)

No	Utang Belanja Jasa	Utang Beban Jasa Audited 2021	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi Kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Utang Belanja Jasa Tahun 2022
1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
-	Pembayaran Langsung Honor Jasa Tenaga Laboratorium Keg. Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengemb. Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	0,00
-	Pembayaran Langsung Honor Narasumber dan Jasa Tenaga Ahli Keg. Pembayaran Langsung Honor Narasumber dan Jasa Tenaga Ahli Keg. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	30.400.000,00	0,00	20.000.000,00	10.400.000,00
-	Pembayaran Langsung Jasa Tenaga Ahli Keg. Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengemb. Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	74.750.000,00	0,00	74.750.000,00	0,00
	Jumlah	125.250.000,00	0,00	114.850.000,00	10.400.000,00

- 2) Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp17.164.876.659,00 terdapat pada RS Ernaldi Bahar, RS. Paru-Paru, RS. Gigi dan Mulut dan RSUD Siti Fatimah, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 125 Rincian Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

(dalam rupiah)

Utang Belanja Barjas BLUD	Utang Belanja Barjas BLUD Audited 2021	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi kurang Tahun 2022	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Saldo Akhir Utang Belanja Barjas BLUD Tahun 2022
RS. Paru-Paru						
Belanja Jasa pelayanan	14.753.595,00	0,00	14.753.595,00			0,00
Biaya Pemeriksaan laboratorium BBLK	670.000,00	0,00	670.000,00			0,00
Jumlah	15.423.595,00	0,00	15.423.595,00			0,00
RS. Gigi dan Mulut						
PT. Rentokil (Fest control) bulan November 2020	0,00	0,00	0,00			0,00
Jasa Pelayanan Dokter Bedah Mulut (BPJS Okt, Nov, Des dan Umum Des 2020)	0,00	0,00	0,00			0,00
Belanja Jasa Pelayanan lainnya	0,00	0,00	0,00			0,00
Jasa Pencucian Linen Kotor (RSMH) Bulan Desember 2020	0,00	0,00	0,00			0,00

Utang Belanja Barjas BLUD	Utang Belanja Barjas BLUD Audited 2021	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi kurang Tahun 2022	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Saldo Akhir Utang Belanja Barjas BLUD Tahun 2022
Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Prostodonti (BPJS Bulan Sept, BPJS Okt, BPJS Nov)	135.213.936,00	0,00	135.213.936,00			0,00
Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Bedah Mulut (BPJS Sept, BPJS Okt, Umum Des)	23.602.070,00	0,00	23.602.070,00			0,00
Jasa Pencucian Linen Kotor (RSMH) Bulan Desember 2021	1.642.500,00	0,00	1.642.500,00			0,00
Jasa Pelayanan Pegawai RS (Bulan Nov dan Des)	441.195.924,00	0,00	441.195.924,00			0,00
Jasa Pemeriksaan Laboratorium BBLK (Bulan Desember)	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00			0,00
Jasa Pengendalian Hama-PT. Rentokil (Nov 2021)	891.000,00	0,00	891.000,00			0,00
Jasa Pemeriksaan TLD Badge (Okt-Des) 2022	0,00	750.000,00	0,00			750.000,00
Jasa Pelayanan Linen Kotor (RSMH) Bulan Desember 2022	0,00	2.666.000,00	0,00			2.666.000,00
Tagihan Internet Bag. Admisi Desember 2022	0,00	110.000,00,00	0,00			110.000,00
Jasa Pelayanan Pegawai RS Bulan Desember 2022 (Umum Des, RJTL Okt, Alkes Okt, Alkes Nov, RJTL Nov)	0,00	420.979.876,00	0,00			420.979.876,00
Jasa Pelayanan Dokter Tamu an. drg. Febriani, Sp. Prost	0,00	2.100.000,00	0,00			2.100.000,00
Jasa Pelayanan Pegawai RS BPJS Desember	0,00	198.980.850,00	0,00			198.980.850,00
Tagihan Makanan dan Minuman Pasien Periode 1-15 Des 2022	0,00	280.000,00	0,00			280.000,00
Tagihan Jasa						
Tagihan Jasa Linen	0,00	0,00	0,00		671.000,00	671.000,00
Tagihan Jasa Listrik	0,00	0,00	0,00	43.491.770,00		43.491.770,00
Tagihan Jasa Telepon	0,00	0,00	0,00	2.225.070,00		2.225.070,00
Tagihan Jasa Air	0,00	0,00	0,00	5.782.200,00		5.782.200,00
Jumlah	604.885.430,00	625.866.726,00	604.885.430,00	51.499.040,00	671.000,00	676.694.766,00
RSUD Siti Fatimah						
Belanja Obat-Obatan	6.259.342.658,00	0,00	6.226.139.895,00			33.202.763,00
Belanja Sewa Peralatan Medis/Non Medis	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00			0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	241.054.000,00	0,00	241.054.000,00			0,00
Belanja Persediaan Alkes	2.112.000,00	0,00	2.112.000,00			0,00
Belanja Jasa Asuransi Pegawai	0,00	0,00	0,00			0,00
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	0,00	0,00	0,00			0,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	0,00	0,00	0,00			0,00
Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	0,00	0,00	0,00			0,00

Utang Belanja Barjas BLUD	Utang Belanja Barjas BLUD Audited 2021	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi kurang Tahun 2022	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Saldo Akhir Utang Belanja Barjas BLUD Tahun 2022
Belanja Jasa Perizinan	0,00	0,00	0,00			0,00
Belanja kawat/faksimili/internet	321.210.000,00	0,00	321.210.000,00			0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	440.601.000,00	0,00	440.601.000,00			0,00
Belanja Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	2.868.328.841,00	0,00	2.868.328.841,00			0,00
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275.444.400,00	0,00	275.444.400,00			0,00
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	877.507.902,00	0,00	877.507.902,00			0,00
Belanja Cetak	0,00	68.000.000,00	0,00			68.000.000,00
Belanja Jasa Laundry	0,00	237.188.241,00	0,00			237.188.241,00
Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	183.030.800,00	0,00			183.030.800,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	4.900.000,00	0,00			4.900.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian	0,00	32.000.000	0,00			32.000.000,00
Belanja Persediaan Alat Kesehatan	0,00	257.760.245,00	0,00			257.760.245,00
Belanja Kebersihan Kantor	0,00	134.473.826,00	0,00			134.473.826,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	539.103.520,00	0,00			539.103.520,00
Belanja Jasa event Organizer	0,00	480.524.550,00	0,00			480.524.550,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	84.355.220,00	0,00			84.355.220,00
Belanja Kerja Sama Operasional	0,00	185.670.037,00	0,00			185.670.037,00
Belanja Perlengkapan Rumah tangga	0,00	24.197.410,00	0,00			24.197.410,00
Belanja Rujukan Parsial	0,00	74.649.000,00	0,00			74.649.000,00
Belanja Sewa Kantor atau Tempat	0,00	8.650.000,00	0,00			8.650.000,00
Belanja Dekorasi	0,00	46.775.000,00	0,00			46.775.000,00
Belanja Pengadaan Promosi Rumah Sakit	0,00	19.536.000,00	0,00			19.536.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.850.000,00	0,00			5.850.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	0,00	4.802.000,00	0,00			4.802.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	82.470.420,00	0,00			82.470.420,00
Belanja Pemeliharaan IPAL	0,00	10.000.000,00	0,00			10.000.000,00
Belanja Bahan Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	0,00	10.640.233.555	0,00			10.640.233.555
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00	159.915.000,00	0,00			159.915.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	13.805.000,00	0,00			13.805.000,00
Belanja Bahan Baku untuk bangunan/kegiatan pelayanan/kegiatan operasi	0,00	37.932.000,00	0,00			37.932.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja/Tenaga lainnya	0,00	17.185.015,00	0,00			17.185.015,00
Belanja Jasa Pengelola BLUD	0,00	12.800.000,00	0,00			12.800.000,00
Belanja Obat-obatan				472.116.494,00		472.116.494,00
Belanja Jasa				327.762.071,00		327.762.071,00

Utang Belanja Barjas BLUD	Utang Belanja Barjas BLUD Audited 2021	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi kurang Tahun 2022	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Saldo Akhir Utang Belanja Barjas BLUD Tahun 2022
Jumlah	11.290.440.801,00	13.365.806.839,00	11.257.238.038,00	799.878.565,00		14.198.888.167,00
RS Ernaldi Bahar						
Belanja Jasa Pelayanan Air, Listrik, Telpon				979.607.732,00		979.607.732,00
Belanja Jasa Air				59.148.300,00		59.148.300,00
Belanja Jasa Listrik				82.116.850,00		82.116.850,00
Jumlah	0,00	0,00		1.120.872.882,00		1.120.872.882,00
RS Mata						
Belanja Obat-obatan	0,00	1.168.420.844,00	0,00	0,00	0,00	1.168.420.844,00
Jumlah	0,00	1.168.420.844,00	0,00	0,00	0,00	1.168.420.844,00
Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.910.749.826,00	15.160.094.409,00	11.877.547.063,00	1.972.250.487,00	671.000,00	17.164.876.659,00

- 3) Utang Belanja Pihak Ketiga sebesar Rp14.759.533.842,83 adalah utang belanja barang dan jasa yang belum dibayar sampai dengan tahun anggaran berakhir dengan rincian terdapat pada tabel berikut.

Tabel 126 Rincian Mutasi Utang Belanja Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

No	Utang Belanja Pihak Ketiga/SKPD	Utang Belanja Pihak Ketiga Audited 2021	Koreksi Saldo Awal	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Utang Belanja Pihak Ketiga Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan	2.426.448.840,00	0,00	1.010.408.000,00	2.416.468.840,00	1.020.388.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.008.008.863,72	0,00	4.446.888.020,00	871.659.413,72	4.583.237.470,00
3	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	6.157.212.032,00	9.714.125,00	975.258.267,00	5.782.622.752,00	1.359.561.672,00
4	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	4.433.029.274,00	0,00	1.802.467.620,00	4.433.029.274,00	1.802.467.620,00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	3.427.218.459,83	0,00	3.917.941.286,00	2.232.198.365,00	5.112.961.380,83
6	Dinas Perhubungan	3.984.500,00	0,00	0,00	3.984.500,00	0,00
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	308.652.530,00	0,00	0,00	308.652.530,00	0,00
8	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	176.400.000,00	0,00	8.840.000,00	176.400.000,00	8.840.000,00
9	Dinas Kehutanan	13.183.352,45	0,00	0,00	13.183.352,45	0,00
10	Sekretariat Daerah	24.399.650,00	0,00	0,00	24.399.650,00	0,00
11	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	499.103.030,00	0,00	0,00	473.512.280,00	25.590.750,00

No	Utang Belanja Pihak Ketiga/SKPD	Utang Belanja Pihak Ketiga Audited 2021	Koreksi Saldo Awal	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Utang Belanja Pihak Ketiga Tahun 2022
12	Bapenda	0,00	0,00	554.073.000,00	0,00	554.073.00,00
13.	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	216.335.900,00	0,00	216.335.900,00
14	SATPOL PP	0,00	0,00	44.692.500,00	0,00	44.692.500,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	31.385.550,00	0,00	31.385.550,00
Jumlah		18.477.640.532,00	9.714.125,00	13.008.290.143,00	16.736.110.957,17	14.759.533.842,83

Rincian Utang Belanja Pihak Ketiga per kegiatan terdapat pada **Lampiran 36**.

c. Utang Belanja Hibah

Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp9.430.187.000,00. Utang Belanja Hibah tahun 2021 sebesar Rp9.430.187.000,00 merupakan sisa dana DAK non Fisik BOS yang belum disalurkan dan telah dikembalikan ke Pemerintah Pusat melalui mekanisme pemotongan DAU sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sehingga utang belanja hibah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

d. Utang Belanja Bagi Hasil Pajak

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp450.312.861.283,00 dan Rp157.767.683.766,00 yang merupakan kurang salur alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok bulan Oktober-November (Triwulan IV) dan alokasi utang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota bulan November dan Desember 2022 yang belum disalurkan kepada kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran berakhir dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Utang Bagi Hasil Pajak Rokok bulan Oktober-November (Triwulan IV) sebesar Rp85.230.019.166,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 953/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Kurang Salur Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (bulan Oktober sampai dengan bulan November 2022) untuk Pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022. Rincian mutasi utang bagi hasil pajak rokok per kabupaten/kota terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 127 Rincian Mutasi Utang Bagi Hasil Pajak Rokok per Kabupaten/Kota

(dalam rupiah)

Utang Bagi Hasil Pajak Rokok (Kab/Kota)	Saldo Awal Audited 2021	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi Kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Utang Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2022
Palembang	3.250.368.231,61	12.089.828.083,00	3.250.368.231,61	12.089.828.083,00
Musi Banyuasin	1.202.248.584,99	5.917.470.095,00	1.202.248.584,99	5.917.470.095,00
Banyuasin	1.740.063.948,08	7.165.237.576,00	1.740.063.948,08	7.165.237.576,00
OKI	2.097.952.052,45	7.016.937.342,00	2.097.952.052,45	7.016.937.342,00
Ogan Ilir	1.109.937.941,15	4.587.881.797,00	1.109.937.941,15	4.587.881.797,00
OKU	1.184.756.981,05	4.224.801.915,00	1.184.756.981,05	4.224.801.915,00
OKU Selatan	584.238.249,91	4.189.005.307,00	584.238.249,91	4.189.005.307,00
OKU Timur	1.397.701.034,03	6.065.770.329,00	1.397.701.034,03	6.065.770.329,00
Muara Enim	1.661.232.783,75	5.845.876.879,00	1.661.232.783,75	5.845.876.879,00
Prabumulih	862.613.285,98	3.140.676.071,00	862.613.285,98	3.140.676.071,00
Lahat	941.444.450,59	4.460.036.768,00	941.444.450,59	4.460.036.768,00
Pagar Alam	464.968.647,60	2.838.961.803,00	464.968.647,60	2.838.961.803,00
Musi Rawas	921.225.231,60	4.444.695.364,00	921.225.231,60	4.444.695.364,00
Lubuklinggau	666.478.932,70	3.411.707.532,00	666.478.932,70	3.411.707.532,00
Empat Lawang	247.933.172,20	3.513.983.555,00	247.933.172,20	3.513.983.555,00
Musi Rawas Utara	896.311.983,65	3.166.245.077,00	896.311.983,65	3.166.245.077,00
PALI	876.092.764,66	3.150.903.673,00	876.092.764,66	3.150.903.673,00
Jumlah	20.105.568.276,00	85.230.019.166,00	20.105.568.276,00	85.230.019.166,00

- 2) Utang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota bulan Desember 2022 sebesar Rp365.082.842.117,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 181/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022. Rincian mutasi utang Bagi Hasil Pajak Daerah per kabupaten/kota terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 128 Rincian Mutasi Utang Bagi Hasil Pajak Daerah per Kabupaten/Kota

(dalam rupiah)

Kabupaten/Kota	Saldo Awal Audited 2021	Alokasi Definitif Tahun 2022	Realisasi Belanja Tahun 2022	Saldo Akhir Utang Bagi Hasil Pajak Tahun 2022
	SK No. 154/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 22 Februari 2022	SK No. 181/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 16 Februari 2023		SK No. 181/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 16 Februari 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) - (4)
Palembang	34.269.096.711,00	363.484.701.467,98	321.321.788.145,98	76.432.010.033,00
Musi Banyuasin	9.308.360.377,00	124.613.630.431,79	108.439.806.755,79	25.482.184.053,00

Kabupaten/Kota	Saldo Awal Audited 2021	Alokasi Definitif Tahun 2022	Realisasi Belanja Tahun 2022	Saldo Akhir Utang Bagi Hasil Pajak Tahun 2022
	SK No. 154/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 22 Februari 2022	SK No. 181/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 16 Februari 2023		SK No. 181/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 16 Februari 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) - (4)
Banyuasin	8.031.128.310,00	95.341.123.383,21	84.169.672.849,21	19.202.578.844,00
OKI	9.475.725.158,00	127.122.902.866,74	110.464.668.872,74	26.133.959.152,00
Ogan Ilir	5.659.307.771,00	68.530.002.840,25	60.126.772.956,25	14.062.537.655,00
OKU	6.038.044.424,00	71.459.374.328,21	63.177.976.198,21	14.319.442.554,00
OKU Selatan	4.273.605.500,00	51.627.195.211,00	45.383.223.489,00	10.517.577.222,00
OKU Timur	5.657.003.833,00	68.549.824.386,45	60.293.093.597,45	13.913.734.622,00
Muara Enim	13.610.740.910,00	237.567.882.668,78	199.798.395.937,78	51.380.227.641,00
Prabumulih	5.760.063.140,00	69.840.394.187,12	61.179.454.994,12	14.421.002.333,00
Lahat	8.195.014.302,00	128.782.199.704,78	107.907.838.558,78	29.069.375.448,00
Pagar Alam	4.092.063.047,00	50.766.231.134,00	44.393.454.396,00	10.464.839.785,00
Musi Rawas	5.479.369.865,00	68.260.133.536,81	59.788.974.069,81	13.950.529.332,00
Lubuklinggau	5.625.250.638,00	65.463.598.792,51	57.768.113.157,51	13.320.736.273,00
Empat Lawang	3.826.488.954,00	47.768.972.414,03	41.709.820.771,03	9.885.640.597,00
Musi Rawas Utara	4.105.450.805,00	52.577.522.101,97	45.418.379.690,97	11.264.593.216,00
PALI	4.255.401.745,00	53.216.631.072,37	46.210.159.460,37	11.261.873.357,00
Jumlah	137.662.115.490,00	1.744.972.320.528,00	1.517.551.593.901,00	365.082.842.117,00

Rincian mutasi utang bagi hasil pajak per jenis pajak terdapat pada tabel berikut.

Tabel 129 Rincian Mutasi Utang Bagi Hasil Pajak per Jenis Pajak

(dalam rupiah)

No	Utang Bagi hasil Pajak(Jenis Pajak)	Saldo awal Audited 2021	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Utang Bagi hasil Pajak Tahun 2022
1	PKB R2 + R4	39.173.077.163,00	80.899.733.028,00	39.173.077.163,00	80.899.733.028,00
2	PKB A. BERAT	2.480.400,00	4.174.200,00	2.480.400,00	4.174.200,00
3	PKAA	272.925,00	0,00	272.925,00	0,00
4	BBN-KB R2 + R4	32.755.343.155,00	62.151.923.175,00	32.755.343.155,00	62.151.923.175,00
5	BBN-KB A. BERAT	0,00	15.653.250,00	0,00	15.653.250,00
6	BBN-KAA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PBB-KB	65.188.710.625,00	220.887.003.082,00	65.188.710.625,00	220.887.003.082,00
8	PAP	542.231.222,00	1.124.355.382,00	542.231.222,00	1.124.355.382,00
Jumlah		137.662.115.490,00	365.082.842.117,00	137.662.115.490,00	365.082.842.117,00

e. Utang Belanja Bantuan Keuangan

Saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp207.951.274.806,02 dan Rp303.925.964.204,69. Utang Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2022 merupakan Utang Belanja Transfer Jamsoskes Kabupaten/Kota, Utang Integrasi Program BPJS Kesehatan, dan Utang Bantuan Keuangan bersifat khusus dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Utang Belanja Transfer Jamsoskes Kabupaten/Kota Tahun 2022 sebesar Rp70.012.007.190,58 merupakan utang jaminan kesehatan program Gubernur Sumatera Selatan dengan sistem *cost sharing*. Saldo utang Jamsoskes tersebut berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi pada tanggal 15 Februari 2018 dan pada Tahun 2021 telah dilakukan pembayaran kepada 11 kabupaten/kota dengan rincian mutasi pada tabel berikut.

Tabel 130 Mutasi Utang Jamsoskes Kabupaten/Kota

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Per 31 Desember 2021	Mutasi 2022		Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Lubuklinggau	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OKU	1.779.094.386,37	0,00	0,00	1.779.094.386,37
3	OKU Timur	7.818.115.170,05	0,00	0,00	7.818.115.170,05
4	Banyuasin	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Lahat	10.460.781.611,47	0,00	0,00	10.460.781.611,47
6	Mura	3.865.128.028,38	0,00	0,00	3.865.128.028,38
7	Empat Lawang	4.615.352.278,15	0,00	0,00	4.615.352.278,15
8	PALI	9.877.296.056,92	0,00	0,00	9.877.296.056,92
9	Muratara	5.304.341.929,69	0,00	0,00	5.304.341.929,69
10	OKI	3.263.443.522,34	0,00	0,00	3.263.443.522,34
11	Ogan Ilir	979.382.808,37	0,00	0,00	979.382.808,37
12	Prabumulih	2.949.935.230,36	0,00	0,00	2.949.935.230,36
13	Muara Enim	11.561.991.479,46	0,00	0,00	11.561.991.479,46
14	OKU Selatan	5.753.447.235,02	0,00	0,00	5.753.447.235,02
15	Pagar Alam	1.783.697.454,00	0,00	0,00	1.783.697.454,00
16	Palembang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		70.012.007.190,58	0,00	0,00	70.012.007.190,58

- 2) Utang Integrasi Program BPJS Kesehatan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp22.176.574.691,00 dan Rp23.176.674.691,00 merupakan utang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Integrasi Program BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 269/KPTS/BPKAD/2022. Adapun rincian Utang Integrasi Program BPJS Kesehatan sebagai berikut.

Tabel 131 Utang Integrasi Program BPJS Kesehatan

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Per 31 Desember 2021	Mutasi 2022		Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Lubuklinggau	434.708.000,00		0,00	434.708.000,00
2	OKU	548.020.500,00		0,00	548.020.500,00
3	OKU Timur	1.318.936.500,00		0,00	1.318.936.500,00
4	Banyuasin	1.571.259.000,00		0,00	1.571.259.000,00
5	Lahat	0,00		0,00	0,00
6	Mura	808.637.000,00		0,00	808.637.000,00
7	Empat Lawang	1.519.188.000,00		0,00	1.519.188.000,00
8	PALI	741.280.500,00		0,00	741.280.500,00
9	Muratara	749.955.000,00		0,00	749.955.000,00
10	OKI	1.624.446.500,00		1.000.000.000,00	624.446.500,00
11	Ogan Ilir	1.263.383.500,00		0,00	1.263.383.500,00
12	Prabumulih	699.643.500,00		0,00	699.643.500,00
13	Muara Enim	2.041.480.500,00		0,00	2.041.480.500,00
14	OKU Selatan	1.767.991.500,00		0,00	1.767.991.500,00
15	Pagar Alam	598.995.000,00		0,00	598.995.000,00
16	Palembang	6.580.006.691,00		0,00	6.580.006.691,00
17	Musi Banyuasin	908.643.000,00			908.643.000,00
Jumlah		23.176.674.691,00	0,00	0,00	22.176.574.691,00

3) Utang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2022 sebesar Rp15.762.692.924,44 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 132 Utang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Palembang	50.730.640.430,00	40.397.272.073,06	50.730.640.430,00	40.397.272.073,06
2	Musi Banyuasin	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Banyuasin	37.508.863.168,79	17.093.294.923,95	37.508.863.168,79	17.093.294.923,95
4	Ogan Komering Ilir	4.974.000.000,00	14.271.794.100,00	4.974.000.000,00	14.271.794.100,00
5	Ogan Ilir	12.811.000.000,00	0,00	12.811.000.000,00	0,00
6	Ogan Komering Ulu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OKU Selatan	3.462.377.526,21	0,00	3.462.377.526,21	0,00
8	OKU Timur	50.365.940.588,11	40.068.902.827,43	50.365.940.588,11	40.068.902.827,43
9	Muara Enim	16.616.846.610,00	0,00	16.616.846.610,00	0,00
10	Prabumulih	12.543.061.200,00	0,00	12.543.061.200,00	0,00
11	Lahat	2.204.990.400,00	3.931.429.000,00	2.204.990.400,00	3.931.429.000,00
12	Pagar Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Musi Rawas	8.309.000.000,00	0,00	8.309.000.000,00	0,00
14	Lubuklinggau	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kabupaten/Kota	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
15	Empat Lawang	7.630.120400,00	0,00	7.630.120400,00	0,00
16	Musi Rawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PALI	3.580.542.000,00	0,00	3.580.542.000,00	0,00
Jumlah		210.737.382.323,11	115.762.692.924,44	210.737.382.323,11	115.762.692.924,44

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp67.800.415.576,99 dan Rp267.342.933.050,26 merupakan Utang Belanja Modal BLUD sebesar Rp5.415.870.460,00 dan Belanja Modal SKPD sebesar Rp62.384.536.116,99 yang belum dibayar sampai dengan tahun anggaran berakhir. Utang Belanja Modal BLUD sebesar Rp5.415.870.460,00 adalah utang belanja modal pada RS. Umum Siti Fatimah dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 133 Rincian Mutasi Utang Belanja Modal BLUD

(dalam rupiah)

No	Utang Belanja Modal BLUD	Utang BM BLUD Audited 2021	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Utang BM BLUD Tahun 2022
I	RS. Umum Siti Fatimah (BLUD)				
1	PT Worckhardt Pharma Indo	263.146.343,00	0,00	263.146.343	0,00
2	PT Abhimata Manunggal	120.539.250,00	0,00	120.539.250	0,00
3	PT Tawada Healthcare	58.584.465,00	0,00	58.584.465	0,00
4	CV Anka	46.000.000,00	0,00	46.000.000	0,00
5	PT Rajawali Nusindo	80.763.000,00	0,00	80.763.000	0,00
6	PT Intergastra Nusantara	2.250.000.000,00	0,00	2.250.000.000	0,00
7	PT Tawada Healthcare	335.000.000,00	0,00	335.000.000	0,00
8	PT Enseval Putera Megatrading	520.021.204,00	0,00	520.021.204	0,00
9	PT Mulya Husada Jaya	230.600.000,00	0,00	230.600.000	0,00
10	PT Surgika Alkesindo	22.050.000,00	0,00	22.050.000	0,00
11	PT Airindo Sentra Medika	72.600.000,00	0,00	72.600.000	0,00
12	PT Labora Mandiri Indo Pratama	24.110.804,00	0,00	24.110.804	0,00
13	PT Indofarma Global Medika	177.000.000,00	0,00	177.000.000	0,00
14	PT Timur Raya Lestari	15.792.744,00	0,00	15.792.744	0,00
15	PT Karsa Ragraprima Sukses	156.000.000,00	0,00	156.000.000	0,00
16	PT EMS Indoappliances	53.363.636,00	0,00	53.363.636	0,00

No	Utang Belanja Modal BLUD	Utang BM BLUD Audited 2021	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Utang BM BLUD Tahun 2022
17	PT Duta Indo Omnitron	124.100.000,00	0,00	124.100.000	0,00
18	CV OSA	431.596.000,00	0,00	431.596.000	0,00
19	CV Tata P'Setya	152.539.750,00	0,00	122.031.800	30.507.950,00
20	CV Sriwijaya Consultan	185.794.400,00	0,00	92.897.200	92.897.200,00
21	PT Sayovi Karyatama	203.935.935,00	0,00	203.935.935	0,00
22	PT Agtifa Dwi Putri	100.499.160,00	0,00	100.499.160	0,00
23	PT. Sriwijaya Konsultan	157.865.400,00	0,00	126.292.320	31.573.080,00
24	PT. Sriwijaya Konsultan	139.345.800,00	0,00	139.345.800	0,00
25	PT OSA PUTRA BATOM	1.798.085.800,00	0,00	1.798.085.800	0,00
26	PT Sayovi Karyatama	67.978.645,00	0,00	67.978.645	0,00
27	PT Medison Jaya Raya	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
28	PT. Indosopha Sakti	0,00	1.595.000.000,00	0,00	1.595.000.000,00
29	PT. Karya Anugerah Sriwijaya	0,00	2.324.456.800,00	0,00	2.324.456.800,00
30	CV. Tata P'Setya	0,00	47.615.850,00	0,00	47.615.850,00
31	CV. Maymanah	0,00	261.597.900,00	0,00	261.597.900,00
32	CV. Yasa Karya	0,00	157.498.876,00	0,00	157.498.876,00
33	PT Benatin Surya Cipta	0,00	659.667.600,00	0,00	659.667.600,00
34	PT. Rajawali Nusindo	242.000.000,00	0,00	242.000.000,00	0,00
35	PT. Agtifa Dwi Putri	7.525.246,00	0,00	7.525.246,00	0,00
36	PT Parit Panjang	9.075.000,00	0,00	9.075.000,00	0,00
37	PT Inti Medika Persada	9.724.734,00	0,00	9.724.734,00	0,00
38	PT. Dipa Pharmalab	61.995.049,00	0,00	61.995.049,00	0,00
39	PT Thamrin Brothers	103.440.000,00	0,00	103.440.000,00	0,00
40	PT Anugerah Mega Lestari	8.574.000,00	0,00	8.574.000,00	0,00
41	CV. Asy Putra Pratama	0,00	26.429.812,00	0,00	26.429.812,00
42	CV. Asy Putra Pratama	0,00	18.390.642,00	0,00	18.390.642,00
43	CV. Putri Permata	0,00	11.360.000,00	0,00	11.360.000,00
44	CV. Asy Putra Pratama	0,00	30.712.500,00	0,00	30.712.500,00
45	CV. Asy Putra Pratama	0,00	21.680.250,00	0,00	21.680.250,00
46	CV. Asy Putra Pratama	0,00	30.712.500,00	0,00	30.712.500,00
47	CV. Semasa Bersama	0,00	32.532.000,00	0,00	32.532.000,00
48	CV. Semasa Bersama	0,00	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00

No	Utang Belanja Modal BLUD	Utang BM BLUD Audited 2021	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Utang BM BLUD Tahun 2022
49	CV. Semasa Bersama	0,00	32.467.500,00	0,00	32.467.500,00
	Jumlah	8.232.646.365,00	5.257.892.230,00	8.074.668.135,00	5.415.870.460,00

Utang belanja modal SKPD sebesar Rp62.384.545.116,99 adalah utang belanja modal pada SKPD yang ada di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 134 Rincian Mutasi Utang Belanja Modal SKPD

(dalam rupiah)

No	Utang Belanja Modal SKPD	Utang BM SKPD Audited 2021	Koreksi Saldo Awal	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Utang BM SKPD Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan	10.690.818.467,00	0,00	2.266.928.033,00	10.611.035.567,00	2.346.710.933,00
2	Dinas Kesehatan (SKPD)	1.155.811.150,00	0,00	857.327.581,70	914.502.900,00	1.098.635.831,70
3	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	234.542.715.375,00	(26,56)	38.436.917.372,00	229.950.061.000,44	43.029.571.720,00
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	4.393.219.520,00	(1.767.978.687,00)	3.953.384.244,00	2.613.022.433,00	3.965.602.644,00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	5.935.073.882,26	0,00	2.452.964.450,00	3.662.398.048,00	4.725.640.284,26
6	Dinas Komunikasi dan Informasi	20.210.000,00	0,00	0,00	20.210.000,00	0,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	83.675.750,00	0,00	0,00	83.675.750,00	0,00
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	42.469.600,00	0,00	0,00	42.469.600,00	0,00
9	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	224.282.565,00	0,00	33.166.850,00	220.321.065,00	37.128.350,00
10	Sekretariat Daerah	1.667.452.750,00	0,00	1.302.350.505,00	1.667.452.750,00	1.302.350.505,00

No	Utang Belanja Modal SKPD	Utang BM SKPD Audited 2021	Koreksi Saldo Awal	Mutasi Tambah Tahun 2022	Mutasi kurang Tahun 2022	Saldo Akhir Utang BM SKPD Tahun 2022
11	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	205.201.826,00	0,00	0,00	205.201.826,00	0,00
12	Sekretariat DPRD	84.503.800,00	0,00	662.773.300,00	67.171.700,00	680.105.400,00
13	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	358.448.250,00	0,00	358.448.250,00
14	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	47.207.400,00	0,00	47.207.400,00
15	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	4.516.302.152,03	0,00	4.516.302.152,03
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	139.667.000,00	0,00	139.667.000,00
17	Rumah Sakit Ernaldi Bahar	0,00	0,00	94.397.447,00	0,00	94.397.447,00
18	BPSDMD	0,00	0,00	42.768.200,00	0,00	42.768.200,00
19	Badan Penghubung	64.852.000,00	0,00	0,00	64.852.000,00	0,00
Jumlah		259.110.286.685,26	(1.767.978.713,56)	55.164.602.784,73	250.122.374.639,44	62.384.536.116,99

Rincian Utang Belanja Modal SKPD per kegiatan terdapat pada **Lampiran 37**.

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp404.037.583.195,22. Utang Jangka Panjang 2022 sebesar Rp0,00 dikarenakan Utang Jangka Panjang Lembaga Keuangan Bukan Bank di reklasifikasi menjadi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

4.3.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp33.013.843.281.886,80 dan Rp31.858.511.529.758,70 Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dihitung dari total aset dikurangi kewajiban yaitu:

Aset	Rp35.244.953.304.285,71
Kewajiban	<u>Rp 1.318.710.997.409,26</u>
Ekuitas	Rp33.926.242.306.876,45

Rincian lebih lanjut saldo Ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

4.4.1 Pendapatan-LO

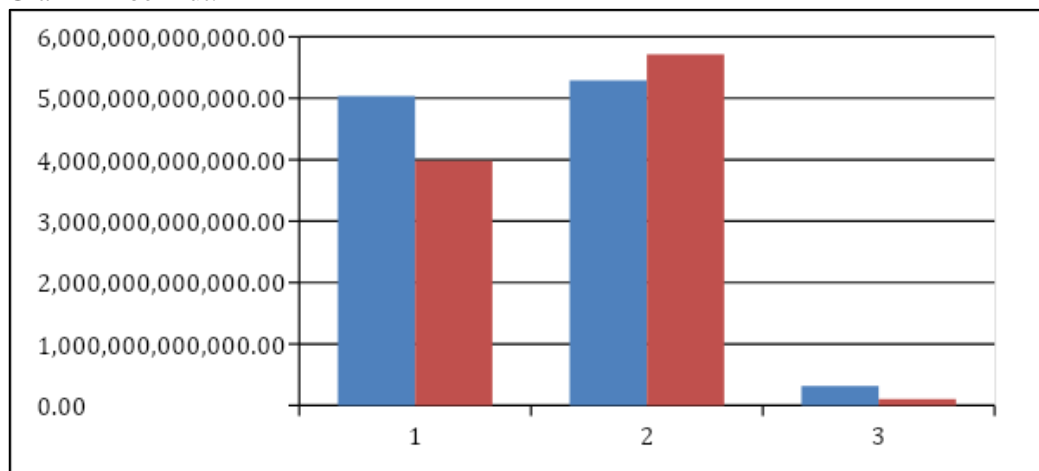
Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 135 Pendapatan-LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Pendapatan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	4.982.113.125.868,90	3.978.222.693.041,08	1.003.890.432.827,82	25,23
2	Pendapatan Transfer	5.288.928.528.005,00	5.712.683.072.712,00	(423.754.544.707,00)	(7,42)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	369.835.445.526,72	100.188.397.383,67	269.647.048.143,05	269,14
Jumlah		10.640.877.099.400,62	9.791.094.163.136,75	849.782.936.263,85	8,68

Realisasi Pendapatan-LO Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada Grafik 14 berikut.



Grafik 14 Realisasi Pendapatan-LO Tahun 2022 dan 2021

Jumlah Pendapatan-LO Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.640.877.099.400,62 jika dibandingkan dengan Pendapatan-LRA Tahun 2022 sebesar Rp10.036.955.961.132,70 terdapat perbedaan sebesar Rp603.921.138.267,90. Rincian Pendapatan-LO per kelompok pendapatan Tahun 2022 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 136 Pendapatan-LO dan LRA Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	LO	LRA	Perbedaan
1	Pendapatan Asli Daerah	4.982.113.125.868,90	4.930.954.855.677,74	51.158.270.191,16
2	Pendapatan Transfer	5.288.928.528.005,00	5.090.093.999.526,00	198.834.528.479,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	369.835.445.526,72	15.907.105.929,00	353.928.339.597,72
Jumlah		10.640.877.099.400,62	10.036.955.961.132,70	603.921.138.267,88

4.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Provinsi Sumatera Selatan adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.982.113.125.868,90 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 137 Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	PAD	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	4.460.834.176.208,25	3.524.812.566.246,24	936.021.609.962,04	26,56
2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.757.190.380,91	9.992.089.273,59	1.765.101.107,32	17,66
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	210.364.926.627,52	164.751.811.560,44	45.613.115.067,08	27,69
4	Lain-lain PAD Yang Sah	299.156.832.652,22	278.666.225.960,81	20.490.576.691,41	7,35
Jumlah		4.982.113.125.868,90	3.978.222.693.041,08	1.003.890.432.827,82	25,23

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp4.930.954.855.677,74, terdapat perbedaan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp51.158.270.191,16 seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 138 Pendapatan Asli Daerah-LO dan LRA Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	PAD	LO	LRA	Perbedaan
1	Pendapatan Pajak Daerah	4.460.834.176.208,25	4.461.152.465.008,25	(318.288.800,00)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.757.190.380,91	12.185.155.716,25	(427.965.335,34)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	210.364.926.627,52	153.032.882.582,11	57.332.044.045,41
4	Lain-lain PAD Yang Sah	299.156.832.652,22	304.584.352.371,13	(5.427.519.718,91)
Jumlah		4.982.113.125.868,90	4.930.954.855.677,74	51.158.270.191,16

1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO terealisasi sebesar Rp4.460.834.176.208,25 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO antara Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 139 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.194.685.750.280,00	1.050.846.360.960,00	143.839.389.320,00	13,69
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.083.383.406.500,00	957.251.353.845,00	126.132.052.655,00	13,18
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	1.506.812.780.858,25	940.804.251.499,04	566.008.529.359,21	60,16
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	13.119.649.458,00	12.628.973.571,20	490.675.886,80	3,89
5	Pajak Rokok	662.832.589.112,00	563.281.626.371,00	99.550.962.741,00	17,67
Jumlah		4.460.834.176.208,25	3.524.812.566.246,24	936.021.609.962,01	26,56

Jika dibandingkan dengan pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp4.461.152.465.008,25, terdapat perbedaan selisih kurang sebesar Rp318.288.800,00 yang merupakan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah yang telah diakui Tahun 2021, seperti disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 140 Pendapatan Pajak Daerah-LO dan LRA Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Pajak Daerah	LO	LRA	Perbedaan
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.194.685.750.280,00	1.194.685.750.280,00	0,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.083.383.406.500,00	1.083.383.406.500,00	0,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	1.506.812.780.858,25	1.507.131.069.658,25	(318.288.800,00)
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	13.119.649.458,00	13.119.649.458,00	0,00
5	Pajak Rokok	662.832.589.112,00	662.832.589.112,00	0,00
Jumlah		4.460.834.176.208,25	4.461.152.465.008,25	(318.288.800,00)

2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp11.757.190.380,91 dan Rp Rp9.992.089.273,59 dengan uraian pada tabel berikut.

Tabel 141 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
2	Retribusi Pelayanan Pendidikan	35.709.000,00	0,00	35.709.000,00	0,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.901.899.000,00	2.362.615.562,09	539.283.437,91	22,83
4	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5	Retribusi Terminal	994.325.000,00	893.801.530,00	100.523.470,00	11,25
6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	352.610.500,00	383.050.000,00	(30.439.500,00)	(7,95)
7	Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan	154.257.587,00	15.484.816,50	138.772.770,50	896,19
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	1.226.892.700,00	556.540.000,00	670.352.700,00	120,45
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	187.706.000,00	185.900.000,00	1.806.000,00	0,97
10	Retribusi Penyebrangan Air	5.850.539.929,00	0,00	5.850.539.929,00	0,00
11	Retribusi Izin Trayek	49.500.000,00	4.648.363.465,00	(4.598.863.465,00)	(98,94)
12	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	926.333.900,00	-926.333.900,00	(100,00)
13	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00
Jumlah		11.757.190.380,91	9.992.089.273,59	1.765.100.442,41	17,66

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp12.185.155.716,25 terdapat perbedaan selisih kurang sebesar Rp427.965.335,34 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 142 Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan LRA Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Retribusi Daerah	LO	LRA	Perbedaan
1	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Pendidikan	35.709.000,00	35.709.000,00	0,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.901.899.664,91	3.319.940.203,25	-418.040.538,34
4	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Terminal	994.325.000,00	994.325.000,00	0,00
6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	352.610.500,00	352.610.500,00	0,00

No	Pendapatan Retribusi Daerah	LO	LRA	Perbedaan
7	Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan	154.257.587,00	164.182.384,00	-9.924.797,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	1.226.892.700,00	1.226.892.700,00	0,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	187.706.000,00	187.706.000,00	0,00
10	Retribusi Penyebrangan Air	5.850.539.929,00	5.850.539.929,00	0,00
11	Retribusi Izin Trayek	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00
12	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
Jumlah		11.757.190.380,91	12.185.155.716,25	(427.965.335,34)

Penjelasan atas perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan LRA adalah sebagai berikut:

- 1) Selisih kurang perbedaan piutang retribusi kekayaan daerah sebesar Rp418.040.538,34 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pengurangan pendapatan retribusi untuk penerimaan retribusi Tahun 2021 sebesar Rp521.987.157,00 dan penambahan pendapatan retribusi untuk pencatatan piutang retribusi Tahun 2022 yang belum diterima sebesar Rp115.300.153,75 pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang.
 - b. Pengurangan pendapatan retribusi untuk penerimaan retribusi Tahun 2021 sebesar Rp241.065.000,00 dan penambahan pendapatan retribusi untuk pencatatan retribusi sebesar Rp350.000.000,00 pada Seretariat Daerah.
 - c. Pengurangan pendapatan retribusi karena penyesuaian pendapatan Diterima Dimuka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun 2022 sebesar Rp233.449.259,00 dan penambahan pendapatan retribusi karena penyesuaian pendapatan diterima dimuka Tahun 2021 atas retribusi kekayaan daerah menjadi pendapatan retribusi sebesar Rp128.160.723,91 pada Sekretariat Daerah.
 - d. Pengurangan pendapatan retribusi karena pembayaran piutang retribusi Tahun 2021 sebesar Rp15.000.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 2) Selisih kurang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp9.924.797,00 merupakan penambahan pendapatan retribusi Tahun 2022 yang belum diterima sebesar Rp25.979.472,00 dan pengurangan pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhan karena pembayaran piutang Tahun 2021 sebesar Rp35.904.269,00.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 pada perusahaan milik daerah dan sektor swasta sebesar Rp210.364.926.627,52 mengalami kenaikan sebesar Rp45.613.115.067,08 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021 sebesar Rp164.751.811.560,44, atau 27,69% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 143 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

(dalam rupiah)

No	Investasi	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	PT. Bank Sumsel Babel	94.033.192.548,82	133.128.974.716,00	(39.095.782.167,18)	(29,37)
2	PD. Pertambangan dan Energi/PT Sumsel Energi Gemilang (SEG)	5.464.099.890,00	943.721.770,00	4.520.378.120,00	478,99
3	BPR Sumatera Selatan	3.903.305.895,92	1.602.028.541,59	2.301.277.354,33	143,65
4	PT Penjamin Kredit Daerah	16.084.385.431,62	10.799.431.434,85	5.284.953.996,77	48,94
5	PT Asuransi Bangun Askrida	100.942.071,00	94.350.095,00	6.591.976,00	6,99
6	PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna	804.678.000,00	792.330.000,00	12.348.000,00	1,56
7	PT Tambang Batu Bara Bukit Asam	73.378.486.125,00	7.960.554.081,00	65.417.932.044,00	821,78
8	PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	12.804.105.450,16	9.430.420.922,00	3.373.684.528,16	35,77
9	PT. ATS	3.791.731.215,00	0,00	3.791.731.215,00	0,00
Jumlah		210.364.926.627,52	164.751.811.560,44	45.613.115.067,08	27,69

Mutasi tambah/kurang pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO jika dibandingkan dengan Pendapatan-LRA dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 144 Mutasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO

(dalam rupiah)

No	Investasi	LO	LRA	Perbedaan
1	PT. Bank Sumsel Babel	94.033.192.548,82	71.318.740.434,61	22.714.452.114,21
2	PD. Pertambangan dan Energi/PT Sumsel Energi Gemilang (SEG)	5.464.099.890,00	0,00	5.464.099.890,00
3	BPR Sumatera Selatan	3.903.305.895,92	0,00	3.903.305.895,92
4	PT Penjamin Kredit Daerah	16.084.385.431,62	3.638.304.736,50	12.446.080.695,12
5	PT Asuransi Bangun Askrida	100.942.071,00	100.942.071,00	0,00
6	PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna	804.678.000,00	804.678.000,00	0,00
7	PT Tambang Batu Bara Bukit Asam	73.378.486.125,00	73.378.486.125,00	0,00

No	Investasi	LO	LRA	Perbedaan
8	PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	12.804.105.450,16	0,00	12.804.105.450,16
9	PT. ATS	3.791.731.215,00	3.791.731.215,00	0,00
Jumlah		210.364.926.627,52	153.032.882.582,11	57.332.044.045,41

Terdapat perbedaan Realisasi LRA dan Realisasi LO untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang berasal dari penambahan hak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas laba bersih yang dilaporkan dikurang laba yang dibagikan (dividen) dari BUMD dengan metode ekuitas.

4. Lain-lain PAD yang Sah-LO

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp299.156.832.652,22 dan Rp278.666.225.960,81 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 145 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Lain-lain PAD yang Sah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.717.435.277,00	1.155.057.400,00	562.377.877,00	48,69
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Manukar BMD yang Tidak Dipisahkan	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.266.386.100,72	4.149.978.205,88	1.116.407.894,84	26,90
4	Jasa Giro Kas Daerah	21.882.295.878,00	20.222.977.506,57	1.659.318.371,43	8,21
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	20.187.607.382,76	27.160.402.677,85	(6.972.795.295,09)	(25,67)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.258.128.057,95	1.292.484.565,48	965.643.492,47	74,71
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	37.870.281.721,77	45.130.100.966,80	(7.259.819.245,03)	(16,09)
8	Pendapatan dari Pengembalian	557.211.476,00	1.305.364.843,00	(748.153.367,00)	(57,31)
9	Pendapatan BLUD	208.787.591.721,24	175.917.543.605,45	32.870.048.115,79	18,69
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	629.215.036,78	2.332.316.189,78	(1.703.101.153,00)	(73,02)
Jumlah		299.156.832.652,22	278.666.225.960,81	20.490.606.691,41	7,35

Jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp304.584.352.371,13 terdapat perbedaan selisih kurang sebesar Rp5.427.519.718,91 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 146 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Lain-lain PAD yang Sah	LO	LRA	Perbedaan
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.717.435.277,00	1.717.435.277,00	0,00
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	680.000,00	0,00	680.000,00
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.266.386.100,72	5.266.386.100,72	0,00
4	Hasil Kerjasama Daerah	0,00	0,00	0,00
5	Jasa Giro Kas Daerah	21.882.295.878,00	21.882.295.878,00	0,00
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	14.150.000,00	(14.150.000,00)
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	20.187.607.382,76	20.747.768.016,76	(560.160.634,00)
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.258.128.057,95	2.258.128.057,95	0,00
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	37.870.281.721,77	37.656.868.649,75	213.413.072,02
10	Pendapatan dari Pengembalian	557.211.476,00	557.211.476,00	0,00
11	Pendapatan BLUD	208.787.591.721,24	214.484.108.914,95	(5.696.517.193,71)
12	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	629.215.036,78	0,00	629.215.036,78
Jumlah		299.156.832.652,22	304.584.352.371,13	(5.427.519.718,91)

Penjelasan atas perbedaan Lain-lain PAD yang Sah-LO dan LRA adalah sebagai berikut.

1. Selisih lebih dari Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp680.000,00 merupakan Hibah penghapusan kekurangan pembayaran belanja modal Peralatan dan Mesin pada Badan Kesbangpol dari CV. Pinguin Data Solusindo sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 19 Januari 2023.
2. Selisih kurang penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp14.150.000,00 pada BPKAD (PPKD) merupakan pembayaran piutang Tahun 2021 yang terdiri dari penyeteroran tunggakan kerugian daerah an. Drs. Darwin Sugandi/ahliwaris sebesar Rp900.000,00; Angsuran sampai Pelunasan TGR kendaraan Dinas BG 2023 LZ an. Trisbani Arief sebesar Rp11.250.000,00 dan angsuran mobil hilang an. Syahrion Agustoni sebesar Rp2.000.000,00.
3. Selisih kurang Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain sebesar Rp560.160.634,00 merupakan pengurang pendapatan bunga AKR pada BPKAD sebesar Rp40.256.564,00 dibayar pada tanggal 31 maret 2022 dan pengurangan pendapatan lainnya Tahun 2021 yang telah distor ke RKUD tanggal 4 Januari 2022 pada SKPD PSDA sebesar Rp580.310.634,00.
4. Selisih kurang pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp213.413.072,02 merupakan pengurangan pendapatan denda pajak daerah dari pembayaran piutang denda pajak daerah Tahun 2021 sebesar Rp213.413.072,02.

5. Selisih kurang pendapatan BLUD sebesar Rp5.696.517.193,71 merupakan selisih dari pengurangan pendapatan sebesar Rp36.846.298.032,36 dan Penambahan Pendapatan sebesar Rp29.167.887.091,51. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a) Penambahan pendapatan BLUD sebesar Rp29.167.887.091,51 dengan rincian:
- Penyesuaian piutang pendapatan BLUD Tahun 2022 pada RS. Mata sebesar Rp2.426.436.057,00;
 - Penyesuaian penambahan piutang klaim BPJS Tahun 2022 dan penyesuaian piutang kerjasama pemeriksaan Radiologi Tahun 2022 pada RS Gigi dan Mulut sebesar Rp398.361.700,00;
 - Membalik saldo awal pendapatan Diterima Dimuka Lainnya sebesar Rp287.906.849,32 dan penyesuaian penambahan piutang Tahun 2022 pada RSUD Siti Fatimah sebesar Rp2.830.887.552,19;
 - Penambahan piutang Tahun 2022 pada RS Erba (BLUD) sebesar Rp19.974.224.933,00;
 - Penyesuaian piutang Tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD) sebesar Rp3.250.070.000,00;
- b) Pengurangan pendapatan sebesar Rp36.846.298.032,36 dengan rincian:
- Pembayaran Piutang Tahun 2021 pada RS Khusus Mata Masyarakat (BLUD) sebesar Rp1.961.561.940,00;
 - Pembayaran piutang klaim BPJS Tahun 2021 sebesar Rp943.500,00 dan pembayaran piutang klaim TCM Tahun 2021 sebesar Rp19.750.000,00 pada RS Paru;
 - Pembayaran Piutang klaim BPJS Tahun 2021 sebesar Rp313.991.400,00 pada RS Khusus Gigi dan Mulut;
 - Pembayaran piutang Tahun 2021 sebesar Rp6.051.507.289,36 dan pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp2.168.402.265,00 pada RS Siti Fatimah;
 - Pembayaran piutang Tahun 2021 sebesar Rp22.423.415.338,00 dan pengurangan pendapatan atas biaya kliring sebesar Rp1.791.300,00 pada RS Ernaldi Bahar;
 - Pembayaran piutang Tahun 2020 sebesar Rp12.645.000,00 dan Pembayaran piutang Tahun 2021 sebesar Rp3.892.290.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD).
6. Perbedaan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp629.215.036,78 pada BPKAD merupakan:
- Penambahan Pendapatan dari pengurangan pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 sebesar Rp761.604.592,84;

- Pengurangan Pendapatan dari penambahan pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 sebesar Rp674.608.443,34;
- Penambahan pendapatan dari pengakuan piutang Tahun 2022 sebesar Rp4.792.612.736,00;
- Pengurangan pendapatan dari pembayaran piutang Tahun 2021 sebesar Rp4.250.393.848,72.

4.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 berasal dari Transfer Pusat terealisasi sebesar Rp5.288.928.528.005,00, mengalami penurunan sebesar Rp423.754.544.707,00 atau 7,42% dibandingkan Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp5.712.683.072.712,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 147 Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	Rasio (%)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.641.571.825.375,00	1.891.734.449.581,00	749.837.375.794,00	39,64
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.563.041.287.000,00	1.563.041.287.000,00	0,00	0,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	188.860.939.022,00	220.514.359.267,00	(31.653.420.245,00)	(14,35)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	834.583.919.608,00	2.037.392.976.864,00	(1.202.809.057.256,00)	(59,04)
5	DID	60.870.557.000,00	0,00	60.870.557.000,00	0,00
	Jumlah	5.288.928.528.005,00	5.712.683.072.712,00	(423.754.544.707,00)	(7,42)

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp5.090.093.999.526,00, terdapat perbedaan selisih sebesar Rp198.834.528.479,00 disajikan ada tabel berikut.

Tabel 148 Pendapatan Transfer-LO dan LRA Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	LO	LRA	Perbedaan
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.641.571.825.375,00	2.442.737.296.896,00	198.834.528.479,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.563.041.287.000,00	1.563.041.287.000,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	188.860.939.022,00	188.860.939.022,00	0,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	834.583.919.608,00	834.583.919.608,00	0,00
6	DID	60.870.557.000,00	60.870.557.000,00	0,00
	Jumlah	5.288.928.528.005,00	5.090.093.999.526,00	198.834.528.479,00

4.4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2022 merupakan Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp369.835.445.526,72, mengalami peningkatan sebesar Rp269.647.048.143,05 atau 269,12% apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp100.188.397.383,67. Realisasi Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp369.835.445.526,72 mengalami kenaikan sebesar Rp269.647.048.143,05 atau 269,12% apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 149 Realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Hibah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	340.937.334.386,72	57.040.097.122,00	283.897.237.264,72	497,72
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	1.035.824.000,00	26.199.403.922,00	(25.163.579.922,00)	(96,05)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	50.000.000,00	10.964.149.103,67	(10.914.149.103,67)	(99,54)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	27.162.287.140,00	5.960.000.004,00	21.202.287.136,00	355,74
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	650.000.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00
6	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	24.747.232,00	(24.747.232,00)	(100,00)
Jumlah		369.835.445.526,72	100.188.397.383,67	269.647.048.143,05	269,12

Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA sebesar Rp15.907.105.929,00, terdapat perbedaan sebesar Rp353.928.339.597,72. Pendapatan Hibah-LO Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2022 sebesar Rp15.907.105.929,00 terdapat perbedaan sebesar Rp353.928.339.597,72 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 150 Pendapatan Hibah-LO dan LRA Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Hibah	Realisasi LO	Realisasi LRA	Perbedaan
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	340.937.334.386,72	12.367.105.929,00	328.570.228.457,72
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	1.035.824.000,00	0,00	1.035.824.000,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	27.162.287.140,00	3.540.000.000,00	23.622.287.140,00
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	650.000.000,00	0,00	650.000.000,00
Jumlah		369.835.445.526,72	15.907.105.929,00	353.928.339.597,72

Penjelasan atas perbedaan Pendapatan Hibah-LO dan LRA sebesar Rp353.928.339.597,72 adalah sebagai berikut:

- Selisih lebih pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Tetap dan Persediaan sebesar Rp328.570.228.457,72 disebabkan adanya penambahan hibah Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 151 Rincian Penambahan Pendapatan Hibah-LO dari Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	SKPD	Pendapatan Hibah	Uraian
1	Dinas Kesehatan	71.369.490.557,72	Penyesuaian Persediaan Hibah Vaksin dan Obat-obatan serta Persediaan BMHP dari Kementerian Kesehatan, Koreksi persediaan hibah kurang catat pemasukan Obat pada Dinas Kesehatan
2	Dinas Perdagangan	572.403.800,00	Penyesuaian Hibah Kendaraan dari Kementerian Perdagangan
3	Dinas Perpustakaan	515.932.750,00	Penyesuaian Hibah Buku dan Peralatan Mesin Alat Angkut Darat (Mobil Perpustakaan)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.944.186.004,00	Penyesuaian Hibah BNPB Peralatan dan Mesin Tahun 2022 berupa motor listrik, serta penerimaan persediaan barang penguatan kelembagaan dan penanganan darurat covid dari hibah BNPB Tahun 2022
5	RSUD Siti Fatimah	32.032.728,00	Penyesuaian Penambahan Hibah Peralatan Mesin dari Kemenkes
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	9.063.790.614,00	Penyesuaian Penambahan Hibah Peralatan Mesin dari Kemenkes
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43.800.000,00	Penyesuaian Hibah Penambahan Komputer
8	Dinas Perhubungan	52.310.574.000,00	Penyesuaian hibah Penambahan Tanah, Bangunan dan Gedung
9	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	116.916.954.796,00	Penambahan Hibah Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Pendapatan Hibah	Uraian
10	Dinas PU Perumahan dan Kawasan Pemukiman	75.783.563.208,00	Penyesuaian Hibah Meubelair dan Rusunawa di Jakabaring dari Kemetrian PU
11	Badan Pendapatan Daerah	17.500.000,00	Hibah atas 1 bidang tanah yang tercatat Rp0,00 pada Badan Pendapatan Daerah
Jumlah		328.570.228.457,72	

- Selisih lebih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp1.035.824.000,00 merupakan Hibah Aset Tanah dari Pemerintah kota Pagar Alam.
- Selisih lebih Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp50.000.000,00 merupakan Hibah Aset Tanah Tahun 2007 dari Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI.
- Selisih lebih Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp23.622.287.140,00 merupakan Hibah persediaan Vaksin/Obat-obatan sebesar Rp23.508.287.140,00 pada Dinas Kesehatan dan Hibah Mobil Ambulance sebesar Rp114.000.000,00 pada RS Khusus Mata Masyarakat.
- Selisih lebih Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp650.000.000,00 merupakan Hibah gedung bangunan dari PT Bukit Asam Tahun 2020 sebesar Rp400.000.000,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp250.000.000,00. pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4.4.2 Beban

Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.561.761.590.493,26 dengan rincian kenaikan dan penurunan jika dibandingkan dengan beban Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 152 Realisasi Beban Daerah Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Beban	Beban Tahun 2022	Beban Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio (%)
Beban Pegawai	2.100.516.404.105,00	1.954.168.534.064,00	146.347.870.041,00	7,49
Beban Persediaan	598.760.248.787,91	500.388.623.496,24	98.371.625.291,67	19,66
Beban Jasa	1.116.419.578.800,98	980.608.598.632,90	135.810.980.168,08	13,85
Beban Pemeliharaan	143.448.322.768,63	187.959.380.755,37	(44.511.057.986,74)	(23,68)

Beban	Beban Tahun 2022	Beban Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio (%)
Beban Perjalanan Dinas	279.680.192.333,00	204.498.698.188,00	75.181.494.145,00	36,76
Beban Bunga	13.233.460.237,35	570.795.054,47	12.662.665.182,88	2.218,43
Beban Hibah	364.933.519.373,27	1.629.974.928.627,00	(1.265.041.409.253,73)	(77,61)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.076.891.505.739,47	946.520.311.743,54	130.371.193.995,93	13,77
Beban Penyisihan Piutang	1.230.274.840,25	846.786.797,08	383.488.043,17	45,28
Beban Lain-lain	60.702.880.708,73	76.036.084.181,69	(15.333.203.472,96)	(20,17)
Beban Transfer	3.805.945.202.798,67	3.137.698.225.442,95	668.246.977.355,72	21,30
Jumlah	9.561.761.590.493,26	9.619.270.966.983,23	(57.500.726.489,98)	(0,59)

4.4.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.100.516.404.105,00 mengalami kenaikan sebesar Rp146.347.870.041,00 atau 7,49% dibandingkan Beban Pegawai Tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp1.954.168.534.064,00. Rincian pada tabel berikut.

Tabel 153 Realisasi Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Rekening	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	805.449.507.107,00	766.514.659.643,00	38.934.847.464,00	5,08
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	76.462.677.560,00	73.732.376.833,00	2.730.300.727,00	3,70
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	14.328.059.900,00	14.302.277.986,00	25.781.914,00	0,18
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	51.079.243.700,00	50.695.025.837,00	384.217.863,00	0,75
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.207.698.000,00	11.491.423.000,00	2.716.275.000,00	23,64
6	Beban Tunjangan Beras ASN	45.337.027.974,00	43.180.615.001,00	2.156.412.973,00	4,99

No	Rekening	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.254.886.216,00	2.084.500.618,00	170.385.598,00	8,17
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	11.094.710,00	10.664.974,00	429.736,00	4,03
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	40.943.345.497,00	62.780.028.762,00	(21.836.683.265,00)	(34,78)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.665.940.789,00	1.570.682.193,00	95.258.596,00	6,06
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	4.992.425.265,00	4.712.046.570,00	280.378.695,00	5,95
12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.182.069.766,00	38.885.819.550,00	(23.703.749.784,00)	(60,96)
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	1.002.640.000,00	(1.002.640.000,00)	(100,00)
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	412.531.677.640,00	296.559.057.708,00	115.972.619.932,00	39,11
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	119.952.977.000,00	89.233.618.772,00	30.719.358.228,00	34,43
17	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	78.044.080,00	0,00	78.044.080,00	100,00
18	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	310.067.474.215,00	323.701.625.280,00	(13.634.151.065,00)	(4,21)
19	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	6.351.821.823,00	1.990.612.500,00	4.361.209.323,00	219,09
20	Beban Honorarium	17.481.684.914,00	11.503.457.951,00	5.978.226.963,00	51,97
21	Beban Tunjangan Badan Musyawarah	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Beban Tunjangan Komisi	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Rekening	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
23	Beban Tunjangan Badan Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Beban Tunjangan Badan Kehormatan	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Beban Uang Representasi DPRD	2.379.300.000,00	2.372.550.000,00	6.750.000,00	0,28
26	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	303.282.000,00	300.894.000,00	2.388.000,00	0,79
27	Beban Tunjangan Beras DPRD	230.295.600,00	228.340.260,00	1.955.340,00	0,86
28	Beban Uang Paket	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Beban Uang Paket DPRD	203.940.000,00	203.265.000,00	675.000,00	0,33
30	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	3.449.985.000,00	3.440.197.500,00	9.787.500,00	0,28
31	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	272.092.500,00	272.092.500,00	0,00	0,00
32	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	31.450.500,00	31.189.500,00	261.000,00	0,84
33	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	18.900.000.000,00	18.837.000.000,00	63.000.000,00	0,33
35	Beban Tunjangan Reses DPRD	4.671.450.000,00	4.707.150.000,00	(35.700.000,00)	(0,76)
36	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	1.030.362.846,00	1.027.090.320,00	3.272.526,00	0,32
37	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	22.268.237.680,00	19.756.206.240,00	2.512.031.440,00	12,72
38	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	14.200.000.000,00	16.980.000.000,00	(2.780.000.000,00)	(16,37)
39	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	70.200.000,00	5.400.000,00	7,69
40	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.400.000,00	7.800.000,00	600.000,00	7,69

No	Rekening	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
41	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	126.360.000,00	9.720.000,00	7,69
42	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400,00	4.707.300,00	362.100,00	7,69
43	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	8.047.084,00	7.801.602,00	245.482,00	3,15
44	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400,00	1.300,00	100,00	7,69
45	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000,00	561.600.000,00	0,00	0,00
46	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	7.196.000.000,00	5.593.000.000,00	1.603.000.000,00	28,66
47	Beban Pegawai BOS	76.131.906.325,00	78.837.051.622,00	(2.705.145.297,00)	(3,43)
48	Beban Pegawai BLUD	10.075.647.614,00	6.852.903.742,00	3.222.743.872,00	47,03
Jumlah		2.100.516.404.105,00	1.954.168.534.064,00	146.347.870.041,00	7,49

Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp2.100.516.404.105,00, dapat diuraikan perincian objek pada tabel berikut.

Tabel 154 Realisasi Beban Pegawai - LO dan LRA Tahun 2022

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Rekening	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
1	Beban Gaji Pokok ASN	805.449.507.107,00	805.449.507.107,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	76.462.677.560,00	76.462.677.560,00	0,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	14.328.059.900,00	14.328.059.900,00	0,00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	51.138.843.700,00	51.138.843.700,00	0,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.207.698.000,00	14.207.698.000,00	0,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	45.337.027.974,00	45.337.027.974,00	0,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.195.286.216,00	2.195.286.216,00	0,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	11.094.710,00	11.094.710,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	40.943.345.497,00	33.166.939.971,00	7.776.405.526,00

No	Rekening	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.665.940.789,00	1.665.940.789,00	0,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	4.992.425.265,00	4.992.425.265,00	0,00
12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.182.069.766,00	15.182.069.766,00	0,00
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	0,00	0,00
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	412.531.677.640,00	412.531.677.640,00	0,00
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	119.952.977.000,00	119.952.977.000,00	0,00
17	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	78.044.080,00	78.044.080,00	0,00
18	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	310.067.474.215,00	310.067.474.215,00	0,00
19	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	6.351.821.823,00	6.351.821.823,00	0,00
20	Beban Honorarium	17.481.684.914,00	17.335.584.914,00	146.100.000,00
21	Beban Tunjangan Badan Musyawarah	0,00	0,00	0,00
22	Beban Tunjangan Komisi	0,00	0,00	0,00
23	Beban Tunjangan Badan Anggaran	0,00	0,00	0,00
24	Beban Tunjangan Badan Kehormatan	0,00	0,00	0,00
25	Beban Uang Representasi DPRD	2.379.300.000,00	2.379.300.000,00	0,00
26	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	303.282.000,00	303.282.000,00	0,00
27	Beban Tunjangan Beras DPRD	230.295.600,00	230.295.600,00	0,00
28	Beban Uang Paket	0,00-	0,00	0,00
29	Beban Uang Paket DPRD	203.940.000,00	203.940.000,00	0,00
30	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	3.449.985.000,00	3.449.985.000,00	0,00
31	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	272.092.500,00	272.092.500,00	0,00

No	Rekening	Realisasi-LO	Realisasi-LRA	Perbedaan
32	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	31.450.500,00	31.450.500,00	0,00
33	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
34	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	18.900.000.000,00	18.900.000.000,00	0,00
35	Beban Tunjangan Reses DPRD	4.671.450.000,00	4.671.450.000,00	0,00
36	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	1.030.362.846,00	1.030.362.846,00	0,00
37	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	22.268.237.680,00	22.268.237.680,00	0,00
38	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	14.200.000.000,00	14.200.000.000,00	0,00
39	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
40	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
41	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00	0,00
42	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400,00	5.069.400,00	0,00
43	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	8.047.084,00	8.047.084,00	0,00
44	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400,00	1.400,00	0,00
45	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000,00	561.600.000,00	0,00
46	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	7.196.000.000,00	7.196.000.000,00	0,00
47	Beban Pegawai BOS	76.131.906.325,00	76.131.906.325,00	0,00
48	Beban Pegawai BLUD	10.075.647.614,00	10.052.817.614,00	22.830.000,00
Jumlah		2.100.516.404.105,00	2.092.571.068.579,00	7.945.335.526,00

Jika dibandingkan Belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp2.100.516.404.105,00 terdapat selisih sebesar Rp7.945.335.526,00 yang merupakan reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD ke beban honorarium pada Rumah Sakit Mata sebesar Rp118.800.000,00 dan Rumah Sakit Khusus Paru sebesar Rp27.300.000,00. Reklasifikasi beban barang dan jasa ke beban pegawai BLUD pada Rumah Sakit Mata sebesar Rp22.830.000,00. Koreksi tambah Utang PFK atas Iuran Jaminan Kesehatan - BPJS pada BPKAD selama Tahun 2022 yang belum dibayarkan sebesar Rp7.776.405.526,00.

4.4.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp598.760.248.787,91, mengalami kenaikan sebesar 19,66% dibandingkan Beban Persediaan Tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp500.388.623.496,24. Realisasi Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021 pada **Lampiran 38**.

Beban Persediaan Tahun 2022 sebesar Rp598.760.248.787,91, dapat diuraikan per rincian obyek pada **Lampiran 39**.

Selisih lebih Beban Persediaan terhadap belanja barang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Persediaan Awal Tahun	Rp99.574.950.539,99
2. Penambahan Utang Tahun Ini	Rp18.402.994.541,83
3. Hibah.....	Rp97.131.113.107,72
4. Penambahan Belanja Tidak Terduga	Rp3.192.600.000,00
5. Reklas dari Belanja Barang Jasa BLUD.....	Rp50.833.934.076,00
6. Koreksi/Reklasifikasi Tambah	Rp1.611.487.106,25
7. Pembayaran Utang Tahun 2021.....	(Rp16.473.826.645,83)
8. Persediaan Akhir Tahun 2022.....	(Rp100.611.085.180,50)
9. Koreksi/Reklasifikasi Kurang.....	(Rp1.909.960.169,39)
10. Selisih (1+2-3+4+5+6-7-8-9)	Rp151.752.207.376,07

Reklas dari Beban Barang Jasa BLUD sebesar Rp50.833.934.076,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. RS. Mata (BLUD)	Rp 8.907.295.556,00
2. RS. Paru-Paru (BLUD).....	Rp 212.949.883,00
3. RS. Gigi dan Mulut (BLUD).....	Rp 686.582.610,00
4. RS. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD).....	Rp 22.842.013.886,00
5. RS. Dr Ernaldi Bahar (BLUD).....	Rp 10.380.637.886,00
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD)	Rp 5.091.692.155,00
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BLUD).....	<u>Rp 2.712.762.100,00</u>
Jumlah	Rp 50.833.934.076,00

Mutasi Penambahan Hibah sebesar Rp97.131.113.107,72 dengan rincian sebagai berikut.

1. Dinas Kesehatan (SKPD).....	Rp 94.048.733.615,72
2. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD).....	Rp 829.044.082,00
3. RS. Dr Ernaldi Bahar (SKPD).....	Rp 342.172.000,00
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	Rp 1.911.163.410,00
Jumlah	Rp 97.131.113.107,72

Realisasi Beban Persediaan per SKPD Tahun 2022 disajikan pada **Lampiran 40**.

4.4.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.116.419.578.800,98 mengalami kenaikan sebesar Rp135.810.980.168,08 atau 13,85% dibandingkan Beban Jasa Tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp980.608.598.632,90. Realisasi Beban Jasa Tahun 2022 dan 2021 pada Lampiran 41.

Beban Jasa Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.116.419.578.800,98 dapat diuraikan per rincian obyek pada **Lampiran 42**.

Selisih kurang beban jasa terhadap belanja jasa dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan Utang 2022.....	Rp	33.730.994.129,00
2. Belanja Tak Terduga	Rp	1.528.650.000,00
3. Reklas dari Belanja Barang Jasa Blud	Rp	93.519.813.757,40
4. Beban Dibayar Dimuka Awal Tahun (2021)..	Rp	3.718.075.722,06
5. Koreksi/Reklasifikasi Tambah.....	Rp	290.799.400,00
6. Pembayaran Utang Tahun 2021.....	(Rp	31.595.606.007,00)
7. Beban Dibayar Dimuka Akhir Tahun (2022)...	(Rp	3.865.882.104,87)
8. Koreksi/Reklasifikasi Kurang.....	(Rp	159.762.077.447,40)
9. Kapitalisasi Aset.....	(Rp	1.797.138.310,00)
Selisih (10 = 1+2+3+4+5-6-7-8-9)	(Rp	64.232.370.860,81)

Reklas dari belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp93.519.813.757,40 dengan rincian sebagai berikut.

- RS. Mata (BLUD).....	Rp	18.476.826.599,00
- RS. Gigi dan Mulut (BLUD).....	Rp	2.802.187.509,00
- RS. Paru-Paru (BLUD).....	Rp	346.980.184,00
- RS. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD).....	Rp	45.855.023.207,00
- RS. Dr Ernaldi Bahar (BLUD).....	Rp	15.060.915.855,00
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD).....	Rp	1.356.677.435,40
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BLUD).....	Rp	<u>9.621.202.938,00</u>
Jumlah	Rp	93.519.813.757,40

Realisasi Beban Jasa per SKPD disajikan pada **Lampiran 43**.

4.4.2.4. Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2022 adalah Rp143.448.322.768,63, mengalami penurunan sebesar Rp44.511.057.986,74 atau 23,68% dibandingkan realisasi Tahun

2021 Rp187.959.380.755,37. Rincian Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 pada **Lampiran 44**.

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 adalah Rp143.448.322.768,63 dapat diuraikan per rincian obyek pada **Lampiran 45**.

Selisih kurang beban pemeliharaan terhadap belanja pemeliharaan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penambahan Utang Tahun 2022	Rp1.971.546.522,00
2. Reklas Belanja Barang dan Jasa BLUD.....	Rp 6.673.735.005,00
3. Koreksi/Reklasifikasi Tambah.....	Rp 3.178.397.667,89
4. Pembayaran Utang Tahun 2021.....	(Rp 5.640.885.938,17)
5. Kapitalisasi Aset	(Rp 4.095.321.558,00)
6. Koreksi/Reklasifikasi Kurang.....	(Rp 2.316.074.079,53)
7. Selisih (6 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5 - 6)	(Rp 228.602.380,81)

Koreksi dan reklasifikasi tambah sebesar Rp3.178.397.667,89 dengan rincian sebagai berikut.

1. Beban Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp394.403.000,00;
2. Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp585.245.381,00;
3. Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar pada Dinas Perhubungan sebesar Rp159.582.917,89;
4. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga pada Sekretariat Daerah sebesar Rp497.394.100,00;
5. Beban Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp4.800.000,00;
6. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor pada Sekretariat DPRD sebesar Rp481.122.269,00;
7. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Rumah Negara Golongan I pada Sekretariat DPRD sebesar Rp972.025.000,00; dan
8. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Perindustrian sebesar Rp83.825.000,00.

Koreksi dan reklasifikasi kurang sebesar Rp2.316.074.079,53 dengan rincian sebagai berikut.

1. Beban Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp4.847.343,00;

2. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp44.692.500,00;

3. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp 149.600.000,00
Inspektorat.....	Rp 384.856.608,00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Rp 1.648.401.878,53
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 83.675.750,00
Jumlah	Rp 2.266.534.236,53

Reklas dari belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp6.673.735.005,00 dengan rincian sebagai berikut.

- RS. Gigi dan Mulut (BLUD).....	Rp 280.313.704,00
- RS. Paru-Paru (BLUD).....	Rp 26.120.950,00
- RS. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD).....	Rp 2.113.125.819,00
- RS. Dr Ernaldi Bahar (BLUD).....	Rp 1.528.169.094,00
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD).....	Rp 1.840.361.109,00
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BLUD).....	<u>Rp 885.644.329,00</u>
- Jumlah	Rp 6.673.735.005,00

Realisasi Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2022 disajikan pada **Lampiran 46**.

4.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp279.680.192.333,00. Jika dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 sebesar Rp204.498.698.188,00 mengalami kenaikan sebesar Rp75.181.494.145,00 atau 36,76%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 155 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Beban	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Kenaikan/Penurunan	Rasio (%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	250.158.667.489,00	182.006.255.560,00	68.152.411.929,00	37,45
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	2.785.319.933,00	6.890.274.886,00	(4.104.954.953,00)	(59,58)
5	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.895.507.843,00	7.511.658.861,00	(616.151.018,00)	(8,20)
6	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.837.245.472,00	4.817.320.422,00	9.019.925.050,00	187,24

7	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.444.796.408,00	3.273.188.459,00	(828.392.051,00)	(25,31)
8	Beban Perjalanan Dinas Biasa ^u Luar Negeri	3.558.655.188,00	0,00	3.558.655.188,00	100,00
Jumlah		279.680.192.333,00	204.498.698.188,00	75.181.494.145,00	36,76

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 adalah Rp279.680.192.333,00 dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut.

Tabel 156 Realisasi Beban Perjalanan Dinas - LO dan LRA Tahun 2022

(dalam rupiah)

No.	Beban	Realisasi-LO	Realisasi -LRA	Perbedaan
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	250.158.667.489,00	246.021.652.870,00	4.137.014.619,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	2.785.319.933,00	2.785.319.933,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.895.507.843,00	4.039.845.604,00	2.855.662.239,00
6	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.837.245.472,00	13.837.245.472,00	0,00
7	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.444.796.408,00	698.827.092,00	1.745.969.316,00
8	Beban Perjalanan Dinas Biasa ^u Luar Negeri	3.558.655.188,00	3556055188,00	2.600.000,00
Jumlah		279.680.192.333,00	270.938.946.159,00	8.741.246.174,00

Dari tabel diatas terdapat perbedaan sebesar Rp8.741.246.174,00 adalah:

1. Terdapat Penambahan Utang Perjalanan Dinas Biasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah sebesar Rp 5.850.000,00
2. Terdapat Beban Perjalanan Dinas Biasa pada pada Dinas Sosial dan Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Dinas Perdagangan sebesar.....Rp 387.000.000,00
3. Beban Perjalanan Dinas yang disebabkan reklas dari belanja barang dan jasa BLUD/BOS pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.
 - a. RS. Mata (BLUD).....Rp 400.830.158,00
 - b. RS. Paru-Paru (BLUD).....Rp 7.495.704,00
 - c. RS. Gigi dan Mulut (BLUD).....Rp 2.600.000,00
 - d. RS. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD)..... Rp 2.239.817.728,00
 - e. RS, Ernaldi Bahar (BLUD).....Rp 431.997.355,00
 - f. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD).....Rp 2.256.620.647,00
 - g. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BLUD)..... Rp 3.009.034.582,00

Rp 8.348.396.174,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun 2022 disajikan pada **Lampiran 47**.

4.4.2.6. Beban Bunga

Beban Bunga Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp13.233.460.237,35 naik sebesar Rp12.662.665.182,88 atau 2.218,43 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp570.795.054,47,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 157 Realisasi Beban Bunga Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Rekening	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	Beban Bunga Utang atas pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	0,00	3.892.784,00	(3.892.784,00)	(100,00)
2	Beban Bunga Utang atas pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	13.233.460.237,35	570.795.054,47	12.662.665.182,88	2.218,43
3	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - Swasta - Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		13.233.460.237,35	574.687.838,47	12.658.772.398,88	2.202,72

Beban bunga Tahun 2022 adalah Rp13.233.460.237,35 dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut.

Tabel 158 Realisasi Beban Bunga - LO dan LRA Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Rekening	Realisasi LO (Rp)	Realisasi LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Bunga Utang atas pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
2	Beban Bunga Utang atas pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	13.233.460.237,35	13.227.699.524,00	5.760.713,35
3	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - Swasta - Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah		13.233.460.237,35	13.227.699.524,00	5.760.713,35

Dari tabel di atas terdapat perbedaan Beban Bunga Utang Atas Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah adalah utang bunga kepada PT Sarana Multi Infrastruktur yang harus diperhitungkan pada awal dan akhir tahun 2022 sebesar Rp5.760.713,35.

4.4.2.7. Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp364.933.519.373,27 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.629.974.928.627,00 mengalami penurunan sebesar 77,61% atau Rp1.265.041.409.253,73 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 159 Realisasi Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Rekening	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	13.058.144.162,27	0,00	13.058.144.162,27	100,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	682.112.522,00	492.380.953,00	189.731.569,00	38,53
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	344.155.264.396,00	198.959.552.406,00	145.195.711.990,00	72,98
4	Beban Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	1.425.009.480.000,00	(1.425.009.480.000,00)	(100,00)
6	Beban Hibah kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.074.956.693,00	550.473.668,00	1.524.483.025,00	276,94
8	Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	4.963.041.600,00	4.963.041.600,00	0,00	0,00
10	Beban Hibah Dana Bos ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		364.933.519.373,27	1.629.974.928.627,00	(1.265.041.409.253,73)	(77,61)

Beban Hibah Tahun 2022 adalah Rp364.933.519.373,27 dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut.

Tabel 160 Realisasi Beban Hibah - LO dan LRA Tahun 2022

(dalam rupiah)

Rekening	Realisasi LO	Realisasi LRA	Perbedaan
Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	13.058.144.162,27	0,00	13.058.144.162,27
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	682.112.522,00	0,00	682.112.522,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	344.155.264.396,00	344.164.164.396,00	(8.900.000,00)
Beban Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00

Rekening	Realisasi LO	Realisasi LRA	Perbedaan
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.074.956.693,00	2.074.956.693,00	0,00
Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	4.963.041.600,00	4.963.041.600,00	0,00
Beban Hibah Dana Bos ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
Jumlah	364.933.519.373,27	351.202.162.689,00	13.731.356.684,27

Dari tabel di atas terdapat perbedaan dengan rincian penjelasan sebagai berikut.

- Selisih lebih Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp13.058.144.162,27 merupakan Hibah Aset Tetap Tanah ke Balai Teknik Kesehatan Lingkungan sebesar Rp1.934.144.162,27 dan Akademi Keperawatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp11.124.000.000,00.
- Selisih lebih Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp682.112.522,00 yang merupakan Hibah Aset Tetap Tanah Kolam di Pagar Alam sebesar Rp68.770.000,00 dan Hibah Gedung dan Bangunan (Rumah Utama dan Saung Pagar Alam) sebesar Rp613.342.522,00 kepada Masyarakat Kota Pagar Alam.
- Selisih kurang Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp8.900.000,00 merupakan utang hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba (Sekolah-Sekolah Swasta).

Tabel 161 Rincian Beban Hibah per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Beban Hibah-LO (Rp)
A	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	13.058.144.162,27
	Dinas Kesehatan (SKPD)	13.058.144.162,27
B	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	682.112.522,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	682.112.522,00
C	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersigat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	344.155.264.396,00
1	Dinas Pendidikan	216.485.731.482,00
2	Dinas Kesehatan (SKPD)	5.099.654.398,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.974.905.615,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	26.530.531.234,00
6	Sekretariat Daerah	84.406.182.504,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.658.259.163,00

D	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Masyarakat	2.074.956.693,00
1	Dinas Sosial	1.275.552.693,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	799.404.000,00
E	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	4.963.041.600,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.963.041.600,00
Jumlah		364.933.519.373,27

4.4.2.8. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp1.230.274.840,25 merupakan Beban Penyisihan Piutang Provinsi Sumatera Selatan yang terdapat pada 9 SKPD, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 162 Realisasi Beban Penyisihan Piutang per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Beban Penyisihan Piutang-LO
1	Rs. Mata (Blud)	12.132.180,29
2	Rs. Gigi Dan Mulut (Blud)	1.990.376,50
3	Rs. Umum Daerah Siti Fatimah (Blud)	58.838.291,46
4	Rs. Dr Ernaldi Bahar (Blud)	75.875.532,00
5	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	10.975.364,61
6	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (Blud)	21.345.850,00
7	Sekretariat Daerah	665.000.000,00
8	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Skpd)	380.572.569,39
9	Badan Pendapatan Daerah	3.544.676,00
Jumlah		1.230.274.840,25

4.4.2.9. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain pada Tahun 2022 sebesar Rp60.702.880.708,73 yang merupakan Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp35.118.162.209,73 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) dan Beban lain-lain sebesar Rp25.584.718.499,00 terdiri dari aset ekstrakomptabel, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 163 Realisasi Beban Lain-Lain Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	SKPD	Beban Lain-Lain-LO
A.	Beban Penurunan Investasi	35.118.162.209,73
1.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (PPKD)	35.118.162.209,73
B.	Beban Lain-lain	25.584.718.499,00
1	Dinas Pendidikan	23.654.198.538,00

No	SKPD	Beban Lain-Lain-LO
2	Dinas Kesehatan (SKPD)	0,00
3	Rs. Mata (BLUD)	27.880.780,00
4	Rs. Paru-Paru (BLUD)	0,00
5	Rs. Gigi Dan Mulut (BLUD)	48.567.241,00
6	Rs. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD)	508.194.699,00
7	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi (BLUD)	1.975.800,00
8	Rs. Dr Ernaldi Bahar (SKPD)	210.828.091,00
9	Rs. Dr Ernaldi Bahar (BLUD)	0,00
10	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	12.757.000,00
11	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	163.894.600,00
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8.748.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
14	Dinas Sosial	0,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	34.710.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (SKPD)	0,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD)	4.596.900,00
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00
23	Dinas Perhubungan	0,00
24	Dinas Komunikasi Dan Informatika	18.550.000,00
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.700.000,00
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
27	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00
28	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	3.250.000,00
29	Dinas Perpustakaan	193.856.200,00
30	Dinas Kearsipan	26.861.000,00
31	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.503.000,00
32	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	0,00
33	Dinas Perkebunan	1.310.000,00
34	Dinas Kehutanan	0,00
35	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	41.592.150,00
36	Dinas Perdagangan	0,00
37	Dinas Perindustrian	1.856.400,00
38	Sekretariat Daerah	226.570.400,00
39	Inspektorat	0,00

No	SKPD	Beban Lain-Lain-LO
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.000.000,00
41	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)	247.447.850,00
42	Badan Pendapatan Daerah	2.606.180,00
43	Badan Kepegawaian Daerah	490.100,00
44	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (SKPD)	3.000.000,00
45	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BLUD)	0,00
46	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	36.752.100,00
47	Sekretariat DPRD	78.484.470,00
48	Badan Penghubung	18.537.000,00
Jumlah		60.702.880.708,73

4.4.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.076.891.505.739,47. Jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 sebesar Rp946.520.311.743,54 terdapat kenaikan sebesar Rp130.371.193.995,93 atau 87,89% dengan rincian pada tabel berikut ini.

Tabel 164 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	1.067.873.373.363,47	939.761.472.341,54	128.111.901.021,93	13,63
2	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	71.451.960,00	(71.451.960,00)	100,00
3	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	9.018.132.376,00	6.687.387.442,00	2.330.744.934,00	34,85
Jumlah		1.076.891.505.739,47	946.520.311.743,54	130.371.193.995,93	13,77

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD terdapat pada **Lampiran 48**.

4.4.2.11. Beban Transfer

Beban Transfer pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.805.945.202.798,67 dan Rp3.137.698.225.442,95. Beban Transfer Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 165 Rincian Beban Transfer Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Rekening	Realisasi LO	Realisasi LRA	Perbedaan
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	2.207.529.411.963,00	1.914.984.234.446,00	292.545.177.517,00
2	Beban Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Provinsi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00

No	Rekening	Realisasi LO	Realisasi LRA	Perbedaan
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.592.915.790.835,67	1.687.890.480.234,34	(94.974.689.398,67)
4	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
Jumlah		3.805.945.202.798,67	3.608.374.714.680,34	197.570.488.118,33

1. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun 2022 sebesar Rp2.207.529.411.963,00 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten terdapat pada tabel berikut.

Tabel 166 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi DBH Pajak Rokok Tahun 2022	Realisasi DBH Pajak Kendaraan Tahun 2022	Pembayaran Utang Tahun 2021	Penambahan Utang Tahun 2022	Beban Transfer
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 + 6
1	Kota Palembang	57.448.117.066,61	321.321.788.145,98	37.519.464.942,61	88.521.838.116,00	429.772.278.385,98
2	Kab Muba	27.729.801.810,99	108.439.806.755,79	10.510.608.961,99	31.399.654.148,00	157.058.653.752,79
3	Kab Banyuasin	33.861.260.694,08	84.169.672.849,21	9.771.192.258,08	26.367.816.420,00	134.627.557.705,21
4	Kab OKI	33.554.330.511,45	110.464.668.872,74	11.573.677.210,45	33.150.896.494,00	165.596.218.667,74
5	Kab Ogan Ilir	21.677.051.350,15	60.126.772.956,25	6.769.245.712,15	18.650.419.452,00	93.684.998.046,25
6	Kab OKU	18.623.466.737,05	63.177.976.198,21	7.222.801.405,05	18.544.244.469,00	93.122.885.999,21
7	Kab OKU Selatan	19.363.219.714,91	45.383.223.489,00	4.857.843.749,91	14.706.582.529,00	74.595.181.983,00
8	Kab OKU Timur	28.590.072.546,03	60.293.093.597,45	7.054.704.867,03	19.979.504.951,00	101.807.966.227,45
9	Kab Muaraenim	27.867.839.249,75	199.798.395.937,78	15.271.973.693,75	57.226.104.520,00	269.620.366.013,78
10	Kota Prabumulih	14.942.017.200,98	61.179.454.994,12	6.622.676.425,98	17.561.678.404,00	87.060.474.173,12
11	Kab Lahat	20.935.438.646,59	107.907.838.558,78	9.136.458.752,59	33.529.412.216,00	153.236.230.668,78
12	Kota Pagaralam	11.859.506.005,60	44.393.454.396,00	4.557.031.694,60	13.303.801.588,00	64.999.730.295,00
13	Kab MURA	20.846.445.121,60	59.788.974.069,81	6.400.595.096,60	18.395.224.696,00	92.630.048.790,81
14	Kota Lubuk Linggau	14.041.542.737,70	57.768.113.157,51	6.291.729.570,70	16.732.443.805,00	82.250.370.129,51
15	Kab Empat Lawang	16.000.845.190,20	41.709.820.771,03	4.074.422.126,20	13.399.624.152,00	67.035.867.987,03
16	Kab Muratara	15.090.339.743,65	45.418.379.690,97	5.001.762.788,65	14.430.838.293,00	69.937.794.938,97
17	Kab. PALI	15.001.346.217,66	46.210.159.460,37	5.131.494.509,66	14.412.777.030,00	70.492.788.198,37
Jumlah		397.432.640.545,00	1.517.551.593.901,00	157.767.683.766,00	450.312.861.283,00	2.207.529.411.963,00

Apabila dibandingkan antara Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp1.914.984.234.446,00 TA 2022 dan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp2.207.529.411.963,00 TA 2022 terdapat selisih lebih sebesar Rp292.545.177.517,00 yang merupakan:

- 1) Penambahan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Gubernur Nomor 181/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp365.082.842.117,00.
 - 2) Penambahan Utang Atas Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV ke Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Gubernur Nomor 953/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 23 Desember 2022 tentang Kurang Salur Alokasi DBH Pajak Rokok Triwulan IV untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp85.230.019.166,00;
 - 3) Pengurangan beban atas pembayaran Utang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Tahun 2021 sebesar Rp157.767.683.766,00;
2. Beban Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Provinsi tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan beban belanja bantuan keuangan PBI Jaminan Kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 untuk Kabupaten OKI;
 3. Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Ke Kabupaten/Kota terealisasi tahun 2022 sebesar Rp1.592.915.790.835,67.

Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Ke Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.592.915.790.835,67. Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah per Kabupaten/Kota terdapat pada tabel berikut.

Tabel 167 Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Bankeu Khusus	Kurang Salur Bantuan Keuangan Pemerintah Kepada Kab/Kota	Dana Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	Beban Transfer
1	2	3	4	5	5=3+4+5
1	Kota Palembang	138.520.507.889,89	50.730.640.430,00	40.397.272.073,06	128.187.139.532,95
2	Kab Muba	13.653.059.000,00	0,00	0,00	13.653.059.000,00
3	Kab Banyuasin	113.100.806.505,90	37.508.863.168,79	17.093.294.923,95	92.685.238.261,06
4	Kab OKI	103.653.871.400,00	4.974.000.000,00	0,00	98.679.871.400,00
5	Kab Ogan Ilir	108.600.995.392,00	12.811.000.000,00	14.271.794.100,00	110.061.789.492,00
6	Kab OKU	47.492.352.254,00	0,00	0,00	47.492.352.254,00
7	Kab OKU Selatan	82.658.077.077,51	3.462.377.526,21	0,00	79.195.699.551,30
8	Kab OKU Timur	303.785.596.707,11	50.365.940.588,11	40.068.902.827,43	293.488.558.946,43
9	Kab Muara Enim	26.586.026.610,00	16.616.846.610,00	0,00	9.969.180.000,00
10	Kota Prabumulih	35.074.995.200,00	12.543.061.200,00	0,00	22.531.934.000,00
11	Kab Lahat	161.584.492.587,00	2.204.990.400,00	3.931.429.000,00	163.310.931.187,00
12	Kota Pagar Alam	61.519.035.000,00	0,00	0,00	61.519.035.000,00
13	Kab MURA	101.831.244.624,00	8.309.000.000,00	0,00	93.522.244.624,00
14	Kota Lubuklinggau	77.435.526.800,00	0,00	0,00	77.435.526.800,00

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Bankeu Khusus	Kurang Salur Bantuan Keuangan Pemerintah Kepada Kab/Kota	Dana Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	Beban Transfer
1	2	3	4	5	5=3+4+5
15	Kab Empat Lawang	163.144.553.596,93	7.630.120.400,00	0,00	155.514.433.196,93
16	Kab Muratara	93.477.466.000,00	0,00	0,00	93.477.466.000,00
17	Kab. PALI	55.771.873.590,00	3.580.542.000,00	0,00	52.191.331.590,00
Jumlah		1.687.890.480.234,34	210.737.382.323,11	115.762.692.924,44	1.592.915.790.835,67

Selisih kurang Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebesar Rp94.974.689.398,67 adalah selisih antara pembayaran utang Tahun 2021 sebesar Rp210.737.382.323,11 dengan penambahan utang Tahun 2022 sebesar Rp115.762.692.924,44.

4. Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp4.500.000.000,00 yang merupakan transfer bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa se-Sumatera Selatan. Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Kelurahan per Kabupaten/Kota terdapat pada penjelasan tentang akun-akun LRA pada laporan keuangan ini. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa.

4.4.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional merupakan kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan pokok pemerintahan. Saldo dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 menunjukkan defisit sebesar Rp1.085.686.770,11 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.293.101.616,36 dari Tahun 2021 defisit sebesar Rp4.378.788.386,47 dengan rincian sebagai berikut.

1. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang merupakan penghapusan nilai utang karena selisih pembulatan pada Simda di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp27,00;
2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp296.039.544,89, terdiri dari:
 - a. Surplus atas kekurangan pencatatan beban penyisihan piutang pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebesar Rp13.677.552,46, pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.080.325,00 dan pada BPKAD sebesar Rp9.591.229,66 .;
 - b. Surplus atas penghapusan penyisihan piutang Tahun 2021 pada Rumah Sakit Mata sebesar Rp9.807.809,70;
 - c. Surplus atas penghapusan penyisihan piutang Klaim BPJS Tahun 2021 pada Rumah Sakit Khusus Paru sebesar Rp4.717,50, dan Penyisihan Piutang Klaim TCM Tahun 2021 pada Rumah Sakit Khusus Paru sebesar Rp98.750,00;
 - d. Surplus atas penghapusan penyisihan piutang Tahun 2021 pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebesar Rp1.569.957,00;
 - e. Surplus atas penghapusan penyisihan piutang Tahun 2021 pada RS. Siti Fatimah sebesar Rp30.257.633,61;

- f. Surplus atas penghapusan penyisihan Piutang Tahun 2021 pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Rp2.900.270,00;
 - g. Surplus atas penghapusan penyisihan piutang Tahun 2021 pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp2.033.435,02;
 - h. Surplus atas penghapusan penyisihan piutang Tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD) sebesar Rp17.184.775,00;
 - i. Surplus atas penghapusan penyisihan piutang Tahun 2021 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp75.000,00;
 - j. Surplus atas penghapusan penyisihan piutang PT Paragonmall Tahun 2021 sebesar Rp344.476,00, PT Griya Inti Sejahtera Insani Tahun 2021 sebesar Rp2.811.408,05, PT Rajawali Tahun 2021 sebesar Rp1.815.000,00, Bowling Centre Tahun 2021 sebesar Rp100.000,07 dan penyisihan piutang pendapatan bunga yang telah dibayar lunas sebesar Rp1.742.119,82;
 - k. Surplus atas penghapusan penyisihan piutang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14.150.000,00;
 - l. Surplus atas penghapusan penyisihan piutang Pajak PBB-KB Tahun 2021 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp5.136.120,00;
 - m. Surplus atas Penyesuaian Penambahan Aset Rumah Negara Golongan I dari surplus Penambahan Aset pada Sekretariat DPRD sebesar Rp181.658.966,00;
3. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar Rp1.381.726.342,00 terdiri dari;
 - a. Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin sesuai Keputusan Gubernur Nomor 585/KPTS/BPKAD/2022 pada Sekretariat DPRD berupa :
 - Alat Kantor Lainnya sebesar Rp16.015.000,00;
 - Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp325.840,00;
 - Meja dan Kursi sebesar Rp680.000,00;
 - Alat Studio sebesar Rp3.470.730,00;
 - Alat Komunikasi sebesar Rp250.000,00;
 - Alat Laboratorium sebesar Rp690.000,00;
 - Peralatan Komputer sebesar Rp99.270,00.
 - b. Penyesuaian Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta akibat Penghapusan Gedung UPTB Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah OKI I pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp209.768.334,00;
 - c. Penghapusan aset Peralatan dan Mesin Tahun 2021 pada Dinas Perindustrian sebesar Rp87.500,00;
 - d. Penyesuaian Mencatat Kerugian Penghapusan Aset Mesin dan Peralatan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebesar Rp2.025.575,00;
 - e. Penghapusan Mushollah Kantor Gubernur pada Sekretariat Daerah sebesar Rp146.705.333,00;
 - f. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan Rp1.897.917,00;

- g. Penghapusan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan Rp102.656.000,00;
- h. Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Rp760.918.955,00;
- i. Penghapusan Aset Gedung Kantor Cabang di Jalan Rasyid Siddiq Kelurahan 8 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp136.135.888,00.

4.4.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.015.367.801,00 dan Rp78.249.427,00. Pos Luar Biasa Tahun 2022, terdiri dari.

- a. Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Uang Kesalahan Setor BBNKB1 dan PKB PT. Indotruck Utama, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 235/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp3.210.510.000,00;
- b. Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Uang Kesalahan Setor PT. Perdana Abadi Perkasa, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 236/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp728.430.601,00;
- c. Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan kepada Individu/Keluarga yang Mengalami Bencana Kebakaran di Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 295/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 22 April 2022 sebesar Rp240.000.000,00;
- d. Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Uang Kelebihan Setor Pembayaran Pajak Daerah BBNKB dan PKB PT. Eka Permata Agung, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 483/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp241.427.200,00;
- e. Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Uang Kelebihan Setor CV. OSA, atas temuan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan yg di setor ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 609/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 23 Agustus 2022 sebesar Rp500.000.000,00;
- f. Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan kepada Individu/Keluarga yg mengalami Bencana Kebakaran di Kelurahan 1 Ilir Kecamatan IT II, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 810/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 3 November 2022 sebesar Rp95.000.000,00.

4.5 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2022 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris. Rincian Arus Kas bersih dari masing-masing aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas per 31 Desember 2022 dan Laporan Arus Kas per 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 168 Rincian Arus Kas Bersih

No	Uraian	2022	2021
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2.106.866.935.346,33	1.384.727.870.309,72
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.534.652.978.818,28)	(1.920.166.886.621,94)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(130.177.141.404,45)	493.566.176.762,71
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	268.070.825,00	(2.837.544.233,02)

4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.908.033.213.200,33 naik sebesar Rp523.305.342.890,61 atau 37,79% bila dibandingkan saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.384.727.870.309,72 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Arus Kas Masuk</u>		
Pendapatan Pajak Daerah	4.461.152.465.008,25	3.523.785.342.246,24
Pendapatan Retribusi Daerah	12.185.155.716,25	9.313.749.306,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	153.032.882.582,11	65.714.183.659,07
Lain-lain PAD Yang Sah	302.866.917.094,13	263.982.530.473,86
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.090.093.999.526,00	5.712.683.072.712,00
Pendapatan Hibah	15.907.105.929,00	33.145.138.870,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	10.035.238.525.855,74	9.608.624.017.267,17
<u>Arus Kas Keluar</u>		
Belanja Pegawai	2.092.571.068.579,00	1.923.290.549.742,00
Belanja Barang dan Jasa	2.042.275.862.382,07	1.811.885.209.417,49
Belanja Bunga	13.227.699.524,00	382.096.916,00
Belanja Hibah	351.202.162.689,00	1.629.473.647.674,00

Belanja Tak Terduga	19.553.804.801,00	14.055.098.162,00
Belanja Bagi Hasil	1.914.984.234.446,00	1.579.375.912.863,60
Belanja Bantuan Keuangan	1.693.390.480.234,34	1.265.433.632.182,36
Jumlah Arus Kas Keluar	8.127.205.312.655,41	8.223.896.146.957,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.908.033.213.200,33	1.384.727.870.309,72

4.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.035.238.525.855,74 terjadi kenaikan sebesar Rp426.614.508.588,57 atau 4,44% jika dibandingkan dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.608.624.017.267,17. Arus kas masuk ini merupakan Pendapatan Daerah yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi dari Laporan Realisasi Anggaran yang diterima melalui Kas Daerah meliputi Kas Umum Daerah, Kas di Bendahara OPD, Kas Badan Layanan Umum Daerah, Kas BOS dan PSG serta Kas Lainnya. Apabila dikomparasikan pendapatan yang tersaji pada laporan realisasi anggaran dengan Laporan Arus Kas masuk dari Aktivitas Operasi akan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 169 Perbandingan Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	Pajak Daerah	4.461.152.465.008,25	4.461.152.465.008,25	0,00
2	Retribusi Daerah	12.185.155.716,25	12.185.155.716,25	0,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	153.032.882.582,11	153.032.882.582,11	0,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	304.584.352.371,13	302.866.917.094,13	1.717.435.277,00
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.090.093.999.526,00	5.090.093.999.526,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	15.907.105.929,00	15.907.105.929,00	0,00
Jumlah		10.036.955.961.132,74	10.035.238.525.855,74	1.717.435.277,00

Selisih antara Penerimaan Lain-lain PAD yang sah pada LRA dengan Arus Masuk Kas pada aktivitas operasi LAK sebesar Rp1.717.435.277,00 merupakan pendapatan hasil penjualan Aset Daerah yang dimasukkan ke dalam akun Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi.

Arus masuk kas aktivitas operasi sebesar Rp10.035.238.525.855,74 berdasarkan rekening penerimaannya dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 170 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Berdasarkan Rekening Penerimaan

No	Uraian	Jumlah Arus Masuk Kas	Keterangan
1	Kas Umum Daerah	9.154.013.025.900,79	
2	Kas Bendahara Penerimaan	30.928.275,00	

No	Uraian	Jumlah Arus Masuk Kas	Keterangan
3	Kas Bendahara Pengeluaran	806.333,00	
4	Kas Badan Layanan Umum Daerah	214.484.108.914,95	
-	Rs. Dr Ernaldi Bahar (BLUD)	27.167.110.807,00	
-	Rs. Mata (BLUD)	34.058.571.105,00	
-	Rs. Paru-Paru (BLUD)	529.428.105,00	
-	Rs. Gigi Dan Mulut (BLUD)	4.854.386.255,00	
-	Rs. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD)	102.646.962.699,95	
-	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi (BLUD)	1.844.536.173,00	
-	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (BLUD)	27.089.098.028,00	
-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BLUD)	16.294.015.742,00	
5	Kas BOS	520.387.923.000,00	
6	Kas Lainnya pada Sub RKUD	192.842.740,00	
7.	Penerimaan DAU dengan mekanisme pemotongan untuk kompensasi pengembalian Sisa Dana BOS Tahun 2019	9.430.187.000,00	KMK No 10/KM.7/2022
8	Penerimaan DAU dengan mekanisme pemotongan sebagai penyelesaian kewajiban atas pembayaran kembali pokok pinjaman.	136.698.703.692,00	KMK No 23/KM.7/2022
Jumlah (1+2+3+4+5+6+7+8)		10.035.238.525.855,74	

4.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.127.205.312.655,41 terjadi penurunan sebesar Rp96.690.834.302,04 atau (1,18%) jika dibandingkan dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.223.896.146.957,45. Aktivitas Keluar Kas ini merupakan Belanja Operasi yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi dari Laporan Realisasi Anggaran yang dikeluarkan dari Kas Daerah meliputi Kas Umum Daerah, Kas di Bendahara OPD, Kas Badan Layanan Umum Daerah, Kas BOS dan PSG serta Kas Lainnya. Apabila dikomparasikan belanja yang tersaji pada Laporan Realisasi Anggaran dengan Arus Kas Keluar dari aktivitas operasi akan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 171 Perbandingan Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	Belanja Pegawai	2.092.571.068.579,00	2.092.571.068.579,00	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.042.275.862.382,07	2.042.275.862.382,07	0,00
3	Belanja Bunga	13.227.699.524,00	13.227.699.524,00	0,00
4	Belanja Hibah	351.202.162.689,00	351.202.162.689,00	0,00
5	Belanja Tidak Terduga	19.553.804.801,00	19.553.804.801,00	0,00
6	Belanja Bagi Hasil	1.914.984.234.446,00	1.914.984.234.446,00	0,00

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
7	Belanja Bantuan Keuangan	1.693.390.480.234,34	1.693.390.480.234,34	0,00
Jumlah		8.127.205.312.655,41	8.127.205.312.655,41	0,00

Arus keluar kas aktivitas operasi sebesar Rp8.127.205.312.655,41 berdasarkan rekening pengeluarannya dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 172 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

No	Uraian	Jumlah Pengeluaran Kas	Keterangan
1	Kas Umum Daerah	7.501.828.633.409,01	
2	kas Bendahara Pengeluaran	0,00	
3	Kas Badan Layanan Umum Daerah	171.043.903.795,40	
-	Rs. Dr Ernaldi Bahar (BLUD)	27.519.520.220,00	
-	Rs. Mata (BLUD)	27.977.582.313,00	
-	Rs. Paru-Paru (BLUD)	620.846.721,00	
-	Rs. Gigi Dan Mulut (BLUD)	3.771.683.823,00	
-	Rs. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD)	76.125.280.640,00	
-	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi (BLUD)	1.446.277.169,00	
-	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (BLUD)	17.354.068.960,40	
-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BLUD)	16.228.643.949,00	
4	Kas BOS	444.902.588.451,00	
5	Kas lainnya yang merupakan pengembalian sisa dana BOS tahun 2019 dengan mekanisme pemotongan DAU	9.430.187.000,00	KMK No 10/KM.7/2022
Jumlah (1+2+3+4+5+6)		8.127.205.312.655,41	

4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.534.652.978.818,28) turun sebesar Rp385.513.907.803,66 atau 20,08% dari Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.920.166.886.621,94).

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi disajikan sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Arus Kas Masuk</u>		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	18.382.877,00	1.000.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	1.699.052.400,00	2.666.227.400,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	1.717.435.277,00	2.667.227.400,00
<u>Arus Kas Keluar</u>		
Belanja Modal Tanah	8.708.743.955,00	70.853.405.527,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	342.811.302.542,00	288.834.883.969,24
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	361.568.165.909,82	289.050.835.757,28
Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	747.812.255.898,46	1.107.398.086.860,42
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	75.469.945.790,00	80.696.901.908,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0	86.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	1.536.370.414.095,28	1.922.834.114.021,94

4.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp(130.177.141.404,45) turun sebesar Rp623.743.318.167,16 atau 126,37% dibandingkan arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp493.566.176.762,71.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan pendanaan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran pendanaan, yang dihitung berdasarkan arus kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas pendanaan disajikan sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Arus Kas Masuk</u>		
Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	72.180.084.069,55	493.566.176.762,71
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	72.180.084.069,55	493.566.176.762,71
<u>Arus Kas Keluar</u>		
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	202.357.225.474,00	0
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	202.357.225.474,00	0
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(130.177.141.404)	493.566.176.762,71

4.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2022 sebesar Rp268.070.825,00 naik sebesar Rp3.105.615.058,02 atau 109,45% dari Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris sebesar per 31 Desember 2021 sebesar Rp(2.837.544.233,02). Saldo arus kas bersih sebesar Rp268.070.825,00 adalah penerimaan PFK dari penambahan utang pajak BOS dan PSG sebesar Rp273.895.356,00 dan utang PFK lainnya sebesar Rp74.192.400,00 pada Dinas Pendidikan, dikurangi pengeluaran PFK utang pajak tahun 2021 sebesar Rp35.245.427,00 dan utang PFK lainnya sebesar Rp44.771.504,00 pada Dinas Pendidikan.

Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain adalah Perhitungan Pihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas dari aktivitas transitoris dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Arus Kas Masuk</u>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	405.487.537.675,83	390.180.222.345,89
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	405.487.537.675,83	390.180.222.345,89
<u>Arus Kas Keluar</u>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	405.219.466.850,83	393.017.766.578,91
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	405.219.466.850,83	393.017.766.578,91
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	268.070.825,00	(2.837.544.233,02)

Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK disajikan pada tabel berikut.

Tabel 173 Rincian Penerimaan dan Pengeluaran PFK

<i>(dalam rupiah)</i>			
No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Iuran Wajib Pegawai	52.313.602.993,00	52.311.813.557,00
2	Askes	27.063.927.175,00	27.063.927.175,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	86.116.281.038,00	85.968.056.847,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	5.773.220.707,00	5.767.553.570,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	4.468.961.040,00	4.454.513.029,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	23.369.018.353,00	23.369.018.353,00
7	Pajak Penghasilan Ps 15	128.994.492,00	128.994.492,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	180.392.113.985,00	180.323.592.831,00
9	Taspen	12.075.131.689,00	12.075.131.689,00
10	Denda Keterlambatan	1.776.596.843,87	1.776.596.843,87
11	Potongan Audit BPK	7.205.121.739,96	7.205.121.739,96
12	Tunjangan Komunikasi Insentif	2.835.000.000,00	2.835.000.000,00

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
13	Tunjangan Perumahan	979.800.000,00	979.800.000,00
14	Potongan Jaminan Pelaksanaan	63.575.220,00	63.575.220,00
15	Tunjangan Transportasi	852.000.000,00	852.000.000,00
16	PFK Lainnya	74.192.400,00	44.771.504,00
Jumlah		405.487.537.675,83	405.219.466.850,83

Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas mencerminkan kenaikan/ (penurunan) kas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Saldo Akhir Arus Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp323.265.130.229,19 terjadi kenaikan sebesar Rp243.464.578.187,60 atau 305,09% jika dibandingkan dengan Saldo Akhir Arus Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp79.800.552.041,59. Rincian Saldo Akhir Kas disajikan sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kenaikan / (Penurunan) Kas	243.471.163.802,60	(44.710.383.782,53)
Saldo Awal Kas di BUD	23.462.357.600,53	61.752.769.102,86
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	76.450.634,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	13.231.924,00	24.959.467,00
Saldo Kas di Bendahara BOS	1.112.967.254,00	11.917.590.919,58
Koreksi Saldo Awal Kas di bendahara BOS	(6.585.615,00)	(26.170.690,46)
Saldo Awal Kas di BLUD	45.734.763.013,06	41.259.937.445,85
Saldo Kas Lainnya	9.477.232.250,00	9.505.398.945,29
Saldo Akhir Kas	323.265.130.229,19	79.800.552.041,59

Saldo Akhir Kas sebesar Rp323.265.130.229,19 terdiri dari:

Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	274.006.730.562,58
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	806.333,000
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	30.928.275,00
Kas di Bendahara BOS	Rp	937.548.379,00
Kas di BLUD	Rp	48.049.228.689,61
Kas Lainnya	Rp	239.887.990,00

Jika dibandingkan dengan saldo kas di neraca sebesar Rp323.265.976.194,19 terdapat perbedaan sebesar Rp845.965,00 yang merupakan kas lainnya berupa rekening pasif pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 174 Kas Lainnya berupa Rekening Pasif

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nomor Rekening	Jumlah
1	Program Gigi	140-3011-847	47.620,00
2	Klaim Obat Askes RSKMM	140-3011-858	572.861,00
3	UPTD BKOKM	140-3011-863	225.000,00
4	RS Khusus Paru	140-3011-874	163,00
5	RS Khusus Paru	140-3011-867	315,00
6	Program upaya kesehatan masyarakat	140-3011-672	6,00
Jumlah			845.965,00

Sedangkan jika saldo akhir kas di Laporan Arus Kas dibandingkan dengan SiLPA LRA sebesar Rp322.917.042.473,19 terdapat perbedaan sebesar Rp348.087.756,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 175 Laporan Arus Kas dengan SiLPA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	SILPA	322.917.042.473,19
2	Saldo Akhir Kas	323.265.130.229,19
3	Selisih	-348.087.756,00
	Penjelasan Selisih	
	- Utang PFK BOS	65.451.310,00
	- Utang PFK PSG	282.636.446,00
4	Jumlah	348.087.756,00

4.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 176 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Ekuitas Awal	31.858.511.529.758,72	31.142.490.750.017,20
Surplus/Defisit-LO	1.073.014.424.336,25	167.366.158.340,04
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	(8.458.202,00)	10.670.000,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	994.724.780.983,48	548.643.951.401,47
Koreksi Saldo Awal Kas	(6.585.609,00)	-26.170.690,46
Koreksi Saldo Awal Piutang	306.230.000,00	-10.280.000,00
Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang	(1.150,00)	80.325,00
Koreksi Saldo Awal Persediaan	1.020.996,00	246.460.990,00
Koreksi Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka	0,00	-276.050.399,14
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	980.380.625.691,55	566.387.160.783,05
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	8.772.227.949,01	11.908.484.492,00
Koreksi Saldo Awal Aset Lainnya	0,00	-1.170.500.000,00
Koreksi Saldo Awal Amortisasi ATB	25.308.000,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain	3.260.532.741,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Utang	1.811.596.484,00	-28.453.220.963,00
Koreksi Pendapatan	186.029.423,00	37.986.864,00
Koreksi Beban	(12.203.542,00)	
Koreksi Lainnya	(0,08)	0,02
Total Koreksi	994.716.322.781,48	548.654.621.401,47
Ekuitas Akhir	33.926.242.306.876,45	31.858.511.529.758,72

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp33.926.242.306.876,45 naik sebesar Rp2.067.439.103.335,68 atau 6,48% dari Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2021 sebesar Rp31.858.511.529.758,72 dengan rincian sebagai berikut.

4.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas awal sebesar Rp31.858.511.529.758,72 adalah saldo akhir ekuitas Tahun 2022.

4.6.2 Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp1.073.014.424.336,25.

4.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp994.716.322.781,56 terdiri dari koreksi nilai persediaan sebesar Rp(8.458.202,00) dan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp994.724.780.983,56 dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp(8.458.202,00) terdiri dari :
 - a. Koreksi lebih catat saldo awal persediaan Bahan Habis Pakai Laboratorium per 31 Desember 2022 pada BLUD Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebesar Rp(8.958.802,00)
 - b. Koreksi kurang catat atas persediaan HCl 0,1 N ukuran 500 ML yang masih ada di Laboratorium pada BLUD Rumah Sakit Siti Fatimah sebesar Rp500.600,00.
2. Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp994.724.780.983,48 terdiri dari:
 - a. Koreksi kurang ekuitas atas perubahan saldo awal kas sebesar Rp(6.585.609,00) yang terdiri dari :
 - 1) Koreksi kurang saldo awal kas di bendahara PSG pada SMK Negeri 1 Sungai Rotan sebesar Rp(3.900.000,00) dan SMK Negeri 1 Tulung Selapan sebesar Rp(4.912.615,00) pada Dinas Pendidikan.
 - 2) Koreksi tambah kas di bendahara BOS yang merupakan pengembalian saldo kas 2021 ke rekening sekolah sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP pada SMK Negeri 5 Palembang sebesar Rp2.227.000,00 pada Dinas Pendidikan.
 - 3) Koreksi tambah kas lainnya yang berasal dari saldo rekening upaya kesehatan masyarakat sebesar Rp6,00 pada Dinas Kesehatan.
 - b. Koreksi tambah ekuitas atas penambahan nilai piutang sebesar Rp306.230.000,00 terdiri dari :
 - 1) Koreksi tambah piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp230.000,00 Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang.
 - 2) Koreksi tambah piutang atas kurang catat sisa piutang retribusi PT.Swarna Dwipa Sumsel Gemilang sebesar Rp475.000.000,00 pada Sekretariat Daerah.
 - 3) Koreksi kurang atas pencatatan piutang sebesar Rp(169.000.000,00) pada BPKAD yang terdiri dari koreksi tambah atas pencatatan piutang Tuntutan Perbendaharaan tahun 2015 atas nama Syahrul Somad sebesar

Rp12.000.000,00 dan putang TGR tahun 2017 atas nama Tarli Senuling sebesar Rp6.000.000,00 dan koreksi kurang atas pencatatan piutang TGR Tahun 2017 atas nama Tribani Arief sebesar Rp(6.000.000,00) dan piutang bagian lancar penjualan angsuran an Ahmad Gufron sebesar Rp(1.000.000,00) serta koreksi kurang karena kesalahan pencatatan piutang (pencatatan ganda) pada PT Rajawali Jasa Tritama yang telah dicatat pada PT Paragon Mall untuk Tahun 2021 besar Rp(180.000.000,00)

- c. Koreksi kurang ekuitas saldo awal penyisihan piutang sebesar Rp(1.150,00) pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang.
- d. Koreksi tambah ekuitas atas penambahan persediaan sebesar Rp1.020.996,00 yang terdiri dari :
 - 1) Koreksi tambah saldo awal persediaan Tahun 2022 berupa persediaan linen sebesar Rp531,00 pada RSUD Siti Fatimah
 - 2) Koreksi tambah saldo awal persediaan bahan kimia Tahun 2022 sebesar Rp1.020.465 pada Rumah Sakit Paru-paru.
- e. Koreksi tambah ekuitas atas mutasi Aset Tetap sebesar Rp980.380.625.691,55 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Koreksi tambah Aset Tetap sebesar Rp964.896.603.950,00 pada Dinas Pendidikan yang terdiri dari :
 - Koreksi tambah Aset Tetap sebesar Rp138.646.000,00 yang terdiri dari Koreksi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum tercatat sebesar Rp70.000.000,00 dan Aset Tetap lainnya sebesar Rp68.646.000,00 yang sebelumnya dicatat sebagai barang ekstrakomptabel.
 - Koreksi tambah Aset Tetap tanah sebesar Rp964.757.957.950,00 merupakan koreksi atas 144 bidang tanah yang tercatat Rp0,00.
 - 2) Koreksi tambah Aset Tetap tanah sebesar Rp2.117.235.250,00 pada Dinas Kesehatan yang merupakan koreksi atas tanah yang tercatat Rp0.00 dan koreksi penghapusan Aset Tetap gedung dan bangunan karena berupa pegecatan di BKOKM sebesar Rp67.817.750,00.
 - 3) Koreksi tambah asset tetap Gedung dan Bangunan yang belum dicatat sebesar Rp4.106.641.450,00 pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi (BLUD) yang dilakukan di Tahun 2021 dengan nilai rehab sebesar Rp3.821.720.000,00, perencanaan sebesar Rp187.736.450,00, dan pengawasan sebesar Rp97.185.000,00 dengan menggunakan rekening belanja barang dan jasa.
 - 4) Koreksi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp53.350.000,00 merupakan pendapatan hibah Tahun 2021 yang tercatat sebagai persediaan pada RS. DR. Ernaldi Bahar.
 - 5) Penambahan Aset Tetap pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp1.523.991.270,55 terdiri dari:

- Koreksi tambah Aset Tetap Gedung karena penambahan nilai ekstrakom menjadi intrakom rumah dinas Rp158.200.000,00, bedeng Rp48.100.000,00, dan kantor Rp276.400.000,00
 - Koreksi pembulatan penambahan Aset Tetap yang berasal dari Aset Tetap gedung *workshop* UPTD Lahat sebesar Rp4,55
 - Koreksi pembulatan Aset Tetap yang berasal dari Aset Tetap jalan pengawasan teknis paket 11 dan 12 yang tidak ditagihkan sebesar Rp2,00
 - Koreksi tambah nilai Aset Tetap jembatan (3 paket) karena barang intrakomptabel 2022 sebesar Rp1.041.291.264,00
- 6) Koreksi kurang Aset Tetap karena penghapusan Aset Tetap gedung dan bangunan karena berupa perbaikan instalasi jaringan lampu taman masjid agung dan asetnya bukan milik pemprov sumsel sebesar Rp(78.143.377,00) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - 7) Koreksi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp500.000,00 yang merupakan koreksi barang ekstrakomptabel.
 - 8) Koreksi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian sebesar Rp1.500.000,00 yang merupakan koreksi barang ekstrakomptabel.
 - 9) Koreksi tambah Aset Tetap sebesar Rp6.245.833.762,00 terdiri dari penambahan Aset Tetap tanah atas perluasan tanah asrama haji yang belum dicatat sebesar Rp3.410.162.982,00 dan penambahan Aset Tetap Gedung dan bangunan sebesar Rp2.835.670.780,00 yang sebelumnya dicatat sebagai barang ekstrakomptabel pada Sekretariat Daerah.
 - 10) Koreksi kurang Aset Tetap sebesar Rp(299.075.614,00) terdiri dari penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ekstra menjadi intra sebesar Rp13.895.000,00 dan pengurangan Aset Tetap gedung dan bangunan akibat penghapusan karena pengecatan sebesar Rp312.970.614,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - 11) Koreksi tambah Aset Tetap sebesar Rp197.764.000,00 pada Badan Pendapatan atas penambahan KDP Gedung Bangunan yang merupakan kapitalisasi barang dan jasa Tahun 2021 yang baru dicatat pada Tahun 2022 sebagai Aset Tetap yaitu pembangunan Gedung kantor UPTB PPD wilayah OKI sebesar Rp 98.900.000,00 dan UPTB PPD wilayah Palembang IV sebesar Rp98.864.000,00.
 - 12) Koreksi tambah Aset Tetap gedung bangunan sebesar Rp5.600.000,00 yang sebelumnya dicatat sebagai barang Ekstrakomptabel pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 - 13) Koreksi tambah Aset Tetap gedung bangunan sebesar Rp147.140.000 yang merupakan perolehan tahun 2021 pada Badan Penelitian Pengembangan Daerah.

- 14) Koreksi tambah Aset Tetap gedung bangunan yang berupa bangunan panggung terbuka di Rumah Anjungan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta yang belum tercatat sebesar Rp1.461.685.000,00 pada Badan Penghubung.
- f. Koreksi tambah ekuitas atas penambahan dan pengurangan pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp8.772.227.949,01 terdiri dari :
- 1) Koreksi tambah ekuitas akibat pengurangan akumulasi penyusutan Aset Tetap karena perubahan masa manfaat sebesar Rp6.411.258.053,16, terdiri dari:

Pengurangan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp1.594.004.590,92 dan penambahan akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp4.088.395.034,43 pada Dinas Pendidikan.	(2.494.390.443,51)
---	--------------------

Pengurangan akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi pada Dinas kesehatan	3.055.558,33
---	--------------

Pengurangan akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi pada Rumah Sakit Mata	2.287.564,83
--	--------------

Pengurangan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada RS. DR. Ernaldi Bahar	1.446.875,00
---	--------------

Pengurangan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.078.011.197,17
--	------------------

Pengurangan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	7.404.444.162,32
Penambahan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD)	(14.549.715,23)
Penambahan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan	(4.399.270.948,87)
Penambahan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perpustakaan	(5.662.807,50)
Penambahan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	(83.229.797,33)
Penambahan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kehutanan	(62.582.355,89)
Pengurangan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	19.072.912,24

Pengurangan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Badan Penghubung 12.903.798,14

Penambahan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (50.277.946,54)

- 2) Koreksi tambah ekuitas akibat pengurangan akumulasi penyusutan Aset Tetap karena penghapusan atau Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp547.756.207,00 terdiri dari :
 - Pengurangan akumulasi penyusutan Aset Tetap peralatan mesin sebesar Rp165.545.979,00 karena penghapusan pada Dinas Pendidikan.
 - Pengurangan akumulasi penyusutan Aset Tetap peralatan mesin yang menjadi barang rusak berat sebesar Rp205.205.800,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Rp177.004.428,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3) Koreksi kurang ekuitas akibat penambahan akumulasi penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena reklasifikasi barang ekstrakompatabel menjadi Aset Tetap sebesar Rp(9.376.916,65) yaitu sebesar Rp(308.333,33) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rp(500.000,01) pada Dinas Perindustrian dan Rp(8.568.583,31) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- 4) Koreksi tambah ekuitas akibat pengurangan akumulasi penyusutan Aset Tetap yang disebabkan oleh reklasifikasi Aset Tetap pada beberapa OPD sebesar Rp353.634.284,50 terdiri dari :
 - Koreksi tambah ekuitas akibat pengurangan akumulasi penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp325.252.616,50 dan penambahan akumulasi penyusutan Gedung Bangunan sebesar Rp(84.259.750,00) yang disebabkan oleh Reklasifikasi atas 14 unit Aset Tetap Gedung Bangunan yang sebelumnya tercatat pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendidikan.
 - Koreksi tambah ekuitas akibat pengurangan akumulasi penyusutan karena akibat reklasiifkasi gedung dan bangunan atas 1 unit yang tercatat pada Aset Tetap sebesar Rp19.207.667 pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - Koreksi tambah ekuitas akibat pengurangan akumulasi penyusutan karena akibat reklasiifkasi jalan dan jaringan atas 1 unit yang tercatat pada Aset Tetap sebesar Rp3.150.833,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

- Koreksi tambah ekuitas akibat pengurangan akumulasi penyusutan karena akibat reklasifikasi jalan dan jaringan atas 1 unit yang tercatat pada Aset Tetap sebesar Rp6.023.168,00 pada Sekretariat Daerah.
- 5) Koreksi tambah ekuitas akibat pengurangan akumulasi penyusutan Aset Tetap karena perbedaan pencatatan sebesar Rp1.468.956.321,00, terdiri dari:

Pengurangan akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang.	577.374.326,00
---	----------------

Pengurangan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.	37.876.227,00
---	---------------

Pengurangan akumulasi penyusutan Gedung bangunan dan jalan, jaringan dan irigasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan.	840.416.675,00
---	----------------

Penambahan akumulasi penyusutan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp13.289.093,00 terdiri dari penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Rp(1.333.771.883,00), pengurangan akumulasi penyusutan gedung bangunan Rp1.523.297.579,68 dan penambahan akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan Rp(176.236.603,68).	13.289.093,00
--	---------------

- g. Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp3.260.532.741,00 yaitu pada Dinas Kesehatan (SKPD) yang merupakan akumulasi penyusutan Aset yang telah diserahkan kepada masyarakat berupa Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp3.168.491.635,00 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp92.041.106,00
- h. Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp25.308.000,00 pada Dinas Pendidikan.
- i. Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan dan penambahan utang sebesar Rp1.811.596.484,00 terdiri dari :

- 1) Koreksi tambah ekuitas akibat pengurangan utang belanja sebesar Rp2.000.000,00 dan utang pengadaan Aset Tetap sebesar Rp30.530.600,00 pada Dinas Pendidikan.
- 2) Koreksi tambah ekuitas akibat pengurangan utang BPJS tahun 2021 sebesar Rp198.899.400,00 pada Dinas Kesehatan.
- 3) Koreksi tambah ekuitas akibat pengurangan utang aset yang belum dibayar yang sebelumnya sudah tercatat sebesar Rp157.978.230,00 pada RSUD Siti Fatimah
- 4) Koreksi tambah ekuitas akibat pengurangan utang sebesar Rp1.763.131.344,00 yaitu Penambahan utang belanja pemeliharaan bangunan air-waduk pada CV. Palugada Perkasa dikarenakan adanya kesalahan pencatatan pada daftar utang sebesar Rp(4.847.393,00) dan pengurangan utang sebesar Rp1.767.978.737,00 yang terdiri Perkuatan tebing Sungai megang atas nama PT Maimora Gumenta sebesar Rp1.264.158.167,00 dan Perkuatan tebing di Desa Tanah Abang Ulu atas nama CV Gunten Rizky sebesar Rp503.820.520,00 di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan koreksi tambah pembulatan utang belanja barang dan jasa sebesar Rp50,00
- 5) Koreksi kurang ekuitas atas penambahan utang PFK iuran BPJS pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp(340.943.090,00)
- j. Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan pendapatan jasa layanan atas klaim BPJS sebesar Rp186.029.423,00 yang lebih catat pada RS. Ernaldi Bahar.
- k. Koreksi kurang atas ekuitas beban lain-lain sebesar Rp(12.203.542,00) terdiri dari.
 - 1) Koreksi tambah ekuitas beban lain-lain pada RS.Mata (BLUD) sebesar Rp16.800.000,00 karena salah pencatatan barang ekstrakomptabel.
 - 2) Koreksi kurang ekuitas sebesar Rp(29.003.542,00) atas pengurangan beban jasa pelayanan atau imbalan kerja pada RS. Gigi dan Mulut.
- l. Koreksi kurang Lainnya karena pembulatan sebesar Rp0,08.

4.6.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp33.925.950.633.094,45 adalah saldo akhir Ekuitas Tahun 2022.

V. PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

5.1 Informasi Tambahan

Tahun 2022 adalah tahun terakhir Rumah Sakit Khusus (RSK) Paru menyusun Laporan Keuangan karena melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 per tanggal 27 Oktober 2022, terjadi penggabungan organisasi BLUD RSK Paru ke dalam organisasi BLUD RSUD Siti Fatimah. Penggabungan dilakukan karena layanan di RSK Paru dianggap tidak optimal dalam menghasilkan pendapatan karena pengakhiran kerjasama dengan pihak BPJS yang disebabkan ketidakmampuan memenuhi syarat kecukupan sarana dan prasarana rumah sakit, dan tenaga medis. Untuk itu seluruh aset, kewajiban, dan sumber daya manusia RSK Paru dialihkan ke RSUD Siti Fatimah mulai tahun 2023.

Dalam rangka pelayanan kesehatan kepada Aparatur Sipil Negara Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan khususnya Seksi Pelayanan Kesehatan Primer & Tradisional, sesuai dengan Keputusan Gubernur No.165/KPTS/Dinkes/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang diperbaharui dengan Keputusan Gubernur No.811/KPTS/Dinkes/2022 tanggal 3 November 2022 tentang Susunan Organisasi Klinik Pratama Korps Pegawai Republik Indonesia pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, melaksanakan pelayanan kesehatan melalui Klinik Pratama KORPRI.

Izin operasional sebagai BP Klinik Pratama KORPRI Provinsi Sumatera Selatan diterbitkan tahun 2015, diperpanjang tahun 2020 dengan Surat Izin Walikota Palembang No.440/IPSPMD/0002/DPMPSTP-PPK/2020 tanggal 15 Juli 2020. Seiring waktu karena kebutuhan merujuk pasien ke rumah sakit, BP KORPRI bekerjasama dengan PT ASKES (sekarang BPJS) sejak tahun 2005 sebagai Fasyankes Dokter Keluarga dan mengelola dana Kapitasi atas pasien BPJS yang dirawat di Klinik Kesehatan. Pengelolaan dana Kapitasi ini belum tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan karena belum disepakati mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan layanan kesehatan tingkat pertama.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengelola aktivitas pertambangan di wilayah Sumatera Selatan. Kegiatan pertambangan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak negatif terhadap lingkungan hidup yaitu perubahan bentang lahan dan bentang alam, dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Terhadap dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan batubara, perusahaan pertambangan batubara diharuskan melakukan kewajiban reklamasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah erosi permukaan tanah akibat dari penggalian tambang batubara. Kegiatan reklamasi diharapkan menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik.

Jaminan Reklamasi/Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi/pascatambang dan hanya bisa dicairkan apabila reklamasi atau pascatambang telah dilaksanakan. Apabila perusahaan tambang tidak melaksanakan reklamasi ataupun pelaksanaan reklamasinya tidak berhasil, maka dana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan reklamasi melalui pihak ketiga. Jaminan reklamasi dapat berupa deposito berjangka, bank garansi, dan giro yang

ditempatkan di Bank Pemerintah atas nama Gubernur Sumatera Selatan QQ Perusahaan Tambang.

Setelah reklamasi/pascatambang selesai dilakukan, selanjutnya dilaksanakan penilaian oleh Inspektur Tambang berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Apabila telah dilaksanakan penilaian dan reklamasi dinyatakan berhasil maka perusahaan tambang dapat membuat permohonan kepada Gubernur untuk pencairan jaminan reklamasi yang selanjutnya akan diproses di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

Di Sumatera Selatan terdapat 9 (Sembilan) IUP non Logam dan batubara yang telah menempatkan Jaminan Reklamasi ataupun Jaminan Pascatambang dengan total Rp.4.339.162.203,00 seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 177 Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang IUP Non Logam dan Batuan

(dalam rupiah)

No	Nama Perusahaan	Tahun	Nominal (Rp)	No. bilyet	No. rekening	Tanggal Penempatan	Jatuh tempo	Bunga (%)	Ket.
1	PT. PANJI MAHAKARYA	2018-2022	204.975.905,00	AL 053229	140-40-48141	15/12/2019	15/02/2020	5	RR
		2018-2019	65.524.666,00	AL 053230	140-40-48142	15/12/2019	16/02/2020	5	RPT
2	PT DUA PUTRA ADITYA		5.000.000,00	AL 053249	140-40-48156	25/07/2019		5	
3	PT. BELIDA RAYA UTAMA		25.725.000,00	AL 065902	140-40-48159	01/08/2019	01/08/2020	5	
4	PT ALAM TUNGGAL SEMESTA		101.667.509,00	AL 053243	140-40-48148	08/04/2019	08/04/2020	5	
			91.452.510,00	AL 053243	140-40-48149	08/04/2019	09/04/2020	5	
5	PT ANITA JAYA		14.559.894,00	AL 053205	140-40-48150	02/10/2018	02/10/2019	4,75	
6	KARIM		10.692.520,00	AL 053488	140-40-26306	24/10/2018	24/11/2018	5,25	
7	JEFFRY SUHANDI		15.414.298,00	AL 053374	140-40-26219	05/09/2018	05/10/2018	5,25	
8	RUDDY SUTEDJA		38.924.074,00	AL 068489	140-40-26844	15/10/2019	15/10/2020	5	
9	PT. SARANA ALAM SEJAHTERA	2016	27.953.211,00						RR
		2017	115.495.724,00						RR
		2018	114.616.949,00						RR
		2019	115.180.296,00						RR
		2020	115.311.996,00						RR
		2016	363.710.120,00						RPT
		2017	1.091.130.261,00						RPT
	2018	1.821.827.270,00							
Jumlah			4.339.162.203,00						

Keterangan:

RR : Rencana Reklamasi

RPT : Rencana Pascatambang

VI. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2022 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan.